



Kajian Kebijakan Publik

Hilirisasi - Industrialisasi & Penguatan Ekonomi Rakyat Menuju Indonesia Maju

Interim Result Series of Discussion “Road to Pleno Bogor”

*Bidang IV Perumusan Kebijakan Sektor Riil dan Struktural
Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
Agustus 2026*



Kajian Kebijakan Publik (KKP) 8 – 2026

HILIRISASI – INDUSTRIALISASI & PENGUATAN EKONOMI RAKYAT MENUJU INDONESIA MAJU

*Interim Result
Series of Discussion
“Road to Pleno Bogor”*

**Bidang IV Perumusan Kebijakan Sektor Riil dan Struktural
Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
Agustus 2026**

Discussants:

Bayu Krisnamurthi	1
Euginia Mardanugraha	15
Bustanul Arifin	44
Ninasapti Triaswati	61
Nimmi Zulbainarni	87
A. Prasetyantoko	120
Adhitya Nugraha	127
Endrizal Ridwan	145
Lukman Hakim	153
Sultan Suhab	172
Asep Mulyana	192
Joy Elly Tulung	205
Paidi	233
Syahrituah Siregar	255
Martha Fani Cahyandito	278



ROAD TO PLENO BOGOR

FOCUS GROUP DISCUSSION

HILIRISASI-INDUSTRIALISASI DAN PENGUATAN EKONOMI RAKYAT MENUJU INDONESIA MAJU



OPENING SPEECH &
CLOSING REMARKS

PROF. DR. BAYU KRISNAMURTHI
Ketua Perumusan Kebijakan
Sektor Rili & Struktural



PANELIS

PROF. DR. BUSTANUL ARIFIN
Ketua Focus Group
Pertanian dan Kehutanan



PANELIS

DR. NINASAPTI TRIASWATI
Ketua Focus Group
Ketenagakerjaan, Kemiskinan
& Layanan Publik



PANELIS

DR. NIMMI ZULBAINARNI
Ketua Focus Group
Kelautan dan Perikanan



PANELIS

DR. A. PRASETYANTOKO
Ketua Focus Group
Investasi dan Hilirisasi



PANELIS

PROF. DR. MARTHA FANI CAHYANDITO
Ketua Focus Group Lingkungan
Hidup dan Transisi Energi



PANELIS

DR. EUGENIA MARDANUGRAHA
Wakil Ketua Focus Group
Perindustrian & Persaingan
Dunia Usaha



PANELIS

DR. ADHITYA NUGRAHA
Head of Macroeconomics and
Geopolitics Pertamina Energy Institute



MODERATOR

LELY PELITASARI SOEBEKTY, S.P., M.E.
Wakil Ketua Bidang Kebijakan
Sektor Rili & Struktural

Acara ini bertujuan memberikan wawasan strategis mengenai peran hilirisasi-industrialisasi dan penguatan ekonomi rakyat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, dengan menekankan penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, penguatan layanan publik, serta peningkatan daya saing nasional menuju Indonesia Maju.

**HARI JUMAT,
19 JUNI 2026**

2 SEKRETARIAT PP ISEI

13.30 - SELESAI (WIB)

HYBRID VIA ZOOM



ppisei_official



PP ISEI



isei.or.id



ROAD TO PLENO BOGOR

FOCUS GROUP DISCUSSION

HILIRISASI-INDUSTRIALISASI DAN PENGUATAN EKONOMI RAKYAT (HI-PER) MENUJU INDONESIA MAJU

Opening Remarks

Preview & Remark Hasil FGD I

Closing Remarks



Taufik Ariyanto Arsad, S.E., M. E.
Deputi Bidang Kajian dan Advokasi KPPU



Prof. Bayu Krisnamurthi
Ketua Bidang Perumusan Kebijakan Sektor Rili & Struktural



Dr. Eugenia Mardanugraha
Wakil Ketua FG Perindustrian & Persaingan Dunia usaha

Panelis

Moderator



Dr. Endrizal Ridwan
Ketua ISEI Cabang Padang & Koordinator Wilayah Barat PP ISEI



Dr. Lukman Hakim
Ketua ISEI Cabang Surakarta & Koordinator Wilayah Tengah PP ISEI



Dr. Sultan Suhab
Ketua ISEI Cabang Koordinator Wilayah Timur PP ISEI



Lely Pelitasari Soebekty, S.P., M.E.
Wakil Ketua Bidang Kebijakan Sektor Rili & Struktural

Panelis



Dr. Asep Mulyana, S.E., MCE
ISEI Cabang Bandung



Prof. Dr. Joy Ely Tulung
Ketua ISEI Cabang Manado



Dr. Paidi
Ketua ISEI Cabang Medan



Dr. Syahrithuah Siregar
Ketua ISEI Cabang Banjarmasin



KAMIS, 02 JULI 2026
08:30 - SELESAI

KPPU KANWIL III KOTA BANDUNG
HYBRID

ONLINE ZOOM
bit.ly/FGDIbidangIUISEI



ppisei_official



PP ISEI



isei.or.id



RISALAH FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) BIDANG IV PP-ISEI

Hari, tanggal : Jumat, 19 Juni 2026
Waktu : Pukul 13.30 – 16.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Sekretariat PP ISEI dan Zoom Pro (*Hybrid*)
Pimpinan Rapat : Bayu Krisnamurthi
Peserta : Pengurus Pusat ISEI, perwakilan ISEI Cabang, peserta luring di Sekretariat ISEI, peserta daring melalui Zoom

1. Arah Umum FGD

- FGD Bidang IV ISEI diselenggarakan sebagai FGD pertama dari dua rangkaian FGD menuju Sidang Pleno & Seminar Nasional ISEI di Bogor pada Agustus 2026.
- Tema besar diskusi adalah hilirisasi, industrialisasi, dan penguatan ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari kontribusi pemikiran ISEI terhadap pembangunan ekonomi nasional.
- Diskusi dirancang dengan pendekatan matriks yang mempertemukan tiga sektor utama dan tiga isu lintas sektor.
- Tiga sektor utama yang dibahas meliputi pertanian dan kehutanan, kelautan dan perikanan, serta energi dan sumber daya mineral.
- Tiga isu lintas sektor yang dibahas meliputi investasi dan hilirisasi, perindustrian dan persaingan usaha, serta ketenagakerjaan, kemiskinan, & layanan publik.
- Hasil FGD pertama akan dirumuskan kembali untuk dibahas lebih lanjut pada FGD kedua di Bandung pada 2 Juli 2026.
- FGD ini diharapkan menjadi proses berkelanjutan untuk menghasilkan pemikiran ISEI yang lebih utuh, termasuk kemungkinan dikembangkan menjadi dokumen kajian atau buku.

2. FG Lingkungan Hidup dan Transisi Energi (Prof. Martha Fani C)

- Transformasi ekonomi hijau tidak hanya merupakan proyek teknokratis, tetapi juga pertarungan daya saing bangsa.
- Indonesia menghadapi kontradiksi kebijakan karena target energi baru terbarukan dan net zero emission belum selaras dengan realitas bauran energi yang masih didominasi fosil.
- Target bauran energi baru terbarukan 2025 sebesar 23 persen belum tercapai, sementara bauran EBT on-grid justru menunjukkan kecenderungan menurun.
- Kontradiksi fiskal menjadi persoalan karena subsidi energi fosil masih sangat besar dan mengurangi ruang fiskal untuk membiayai transisi energi.
- Transisi energi menghadapi hambatan struktural berupa fragmentasi infrastruktur, keterbatasan jaringan transmisi nasional, dan belum sinkronnya perencanaan PLN dengan target EBT.
- Hilirisasi yang tidak dikendalikan berisiko memperbesar deforestasi, eksploitasi sumber daya alam, dan penurunan kredibilitas komitmen iklim Indonesia.
- Potensi energi surya Indonesia sangat besar, tetapi pemanfaatannya masih rendah karena keterbatasan infrastruktur, regulasi, dan pembiayaan.



- Industri hijau menghadapi celah kebijakan dari sisi penawaran, permintaan, dan pendukung, termasuk belum kuatnya sertifikasi industri hijau, pelabelan karbon, dan taksonomi pembiayaan berkelanjutan.
- Carbon Border Adjustment Mechanism atau CBAM Uni Eropa menjadi tantangan nyata bagi daya saing ekspor Indonesia, terutama untuk produk padat karbon.
- Rekomendasi utama mencakup penguatan tata kelola integratif berbasis mandat, reformasi fiskal dan arsitektur pembiayaan hijau, serta diplomasi hijau dan strategi desain global.
- Pemerintah perlu membentuk gugus tugas lintas kementerian yang memiliki mandat kuat untuk menyelaraskan peta jalan industri, energi, lingkungan, pertanian, kelautan, fiskal, dan pembiayaan hijau.
- Subsidi energi fosil perlu secara bertahap dialihkan menjadi insentif langsung untuk energi terbarukan, termasuk PLTS, pembiayaan lunak, dan jaminan pemerintah untuk proyek EBT.

3. FG Pertanian dan Kehutanan (Prof. Bustanul Arifin)

- Hilirisasi pertanian dan kehutanan perlu dilihat dalam konteks penurunan kontribusi industri terhadap PDB sejak krisis ekonomi 1998.
- Sektor industri pernah menjadi mesin pertumbuhan utama, tetapi kontribusinya menurun sehingga hilirisasi perlu diarahkan untuk membangkitkan kembali basis industrialisasi nasional.
- Pada 2025, sektor pertanian menunjukkan kinerja cukup baik dan tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi, antara lain didorong oleh pertumbuhan produksi beras sekitar 13 persen.
- Kinerja pertanian yang masih naik turun perlu dicermati karena belum tentu cukup stabil untuk menjadi fondasi hilirisasi jangka panjang.
- Volatile food menjadi sumber tekanan inflasi yang paling liar, sehingga sektor pertanian tidak hanya terkait hilirisasi tetapi juga stabilisasi harga dan ketahanan pangan.
- Diskusi lanjutan dengan ISEI daerah perlu menggali pandangan mengenai keberadaan KI dan KEK, terutama apakah benar-benar mendorong hilirisasi dan memberi manfaat bagi ekonomi lokal.
- Pada perkebunan sawit, hilirisasi diarahkan pada functional food, oleokimia, biodiesel, bioavtur, dan produk energi berbasis sawit.
- Kebijakan B50 yang direncanakan mulai 1 Juli perlu dicermati karena dapat menambah kompleksitas pasar sawit dan berpotensi memengaruhi harga tandan buah segar petani.
- Harga sawit yang mulai mengalami penurunan menjadi catatan penting agar hilirisasi tidak menekan posisi petani di hulu.
- Kelapa dalam dinilai lebih banyak melibatkan ekonomi rakyat, sementara pengembangan kelapa hibrida membutuhkan perawatan lebih intensif agar produktivitasnya optimal.
- Karet alam memiliki peluang hilirisasi untuk produk bernilai tinggi seperti ban pesawat dan ban kendaraan listrik, karena belum sepenuhnya dapat digantikan oleh karet sintetis.



- Isu utama dalam hilirisasi pertanian adalah memastikan peningkatan kesejahteraan petani di hulu, bukan hanya peningkatan nilai tambah pada industri hilir.
- Pada sektor kehutanan, produk hilirisasi yang masuk dalam roadmap meliputi industri kayu, wood pellet, dan getah pinus.
- Wood pellet terutama diarahkan sebagai bahan baku energi/listrik, sementara getah pinus memiliki banyak produk turunan bernilai tambah.
- Lokasi industri kehutanan perlu dikaji kembali karena sebagian pusat pengolahan berada di Jawa, sementara bahan baku banyak berasal dari wilayah lain.
- Hilirisasi pertanian dan kehutanan memerlukan peningkatan produktivitas hulu atau hululasi, termasuk perbaikan produktivitas sawit, padi, kelapa, karet, dan komoditas utama lainnya.
- Manajemen stok pangan yang kredibel diperlukan agar penumpukan stok, terutama beras, tidak justru menjadi sumber persoalan distribusi dan inflasi.
- Hilirisasi yang ideal adalah hilirisasi yang mampu meningkatkan kualitas produk hingga segmen high-end dan melibatkan pelaku ekonomi rakyat, bukan hanya industri besar padat modal.

4. FG Energi dan Sumber Daya Mineral (Bapak Adhitya Nugraha)

- Hilirisasi energi merupakan pilar penting bagi reindustrialisasi Indonesia.
- Indonesia masih menghadapi paradoks energi karena kebutuhan produk energi masih banyak dipenuhi melalui impor, terutama minyak mentah, produk kilang, dan LPG.
- Kondisi di Selat Hormuz menunjukkan bahwa gangguan geopolitik dapat berdampak pada tiga dimensi utama, yaitu harga Brent, LNG, dan avtur.
- Setiap dolar yang belum diinvestasikan ke hilirisasi energi pada akhirnya akan dibayar lebih mahal ketika krisis terjadi.
- Stabilitas energi sedang diuji oleh dilema struktural, yaitu kapasitas kilang yang belum mencukupi, produksi minyak mentah menurun, impor produk kilang mahal, subsidi meningkat, dan ruang investasi hilirisasi menyempit.
- Impor energi yang mahal mempersulit penetapan harga yang wajar dan pada akhirnya meningkatkan beban subsidi.
- Lini pertama yang perlu dilakukan adalah membangun kapasitas kilang agar Indonesia tidak hanya menghasilkan gasoline, tetapi juga produk turunan lain seperti propylene dan LPG.
- Lini kedua adalah memperkuat ketahanan stok melalui pembangunan fuel terminal sebagai infrastruktur pertahanan pertama ketika rantai pasok terganggu.
- Lini ketiga adalah mendorong konversi LPG impor ke gas domestik melalui jaringan gas rumah tangga dan CNG.
- Lini keempat adalah gasifikasi batu bara menjadi DME sebagai substitusi LPG.
- Lini kelima adalah pengembangan biofuel, terutama biodiesel dan bioetanol, meskipun kesiapan hulu bioetanol masih menjadi tantangan.
- Subsidi energi tetap berperan penting untuk melindungi daya beli masyarakat bawah, tetapi desain subsidi perlu disesuaikan agar lebih tahan terhadap guncangan.



- Daya beli masyarakat kelas bawah perlu tetap dilindungi, sementara daya beli kelas menengah perlu dipantau karena kelompok ini tidak selalu terlindungi oleh skema bantuan.
- Jaringan gas dan CNG memiliki potensi besar sebagai substitusi energi yang lebih murah dan tidak terlalu bergantung pada impor.
- Jargas, CNG, dan beberapa infrastruktur energi sebenarnya dapat segera dieksekusi karena regulasinya sudah tersedia.
- Kilang mini belum memiliki regulasi yang memadai, sedangkan biodiesel memiliki regulasi tetapi masih menghadapi persoalan kapasitas pasokan.
- Bioetanol masih membutuhkan penguatan regulasi, kesiapan hulu, dan ekosistem pasokan.
- Rekomendasi untuk pemerintah mencakup perbaikan formulasi harga, dukungan fiskal, percepatan penugasan jargas dan CNG, serta penguatan regulasi hilirisasi energi.
- Rekomendasi untuk dunia usaha mencakup realisasi kilang, pengembangan fuel storage, diversifikasi sumber impor LPG, dan penguatan investasi hilir energi.
- Rekomendasi untuk akademisi mencakup kajian desain subsidi energi, kelayakan oil storage hub, dampak hilirisasi kilang, dan dampak implementasi B50.
- Hilirisasi energi ditegaskan sebagai keharusan strategis, bukan pilihan, karena berhubungan langsung dengan ketahanan energi, potensi devisa, dan daya tahan ekonomi nasional.

5. FG Kelautan dan Perikanan (Ibu Nimmi Zulbainarni)

- Kebijakan kelautan dan perikanan perlu dirancang secara menyeluruh dari hulu hingga hilir karena potensi sektor ini masih sangat besar.
- Komoditas ikan dan rumput laut memiliki potensi besar, tetapi belum dikelola optimal karena masih membutuhkan dukungan infrastruktur, rantai dingin, pembiayaan, peningkatan mutu, serta kapasitas SDM.
- Hilirisasi kelautan dan perikanan tidak cukup dilakukan dengan membangun industri pengolahan, tetapi harus membenahi rantai nilai dari hulu, logistik, pengolahan, pemasaran, hingga ekspor.
- Empat bottleneck utama yang menghambat hilirisasi kelautan dan perikanan adalah PNBP, BBM, DHE, serta tarif dan standar pasar ekspor.
- PNBP dipengaruhi oleh tata kelola sumber daya maritim dan perlu bergeser dari sekadar instrumen penerimaan negara menjadi instrumen produktif untuk memperkuat ekosistem sektor.
- PNBP yang hanya dipersepsikan sebagai beban biaya dapat meningkatkan informalitas, resistensi pelaku usaha, dan menurunkan kepatuhan.
- BBM menjadi isu utama karena sulit diakses nelayan, harganya masih tinggi, dan dapat memengaruhi sekitar 60–80 persen biaya melaut.
- Akses BBM subsidi yang terbatas menyebabkan biaya melaut meningkat, margin nelayan menurun, harga bahan baku naik, dan daya saing industri melemah.
- Solusi yang diusulkan adalah BBM presisi berbasis data, kartu BBM berbasis kapal dan aktivitas melaut, digitalisasi surat rekomendasi, perluasan SPBU-N, serta insentif kapal dan alat tangkap hemat energi.



- DHE perlu dikelola lebih baik karena berpengaruh langsung terhadap likuiditas eksportir, terutama karena produk perikanan mudah rusak dan membutuhkan modal kerja harian.
- DHE sebaiknya tidak menjadi bottleneck, tetapi menjadi instrumen pendukung modal kerja, trade finance, export factoring, dan insentif bunga bagi eksportir pengolah.
- Tarif dan standar pasar ekspor menentukan daya saing global karena berkaitan dengan harga, mutu produk, traceability, keberlanjutan, dan sertifikasi internasional.
- Daya saing ekspor perikanan perlu diperkuat melalui diversifikasi pasar, pemanfaatan perjanjian dagang, sertifikasi, traceability nasional, dan diplomasi keberlanjutan.
- Investasi kelautan dan perikanan perlu diarahkan untuk menurunkan biaya logistik, memperkuat rantai dingin, mendekatkan pengolahan ke sumber bahan baku, dan memperluas produk turunan bernilai tambah.
- Persaingan usaha sehat diperlukan agar nilai tambah tidak terkunci pada segelintir pelaku, offtaker, atau tata niaga tertutup.
- Nelayan dan pembudidaya perlu memiliki akses lebih baik terhadap informasi harga, logistik, pembiayaan, industri, dan eksportir agar posisi tawarnya meningkat.
- Hilirisasi kelautan dan perikanan hanya inklusif apabila tenaga kerja pesisir naik kelas dari pemasok bahan baku menjadi SDM pengolah, pengelola traceability, operator rantai dingin, dan pelaku pemasaran.
- Kebijakan kelautan dan perikanan perlu dijalankan secara terintegrasi, mencakup PNPB produktif, BBM presisi, DHE produktif, penguatan daya saing ekspor, investasi hilirisasi, persaingan usaha sehat, dan penguatan SDM.
- Kesimpulan utama dari sektor ini adalah hilirisasi harus menciptakan nilai tambah yang dirasakan oleh semua pelaku dalam rantai nilai, bukan hanya oleh pelaku besar di hilir.

6. FG Perindustrian dan Persaingan Usaha (Ibu Eugenia Mardanugraha)

- Perspektif persaingan usaha dibahas dengan merujuk pada gagasan Sumitronomics, terutama pentingnya menghapus inefisiensi dan praktik monopoli.
- Kunci pemikiran yang ditekankan adalah deregulasi kebijakan, penghapusan inefisiensi, dan penghapusan praktik monopoli.
- Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berkelanjutan apabila dibebani regulasi berlebihan, proteksionisme, subsidi terhadap industri yang tidak efisien, dan praktik monopoli.
- Kebijakan ekonomi saat ini dinilai cenderung menambah inefisiensi dan memberi privilege ekonomi kepada kelompok tertentu, terutama melalui penguatan peran BUMN atau entitas tertentu.
- Dominasi negara sebagai agen pembangunan atau state-led development berpotensi menggeser peran swasta apabila tidak dirancang dengan hati-hati.
- Kebijakan seperti Koperasi Desa Merah Putih perlu dikritisi apabila pelaksanaannya justru menggeser peran pelaku pasar yang sudah ada, seperti gerai minimarket, tanpa desain transisi yang adil.



- Pembatasan fee platform ojek online sebesar 8 persen juga perlu dilihat secara hati-hati karena intervensi harga absolut dapat mengurangi dinamika persaingan dan ruang inovasi.
- Beberapa kebijakan yang bersifat top down dapat menjauhkan ekonomi dari titik keseimbangan pasar apabila tidak mempertimbangkan dampak terhadap pelaku usaha dan struktur persaingan.
- Negara perlu hadir ketika terdapat market failure, seperti eksternalitas negatif, asimetri informasi, kartel, monopoli, atau penyalahgunaan posisi dominan.
- Namun, intervensi negara yang berlebihan dapat menimbulkan government failure berupa distorsi harga, picking winners, penutupan akses pasar, dan melemahnya efisiensi.
- Peran negara perlu diarahkan sebagai market building state, bukan market replacing state.
- Negara seharusnya membangun kapasitas pasar, menyediakan infrastruktur, menjaga kepastian hukum, menetapkan standar, dan mengawasi perilaku pasar, bukan menggantikan pasar atau menentukan pemenang.
- Rekomendasi kebijakan mencakup integrasi perspektif persaingan usaha dalam agenda hilirisasi secara teknokratis dan end-to-end.
- Hilirisasi perlu dibuat lebih kompetitif dan inklusif dengan membuka akses bagi berbagai pelaku, termasuk swasta, pelaku menengah, UMKM, dan investor baru.
- Digitalisasi perlu diperkuat untuk mendorong efisiensi yang berkeadilan, tanpa menciptakan intervensi yang membatasi inovasi.
- Netralitas antara kepentingan pasar dan negara perlu dijaga agar kebijakan tidak mendistorsi persaingan atau membatasi inovasi.
- Kajian persaingan usaha perlu dikembangkan sebagai isu lintas sektor, termasuk dalam hilirisasi, ekonomi digital, BUMN, koperasi, dan kebijakan industri.

7. FG Investasi dan Hilirisasi (Bapak Agustinus Prasetyantoko)

- Investasi merupakan komponen yang paling mungkin diakselerasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen.
- Konsumsi domestik cenderung lebih statis, kapasitas pemerintah terbatas, dan sektor eksternal penuh tantangan, sehingga investasi menjadi game changer utama.
- Untuk mencapai target pertumbuhan, Indonesia membutuhkan peningkatan FDI dan investasi domestik secara signifikan.
- Komponen pendukung utama realisasi investasi adalah sektor swasta, tetapi dalam beberapa tahun terakhir peran swasta menunjukkan kecenderungan menurun.
- Kenaikan peran Danantara perlu dikelola agar menciptakan crowding in, bukan crowding out terhadap investasi swasta.
- Secara makro, potensi nilai investasi hilirisasi hingga 2040 diperkirakan mencapai sekitar USD 618,1 miliar, dengan potensi penyerapan tenaga kerja sekitar 3 juta orang.
- Namun, estimasi proyek hilirisasi menunjukkan adanya gap antara potensi awal dan proyek yang benar-benar feasible.



- Dari nilai investasi sekitar Rp618 triliun, proyek yang realistis setelah review diperkirakan turun menjadi sekitar Rp226–250 triliun atau sekitar sepertiga dari potensi awal.
- Tahap pertama proyek hilirisasi mencakup sekitar 18 proyek strategis yang perlu diuji dari sisi feasibility, energi, infrastruktur, lokasi, dan pembiayaan.
- Beberapa proyek yang awalnya direncanakan di wilayah timur akhirnya dipindahkan ke wilayah barat karena persoalan energi, infrastruktur, logistik, dan keekonomian.
- Indonesia memiliki potensi besar dalam hilirisasi nikel karena merupakan produsen nikel nomor satu dunia, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya merata.
- Kasus nikel menunjukkan bahwa ekspor dan pertumbuhan dapat meningkat, tetapi tidak otomatis menurunkan kemiskinan, memperbaiki kualitas tenaga kerja lokal, atau menciptakan multiplier effect yang luas.
- Investasi hilirisasi cenderung semakin padat modal sehingga peningkatan nilai investasi tidak otomatis menghasilkan penyerapan tenaga kerja yang sebanding.
- Aspek financing menjadi isu penting karena Indonesia masih sangat bergantung pada perbankan, sementara pembiayaan jangka panjang melalui capital market belum berkembang optimal.
- Rekomendasi pertama adalah perlunya mapping makro yang disertai perencanaan detail, termasuk ketersediaan gas, energi, infrastruktur, lokasi, dan kesiapan ekosistem pendukung.
- Rekomendasi kedua adalah dampak hilirisasi harus direncanakan sejak awal agar tidak bias pada industri besar, padat modal, dan FDI.
- Rekomendasi ketiga adalah perlunya regulasi yang jelas, terutama karena 80–85 persen investasi masih berasal dari swasta.
- Rekomendasi keempat adalah memastikan peran Danantara sebagai pengungkit investasi swasta, bukan pesaing yang mempersempit ruang swasta.
- Rekomendasi kelima adalah perlunya alternatif insentif setelah berkurangnya ruang tax holiday.
- Rekomendasi keenam adalah memasukkan aspek sustainability dan rantai pasok hijau dalam perencanaan hilirisasi.
- Rekomendasi ketujuh adalah memperkuat ketersediaan pembiayaan melalui skema inovatif seperti blended finance, green finance, dan instrumen pembiayaan jangka panjang lainnya.

8. FG Ketenagakerjaan, Kemiskinan, & Layanan Publik **(Ibu Ninasapti Triaswati)**

- Industrialisasi inklusif perlu diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja produktif yang mampu menyejahterakan rakyat.
- Paradoks Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia, tetapi masih menghadapi kemiskinan, ketimpangan, dan kualitas kesejahteraan yang belum merata.
- Realisasi pertumbuhan ekonomi yang stagnan sekitar 5 persen dalam beberapa periode terakhir belum cukup menjawab persoalan transformasi struktural dan kesejahteraan.



- Gap utama terjadi pada produktivitas, kelompok pendapatan masyarakat, ukuran bisnis, serta kesenjangan kewilayahan.
- Pemikiran Sumitro Djojohadikusumo menjadi rujukan bahwa pembangunan harus dipahami lebih luas dari sekadar pertumbuhan PDB.
- Pembangunan perlu dilihat sebagai proses transformasi struktural ekonomi dan masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja produktif.
- Perbaikan yang perlu dituju mencakup pertumbuhan ekonomi tinggi sekitar 6 persen, ICOR rendah sekitar 3–3,5, Debt Service Ratio sekitar 20 persen, tenaga kerja formal sekitar 30–35 persen, dan tenaga kerja pertanian sekitar 15 persen.
- Tantangan utama adalah menciptakan pasar yang sehat melalui penghilangan praktik ilegal dan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi penindakan perlu dilakukan hati-hati agar tidak mengganggu kepercayaan pasar dan memicu capital outflow.
- Kebijakan publik perlu bergeser dari financial based budgeting menuju performance based budgeting.
- Penganggaran tidak cukup diukur dari serapan anggaran, tetapi harus dilihat dari outcome seperti penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan perbaikan indikator makroekonomi.
- Program besar seperti MBG perlu dievaluasi dari sisi efektivitas, efisiensi, tata kelola, dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan.
- Industrialisasi dan hilirisasi perlu diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja formal, produktif, dan dilengkapi perlindungan sosial.
- Struktur tenaga kerja Indonesia masih menunjukkan ketergantungan besar pada sektor pertanian dan sektor informal dengan produktivitas serta upah yang rendah.
- Investasi peningkatan kualitas SDM perlu dilakukan agar lulusan dan tenaga kerja dapat masuk ke sektor formal dengan pendapatan lebih tinggi.
- Transformasi teknologi, robotisasi, digitalisasi, dan AI berpotensi menciptakan creative destruction apabila sistem pendidikan dan pelatihan tidak cepat beradaptasi.
- Ekosistem pendidikan, R&D, kurikulum, dan pelatihan vokasi perlu dihubungkan langsung dengan kebutuhan industrialisasi dan hilirisasi.
- Pemerintah perlu memastikan investasi pendidikan tidak hanya berupa pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas pembelajaran, fasilitas digital, listrik, internet, dan kesiapan SDM.
- Hilirisasi harus diukur dari kemampuannya menciptakan decent jobs, menaikkan produktivitas, memperkuat pendapatan pekerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

9. Penajaman Diskusi Lintas Sektor

a. Tarif Ekspor, Bea Masuk, dan Tata Kelola Ekspor (Bapak Pos M Hutabarat)

- Hilirisasi membutuhkan investasi, tax incentive, dan iklim persaingan yang sehat.
- Salah satu isu penting adalah tarif bea masuk negara tujuan ekspor, karena bahan mentah sering dikenakan tarif rendah atau nol, sedangkan produk olahan dikenakan tarif lebih tinggi.



- Contoh yang dibahas adalah CPO yang memiliki tarif bea masuk rendah ke China, tetapi ketika diolah menjadi olein tarifnya dapat menjadi lebih tinggi.
- Kondisi tersebut dapat mengurangi manfaat hilirisasi di dalam negeri karena beban tarif di negara tujuan ekspor menggerus margin eksportir.
- Pemerintah perlu memberikan tax incentive bagi industri yang melakukan hilirisasi untuk tujuan ekspor.
- Praktik underpricing dan underinvoicing perlu ditangani melalui penguatan tata kelola ekspor, termasuk kemungkinan penggunaan harga patokan seperti sebelum reformasi.
- Pembentukan BUMN sebagai monopoli ekspor karena kecurigaan underinvoicing dinilai tidak perlu apabila lembaga bea cukai dapat ditertibkan.
- Prinsip yang ditekankan adalah jangan menyelesaikan persoalan tata kelola ekspor dengan kebijakan yang justru merusak struktur pasar secara luas.
- Pemerintah perlu melakukan selective government policy, yaitu masuk ketika terjadi market failure, tetapi tidak menggantikan keseluruhan peran pasar.

**b. Peran Pemerintah, Market Failure, dan Government Failure
(Prof. Bayu Krisnamurthi, Bapak Agustinus Prasetyantoko)**

- Dominasi fiskal atau fiscal domination memiliki risiko menciptakan market replacing, bukan market developing.
- Peran pemerintah tetap penting dan strategis, tetapi jangan sampai menimbulkan government failure.
- Tantangan utama adalah bagaimana mengatasi market failure tanpa menciptakan government failure.
- Dalam ilmu kebijakan, policy adalah proses memilih di antara berbagai alternatif.
- Ekonom berperan mencari titik optimasi dan menunjukkan konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan kepada pengambil keputusan.
- Prinsip Sumitronomics dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai dan memilih kebijakan ke depan.
- Salah satu prinsip penting adalah wasit tidak boleh menjadi pemain, sehingga pemerintah perlu menjaga perannya sebagai pengatur dan pembentuk pasar, bukan pelaku yang mendominasi pasar.
- Peran pemerintah sebaiknya diarahkan pada market building, bukan market replacing.
- Keinginan intervensi pemerintah perlu memiliki koridor yang jelas dalam mekanisme ekonomi.
- Pemerintah perlu menciptakan iklim industri yang kompetitif agar peran pemerintah dan swasta dapat berjalan optimal.
- Intervensi pemerintah harus diarahkan untuk memperkuat partisipasi swasta, bukan meminggirkan sektor swasta.
- Dalam sektor energi, perlu ada pemisahan yang jelas antara penugasan pemerintah/BUMN dan aktivitas bisnis komersial agar tidak menimbulkan distorsi pasar.



c. Penugasan, Bisnis, dan Competitive Neutrality

(Bapak Adhitya Nugraha, Ibu Eugenia Mardanugraha)

- Dalam sektor energi dan BUMN, perlu ada pemisahan yang jelas antara penugasan dan bisnis.
- Penugasan pemerintah/BUMN tidak boleh tercampur secara tidak sehat dengan aktivitas bisnis komersial karena dapat menciptakan distorsi pasar.
- Pemisahan ini penting agar kebijakan energi dan hilirisasi tidak menimbulkan konflik kepentingan antara fungsi pelayanan publik dan fungsi bisnis.
- Jika pemerintah atau BUMN masuk sebagai pelaku pasar, prinsip competitive neutrality harus dijaga agar swasta tidak menghadapi perlakuan yang tidak setara.
- Intervensi pemerintah perlu dibatasi pada koreksi market failure, bukan menciptakan distorsi baru.

d. Market Developing, Ekonomi Rakyat, dan Peran ISEI Daerah

(Prof. Bustanul Arifin)

- ISEI daerah perlu membantu memastikan apakah kebijakan hilirisasi di lapangan menciptakan market pricing, market developing, atau justru market replacing.
- Orientasi yang perlu dikedepankan adalah market developing agar hilirisasi dapat menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi rakyat, dan menghasilkan nilai tambah domestik.
- ISEI perlu merumuskan saran dan langkah konkret agar hilirisasi tidak berhenti pada konsep, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan pusat dan daerah.
- Matriks diskusi perlu dilengkapi dengan baris sektor dan kolom isu lintas sektor, seperti persaingan usaha, ekonomi rakyat, penciptaan lapangan kerja, investasi, SDM, dan sustainability.
- Masukan dari ISEI daerah penting untuk menguji apakah KI, KEK, dan proyek hilirisasi benar-benar memberikan dampak terhadap petani, nelayan, UMKM, tenaga kerja lokal, dan struktur ekonomi daerah.

e. Teknologi, Danantara, dan Transformasi Tenaga Kerja

(Bapak Nurul Ichwan, Ibu Ninasapti Triaswati)

- Industri padat karya pada tahap awal dapat memiliki daya saing, tetapi seiring kenaikan inflasi dan biaya tenaga kerja, industri padat karya berpotensi kalah oleh industri padat modal yang semakin efisien.
- Indonesia memiliki bahan baku, tetapi belum sepenuhnya menguasai teknologi untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi.
- Hilirisasi yang berhasil membutuhkan ekosistem yang mencakup teknologi, pendidikan, tenaga kerja, industri, dan investasi.
- Prasyarat utama adalah investasi dalam pengembangan teknologi untuk menghadirkan inovasi.
- Danantara dapat berperan sebagai enabler awal yang membangun ekosistem, kemudian membuka ruang bagi sektor swasta untuk mengembangkan pertumbuhan yang lebih luas.
- Kolaborasi antara Danantara, BUMN, swasta, kampus, dan pelaku industri diperlukan agar kebutuhan tenaga kerja lima tahun ke depan dapat dipetakan sejak awal.



- Pendidikan perlu diposisikan sebagai talent pool producer yang menghasilkan tenaga kerja sesuai kebutuhan hilirisasi dan industrialisasi.
- Ekosistem pendidikan dan kurikulum perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri agar tenaga kerja tidak hanya terserap sebagai pekerja berupah rendah.

**f. Nilai Tambah, Sentralisasi, dan Peran Swasta
(Ibu Nimmi Zulbainarni, Ibu Eugenia Mardanugraha)**

- Kunci hilirisasi adalah penciptaan nilai tambah di dalam negeri.
- Nilai tambah tidak boleh hanya dinikmati oleh pelaku besar di hilir, tetapi perlu dirasakan oleh pelaku di sepanjang rantai nilai, termasuk nelayan, pembudidaya, petani, UMKM, dan tenaga kerja lokal.
- Jika kebijakan hilirisasi berubah menjadi sentralisasi berlebihan, ruang swasta dapat menyempit dan tujuan penciptaan nilai tambah nasional menjadi tidak optimal.
- Pemerintah perlu menghindari praktik yang membuat seluruh proses bisnis ditarik ke pusat atau dikendalikan secara administratif tanpa memberi ruang pada pelaku usaha.
- Pemerintah dapat hadir sebagai pengatur dan pengawas, tetapi tetap perlu menjaga agar mekanisme pasar, inovasi, dan partisipasi swasta tidak terhambat.
- Persaingan usaha sehat perlu menjadi prasyarat agar hilirisasi tidak hanya memperbesar investasi, tetapi juga memperluas pemerataan manfaat ekonomi.

**g. Ekonomi Biru dan Optimalisasi Selat Malaka
(Bapak Herman Boedoyo)**

- ISEI perlu mempertimbangkan agenda praktis optimalisasi Selat Malaka sebagai bagian dari pengembangan ekonomi biru.
- Selat Malaka memiliki potensi besar karena menjadi jalur penting transportasi perdagangan dunia.
- Selama ini potensi tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh Singapura dan Malaysia, sehingga Indonesia perlu memikirkan strategi yang lebih konkret untuk memperoleh manfaat ekonomi dari posisi strategis tersebut.
- Agenda optimalisasi Selat Malaka dapat dikaitkan dengan pengembangan ekonomi biru, logistik, pelabuhan, jasa maritim, hilirisasi kelautan, dan daya saing wilayah pesisir Indonesia.

10. Kristalisasi Pembahasan

- Hilirisasi merupakan agenda penting untuk memperkuat industrialisasi, meningkatkan nilai tambah domestik, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi.
- Hilirisasi tidak dapat berhasil apabila hanya dipandang sebagai daftar proyek sektoral, tetapi harus didukung ekosistem energi, investasi, pembiayaan, SDM, regulasi, teknologi, dan iklim usaha yang sehat.
- Setiap sektor memiliki bottleneck spesifik, tetapi sebagian besar membutuhkan dukungan lintas sektor yang sama, terutama energi, pembiayaan, logistik, SDM, pasar, dan kepastian kebijakan.



- Peran pemerintah tetap diperlukan, tetapi harus diarahkan untuk membangun pasar, mengoreksi kegagalan pasar, menjaga fairness, dan memperkuat kapasitas pelaku usaha.
- Kebijakan hilirisasi perlu menghindari dua risiko besar, yaitu oligarki pasar akibat dominasi pelaku tertentu dan government failure akibat intervensi negara yang berlebihan.
- Perspektif Sumitronomics dinilai relevan sebagai kerangka berpikir untuk menilai pilihan kebijakan, terutama terkait deregulasi, efisiensi, persaingan usaha, penghapusan monopoli, dan keseimbangan peran negara-pasar.
- Hilirisasi harus dirancang agar tidak hanya meningkatkan ekspor dan investasi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja formal, meningkatkan produktivitas, memperkuat UMKM, dan menaikkan kesejahteraan rakyat.
- Sustainability harus menjadi bagian inti dari hilirisasi, terutama karena tantangan transisi energi, CBAM, deforestasi, pembiayaan hijau, dan tuntutan pasar global semakin kuat.
- Pembiayaan inovatif, green financing, blended finance, dan diplomasi ekonomi hijau perlu menjadi bagian dari strategi hilirisasi nasional.
- Pengembangan SDM, pendidikan, R&D, dan kurikulum harus dipadukan dengan kebutuhan industrialisasi agar hilirisasi tidak hanya menciptakan pekerjaan murah, tetapi pekerjaan produktif dan berkualitas.
- Pemerintah daerah dan ISEI daerah perlu dilibatkan untuk menguji apakah kebijakan hilirisasi benar-benar dapat berjalan sesuai kondisi wilayah, termasuk dari sisi energi, infrastruktur, tenaga kerja, pasar, dan ekonomi rakyat.
- Diskusi FGD pertama masih perlu dilanjutkan untuk memperdalam keterkaitan antara sektor, isu lintas sektor, dan rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan ISEI.

11. Tindak Lanjut

- Hasil FGD pertama akan dirumuskan kembali sebagai bahan diskusi FGD kedua Bidang IV yang direncanakan berlangsung di Bandung pada 2 Juli 2026.
- Sekretariat akan membagikan bahan/paper dari para narasumber kepada peserta agar dapat dipelajari lebih lanjut sebelum diskusi lanjutan.
- Masing-masing focus group diharapkan dapat melengkapi bahan tertulis sesuai masukan yang muncul dalam FGD.
- Pembahasan lanjutan perlu mengintegrasikan isu sektoral dan isu lintas sektor dalam satu kerangka matriks kebijakan.
- Sektor pertanian-kehutanan, kelautan-perikanan, serta energi-mineral perlu ditautkan dengan isu investasi, pembiayaan, persaingan usaha, SDM, sustainability, teknologi, dan ekonomi rakyat.
- FGD kedua perlu memperdalam bagaimana hilirisasi dapat menghasilkan nilai tambah, lapangan kerja formal, pemerataan wilayah, daya saing ekspor, dan penguatan ekonomi rakyat.
- ISEI perlu merumuskan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga menjawab prasyarat sistemik hilirisasi, seperti energi, pembiayaan, regulasi, pasar, SDM, teknologi, dan tata kelola.



ISEI PENGURUS PUSAT

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

Sekretariat :
Gedung Kantor ISEI Pusat
Jl. Daksa IV/9, Kebayoran Baru, Jakarta 12110
Telp. 62 21 722 2463, Fax. 62 21 720 1812
Email: isei.pusat@gmail.com
<http://www.isei.or.id>

- Diskusi mengenai Sumitronomics, market building, competitive neutrality, dan batas intervensi negara perlu dikembangkan lebih lanjut sebagai landasan normatif dalam menilai kebijakan hilirisasi.
- Isu financing, Koperasi Desa Merah Putih, Danantara, peran sektor swasta, dan risiko crowding out perlu diperjelas dalam diskusi berikutnya karena memiliki implikasi penting terhadap pembiayaan, persaingan usaha, dan struktur pasar.
- Masukan dari peserta daerah/ISEI cabang pada FGD berikutnya diperlukan untuk menguji relevansi kebijakan hilirisasi di tingkat wilayah.
- Usulan optimalisasi Selat Malaka perlu dipertimbangkan sebagai salah satu agenda praktis yang menghubungkan ekonomi biru, logistik, perdagangan internasional, dan peran strategis wilayah Indonesia.
- Proses diskusi Bidang IV dapat terus dilanjutkan hingga setelah Sidang Pleno untuk menghasilkan pemikiran ISEI yang lebih utuh dan berpotensi dikembangkan menjadi dokumen kajian atau buku.

Notulis,

Firman Sihol Parningotan
Jonathan Ersten Herawan
Fabritio Paulus Kumowal
Bintang Oka Firmansyah



Euginia Mardanugraha

Bahan Diskusi *Focus Group Discussion* Bidang IV ISEI
“*Road To Bogor*”
19 Juni 2026

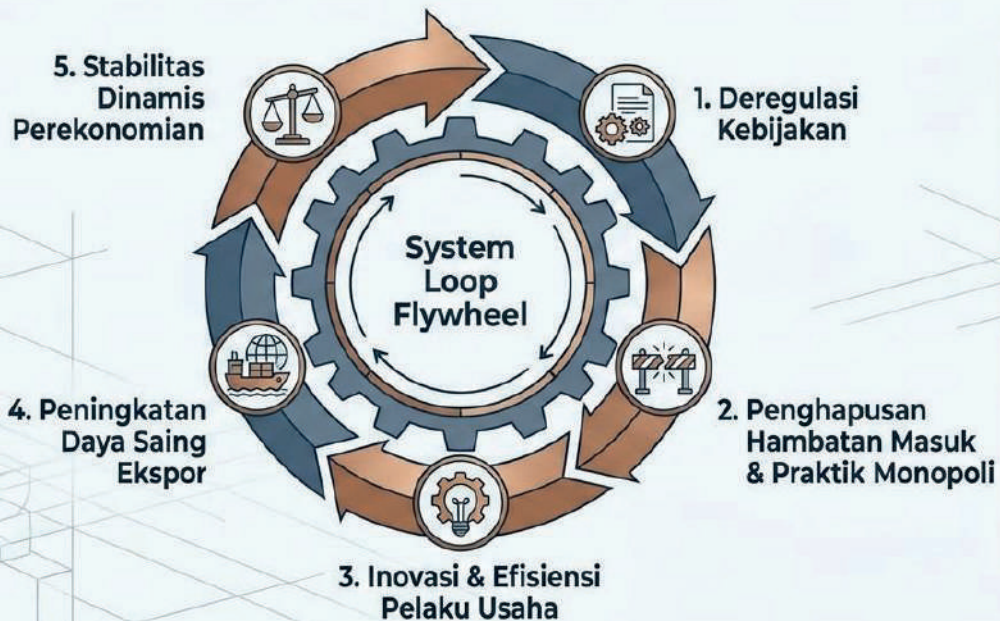
Hilirisasi–Industrialisasi dan Penguatan Ekonomi Rakyat (HI-PER) Menuju Indonesia Maju. Persaingan Usaha sebagai Isu Lintas Sektor (*Cross-Cutting Issue*)

Oleh:
Dr. Eugenia Mardanugraha
WAKA FG Perindustrian dan Persaingan Usaha ISEI
Anggota KPPU

Persaingan Usaha dalam Perspektif Sumitronomics

- Berdasarkan artikel Kompas Kompas, Minggu 17 Agustus 2025 berjudul Sumitro Djojohadikusumo. **Saatnya Hapus Semua Praktik Monopoli** ditulis oleh Pieter P Gero, Andi Suruji, dan Ace Suhaidi Madsupi. Tulisan ini diterbitkan di Harian Kompas edisi Sabtu, 16 Agustus 1997.
- Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berkelanjutan apabila perekonomian dibebani oleh berbagai bentuk inefisiensi yang bersumber dari intervensi kebijakan yang keliru.
- Sumitro menilai bahwa berbagai hambatan dalam arus produksi, transportasi, dan perdagangan bukan semata-mata disebabkan oleh faktor pasar, melainkan oleh kombinasi regulasi yang berlebihan, proteksionisme, subsidi terhadap industri yang tidak efisien, serta praktik monopoli yang menghambat mekanisme pasar.
- Ia mendorong pemerintah untuk menyusun agenda aksi yang jelas guna mempercepat deregulasi dan menghapus praktik monopoli yang tidak semestinya, baik yang terjadi di sektor swasta maupun di lingkungan pemerintahan.

Lensa Diagnostik Sumitronomics: Mewujudkan Stabilitas Dinamis



Konteks Sumitronomics

Mengacu pada pemikiran Sumitro Djojohadikusumo (*Kompas*, 1997):

Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak akan berkelanjutan apabila dibebani inefisiensi dari intervensi yang keliru dan privilese terhadap *special interest groups*.

Ekonomi yang sehat membutuhkan stabilitas dinamis, bukan proteksi statis.

NotebookLM

Pergeseran Kebijakan Ekonomi dari Perspektif Sumitronomics

1. Sumitro menekankan deregulasi, sementara kebijakan saat ini cenderung menambah berbagai bentuk intervensi negara dalam aktivitas ekonomi.
2. Sumitro mendorong penghapusan praktik monopoli dan privilese ekonomi, sedangkan saat ini terdapat kecenderungan konsolidasi pengelolaan aset dan sumber daya strategis pada entitas tertentu.
3. Sumitro memandang persaingan usaha sebagai instrumen utama peningkatan efisiensi, sementara kebijakan ekonomi saat ini lebih sering berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan melalui intervensi administratif dan kebijakan industri.
4. Dalam pemikiran Sumitro, negara berperan menciptakan kondisi yang mendukung pasar yang sehat, bukan menentukan hasil akhir pasar atau memilih pelaku usaha yang diunggulkan.
5. Sumitro menekankan pentingnya kesempatan berusaha yang luas bagi seluruh pelaku ekonomi, sedangkan beberapa kebijakan saat ini berpotensi menciptakan hambatan masuk atau perlakuan berbeda bagi pelaku usaha tertentu.
6. Jika Sumitro menganggap persaingan sebagai fondasi efisiensi dan daya saing nasional, maka arah kebijakan saat ini lebih mencerminkan pendekatan state-led development yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam transformasi ekonomi.
7. Perdebatan kebijakan saat ini bukan lagi mengenai apakah negara perlu hadir dalam pasar, melainkan bagaimana memastikan bahwa kehadiran negara tetap memperkuat mekanisme pasar dan tidak mengurangi manfaat persaingan usaha.

Sumitronomics	Kebijakan Ekonomi Terkini
Deregulasi, efisiensi, penghapusan monopoli, dan perluasan kesempatan berusaha	Hilirisasi, industrialisasi, konsolidasi aset strategis, dan peran negara yang semakin aktif
Negara memperkuat pasar	Negara semakin banyak berpartisipasi dalam pasar
Persaingan sebagai instrumen utama pembangunan	Intervensi negara sebagai instrumen utama pembangunan

Prinsip Sumitronomics	Kecenderungan Kebijakan Saat Ini	Implikasi terhadap Persaingan Usaha
Deregulasi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi	Meningkatnya intervensi negara dalam berbagai sektor strategis	Berpotensi menciptakan hambatan pasar dan mengurangi fleksibilitas pelaku usaha
Penghapusan praktik monopoli dan privilese ekonomi	Konsolidasi pengelolaan aset dan sumber daya strategis pada entitas tertentu	Menimbulkan risiko konsentrasi pasar dan berkurangnya kesempatan bagi pelaku usaha lain
Persaingan usaha sebagai instrumen utama peningkatan efisiensi	Kebijakan industri dan intervensi administratif semakin dominan dalam mencapai tujuan pembangunan	Efisiensi pasar berpotensi tidak lagi menjadi mekanisme utama alokasi sumber daya
Negara berperan membangun pasar yang sehat (market-building state)	Negara semakin aktif sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pelaku usaha	Menimbulkan tantangan dalam menjaga level playing field antar pelaku usaha
Kesempatan berusaha yang luas bagi seluruh pelaku ekonomi	Muncul berbagai kebijakan yang berpotensi memberikan perlakuan berbeda kepada kelompok atau pelaku usaha tertentu	Risiko berkurangnya akses pasar dan meningkatnya hambatan masuk bagi pelaku usaha baru
Daya saing dibangun melalui kompetisi, inovasi, dan efisiensi	Daya saing sering didorong melalui instrumen kebijakan, insentif, dan perlindungan sektor tertentu	Berpotensi mengurangi tekanan kompetitif yang mendorong inovasi dan produktivitas
Pemerintah menghindari perlindungan terhadap kelompok kepentingan tertentu (special interest groups)	Meningkatnya tuntutan kebijakan afirmatif, perlindungan sektor tertentu, dan intervensi distribusi manfaat ekonomi	Menimbulkan dilema antara tujuan pemerataan dan prinsip persaingan usaha
Pasar menjadi mekanisme utama penentuan pemenang dan pecundang	Negara semakin aktif menentukan arah investasi, sektor prioritas, dan dalam beberapa kasus mekanisme pasar	Menimbulkan pertanyaan mengenai batas optimal intervensi negara dalam perekonomian
Persaingan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Pendekatan pembangunan cenderung lebih berorientasi pada <i>state-led development</i>	Memerlukan perhatian lebih besar terhadap prinsip <i>competitive neutrality</i> agar pembangunan tidak mengurangi dinamika persaingan

PERTANYAAN KRITIS

- Apabila Sumitro hadir dan mengamati kebijakan ekonomi Indonesia saat ini, mungkin beliau akan mengajukan sejumlah pertanyaan kritis.
1. Apakah konsolidasi investasi melalui Danantara memperkuat atau justru mengurangi kompetisi?
 2. Apakah Koperasi Desa Merah Putih akan meningkatkan kesempatan berusaha atau menciptakan perlakuan khusus di pasar?
 3. Dan apakah pembatasan fee platform ojek online merupakan koreksi terhadap kegagalan pasar atau justru bentuk intervensi yang mengurangi dinamika persaingan?

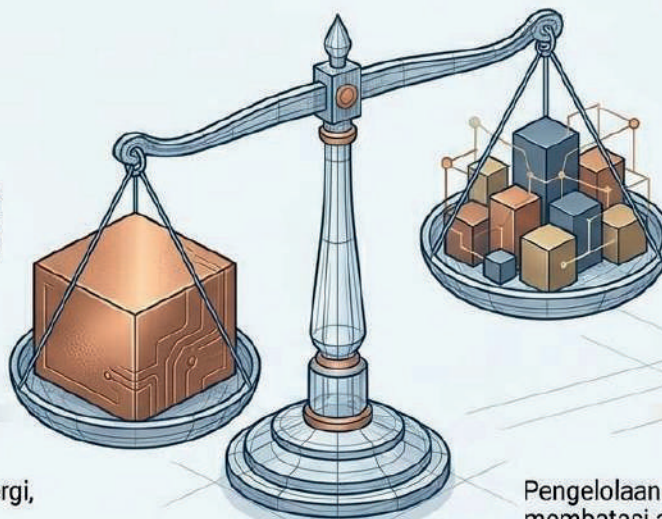
Tiga contoh ini menunjukkan bahwa tantangan utama kebijakan ekonomi saat ini bukan memilih antara negara atau pasar, melainkan menemukan titik keseimbangan yang tepat di antara keduanya.

Paradoks Danantara dalam Ekosistem Hilirisasi Nasional

Kapasitas Konsolidasi Danantara (SWF)

Peluang Konsolidasi

Menyatukan BUMN sektor energi, tambang, dan infrastruktur infrastruktur untuk mempercepat pembiayaan dan memperkuat daya tawar Indonesia di rantai nilai global melalui manajemen aset berskala raksasa.



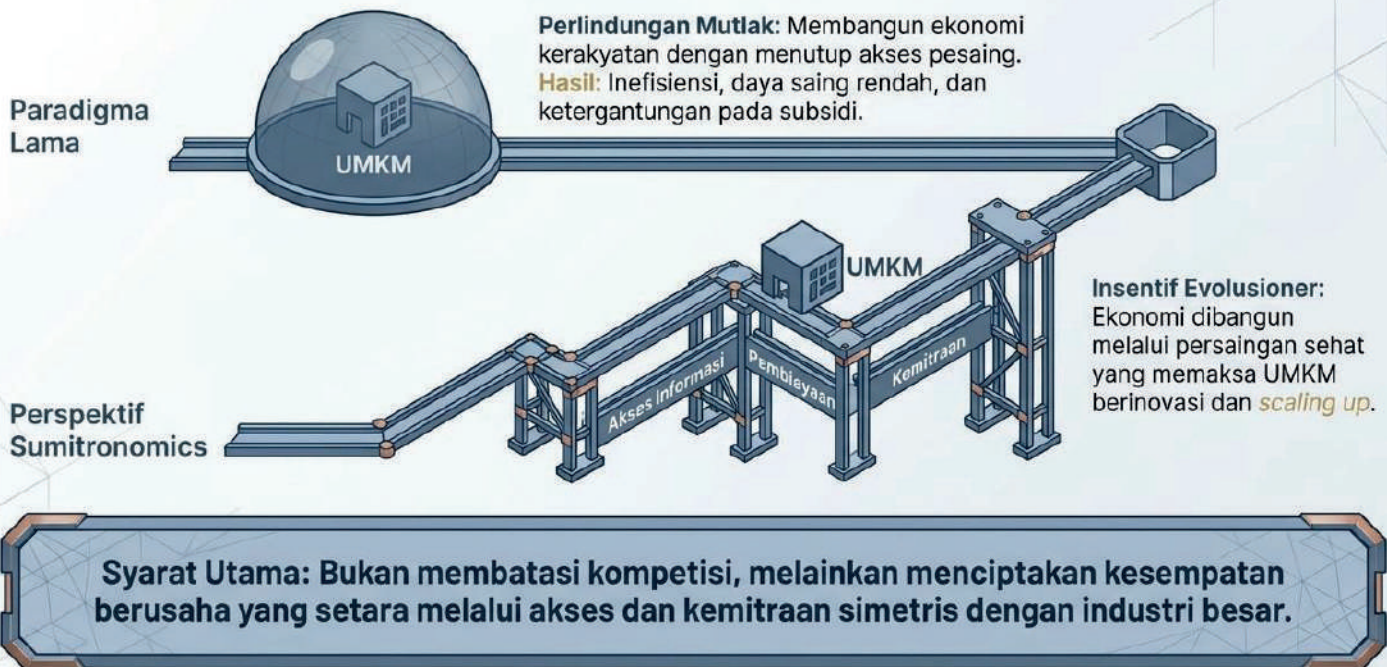
Akses Pasar Inklusif (Swasta & UMKM)

Risiko Distorsi

Pengelolaan aset strategis terpusat berisiko membatasi akses pelaku usaha independen terhadap bahan baku. Eksportir satu pintu berpotensi mematikan kompetisi di tingkat pelaku industri dasar.

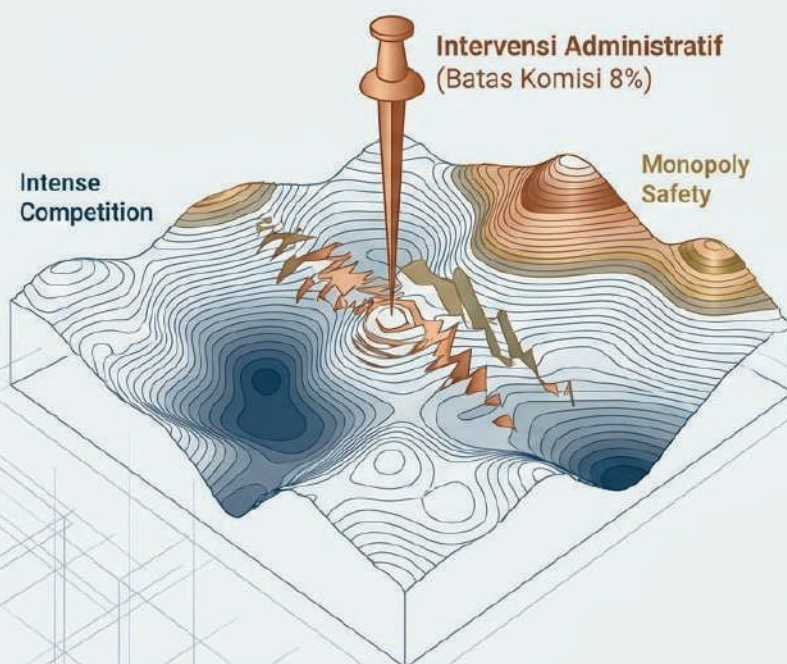
Kesimpulan Klinis: Transformasi Danantara wajib diimbangi dengan **transparansi tata kelola** dan jaminan bahwa ekosistem hilirisasi tidak dimonopoli secara administratif.

Industrialisasi Inklusif Menolak Perlindungan Berlebih



NotebookLM

Ekonomi Digital dan Distorsi Penentuan Harga Administratif



Dinamika TPGs (*Targeted Position Games*)

Pelaku usaha digital tidak selalu mengejar profit harian, melainkan memperebutkan "posisi puncak" struktural yang aman dalam peta pasar.

Kasus Distorsi Ojol

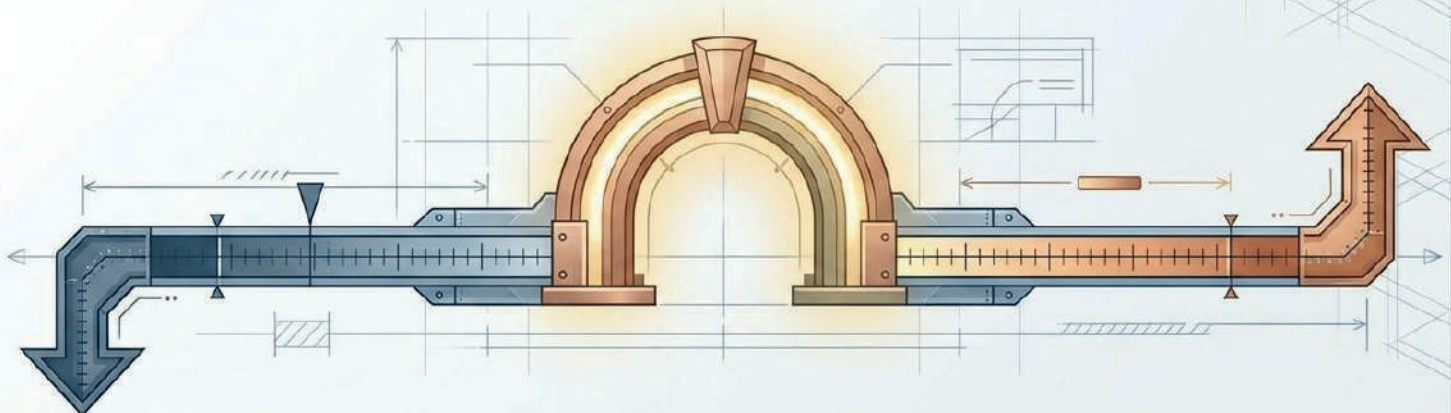
Wacana regulator membatasi komisi platform ride-hailing maksimal 8% secara absolut.

Dampak Sistemik

Mengatur margin secara administratif mengambil alih mekanisme pasar. Hal ini mematikan fleksibilitas platform, menghapus insentif untuk inovasi teknologi, dan mendistorsi peta kompetisi alami dalam jangka panjang.

NotebookLM

Mengkalibrasi Titik Keseimbangan Intervensi Negara



Kiri Jauh: Kegagalan Pasar
Eksternalitas negatif (polusi),
asimetri informasi, kartel, dan
monopoli absolut.

Tindakan: Negara WAJIB hadir.

Tengah: Zona Optimal (Market-Building)

Negara menyediakan infrastruktur, R&D
dasar, kepastian hukum, dan standar
lingkungan. *Regulated Conduct Doctrine*
diterapkan proporsional.

Kanan Jauh: Kegagalan Pemerintah

Distorsi harga (*margin* absolut),
picking winners, penutupan ritel
modern daerah secara sepihak.

Tindakan: Intervensi berlebihan
merusak efisiensi.

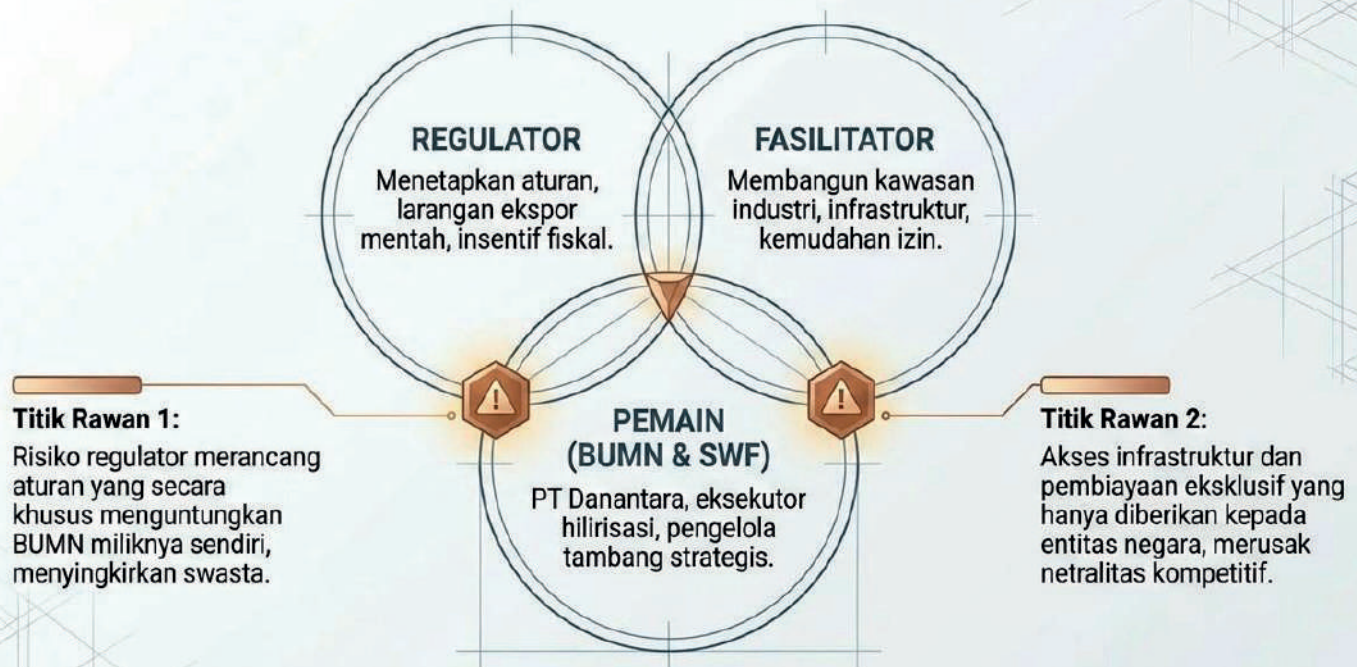
NotebookLM

Matriks Paradigma: Dari Menggantikan Pasar Menuju Membangun Pasar

	PARADIGMA LAMA (Market-Replacing)	PERSPEKTIF SUMITRONOMICS (Market-Building)
Tujuan Kebijakan	Melindungi entitas spesifik dari persaingan terbuka.	Memperkuat ekosistem agar semua entitas siap bersaing.
Metode Intervensi	Menentukan harga secara administratif, membatasi izin secara politis.	Menyediakan infrastruktur, transparansi data, penegakan anti-kartel.
Dampak pada UMKM	Stagnan, pasif, dan bergantung penuh pada proteksi/subsidi.	Dipaksa berinovasi, beraliansi, dan meningkatkan skala (<i>scaling up</i>).
Daya Saing Makro	Inefisiensi sistemik dan biaya logistik membengkak.	Adaptif, produktif, dan kompetitif di rantai nilai global.

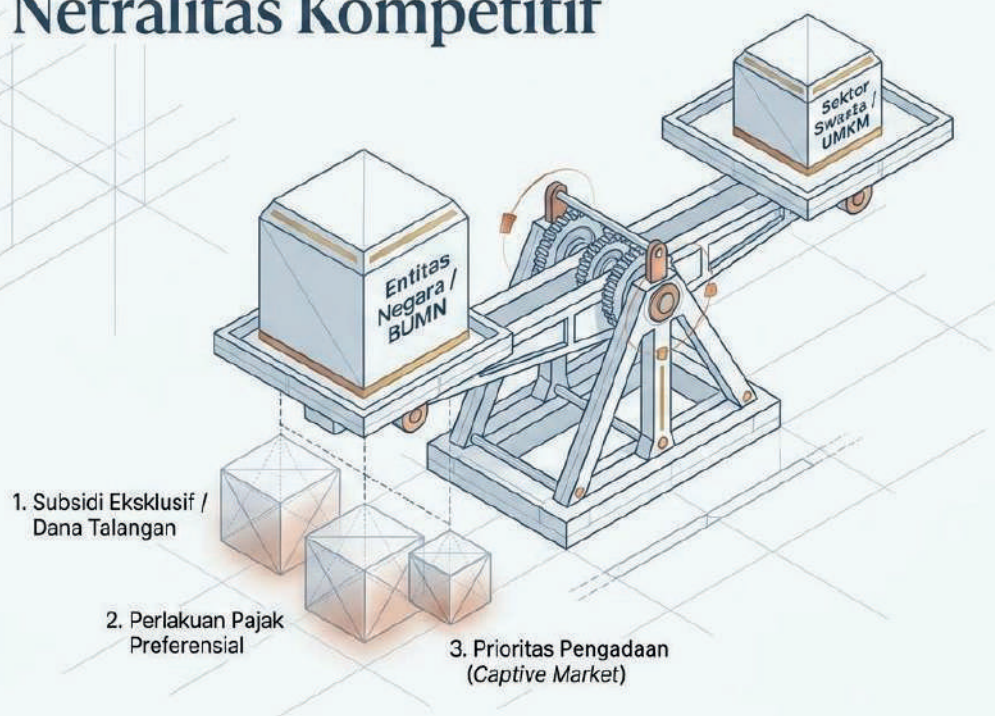
NotebookLM

Anatomi Peran Ganda Negara dan Titik Rawan Distorsi



NotebookLM

Mengembalikan Keseimbangan melalui Netralitas Kompetitif



Definisi

Memastikan BUMN dan swasta bersaing di arena yang datar, tanpa privilese yang bersumber murni dari status kepemilikan negara.

Target Sumitronomics

Negara memandu arah transformasi (Hilirisasi), namun hasil akhirnya ditentukan oleh tingkat efisiensi dan kualitas produk, bukan oleh kedekatan politik.

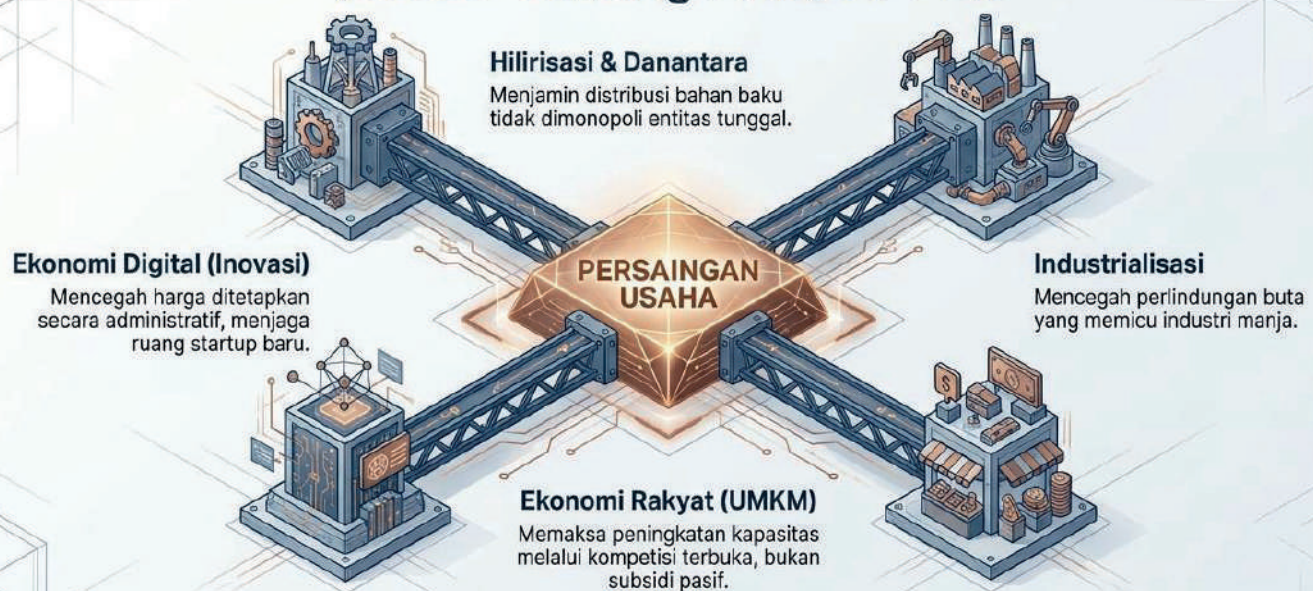
NotebookLM

Matriks Diagnostik Kebijakan Ekonomi Kontemporer

Isu Kebijakan	Niat Awal (Intent)	Risiko Distorsi Persaingan	Alternatif Sumitronics
Pembentukan PT Danantara	Konsolidasi aset raksasa untuk mempercepat investasi hilirisasi & daya tawar global.	Penguasaan eksklusif bahan baku, mematikan pengolahan independen kelas menengah.	Jaminan akses bahan baku (Open Access) yang diawasi lembaga independen.
Pembatasan Komisi Ojol (Maks. 8%)	Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan mitra pengemudi.	Mengunci model bisnis, mematikan inovasi platform, barrier bagi aplikasi baru.	Transparansi algoritma & kemudahan berpindah platform (multi-homing) tanpa penalti.
Penutupan Ritel Modern di Daerah	Melindungi pasar tradisional dan koperasi lokal dari persaingan besar.	Inefisiensi rantai pasok lokal, memicu harga barang melambung bagi konsumen.	Membangun kemitraan supply-chain simetris antara ritel dan pemasok lokal, bukan larangan.

NotebookLM

Persaingan Usaha: Poros Lintas Sektor (Cross-Cutting Axis) HI-PER



Insight: Tanpa persaingan usaha di pusat arsitektur, agenda HI-PER akan berubah dari mesin pertumbuhan menjadi **beban inefisiensi ekonomi** yang masif.

NotebookLM

Rekomendasi Kebijakan

1. Integritas Perspektif Persaingan Usaha dalam Agenda HI-PER: Wajibkan Analisis Dampak Persaingan dalam setiap perumusan kebijakan hilirisasi, memastikan akses bahan baku dan infrastruktur tidak diskriminatif.

2. Mendorong Hilirisasi yang Kompetitif dan Inklusif: Pastikan SWF seperti Danantara tidak menutup peluang masuknya investasi menengah, menjaga spektrum industri turunan tetap kompetitif.

3. Memperkuat Persaingan dalam Ekonomi Digital: Hentikan intervensi harga absolut (*margin capping*). Bergeser pada pengawasan perilaku platform (*abuse of dominance*) tanpa membunuh inovasi.

4. Menjaga Competitive Neutrality dalam Kebijakan Ekonomi: Pastikan BUMN dan perusahaan swasta bersaing di lapangan yang setara, tanpa perlakuan khusus atau subsidi yang mendistorsi.

5. Mendorong Pengembangan Kajian Persaingan Usaha sebagai Isu Lintas Sektor: Mendorong ISEI dan lembaga akademik menjadikan pengawasan Netralitas Kompetitif sebagai alat ukur makroekonomi utama.

NotebookLM

Kompetisi Bukanlah Hambatan Pembangunan, Melainkan Prasyarat Kemakmuran

Agenda HI-PER hanya akan mewujudkan Indonesia Emas 2045 **apabila ia bersandar pada pasar yang efisien, inklusif, dan terbuka.** Intervensi negara harus hadir untuk membangun kapasitas pasar, bukan untuk menentukan pemenangnya.

NotebookLM

Bahan Diskusi

Focus Group Discussion
Bidang IV ISEI
"Road To Bogor"

18 Juni 2026

Tema:

**Hilirisasi–Industrialisasi dan
Penguatan Ekonomi Rakyat (HI-PER)
Menuju Indonesia Maju
Persaingan Usaha sebagai Isu Lintas Sektor
(*Cross-Cutting Issue*)**

Oleh:

Dr. Eugenia Mardanugraha
WAKA FG Perindustrian dan Persaingan Usaha ISEI
Anggota KPPU

I. PERKEMBANGAN SITUASI TERKINI: PERSAINGAN USAHA DI ERA HILIRISASI DAN INDUSTRIALISASI

I.1 Hilirisasi sebagai strategi transformasi ekonomi

Dalam beberapa tahun terakhir, hilirisasi sumber daya alam telah menjadi salah satu strategi utama pembangunan ekonomi Indonesia. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas domestik melalui pengembangan industri pengolahan di dalam negeri, sehingga Indonesia tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah, tetapi juga sebagai produsen barang setengah jadi dan barang jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Agenda hilirisasi juga menjadi instrumen penting untuk mendorong industrialisasi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan ekspor, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Implementasi kebijakan hilirisasi telah mendorong peningkatan investasi yang signifikan, khususnya pada sektor mineral, energi, dan industri pengolahan berbasis sumber daya alam. Arus investasi tersebut telah mengubah struktur industri nasional dengan tumbuhnya berbagai fasilitas pemurnian, pengolahan, dan manufaktur yang sebelumnya belum berkembang secara optimal di dalam negeri. Di sisi lain, proses hilirisasi juga memunculkan rantai nilai (*value chain*) baru yang menghubungkan sektor hulu, industri pengolahan, industri manufaktur, hingga sektor jasa pendukung. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hilirisasi bukan sekadar kebijakan perdagangan atau investasi, melainkan strategi transformasi ekonomi yang berpotensi mengubah struktur perekonomian Indonesia secara fundamental.

I.2 Tantangan Persaingan dalam Agenda Hilirisasi

Meskipun memberikan berbagai manfaat ekonomi, proses hilirisasi juga menghadirkan tantangan dari perspektif persaingan usaha. Salah satu isu yang muncul adalah meningkatnya konsentrasi pasar pada sektor-sektor strategis yang menguasai sumber daya alam maupun fasilitas pengolahan. Kebutuhan investasi yang besar, penguasaan teknologi, serta akses terhadap sumber daya tertentu sering kali menyebabkan hanya sejumlah kecil pelaku usaha yang mampu berpartisipasi dalam industri hilir. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tingkat konsentrasi pasar baik pada industri hulu maupun hilir.

Selain itu, hilirisasi sering diikuti oleh integrasi vertikal antara penguasaan sumber daya alam dan kegiatan pengolahan. Integrasi vertikal pada dasarnya dapat meningkatkan efisiensi dan menjamin pasokan bahan baku, namun dalam kondisi tertentu juga dapat menimbulkan risiko pembatasan akses bahan baku bagi pelaku usaha lain. Ketika pelaku usaha yang menguasai sumber daya sekaligus mengendalikan industri pengolahan, peluang terjadinya eksklusivitas rantai pasok (*exclusive supply chain*) menjadi lebih besar. Situasi tersebut berpotensi menciptakan hambatan masuk (*barrier to entry*) bagi pelaku usaha baru, mengurangi dinamika persaingan, dan mempersempit kesempatan berkembangnya industri turunan yang lebih beragam.

Oleh karena itu, keberhasilan hilirisasi tidak hanya perlu diukur dari besarnya investasi atau peningkatan nilai tambah, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan struktur pasar yang kompetitif dan terbuka. Hilirisasi yang berkelanjutan seharusnya mampu mendorong efisiensi sekaligus memberikan kesempatan yang setara bagi berbagai pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam rantai nilai industri nasional.

II. PERSAINGAN USAHA DALAM PERSPEKTIF SUMITRONOMICS

Berdasarkan artikel Kompas Kompas, Minggu 17 Agustus 2025 berjudul Sumitro Djojohadikusumo. **Saatnya Hapus Semua Praktik Monopoli** ditulis oleh Pieter P Gero, Andi Suruji, dan Ace Suhaidi Madsupi. Tulisan ini diterbitkan di Harian Kompas edisi Sabtu, 16 Agustus 1997, pemikiran Sumitro Djojohadikusumo mengenai persaingan usaha berangkat dari keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berkelanjutan apabila perekonomian dibebani oleh berbagai bentuk inefisiensi yang bersumber dari intervensi kebijakan yang keliru. Sumitro menilai bahwa berbagai hambatan dalam arus produksi, transportasi, dan perdagangan bukan semata-mata disebabkan oleh faktor pasar, melainkan oleh kombinasi regulasi yang berlebihan, proteksionisme, subsidi terhadap industri yang tidak efisien, serta praktik monopoli yang menghambat mekanisme pasar. Menurutnya, berbagai kebijakan tersebut telah meningkatkan biaya ekonomi dan menurunkan daya saing nasional. Oleh karena itu, perbaikan fundamental ekonomi harus dilakukan melalui reformasi struktural yang berorientasi pada deregulasi, peningkatan efisiensi, dan penghapusan hambatan-hambatan yang mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi.

Lebih jauh, Sumitro secara tegas memandang praktik monopoli sebagai salah satu penghambat utama modernisasi dan efisiensi ekonomi Indonesia. Ia mendorong pemerintah untuk menyusun agenda aksi yang jelas guna mempercepat deregulasi dan menghapus praktik monopoli yang tidak semestinya, baik yang terjadi di sektor swasta maupun di lingkungan pemerintahan. Menurut Sumitro, ekonomi pasar yang sehat hanya dapat terwujud apabila kebijakan publik dijalankan untuk kepentingan nasional, bukan untuk melayani kelompok-kelompok kepentingan tertentu (*special interest groups*) yang memperoleh keuntungan dari perlindungan dan privilese ekonomi. Dalam pandangannya, penghapusan praktik monopoli dan konsistensi deregulasi akan meningkatkan efisiensi ekonomi, memperlancar distribusi barang, menekan inflasi, memperkuat daya saing ekspor, serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Pemikiran ini menunjukkan bahwa bagi Sumitro, persaingan usaha bukan sekadar instrumen hukum atau mekanisme pasar, melainkan prasyarat penting bagi pembangunan ekonomi nasional yang efisien dan inklusif.

II.1 Stabilitas Dinamis dan Efisiensi Ekonomi

Salah satu pilar utama pemikiran Sumitro Djojohadikusumo adalah pentingnya menjaga *stabilitas dinamis* dalam perekonomian. Stabilitas yang dimaksud bukan sekadar menjaga inflasi, nilai tukar, atau keseimbangan fiskal, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan perekonomian terus tumbuh secara efisien dan berkelanjutan. Dalam pandangan Sumitro, berbagai bentuk inefisiensi yang timbul akibat regulasi yang tidak tepat, proteksionisme berlebihan, serta praktik monopoli akan meningkatkan biaya produksi dan distribusi sehingga menghambat daya saing ekonomi nasional. Oleh karena itu, efisiensi ekonomi harus menjadi tujuan utama kebijakan pembangunan melalui penciptaan mekanisme pasar yang sehat, deregulasi yang tepat, serta pengurangan berbagai hambatan yang mengganggu arus barang, jasa, dan investasi.

II.2 Hilirisasi SDA dan Struktur Pasar

Sumitro memandang pengolahan sumber daya alam di dalam negeri sebagai strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat basis industrialisasi nasional. Namun demikian, keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi atau kapasitas

produksi, tetapi juga oleh struktur pasar yang terbentuk di sepanjang rantai nilai industri tersebut. Hilirisasi yang sehat seharusnya mampu menciptakan peluang usaha yang lebih luas, mendorong tumbuhnya industri turunan, serta membuka akses bagi pelaku usaha baru untuk masuk ke pasar. Sebaliknya, apabila hilirisasi hanya menghasilkan konsentrasi penguasaan bahan baku dan industri pengolahan pada segelintir pelaku usaha, maka tujuan peningkatan daya saing dan pemerataan manfaat ekonomi berpotensi tidak tercapai secara optimal.

Dalam konteks Indonesia saat ini, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi perkembangan penting yang menunjukkan semakin eratnya hubungan antara agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional. Danantara dibentuk untuk mengelola aset dan investasi strategis negara, termasuk berbagai BUMN besar yang beroperasi pada sektor energi, pertambangan, telekomunikasi, keuangan, dan infrastruktur, dengan mandat mendukung proyek-proyek hilirisasi dan industrialisasi bernilai tambah tinggi. Pemerintah menempatkan Danantara sebagai instrumen strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi dan pengembangan industri pengolahan sumber daya alam.

Dari perspektif persaingan usaha, perkembangan tersebut menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, konsolidasi investasi melalui Danantara dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan, mempercepat pembangunan industri hilir, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Namun di sisi lain, pengelolaan aset strategis yang sangat besar dan terkonsentrasi pada satu entitas menimbulkan pertanyaan mengenai struktur pasar, akses terhadap sumber daya, serta kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk berpartisipasi dalam ekosistem hilirisasi. Danantara diproyeksikan mengelola aset BUMN dalam jumlah yang sangat besar dan menjadi salah satu *sovereign wealth fund* terbesar di dunia, sehingga tata kelola, transparansi, dan prinsip persaingan yang sehat menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa agenda hilirisasi tidak hanya menghasilkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga menciptakan pasar yang kompetitif, terbuka, dan inklusif.

Dengan demikian, tantangan utama hilirisasi ke depan bukan hanya bagaimana meningkatkan investasi dan kapasitas produksi, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa proses transformasi industri tersebut tidak menciptakan konsentrasi kekuatan ekonomi yang berlebihan. Dalam perspektif Sumitronomics, hilirisasi yang berhasil seharusnya mampu meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sekaligus memperluas kesempatan berusaha bagi berbagai pelaku ekonomi, sehingga manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih luas oleh masyarakat.

II.3 Ekonomi Kerakyatan dan Kesempatan Berusaha

Bagi Sumitro, pembangunan ekonomi tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan, tetapi juga harus memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat. Gagasan ekonomi kerakyatan yang menjadi bagian penting dari pemikirannya menempatkan UMKM, koperasi, petani, dan pelaku usaha kecil sebagai fondasi perekonomian nasional. Dalam konteks tersebut, persaingan usaha yang sehat berperan sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pasar, sumber daya, teknologi, dan pembiayaan. Oleh karena itu, penguatan ekonomi rakyat tidak seharusnya dilakukan melalui pembatasan persaingan, melainkan melalui peningkatan kapasitas dan daya saing sehingga pelaku usaha kecil mampu tumbuh dan berpartisipasi secara lebih aktif dalam proses industrialisasi dan pembangunan ekonomi.

II.4 Pemikiran Sumitro tentang Monopoli

Pemikiran Sumitro mengenai monopoli tercermin secara jelas dalam pandangannya bahwa berbagai praktik monopoli, proteksionisme yang berlebihan, dan perlindungan terhadap kelompok kepentingan tertentu merupakan sumber utama inefisiensi ekonomi. Dalam pidatonya tahun 1997 yang kemudian dipublikasikan oleh Kompas, Sumitro menegaskan perlunya melanjutkan agenda deregulasi dan menghapus praktik monopoli yang tidak semestinya baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Menurutnya, keberadaan monopoli menyebabkan meningkatnya biaya produksi, transportasi, dan perdagangan, sehingga menurunkan daya saing ekonomi nasional. Sumitro juga mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi seharusnya dijalankan untuk kepentingan nasional, bukan untuk melayani kelompok-kelompok kepentingan yang memperoleh keuntungan dari privilese dan perlindungan ekonomi. Dengan demikian, bagi Sumitro, persaingan usaha yang sehat merupakan prasyarat penting bagi terciptanya efisiensi, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesempatan berusaha.

Sumitronomics dapat dipahami sebagai kerangka pemikiran yang menempatkan persaingan usaha sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong efisiensi ekonomi, inovasi, ketahanan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ini, persaingan tidak semata-mata dipandang sebagai mekanisme pasar yang bekerja secara otomatis, tetapi sebagai proses yang berlangsung dalam interaksi antara kekuatan pasar, kebijakan pemerintah, dan tujuan pembangunan nasional. Pendekatan ini menggabungkan pemikiran ekonomi klasik mengenai efisiensi pasar dengan tantangan ekonomi modern yang ditandai oleh globalisasi, transformasi digital, keberlanjutan lingkungan, dan meningkatnya kompleksitas struktur pasar.

II.4.1 Efisiensi dan Inovasi Pasar

Persaingan merupakan pendorong utama terciptanya efisiensi dan inovasi dalam perekonomian. Melalui tekanan kompetitif, pelaku usaha terdorong untuk meningkatkan kualitas produk, menekan biaya produksi, serta mengembangkan teknologi dan model bisnis yang lebih inovatif guna mempertahankan daya saingnya. Proses ini pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Challoumis & Eriotis, 2024; Vidican & Heps, 2023). Dalam konteks tersebut, konsep *full competition* menekankan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh strategi harga jangka pendek, tetapi juga oleh kemampuan menciptakan nilai tambah, inovasi, dan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan bagi konsumen dan pasar (Palacio-Morena dkk., 2025).

II.4.2 Keseimbangan Regulasi dan Kepentingan Nasional

Dalam praktiknya, persaingan usaha tidak dapat dilepaskan dari peran negara dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi pasar dan kepentingan nasional. Pada sektor-sektor strategis tertentu, intervensi pemerintah melalui kebijakan industri, subsidi, atau dukungan investasi sering kali diperlukan untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan memperkuat daya saing nasional. Oleh karena itu, kebijakan persaingan perlu mampu menyeimbangkan prinsip netralitas kompetitif dengan kebutuhan pembangunan nasional (Babayev & Rzali, 2025). Dalam konteks ini, *Regulated Conduct Doctrine (RCD)* memberikan kerangka konseptual mengenai kondisi tertentu di mana tindakan yang diwajibkan oleh negara dapat dikecualikan dari pengawasan persaingan, sehingga menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih kontekstual dan proporsional dalam penerapan kebijakan persaingan (Babayev & Rzali, 2025).

II.4.3 Ketahanan Ekonomi dan Keberlanjutan

Persaingan usaha modern juga semakin terkait dengan agenda keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kebijakan persaingan tidak lagi hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana aktivitas ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang (Sargu & Timus, 2025). Hubungan antara persaingan dan keberlanjutan bersifat kompleks. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tingkat persaingan yang lebih tinggi dapat mendorong inovasi ramah lingkungan dan efisiensi sumber daya, sementara penelitian lain menemukan bahwa koordinasi atau pembatasan persaingan tertentu dapat membantu mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih besar (Nowag, 2025). Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara tujuan persaingan dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

II.4.4 Kompleksitas dan Ketahanan Sistemik

Perkembangan ekonomi modern menunjukkan bahwa pasar merupakan sistem yang semakin kompleks dan saling terhubung. Dalam perspektif ini, persaingan dipahami sebagai bagian dari sistem adaptif yang dapat menghasilkan dampak positif maupun negatif terhadap perekonomian. Persaingan tidak selalu menghasilkan hasil yang optimal apabila tidak disertai tata kelola yang memadai, karena dalam kondisi tertentu dapat memicu ketimpangan, konsentrasi pasar, atau ketidakstabilan sistemik (Tedesco & Marquez, 2025). Oleh karena itu, pendekatan baru terhadap kebijakan persaingan mulai mengintegrasikan ilmu kompleksitas untuk memahami tantangan yang muncul akibat ekonomi digital, transisi energi, dan perubahan teknologi yang berlangsung cepat (Makris, 2025).

II.4.5 Ekonomi Pasar Sosial dan Pengambilan Keputusan

Persaingan juga merupakan elemen penting dalam konsep ekonomi pasar sosial (*social market economy*), yaitu sistem ekonomi yang menggabungkan mekanisme pasar dengan tujuan kesejahteraan sosial. Dalam kerangka ini, persaingan memungkinkan terjadinya proses penyesuaian yang bersifat spontan melalui keputusan individu dan pelaku usaha yang saling berinteraksi di pasar, sehingga menghasilkan efisiensi dan manfaat ekonomi secara keseluruhan (Möschel, 2001). Selain itu, perkembangan teori strategi modern menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak selalu berorientasi pada maksimalisasi keuntungan jangka pendek, tetapi juga pada pencapaian posisi tertentu dalam struktur pasar. Konsep *Targeted Position Games (TPGs)* menjelaskan bagaimana perusahaan merancang strategi kompetitif untuk mencapai posisi pasar tertentu yang dianggap optimal dalam jangka panjang (Farshi, 2023).

Secara keseluruhan, perspektif Sumitronomics memandang persaingan usaha sebagai instrumen penting untuk menciptakan efisiensi, inovasi, dan ketahanan ekonomi. Namun demikian, persaingan tidak dapat diperlakukan sebagai tujuan itu sendiri. Persaingan perlu dikelola melalui kebijakan dan kelembagaan yang tepat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa persaingan yang tidak terkelola juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti ketimpangan, kerapuhan sistemik, dan degradasi lingkungan (Tedesco & Marquez, 2025). Oleh karena itu, tantangan kebijakan saat ini bukan sekadar menciptakan persaingan yang lebih besar, melainkan membangun sistem persaingan yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesempatan berusaha, dan keberlanjutan pembangunan secara bersamaan.

III. PERSAINGAN USAHA SEBAGAI PRASYARAT HI-PER

III.1 Hilirisasi yang Kompetitif

Hilirisasi yang kompetitif (*competitive downstreaming*) merupakan salah satu prasyarat penting bagi keberhasilan industrialisasi dan transformasi ekonomi suatu negara. Melalui hilirisasi, sumber daya alam yang sebelumnya diekspor dalam bentuk bahan mentah diolah lebih lanjut di dalam negeri sehingga menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Proses ini tidak hanya meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian, tetapi juga memperluas kesempatan kerja, mendorong diversifikasi ekonomi, memperkuat daya saing nasional, serta meningkatkan ketahanan ekonomi dalam jangka panjang. Bagi Indonesia, hilirisasi menjadi instrumen strategis untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah (*middle-income trap*) dan mewujudkan visi Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

III.1.1 Transformasi Ekonomi dan Konsistensi Kebijakan

Keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan arah transformasi ekonomi yang jelas. Untuk Indonesia, strategi menuju negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045 menempatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sebagai motor utama peningkatan produktivitas, diversifikasi ekonomi, dan pembentukan modal nasional. Melalui strategi *Make in Indonesia*, pemerintah berupaya memperkuat kapasitas manufaktur domestik dan mendorong pergeseran menuju industri dengan tingkat teknologi yang lebih maju (Tan, 2025). Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan regulasi yang konsisten, kepastian kebijakan, dan koordinasi antarsektor yang mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pengembangan energi terbarukan, transformasi industri hijau, dan kolaborasi multipemangku kepentingan menunjukkan pentingnya kerangka kebijakan yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang (Permadi & Hanita, 2025).

III.1.2 Peningkatan Nilai Tambah dan Perluasan Pasar

Salah satu manfaat utama hilirisasi adalah kemampuannya menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian domestik. Pengalaman pada sektor perikanan tangkap di Kabupaten Bone menunjukkan bahwa kegiatan pengolahan pasca panen mampu meningkatkan nilai produk, mengurangi limbah, dan memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat, termasuk perempuan dan generasi muda yang terlibat dalam rantai nilai industri (Marhati dkk., 2025). Pada skala yang lebih luas, kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah yang diterapkan Indonesia bertujuan mendorong berkembangnya industri pengolahan domestik sehingga manfaat ekonomi tidak berhenti pada tahap ekstraksi sumber daya alam, melainkan berlanjut hingga menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi dan daya saing global yang lebih kuat (Rahmawati & Swara, 2025).

III.1.3 Investasi dan Pengembangan Infrastruktur

Hilirisasi yang kompetitif juga membutuhkan dukungan investasi dan infrastruktur yang memadai. Pengembangan industri hilir kelapa sawit, misalnya, memerlukan investasi berkelanjutan pada sektor *oleo-food*, oleokimia, dan bioenergi agar rantai nilai industri dapat berkembang secara optimal. Berbagai instrumen kebijakan seperti insentif pajak, kawasan ekonomi khusus, serta peningkatan akses pembiayaan menjadi faktor penting dalam mendorong investasi industri hilir

(Lestari dkk., 2025). Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur, hambatan logistik, dan ketidakpastian regulasi masih menjadi tantangan yang dapat menghambat perluasan pasar dan menurunkan daya saing industri. Oleh karena itu, keberhasilan hilirisasi memerlukan kebijakan yang terintegrasi serta penguatan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan ekosistem industri yang efisien dan kompetitif (Marhati dkk., 2025).

III.1.4 Daya Saing dan Inovasi Industri

Pada akhirnya, tujuan utama hilirisasi adalah menciptakan industri yang lebih kompetitif dan inovatif. Daya saing industri tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan produk baru, meningkatkan kualitas produksi, serta mengadopsi teknologi yang lebih maju. Inovasi menjadi faktor penting dalam mempertahankan posisi kompetitif suatu industri di pasar domestik maupun global (Shahin & Kefeli, 2023). Oleh karena itu, industrialisasi yang berhasil membutuhkan pendekatan sistemik yang mengintegrasikan kebijakan pemerintah, investasi swasta, pengembangan teknologi, serta penguatan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor industri secara keseluruhan (Ferrer, 2009).

Meskipun menawarkan berbagai manfaat, strategi hilirisasi juga menghadirkan tantangan yang perlu dikelola secara hati-hati. Kebijakan hilirisasi sering kali berhadapan dengan dinamika perdagangan internasional, sebagaimana terlihat pada sengketa terkait kebijakan ekspor nikel Indonesia yang memunculkan perdebatan mengenai hubungan antara kebijakan industri nasional dan aturan perdagangan global (Rahmawati & Swara, 2025). Selain itu, berbagai bentuk intervensi industri seperti subsidi atau perlindungan tertentu dapat menimbulkan dampak yang berbeda bagi sektor hilir dan berpotensi mengurangi daya saing apabila tidak dirancang secara tepat (Blonigen, 2016). Oleh karena itu, hilirisasi yang kompetitif harus mampu menyeimbangkan tujuan peningkatan nilai tambah domestik dengan kebutuhan menjaga persaingan usaha, efisiensi pasar, dan integrasi ekonomi global sehingga industrialisasi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan inklusif.

Keberhasilan agenda hilirisasi tidak hanya diukur dari peningkatan nilai tambah atau besarnya investasi yang masuk, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan struktur pasar yang kompetitif. Hilirisasi yang sehat harus mampu mendorong lahirnya lebih banyak pelaku usaha pada berbagai mata rantai produksi, mulai dari penyedia bahan baku, industri pengolahan, hingga industri hilir yang menghasilkan produk akhir. Dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang berpartisipasi, manfaat ekonomi dari hilirisasi dapat tersebar lebih luas dan tidak terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu. Dalam konteks ini, akses terhadap bahan baku, infrastruktur, teknologi, dan pasar menjadi faktor penting yang harus dijaga agar tidak terjadi penguasaan eksklusif oleh segelintir pelaku usaha. Struktur pasar yang kompetitif juga akan mendorong perusahaan untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi produksi, serta mengembangkan produk yang memiliki daya saing lebih tinggi di pasar domestik maupun global.

III.2 Industrialisasi yang Inklusif

Industrialisasi pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat basis produksi nasional, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja. Namun demikian, industrialisasi yang hanya menghasilkan konsentrasi aset, investasi, dan keuntungan pada sebagian kecil pelaku usaha berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan mengurangi manfaat pembangunan

bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, industrialisasi perlu dirancang secara inklusif dengan memberikan kesempatan yang setara bagi pelaku usaha baru untuk masuk dan berkembang dalam pasar. Persaingan usaha yang sehat berperan penting dalam menjaga dinamika pasar agar tidak didominasi oleh pelaku usaha tertentu, sekaligus mendorong efisiensi dan inovasi secara berkelanjutan. Industrialisasi yang inklusif bukan hanya menciptakan perusahaan-perusahaan besar yang kuat, tetapi juga membangun ekosistem industri yang terbuka, kompetitif, dan mampu melibatkan berbagai pelaku usaha dalam rantai nilai nasional.

III.3 Penguatan Ekonomi Rakyat

Dalam perspektif ekonomi kerakyatan, persaingan usaha tidak bertentangan dengan upaya pemberdayaan UMKM, koperasi, dan pelaku usaha rakyat. Sebaliknya, persaingan yang sehat justru menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha kecil agar mampu tumbuh secara berkelanjutan. Penguatan ekonomi rakyat memerlukan dukungan berupa kemitraan yang setara antara UMKM dan industri besar, akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, teknologi, informasi, serta pasar. Melalui persaingan yang terbuka dan adil, pelaku usaha rakyat memperoleh insentif untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi usaha, dan kemampuan inovasi. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan tidak dibangun melalui pembatasan persaingan atau perlindungan yang berlebihan, melainkan melalui penciptaan kesempatan berusaha yang setara sehingga UMKM dan koperasi dapat menjadi bagian penting dari proses hilirisasi, industrialisasi, dan transformasi ekonomi nasional.

IV. *COMPETITIVE NEUTRALITY*: MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA INTERVENSI NEGARA DAN PERSAINGAN USAHA

Intervensi pemerintah di pasar adalah topik bernuansa yang membutuhkan penyeimbangan kebutuhan untuk memperbaiki kegagalan pasar dengan pelestarian persaingan dan efisiensi pasar. Tingkat intervensi harus dikalibrasi dengan hati-hati untuk mengatasi kegagalan pasar tertentu seperti eksternalitas, informasi asimetris, dan praktik monopolistik, tanpa menghambat kekuatan kompetitif yang mendorong inovasi dan efisiensi. Literatur menunjukkan bahwa sementara intervensi diperlukan dalam keadaan tertentu, intervensi harus dirancang untuk melengkapi daripada menggantikan mekanisme pasar. Pendekatan ini memastikan bahwa intervensi tidak secara tidak sengaja menciptakan inefisiensi atau distorsi yang dapat merusak fungsi regulasi alami pasar.

IV.1 Peran Negara dalam Hilirisasi dan Industrialisasi

Dalam proses hilirisasi dan industrialisasi, negara memiliki peran yang sangat penting sebagai pengarah transformasi ekonomi nasional. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan industrialisasi jarang terjadi hanya melalui mekanisme pasar semata, tetapi memerlukan dukungan kebijakan, pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta intervensi strategis yang mampu mempercepat terbentuknya industri-industri baru. Dalam konteks Indonesia, peran negara menjadi semakin penting mengingat ambisi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat daya saing industri nasional, dan mencapai status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

Sebagai regulator, negara berwenang menyusun berbagai kebijakan yang memengaruhi struktur pasar, pola investasi, dan arah pengembangan industri nasional. Kebijakan hilirisasi mineral, pembatasan ekspor bahan mentah, pemberian insentif fiskal, pengembangan kawasan industri, hingga pengaturan perdagangan merupakan contoh instrumen yang digunakan pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi. Dalam perspektif persaingan usaha, fungsi regulasi ini pada dasarnya diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar (*market failure*), mempercepat pembangunan sektor strategis, serta menciptakan kepastian usaha bagi pelaku ekonomi. Namun demikian, regulasi juga perlu dirancang secara hati-hati agar tidak menciptakan hambatan masuk yang berlebihan atau memberikan perlakuan yang tidak proporsional kepada pelaku usaha tertentu.

Selain sebagai regulator, negara juga berperan sebagai fasilitator investasi melalui penyediaan infrastruktur, insentif usaha, kemudahan perizinan, akses pembiayaan, dan pengembangan kawasan ekonomi strategis. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah bahkan membentuk berbagai instrumen kelembagaan untuk mempercepat investasi pada sektor-sektor prioritas hilirisasi dan industrialisasi. Salah satu contoh yang banyak mendapat perhatian adalah pembentukan Danantara beserta anak usaha strategisnya, termasuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi kendaraan investasi nasional dalam pengembangan sektor sumber daya alam dan industri hilir. Kehadiran instrumen investasi semacam ini mencerminkan semakin aktifnya peran negara dalam mengonsolidasikan sumber daya ekonomi untuk mendukung agenda industrialisasi nasional.

Di samping itu, negara juga berperan sebagai pelaku usaha melalui berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi pada sektor-sektor strategis seperti energi, pertambangan, telekomunikasi, transportasi, keuangan, dan infrastruktur. Dalam banyak kasus, keterlibatan BUMN diperlukan untuk mengisi kekosongan pasar, mengelola sumber daya strategis, atau melaksanakan proyek-proyek yang membutuhkan investasi jangka panjang dengan risiko tinggi. Namun demikian, semakin luasnya keterlibatan negara sebagai pelaku usaha juga menimbulkan tantangan baru dari perspektif persaingan usaha, khususnya terkait prinsip *competitive neutrality*, yaitu bagaimana memastikan bahwa BUMN dan pelaku usaha swasta bersaing dalam kondisi yang setara dan tidak memperoleh keuntungan kompetitif yang bersumber dari kebijakan pemerintah semata.

Perdebatan mengenai batas peran negara dalam pasar juga semakin mengemuka dalam berbagai kebijakan ekonomi kontemporer. Misalnya, wacana pengelolaan ekspor komoditas tertentu melalui satu pintu yang melibatkan entitas negara seperti PT Danantara Sumber Daya Indonesia memunculkan diskusi mengenai keseimbangan antara tujuan peningkatan daya tawar nasional dan potensi berkurangnya kompetisi di tingkat pelaku usaha. Demikian pula kebijakan penetapan pembagian pendapatan (*profit sharing*) dalam ekosistem transportasi daring, termasuk usulan pembatasan porsi komisi platform hingga tingkat tertentu, memperlihatkan bagaimana negara semakin aktif mengatur mekanisme pasar yang sebelumnya ditentukan melalui interaksi bisnis antar pelaku usaha. Pada tingkat daerah, kebijakan pembatasan atau penutupan gerai ritel modern yang telah beroperasi secara legal dengan alasan penguatan ekonomi lokal atau koperasi juga menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara tujuan afirmatif dan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Berbagai contoh tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pembangunan ekonomi saat ini bukan lagi sekadar menentukan apakah negara perlu hadir dalam pasar, melainkan bagaimana memastikan bahwa kehadiran negara tetap mampu mendorong efisiensi, inovasi, dan pemerataan kesempatan berusaha. Dalam perspektif Sumitronomics, negara memiliki peran penting dalam membangun kapasitas ekonomi nasional dan mempercepat industrialisasi. Namun, intervensi tersebut idealnya diarahkan untuk memperkuat mekanisme pasar dan memperluas kesempatan berusaha, bukan menggantikan proses persaingan atau menentukan pemenang pasar secara administratif. Oleh karena itu, keseimbangan antara peran negara dan dinamika pasar menjadi salah satu prasyarat penting bagi keberhasilan hilirisasi, industrialisasi, dan penguatan ekonomi rakyat yang berkelanjutan.

IV.2 Risiko Distorsi Persaingan Akibat Intervensi Negara

Intervensi pemerintah dalam pasar merupakan salah satu isu sentral dalam ekonomi pembangunan dan kebijakan persaingan usaha. Pada satu sisi, intervensi negara diperlukan untuk mengatasi berbagai bentuk kegagalan pasar (*market failures*) yang dapat menghambat efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, intervensi yang berlebihan berpotensi mengurangi dinamika persaingan, menciptakan distorsi pasar, dan menghambat inovasi. Oleh karena itu, tantangan utama kebijakan ekonomi modern bukanlah menentukan apakah negara perlu melakukan intervensi atau tidak, melainkan bagaimana merancang intervensi yang mampu memperbaiki kegagalan pasar tanpa menggantikan mekanisme pasar itu sendiri. Dalam perspektif ini, kebijakan publik seharusnya berfungsi untuk melengkapi (*complement*) dan memperkuat pasar, bukan menggantikannya.

IV.2.1 Mengatasi Kegagalan Pasar

Salah satu alasan utama intervensi pemerintah adalah keberadaan eksternalitas dan barang publik. Dalam kasus eksternalitas negatif seperti polusi, pasar sering kali gagal mencerminkan seluruh biaya sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah dapat menggunakan berbagai instrumen seperti pajak, subsidi, standar lingkungan, maupun mekanisme perizinan guna menyelaraskan kepentingan privat dengan kesejahteraan sosial yang lebih luas (Dowding & Taylor, 2020; Syata, 2026).

Intervensi juga diperlukan ketika terjadi informasi asimetris antara pelaku pasar. Ketidakseimbangan informasi antara produsen dan konsumen dapat mengurangi efisiensi pasar dan menimbulkan praktik yang merugikan konsumen. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah memiliki peran penting melalui pengaturan transparansi, perlindungan konsumen, serta penyediaan informasi yang memadai agar transaksi ekonomi berlangsung secara adil dan efisien (Gillespie, 2019).

Selain itu, intervensi negara sering kali dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar. Praktik monopoli, kartel, maupun bentuk-bentuk persaingan tidak sehat lainnya dapat mengurangi efisiensi ekonomi dan merugikan konsumen. Oleh karena itu, kebijakan persaingan dan penegakan hukum antimonopoli menjadi instrumen penting untuk menjaga struktur pasar yang kompetitif dan terbuka (OECD, 2024; Syata, 2026).

IV.2.2 Strategi Intervensi yang Optimal

Literatur ekonomi menunjukkan bahwa intervensi pemerintah yang efektif umumnya bersifat selektif dan proporsional. Dalam kondisi krisis, misalnya, pemerintah dapat melakukan tindakan untuk memulihkan stabilitas pasar dengan menangani sumber-sumber risiko yang paling besar, tanpa harus mengambil alih seluruh fungsi pasar. Pendekatan ini memungkinkan pemulihan kepercayaan pasar sekaligus mempertahankan mekanisme kompetitif yang menjadi sumber efisiensi ekonomi (Tirole, 2012).

Intervensi juga dapat dilakukan melalui penciptaan lingkungan regulasi yang mendukung persaingan. Pemerintah berperan dalam membangun kerangka hukum dan kelembagaan yang mampu mencegah praktik anti-persaingan, melindungi hak kepemilikan, serta memberikan kepastian usaha bagi pelaku ekonomi. Dalam beberapa sektor, negara bahkan dapat bertindak sebagai pembeli atau penyedia layanan tertentu untuk memperbaiki kegagalan pasar, sepanjang tindakan tersebut tidak menciptakan distorsi yang menghambat persaingan (OECD, 2024).

Di era globalisasi, efektivitas intervensi pemerintah juga semakin dipengaruhi oleh kerja sama internasional. Banyak permasalahan ekonomi modern, seperti perdagangan internasional, perubahan iklim, dan ekonomi digital, melampaui batas yurisdiksi nasional. Oleh karena itu, koordinasi antarnegara menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan domestik tidak menimbulkan distorsi yang merugikan pasar global maupun menghambat daya saing nasional (Deardorff, 2000).

IV.2.3 Risiko dan Tantangan Intervensi

Meskipun memiliki tujuan yang baik, intervensi pemerintah juga mengandung risiko. Kebijakan yang dirancang secara kurang tepat dapat menimbulkan distorsi pasar, mempertahankan struktur ekonomi yang tidak efisien, dan mengurangi insentif bagi pelaku usaha untuk berinovasi. Oleh karena itu, setiap intervensi perlu didasarkan pada analisis yang objektif serta mempertimbangkan dampaknya terhadap struktur pasar dan dinamika persaingan (Röhl & Rusche, 2020).

Selain kegagalan pasar, literatur ekonomi juga mengenal konsep *government failure*, yaitu kondisi ketika intervensi pemerintah justru menghasilkan hasil yang kurang efisien dibandingkan mekanisme pasar. Risiko ini dapat muncul akibat keterbatasan informasi, pengaruh kelompok kepentingan, maupun desain kebijakan yang tidak tepat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan *comparative institutional analysis* untuk menilai apakah intervensi pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya dan risiko yang ditimbulkannya (Dowding & Taylor, 2020).

Dalam konteks tersebut, kebijakan pemerintah seharusnya diarahkan untuk mendukung proses persaingan, bukan melindungi pelaku usaha tertentu. Tujuan utama intervensi adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaku usaha bersaing secara adil, mendorong inovasi, serta mempermudah masuknya pelaku usaha baru ke pasar sehingga konsentrasi kekuatan ekonomi dapat diminimalkan (Kay, 2010).

Dengan demikian, keberhasilan intervensi pemerintah tidak diukur dari seberapa besar keterlibatan negara dalam pasar, melainkan dari kemampuannya memperbaiki kegagalan pasar tanpa mengurangi manfaat persaingan. Dalam perspektif Sumitronomics, negara memiliki peran

strategis dalam mendorong industrialisasi, hilirisasi, dan penguatan ekonomi rakyat. Namun, peran tersebut harus dijalankan dengan tetap menjaga prinsip *competitive neutrality*, sehingga intervensi negara mampu memperkuat efisiensi pasar, memperluas kesempatan berusaha, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Meskipun intervensi negara sering kali diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan, kebijakan yang tidak dirancang secara hati-hati dapat menimbulkan distorsi terhadap proses persaingan. Dalam perspektif ekonomi persaingan, pasar yang sehat tidak hanya ditentukan oleh banyaknya pelaku usaha, tetapi juga oleh adanya kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha untuk bersaing berdasarkan efisiensi, inovasi, dan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Ketika pemerintah mulai menentukan secara administratif hasil-hasil tertentu dalam pasar, terdapat risiko bahwa proses persaingan tidak lagi ditentukan oleh mekanisme pasar, melainkan oleh keputusan regulasi.

Salah satu bentuk potensi distorsi tersebut muncul ketika negara atau entitas yang memperoleh dukungan negara diberikan peran yang sangat dominan dalam suatu rantai nilai industri. Misalnya, wacana pengelolaan ekspor komoditas tertentu melalui satu pintu yang melibatkan entitas seperti PT Danantara Sumber Daya Indonesia bertujuan meningkatkan daya tawar nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global. Namun demikian, pendekatan semacam ini juga memunculkan pertanyaan mengenai akses pasar bagi pelaku usaha lain, mekanisme pembentukan harga, serta potensi berkurangnya kompetisi di tingkat eksportir dan pelaku industri yang selama ini beroperasi secara independen. Oleh karena itu, kebijakan yang mengarah pada konsolidasi aktivitas ekonomi perlu memperhatikan dampaknya terhadap struktur pasar dan dinamika persaingan dalam jangka panjang.

Contoh lain dapat ditemukan pada sektor ekonomi digital, khususnya layanan transportasi berbasis aplikasi (*ride-hailing*). Dalam beberapa waktu terakhir muncul usulan agar komisi atau potongan yang diterima perusahaan platform dari mitra pengemudi dibatasi hingga sekitar 8 persen. Tujuan kebijakan tersebut pada dasarnya adalah meningkatkan pendapatan pengemudi dan memperbaiki kesejahteraan pekerja dalam ekosistem digital. Namun dari perspektif persaingan usaha, pengaturan margin atau pembagian pendapatan secara administratif perlu dianalisis secara hati-hati karena berpotensi memengaruhi model bisnis, strategi investasi, dan dinamika kompetisi antarplatform. Penetapan tingkat keuntungan atau komisi tertentu oleh regulator dapat mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam menentukan strategi bisnisnya serta berpotensi mengurangi insentif untuk berinvestasi pada inovasi, pengembangan teknologi, maupun peningkatan kualitas layanan. Dalam jangka panjang, intervensi semacam ini juga dapat memengaruhi keputusan masuk atau keluarnya pelaku usaha dari pasar.

Pada tingkat daerah, potensi distorsi persaingan juga dapat muncul melalui kebijakan yang membatasi pelaku usaha tertentu untuk tujuan afirmatif. Misalnya, penutupan atau pembatasan gerai ritel modern yang telah beroperasi secara legal dengan alasan perlindungan ekonomi lokal atau penguatan koperasi dapat menimbulkan konsekuensi terhadap kepastian berusaha, pilihan konsumen, dan efisiensi distribusi barang. Meskipun tujuan perlindungan UMKM dan ekonomi rakyat merupakan tujuan yang sah, implementasinya perlu dilakukan secara proporsional dan tidak menimbulkan diskriminasi terhadap pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan perizinan dan beroperasi secara sah.

Berbagai contoh tersebut menunjukkan bahwa tantangan kebijakan ekonomi modern tidak terletak pada pilihan antara negara atau pasar, melainkan pada bagaimana merancang intervensi negara yang mampu mencapai tujuan pembangunan tanpa menghilangkan manfaat persaingan. Dalam kerangka Sumitronomics, negara memang perlu hadir untuk mempercepat industrialisasi, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan nilai tambah nasional. Namun, intervensi tersebut sebaiknya difokuskan pada penciptaan kapasitas, pengurangan hambatan usaha, dan peningkatan daya saing, bukan pada pengaturan hasil akhir pasar secara langsung. Dengan demikian, tujuan pembangunan ekonomi dapat tercapai tanpa mengorbankan efisiensi, inovasi, dan dinamika persaingan yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

IV.3 *Competitive Neutrality* dalam Perspektif Sumitronomics

Dalam perspektif Sumitronomics, negara memiliki peran penting dalam mendorong transformasi ekonomi, industrialisasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, peran tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan mekanisme pasar, melainkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan pasar bekerja secara lebih efisien, kompetitif, dan inklusif. Negara berfungsi sebagai pembentuk institusi, penyedia infrastruktur, pengarah kebijakan strategis, serta penjamin kepastian hukum yang diperlukan agar kegiatan ekonomi dapat berkembang secara sehat. Dengan kata lain, negara membangun pasar (*market-building state*), bukan menggantikan pasar (*market-replacing state*).

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Sumitro Djojohadikusumo yang menekankan pentingnya deregulasi, efisiensi ekonomi, dan penghapusan praktik monopoli sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Sumitro mengakui perlunya campur tangan negara dalam sektor-sektor strategis untuk mempercepat industrialisasi dan memperkuat kapasitas ekonomi nasional. Namun, intervensi tersebut harus diarahkan untuk memperluas kesempatan berusaha dan meningkatkan daya saing, bukan menciptakan ketergantungan atau perlindungan yang berlebihan terhadap pelaku usaha tertentu. Negara perlu memastikan bahwa seluruh pelaku usaha memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pasar dan memperoleh manfaat dari pembangunan ekonomi.

Dalam konteks tersebut, prinsip *competitive neutrality* menjadi penting sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan ekonomi. Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan pemerintah seharusnya tidak memberikan keuntungan kompetitif yang tidak proporsional kepada pelaku usaha tertentu, baik perusahaan milik negara, koperasi, maupun pelaku usaha swasta. Tujuan kebijakan publik seharusnya difokuskan pada penciptaan lingkungan usaha yang kondusif, peningkatan kapasitas pelaku ekonomi, serta pengurangan hambatan masuk ke pasar. Dengan demikian, keberhasilan suatu pelaku usaha ditentukan oleh efisiensi, inovasi, dan kemampuan bersaing, bukan semata-mata oleh kedekatan dengan kebijakan atau perlindungan pemerintah.

Dari perspektif ini, negara juga perlu berhati-hati dalam praktik *picking winners*, yaitu kecenderungan memilih atau memberikan perlakuan istimewa kepada pelaku usaha tertentu dengan harapan dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Meskipun kebijakan afirmatif sering kali diperlukan untuk mendukung sektor strategis atau kelompok usaha tertentu, intervensi yang berlebihan berpotensi mengurangi dinamika persaingan, menciptakan hambatan bagi

pelaku usaha lain, dan menimbulkan inefisiensi dalam jangka panjang. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan lebih banyak ditentukan oleh kemampuan negara menciptakan pasar yang kompetitif dan terbuka daripada menentukan secara administratif siapa yang harus menjadi pemenang dalam pasar tersebut.

Oleh karena itu, dalam kerangka HI-PER, peran negara idealnya diarahkan untuk memperkuat fondasi pasar melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, penyediaan akses pembiayaan, dan perbaikan iklim investasi. Negara perlu menjadi fasilitator yang memperluas kesempatan berusaha bagi seluruh pelaku ekonomi, mulai dari industri besar hingga UMKM, sehingga proses hilirisasi, industrialisasi, dan penguatan ekonomi rakyat dapat berlangsung dalam struktur pasar yang kompetitif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan pembangunan ekonomi nasional dapat dicapai tanpa mengorbankan prinsip persaingan usaha yang sehat dan kesempatan berusaha yang setara bagi seluruh pelaku ekonomi.

V. KESIMPULAN

Agenda Hilirisasi–Industrialisasi dan Penguatan Ekonomi Rakyat (HI-PER) merupakan strategi penting untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju. Hilirisasi sumber daya alam, pengembangan industri nasional, dan penguatan kapasitas ekonomi rakyat memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya saing, serta mengurangi ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah. Namun demikian, keberhasilan agenda tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi, kapasitas produksi, atau peran negara dalam pembangunan ekonomi, melainkan juga oleh kualitas struktur pasar yang terbentuk selama proses transformasi tersebut berlangsung.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa industrialisasi yang berkelanjutan membutuhkan pasar yang kompetitif, terbuka, dan inklusif. Hilirisasi yang hanya menghasilkan konsentrasi penguasaan sumber daya dan industri pada sejumlah kecil pelaku usaha berisiko mengurangi dinamika pasar dan mempersempit kesempatan berusaha. Demikian pula, industrialisasi yang tidak memberikan ruang bagi pelaku usaha baru, UMKM, dan koperasi berpotensi menghasilkan pertumbuhan yang tidak inklusif. Oleh karena itu, persaingan usaha yang sehat perlu dipandang sebagai bagian integral dari strategi pembangunan, bukan sekadar instrumen hukum untuk mengawasi perilaku pelaku usaha.

Dalam perspektif Sumitronomics, efisiensi ekonomi, deregulasi, dan penghapusan praktik monopoli merupakan fondasi penting bagi pembangunan nasional. Sumitro Djojohadikusumo menempatkan persaingan usaha sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas, memperlancar distribusi, memperkuat daya saing, dan memperluas kesempatan berusaha. Pemikiran tersebut tetap relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer, termasuk hilirisasi, digitalisasi, konsentrasi pasar, dan meningkatnya peran negara dalam aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, semakin besarnya keterlibatan negara dalam proses hilirisasi dan industrialisasi menuntut perhatian yang lebih besar terhadap prinsip *competitive neutrality*. Negara memiliki

peran penting sebagai regulator, fasilitator investasi, dan dalam kondisi tertentu sebagai pelaku usaha. Namun, intervensi negara harus diarahkan untuk memperkuat mekanisme pasar, mengatasi kegagalan pasar, dan memperluas kesempatan berusaha, bukan menggantikan proses persaingan atau menentukan pemenang pasar secara administratif. Keberhasilan kebijakan ekonomi pada akhirnya tidak diukur dari seberapa besar peran negara dalam pasar, tetapi dari kemampuannya menciptakan lingkungan usaha yang mendorong inovasi, efisiensi, dan partisipasi yang setara bagi seluruh pelaku ekonomi.

Dengan demikian, persaingan usaha perlu ditempatkan sebagai isu lintas sektor (*cross-cutting issue*) dalam agenda HI-PER. Setiap kebijakan hilirisasi, industrialisasi, ekonomi digital, maupun penguatan ekonomi rakyat perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap struktur pasar, kesempatan berusaha, dan dinamika persaingan. Hanya dengan menjaga keseimbangan antara intervensi negara dan mekanisme pasar, Indonesia dapat mewujudkan transformasi ekonomi yang tidak hanya menghasilkan pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga efisien, inklusif, berkelanjutan, dan mampu menciptakan kemakmuran yang lebih luas bagi seluruh masyarakat.

VI. REKOMENDASI KEBIJAKAN

VI.1 Mengintegrasikan Perspektif Persaingan Usaha dalam Agenda HI-PER

Pemerintah perlu menempatkan persaingan usaha sebagai salah satu pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan hilirisasi, industrialisasi, dan penguatan ekonomi rakyat. Keberhasilan transformasi ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi dan peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan menciptakan struktur pasar yang kompetitif, terbuka, dan inklusif. Oleh karena itu, setiap kebijakan strategis perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap struktur pasar, akses pelaku usaha baru, dan dinamika persaingan jangka panjang.

VI.2 Mendorong Hilirisasi yang Kompetitif dan Inklusif

Kebijakan hilirisasi perlu diarahkan untuk menciptakan ekosistem industri yang mampu melibatkan lebih banyak pelaku usaha dalam rantai nilai nasional. Akses terhadap bahan baku, infrastruktur, teknologi, dan pasar perlu dijaga agar tidak terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa agenda hilirisasi tidak hanya menghasilkan peningkatan nilai tambah, tetapi juga memperluas kesempatan berusaha bagi industri kecil dan menengah, pelaku usaha baru, serta industri turunan yang memiliki potensi inovasi dan penciptaan lapangan kerja.

VI.3 Memperkuat Persaingan dalam Ekonomi Digital

Transformasi digital perlu disertai kebijakan yang mampu menjaga keterbukaan pasar dan mencegah konsentrasi ekonomi yang berlebihan. Pengawasan terhadap platform digital perlu diarahkan untuk memastikan adanya kesempatan yang setara bagi UMKM, pelaku usaha baru, dan inovator untuk mengakses pasar digital. Pada saat yang sama, kebijakan pemerintah hendaknya tidak menghambat inovasi maupun investasi teknologi yang menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi digital.

VI.4 Menjaga *Competitive Neutrality* dalam Kebijakan Ekonomi

Dalam menjalankan agenda pembangunan ekonomi, negara perlu menjaga keseimbangan antara intervensi kebijakan dan mekanisme pasar. Negara memiliki peran penting sebagai regulator, fasilitator investasi, dan dalam kondisi tertentu sebagai pelaku usaha melalui BUMN. Namun demikian, kebijakan publik perlu dirancang berdasarkan prinsip *competitive neutrality*, sehingga tidak menciptakan keuntungan kompetitif yang tidak proporsional bagi pelaku usaha tertentu maupun menimbulkan hambatan yang tidak perlu bagi pelaku usaha lainnya. Intervensi negara sebaiknya difokuskan pada penguatan kapasitas ekonomi, perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan pengurangan hambatan usaha, bukan pada penentuan hasil pasar secara administratif.

VI.5 Mendorong Pengembangan Kajian Persaingan Usaha sebagai Isu Lintas Sektor

ISEI, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan komunitas akademik perlu memperkuat kajian mengenai hubungan antara persaingan usaha, hilirisasi, industrialisasi, ekonomi digital, dan penguatan ekonomi rakyat. Persaingan usaha tidak lagi dapat dipandang sebagai isu sektoral yang terbatas pada hukum persaingan, tetapi telah menjadi isu lintas sektor (*cross-cutting issue*) yang memengaruhi kualitas pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

VII. PENUTUP

Agenda Hilirisasi–Industrialisasi dan Penguatan Ekonomi Rakyat (HI-PER) akan mencapai hasil yang optimal apabila didukung oleh struktur pasar yang kompetitif, terbuka, dan inklusif. Dalam konteks tersebut, persaingan usaha yang sehat tidak boleh dipandang sebagai penghambat pembangunan, melainkan sebagai prasyarat untuk memastikan bahwa manfaat hilirisasi, industrialisasi, dan transformasi ekonomi dapat dinikmati secara lebih luas, berkelanjutan, dan berkeadilan.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

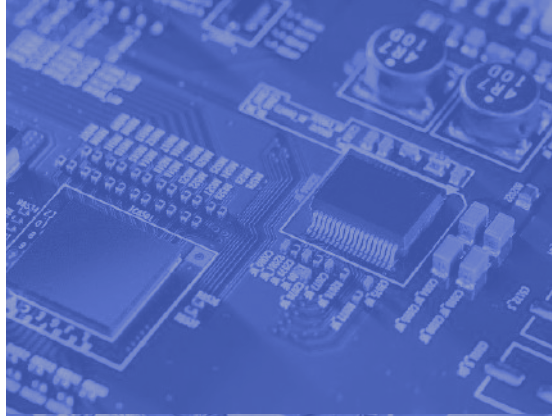
- Babayev, J., & Rzali, S. (2025). Competition Policy and National Interests. Dalam *The Age of Economic Nationalism: The End of Globalization?* Özgür Yayınları. <https://doi.org/10.58830/ozgur.pub911.c3779>
- Blonigen, B. A. (2016). Industrial Policy and Downstream Export Performance. *The Economic Journal*, 126(595), 1635–1659. <https://doi.org/10.1111/econj.12223>
- Challoumis, C., & Eriotis, N. (2024). THE ROLE OF COMPETITION IN PRIVATE ENTERPRISE AND ITS IMPLICATIONS FOR MARKET EFFICIENCY. *Economics and Finance*, 27–34. <https://doi.org/10.51586/2754-6209.2024.12.3.27.34>
- Deardorff, A. V. (2000). The Economics of Government Market Intervention and Its International Dimension. *RSIE Discussion Papers*, (455), 1–23.
- Dowding, K., & Taylor, B. R. (2020). *Markets, Market Failure and the Role of Government* (hlm. 17–45). https://doi.org/10.1007/978-3-030-19707-0_2

- Farshi, E. (2023). *Positional Dynamics in Competition: Introducing Targeted Position Games*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3073699/v1>
- Ferrer, J. (2009). Competitividad Sistémica. Niveles analíticos para el fortalecimiento de sectores de actividad económica. *Revista de Ciencias Sociales*, 11(1). <https://doi.org/10.31876/racs.v11i1.25279>
- Gillespie, A. (2019). Do markets work? Dalam *Economics for Business*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/hebz/9780198786030.003.0007>
- Kay, J. (2010). THE FUTURE OF MARKETS. *Economic Affairs*, 30(1), 38–42. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0270.2009.01971.x>
- Lestari, Y. S., Kresna, M., Endah, N. H., Atmaja, N. N., Irwanto, E. P., & Pratistha, B. (2025). Policy Strategy to Stimulate Indonesia's Palm Oil Downstream Industries. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 6(2), 214–224. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v6i2.726>
- Makris, S. (2025). A Smithian Political Economy Approach for the Competition Law of the 21st Century. *The Modern Law Review*, 88(4), 712–768. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12948>
- Marhati, M., Hasnawati, H., Masriadi, M., Yunus, A. M., & Muslimin, M. (2025). Sustainable Economic Development through Capture Fisheries Downstreaming in Bone Regency. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 7(2), 40–50. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v7i2.6499>
- Möschel, W. (2001). Competition as a Basic Element of the Social Market Economy. *European Business Organization Law Review*, 2(3–4), 713–721. <https://doi.org/10.1017/S1566752900000707>
- Nowag, J. (2025). The economics of competition and sustainability: good and bad competition. Dalam *Global Antitrust and Sustainability* (hlm. 29–74). Oxford University Press/Oxford. <https://doi.org/10.1093/9780191955013.003.0002>
- OECD. (2024). *Competitive Neutrality Toolkit*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/3247ba44-en>
- Palacio-Morena, J. I., Mungaray-Lagarda, A., Salgado-Beltrán, L., & Méndez-León, J. R. (2025). Full Competition and Innovation. *Sustainability*, 17(2), 527. <https://doi.org/10.3390/su17020527>
- Permadi, E., & Hanita, M. (2025). SUSTAINABLE STRATEGIES IN ENERGY RESILIENCE AND DOWNSTREAM DEVELOPMENT: DOWNSTREAMING AND SUSTAINABILITY ARE A MUST. *Proceeding Jakarta Geopolitical Forum*, 9, 128–135. <https://doi.org/10.55960/jgf.v9i1.304>
- Rahmawati, N. D., & Swara, E. (2025). Indonesia's Nickel Export Ban: Between Industrial Downstreaming and International Trade Disputes. *Fortiori Law Journal*, 5(01), 19–36. <https://doi.org/10.47200/flj.v5i01.3051>
- Röhl, K.-H., & Rusche, C. (2020). Corona-Krise: Staatsbeteiligungen bleiben eine problematische Intervention in den Markt. *Wirtschaftsdienst*, 100(12), 945–951. <https://doi.org/10.1007/s10273-020-2802-4>

- Sargu, L., & Timus, A. (2025). The link between theories of competition and the implication for economic policy under the conditions of economic resilience. *Universitas Europaea: Towards a Knowledge Based Society Through Europeanisation and Globalisation: International Conference Proceedings, Vol 1*, 261–266. <https://doi.org/10.54481/uekbs2024.v1.45>
- Shahin, F., & Kefeli, Z. (2023). NEW PRODUCT DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL COMPETITIVENESS IN INDUSTRIAL SECTORS :A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *Humanitarian and Natural Sciences Journal*, 4(8). <https://doi.org/10.53796/hnsj488>
- Syata, W. M. (2026). Intervensi yang Tepat: Fungsi Pemerintah Menangani Kegagalan Pasar. *Journal of Literature Review*, 2(1), 35–43. <https://doi.org/10.63822/mfbejd96>
- Tan, K. T. (2025). DOWNSTREAMING TOWARDS INDONESIA EMAS. *Proceeding Jakarta Geopolitical Forum*, 9, 43–49. <https://doi.org/10.55960/jgf.v9i1.291>
- Tedesco, M. S., & Marquez, G. (2025). *Rethinking Competition as a Non-Beneficial Mechanism in Economic Systems*.
- Tirole, J. (2012). Overcoming Adverse Selection: How Public Intervention Can Restore Market Functioning. *American Economic Review*, 102(1), 29–59. <https://doi.org/10.1257/aer.102.1.29>
- Vidican, R. D., & Hemiş, R. A. (2023). CONSIDERATIONS REGARDING THE CONCEPT OF COMPETITION. *AGORA INTERNATIONAL JOURNAL OF JURIDICAL SCIENCES*, 17(2), 184–194. <https://doi.org/10.15837/aijjs.v17i2.6484>



Bustanul Arifin



Hilirisasi Pertanian dan Kehutanan untuk Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Rakyat

Prof. Dr. Bustanul Arifin

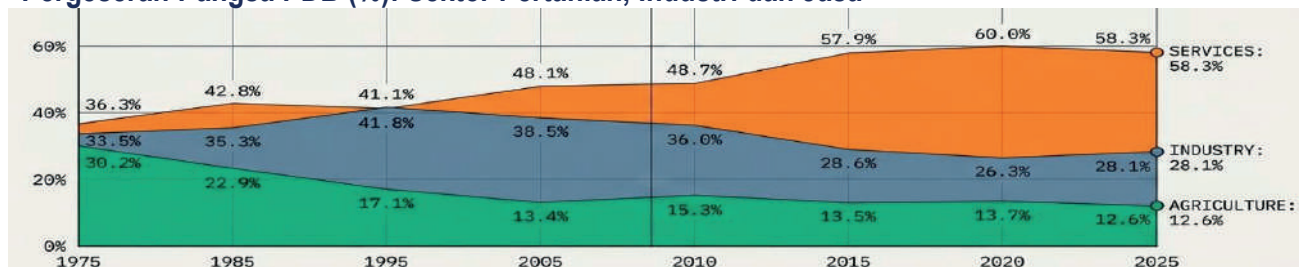
barifin@uwalumni.com

Koordinator FG Pertanian dan Kehutanan PP ISEI
Guru Besar UNILA, Dosen Pascasarjana SB-IPB

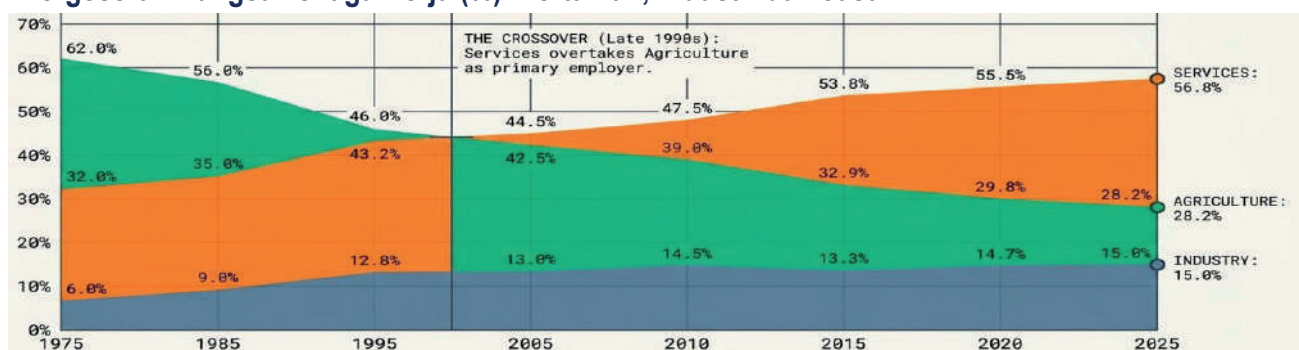
Focus Group for Solutions (FGS) Road to Sidang Pleno ISEI Bogor, Jumat 19 Juni 2026 di Jakarta

Transformasi Struktural Perekonomian Indonesia: **Tidak Mulus**

Pergeseran Pangsa PDB (%): Sektor Pertanian, Industri dan Jasa



Pergeseran Pangsa Tenaga Kerja (%): Pertanian, Industri dan Jasa



Sumber: BPS, terakhir 2026

Pertumbuhan Ekonomi & Pertanian Indonesia: Sedang

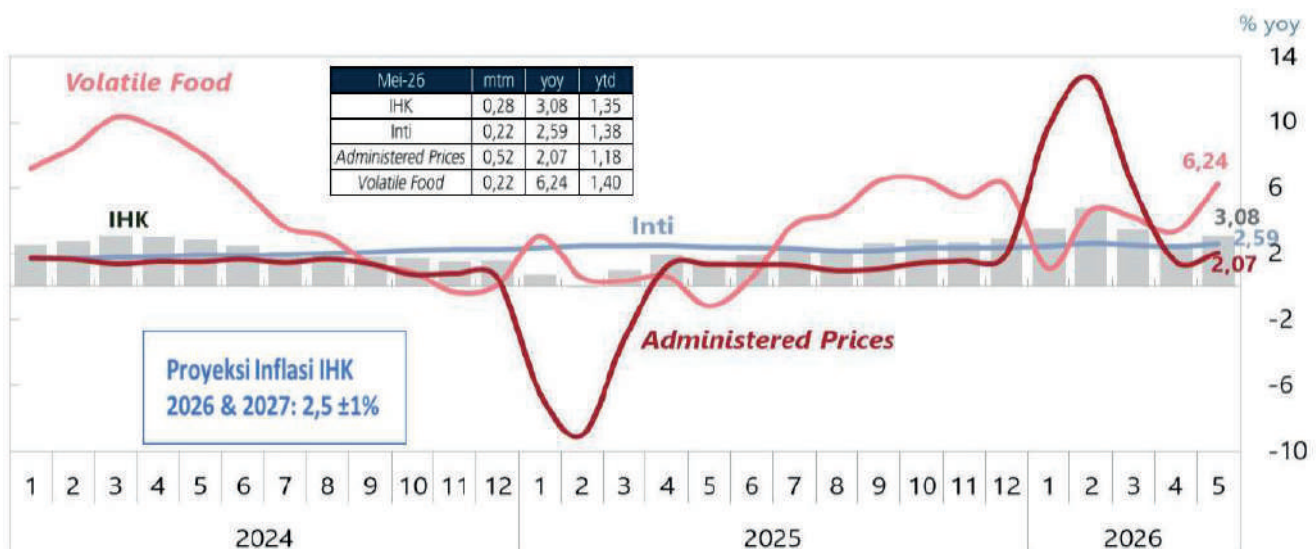
- Pertumbuhan sektor pertanian 2025 cukup tinggi 5,33%, tapi tidak stabil, sehingga cukup sulit untuk diandalkan sebagai pengganda pendapatan dan pengganda tenaga kerja.
- Nilai tambah di sektor pertanian cukup rendah, karena diversifikasi ekspor juga rendah. Penciptaan lapangan kerja di sektor non-pertanian juga rendah, karena linkages lemah.

Deskripsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sektor Pertanian	3.89	3.61	1.75	1.84	2.25	1.30	0.67	5.33
1. Pertanian dan Jasa	3.66	3.31	2.11	1.08	2.33	0.18	0.82	5.74
a. Tanaman Pangan	1.46	-1.73	3.54	-1.56	0.08	-3.88	-0.21	9.94
b. Hortikultura	6.90	5.53	4.17	0.56	4.22	-0.31	0.85	3.57
c. Perkebunan	3.83	4.56	1.33	3.52	1.64	1.73	0.67	2.95
d. Peternakan	4.61	7.78	-0.33	0.34	6.24	3.71	2.78	7.78
e. Jasa-Jasa Pertanian	3.12	3.17	1.60	1.32	2.65	0.17	0.85	6.13
2. Kehutanan	2.78	0.37	-0.03	0.06	-1.26	2.61	-2.06	-0.29
3. Perikanan	5.19	5.73	0.73	5.45	2.79	5.49	0.68	4.95
Ekonomi Indonesian	5.17	5.02	-2.07	3.69	5.31	5.05	5.03	5.11

Sumber: BPS, 5 Februari 2026

Laju Inflasi Indonesia Mei 2026 3,08 (yoy), di atas 2,5±1

- Andil inflasi inti: Minyak goreng, telepon seluler, laptop, pelumas, nasi dengan lauk, komponen servis
- Andil inflasi AP (harga diatur Pemerintah): BBM, tarif tiket pesawat, rokok dan solar
- Andil inflasi VF (pangan bergejolak): cabai merah, bawang merah, tomat, beras, dan sawi hijau.



Sumber: BPS, Juni 2026

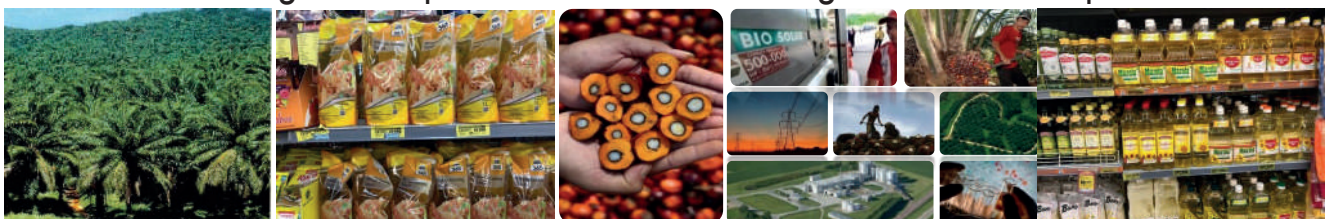
Roadmap 2045--Strategi Hilirisasi Industri Hasil Perkebunan

	Lokus Prioritas	Diversifikasi Industri Produk Hilir Andalan	Debottlenecking Hulu, Kontinuitas bahan baku	Roadmap menuju 2045
Kelapa Sawit	Sumut, Sumsel, Jatim	Fungsional (Oleokimia <i>fatty acid</i> , Vit A E, dll)	Reforma total replanting (PSR), legal, korporatisasi	KEK Sei Mangke, Tanjung Carat, Gresik, Mojokerto
	Riau, Kalbar Kaltim, Kalsel	Kemurgi (Biodiesel, bioavtur, bensa, dll)	Kemitraan sawit rakyat, swasta besar dan negara	KI Dumai, KI Ketapang, KEK MBTK, KI Batulicin
Kelapa Dalam	Jatim, Sulut	Fungsional (Medium-chain triglyceride, flour)	Peningkatan produktivitas kelapa genjah (hibrida)	KEK Gresik, KEK Bitung
	Riau, Kalbar	Karbon aktif	Dukungan infrastruktur, teknologi budidaya baik	Kuala Enok,
Karet Alam	Karawang (Dunlop Tyre)	Ban pesawat, karet alam nyaris wajib	Dominasi karet rakyat, perlu korporatisasi	Efisiensi produk hilir dan rantai nilai karet alam
	Karawang (Hyundai)	Ban mobil listrik kapasitas 12.000/th	Perlu GAP, bibit klonal, peningkatan produktivitas	Efisiensi produk hilir dan rantai nilai karet alam

Sumber: Diolah dari INDEF (2022) dan BKPM (2024)

Hilirisasi Perkebunan: Menuju Industri Berkelanjutan

- Indonesia produsen minyak sawit terbesar di dunia, 48% total produksi. Luas areal kelapa sawit 2025: 17,1 juta ha, dengan produksi CPO: 49,4 juta ton.
- Sertifikasi berkelanjutan sawit: RSPO, ISCC, ISPO, perlu EDUR compliance?
- Kebijakan biofuel B40 menaikkan harga CPO dan migor. TBS juga ikut naik. Apa yang akan terjadi dengan kebijakan B50 per 1 Juli 2026 serta PT DSI sebagai pengelola ekspor CPO? Bagaimana stabilitas harga TBS petani?
- Hilirisasi kelapa dalam dan karet alam tidak hanya diharapkan menjadi nilai tambah produk hilir, tapi peningkatan kesejahteraan petani di sektor hulu?
- BPDP menangani kelapa dalam dan kakao. Bagaimana skema pendanaan?



Roadmap 2045--Strategi Hilirisasi Industri Kehutanan

	Lokus Prioritas	Diversifikasi Industri Produk Hilir Andalan	Debottlenecking Hulu, Kontinuitas bahan baku	Roadmap menuju 2045
Industri Kayu Plywood	Jatim, Jateng, Kaltim	Lemari, Rak buku, Kitchen-set bedroom-set	Kejelasan KEK Kehutanan Kawasan Industri Hijau, Insentif premium plywood	KI Gresik, KI Cilacap, KIE (Kaltim-Industrial Estate)
	Kalsel, Sulsel, Jabar, Kaltara	Lemari, Rak buku, Kitchen-set, dll	Dukungan Investment Authority SWF Danantara,	Tanah Bumbu, KI Palopo, KI Cikembar, Bulungan
Industri Kayu Wood Pellet	Jatim, Jateng, Jambi	Pembangkit listrik, Pemanas bangunan	Perbaikan iklim investasi, Optimalisasi SDA	KI Cikembar, KI Cilacap,
	Gorontalo, Kalteng, Kalbar	Pemanas bangunan perumahan & komersial	Dukungan khusus bagi Sustainable development	Gorontalo, Ketapang,
Industri Getah Pinus	Jateng, Jabar	Pine chemical, Rosin ester, Maleic ester	Fasilitasi produksi getah, derivative gondorukem	Perhutani Pine-Chemical Industry, KITB Batang
	Aceh, Sulbar	Pine chemical, Rosin ester, Maleic ester	Fasilitasi jalan negara, Pengolahan lanjutan	PLTMH Arun II, Perluasan PLN Polman

Sumber: Diolah dari INDEF (2022) dan BKPM (2024)

Hilirisasi Perlu Peningkatan Produktivitas di Hulu: Struktural?

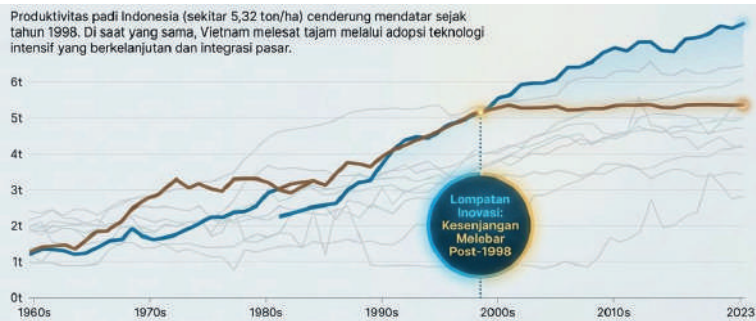
- Hilirisasi atau peningkatan nilai tambah produk pertanian memerlukan strategi huluisasi yang serius
- Peningkatan produktivitas sawit dan padi, dengan intensifikasi berkelanjutan dan merata sesuai daerah
- Hilirisasi produk pertanian memerlukan manajemen stok yang kredibel. Tidak ada gunanya menumpuk stok di gudang Bulog hingga 5 juta ton, jika distribusi beras tidak lancar dan pemicu laju inflasi nasional
- Hilirisasi mendorong pelaku di hilir untuk meningkatkan kualitas produk, jika perlu hingga high-end, untuk menghidupkan ekonomi rakyat, UMKM di daerah dan penggilingan skala kecil dan menengah.

Produktivitas Sawit: Cenderung Turun

	Petani Gurem	Perkebunan Swasta	Potensi Maksimal
Produktivitas TBS	12,5 ton/ha	17,5 ton/ha	30 ton/ha
Produktivitas CPO	3,43 ton/ha	4,45 ton/ha	8 ton/ha

Sumber: GAPKI, 2024

Produktivitas Padi Indonesia: Levelling-off (Mentok?)



Sumber: FAOSTAT, 2025

Pembangunan Industri Agromaritim Indonesia

Bustanul Arifin
barifin@uwalumni.com

**Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian UNILA
Dewan Komisioner dan Ekonom Senior INDEF
dan Koordinator FG Pertanian dan Kehutanan**

Jakarta, 31 Juli 2026

I. PENDAHULUAN

Perekonomi Indonesia ditargetkan tumbuh tinggi 8 persen pada akhir 2029 untuk menghindari jebakan pendapatan menengah (*middle income trap*=MIT) dan Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Upaya mencapai Indonesia Platinum 2045 atau 100 Tahun Indonesia Merdeka – alias lebih dari sekadar Indonesia Emas – terlihat cukup berat karena tantangan internal dan eksternal juga berubah cepat dan tidak mudah untuk diprediksi akurat.

Indonesia telah mengalami *middle income trap* selama 33 tahun, tepatnya sejak 1993 dan terus berlangsung hingga sekarang. Berdasarkan klasifikasi kelompok pendapatan Bank Dunia, Indonesia naik kelas pertama kali masuk kategori negara berpendapatan menengah-bawah (*lower-middle income*) sejak 1993, walau terdisrupsi Krisis Ekonomi Asia pada 1998. Kemudian, Indonesia naik kelas lagi dan masuk negara berpendapatan menengah atas (*upper-middle income*) sejak 2019, walau terdisrupsi pada 2020 karena Covid-19. Status Indonesia dalam kategori negara kelas menengah ini tampaknya masih cukup lama, karena standar pendapatan negara maju terus naik, hingga setara US\$ 14.000 per kapita.

Pada tahun 2026 Indonesia kembali berada pada kelompok pendapatan menengah atas, karena produk domestik bruto (PDB) per kapita mencapai US\$ 5.059,6 atau berada pada rentang US\$ 4.496 – 13.935 per kapita. Untuk mencapai pendapatan tinggi US\$ 14.000 per kapita atau menjadi negara maju, Indonesia perlu mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, setidaknya agar mampu keluar dari jebakan pendapatan menengah. Dengan kondisi perekonomian saat ini, pekerjaan rumah untuk keluar dari *Middle Income Trap* itu jebakan pendapatan menengah ini tentu sangat besar.

Sektor industri agromaritim menjadi salah harapan untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan produk, strategi hilirisasi, atau reindustrialisasi berbasis salah satu sektor yang menjadi basis penting ekonomi Indonesia. Di sini, agromaritim dimaksudkan sebagai suatu integrasi pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas dengan sektor kelautan dan pesisir. Semangatnya adalah bahwa lautan dan daratan sebagai satu kesatuan sistem sosial, ekonomi, ekologi yang utuh, sesuai dengan falsafah Wawasan Nusantara.

Lautan bukan menjadi pemisah antar daratan atau pulau-pulau di Indonesia, tetapi menjadi penghubung aktivitas perekonomian dan masyarakat yang dinamis dan berkelanjutan. Pembangunan agromaritim mensyaratkan integrasi hulu-hilir, rantai nilai yang efisien, dan teknologi digital untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Lebih khusus lagi, industri agromaritim bervisi pemanfaatan sumberdaya pertanian dan kelautan untuk produksi pangan, pakan, energi, farmasi dll.

Artikel ini membahas pembangunan industri agromaritim Indonesia, dimulai dengan mengupas persoalan yang bersifat struktural, karena transformasi struktural perekonomian Indonesia tidak berlangsung mulus. Deindustrialisasi di Indonesia terjadi terlalu dini, sebelum pembangunan industri mampu menjadi lokomotif perekonomian. Roadmap pembangunan industri agromaritim juga akan disajikan sesuai dengan perkembangan terkini dan kebijakan yang telah mewadahnya. Penutup tulisan ini adalah perubahan kebijakan untuk mewujudkan strategi pembangunan industri agromaritim yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

II. TRANSFORMASI STRUKTURAL DAN DEINDUSTRIALISASI DINI

Transformasi struktural perekonomian merujuk pada perubahan komposisi struktur perekonomian, dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa. Intinya adalah bahwa sektor pertanian telah memainkan peran penting dalam perekonomian, meskipun pangsa PDB menurun ketika ekonomi telah tumbuh. Transformasi struktural berhubungan dengan berubahnya komposisi strategi dan prioritas pembangunan dari ekonomi yang berbasis pertanian menjadi ekonomi berbasis industri dan jasa, tanpa harus meninggalkan basis utama pembangunan sektor pertanian itu. Indonesia juga mengalami transformasi struktural perekonomian, walaupun berlangsung tidak semulus seperti dalam buku teks. Secara teknis-ekonomis, pangsa sektor pertanian terhadap produk domestik bruto total semua ekonomi pada tahap awal pembangunan cukup besar, kemudian menurun agak drastis seiring makin majunya suatu bangsa. Demikian pula, pangsa tenaga kerja yang terlibat di sektor pertanian seharusnya menurun seiring dengan penurunan pangsa sektoral tersebut. Jika penurunan ini tidak *smooth*, biasanya proses pembangunan ekonomi agak terganggu.

Tabel 1 menampilkan proses transformasi struktural, terlihat dari penurunan pangsa PDB sektor pertanian dari sekitar 23 persen pada 1985 menjadi 15,3 persen pada 2010, menjadi 13,1 persen pada 2015, dan kembali naik menjadi 13,71 persen pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2020. Proses penurunan pangsa sektor pertanian tersebut sebenarnya berlangsung cukup mulus dan tercatat 12,6 persen terhadap total PDB Indonesia 2025.

Tabel 1. Transformasi Struktural Perekonomian, 1985-2025

Uraian	1985	1995	2005	2010	2015	2020	2025
1. Pangsa PDB (%)							
Pertanian	22,9	17,1	13,4	15,3	13,5	13,7	12,6
Industri*)	35,3	41,8	38,5	36,0	28,6	26,3	28,1
Jasa	42,8	41,1	48,1	48,7	57,9	60,0	58,3
2. Pangsa Tenaga Kerja (%)							
Pertanian	56,0	46,0	42,5	39,0	32,9	29,8	28,2
Industri*)	9,0	12,8	13,0	14,5	13,3	14,7	15,0
Jasa	35,0	43,2	44,5	47,5	53,8	55,5	56,8

*) Sektor industri meliputi manufaktur dan pertambangan

Sumber: Dihitung dari data BPS (berbagai tahun)

Pangsa PDB sektor industri (kumulasi sektor manufaktur dan sektor pertambangan-penggalan) mengalami peningkatan dari 35 persen pada 1985 menjadi 41,8 persen pada tahun 1995. Pangsa sektor industri kemudian menurun sampai 38,5 persen pada 2005, sebagai dampak dari Krisis Ekonomi Asia pada 1998 yang cukup dahsyat. Indonesia mengalami deindustrialisasi terlalu dini, yang cukup sulit untuk dipulihkan kembali sampai sekarang. Pangsa sektor industri terus menurun dari 36 persen pada 2010, menurun menjadi 28,7 persen 2015 dan terus turun sampai 26,3 persen pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 dan terakhir 28,1 persen pada 2025. Pangsa PDB sektor jasa meningkat signifikan, dari 42,8 persen pada 1985, menjadi 41,1 persen

pada 1995, naik lagi menjadi 48,7 persen pada 2010, lalu 60 persen pada 2020 dan 58,3 dari total PDB perekonomian Indonesia pada 2025.

Data dari Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) BPS juga menunjukkan hal yang sama, penurunan yang signifikan selama setengah abad terakhir. Pangsa pekerjaan sektor pertanian atau agromaritim juga menurun signifikan, 35 persen pada 1985 menjadi 46 persen pada 1995 seiring dengan kebijakan Presiden Soeharto yang mendorong pembangunan industri. Pangsa tenaga kerja di sektor industri meningkat dari 9 persen pada 1985 dan menjadi 12,8 persen pada 1995, dan terus meningkat hingga 53,8 persen pada 2015 dan 56,8 persen pada 2025. Krisis Ekonomi Asia pada 1998 nampak terlalu dahsyat, menerjang sendi-sendi penting perekonomian, memukul sektor sektor industri manufaktur nasional, yang tidak mampu bangkit lagi hingga saat ini. Fenomena deindustrialisasi di Indonesia terjadi terlalu dini, sehingga jika terjadi pergeseran tenaga kerja, itu pun terjadi atau berpindah pada sektor yang tidak memiliki nilai tambah tinggi. Pergeseran penduduk dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, dari daerah pedesaan ke perkotaan, dari pekerjaan informal ke pekerjaan formal berkontribusi pada peningkatan ketidaksetaraan Indonesia.

Penurunan pangsa tenaga kerja pertanian dalam angkatan kerja nasional terjadi karena faktor *push* dan *pull*. Jika faktor *push* yang lebih dominan, maka hal tersebut berdampak negatif pada kemiskinan. Maksudnya, sektor pertanian tidak dapat mengakomodasi pertumbuhan angkatan kerja, sehingga sumber daya keluar dari pertanian ke sektor yang lebih cepat berkembang. Faktor *push* berkonotasi positif bahwa sektor nonpertanian memiliki peluang kerja yang lebih menarik, terutama karena perbedaan dalam faktor pendukung dan akumulasi modal. Pangsa penurunan PDB pertanian jauh lebih cepat dibandingkan dengan pangsa penurunan tenaga kerja pertanian. Kelebihan tenaga kerja pertanian tidak secara fleksibel bergeser ke sektor lain, tetapi tetap berada di sektor pertanian dan pedesaan atau menjadi pengangguran terselubung. Rendahnya peningkatan nilai tambah produk pertanian dan diversifikasi usaha merupakan determinan penting yang berkontribusi pada proses transformasi struktural yang tidak seimbang di atas.

Misalnya, pekerja sektor informal ternyata terus meningkat menjadi 59,4 persen, sedangkan pekerja formal atau karyawan dan pegawai menurun sebesar 2,07 juta pada periode Agustus 2024 hingga Februari 2025. Tiga sektor usaha yang mengalami penurunan lapangan kerja terbesar pada periode yang sama adalah konstruksi 0,77 juta orang, industri manufaktur 0,4 juta orang dan jasa lain 0,2 juta orang. Sementara itu, jumlah kelas menengah di Indonesia pada periode 2019-2024 turun dari 57,33 juta (21,45 persen) menjadi 47,85 juta orang (17,13 persen).

Faktor penting lain dalam proses transformasi struktural perekonomian Indonesia adalah komposisi penduduk perkotaan dan pedesaan yang berubah signifikan, dengan rasio 55 persen penduduk tinggal di perkotaan dan 45 persen di pedesaan. Pada tahun 2030, komposisi penduduk perkotaan dan pedesaan akan berubah menjadi 60:40 persen. Pada tahun 2045, komposisinya akan berubah lagi menjadi 65:35 persen yang menjadi tantangan serius dalam penyediaan pangan. Siapa yang akan menghasilkan pangan jika sebagian besar penduduk Indonesia justru tinggal di perkotaan. Model permintaan produk pangan pokok dan strategis telah pernah dilakukan (Arifin *et al.*, 2019), yang dapat dijadikan acuan bagi masa depan dan komposisi konsumsi pangan ke depan.

Langkah-langkah sistematis untuk melakukan reindustrialisasi dan meningkatkan nilai tambah sektor agromaritim harus segera dilakukan. Inisiatif lama pembangunan kawasan industri (KI), kawasan ekonomi khusus (KEK), dan strategi aglomerasi pembangunan kewilayahan perlu dilanjutkan, dengan beberapa penyempurnaan yang diperlukan. Misalnya, dukungan pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains dan teknologi, reformasi kebijakan pendidikan, pembangunan kesehatan dll adalah prasyarat penting untuk membangun masa depan industri agromaritim yang anjal atau resilien, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Roadmap Hilirisasi Industri Agromaritim

Peta jalan (*roadmap*) hilirisasi pembangunan industri agromaritim hingga 2045 telah dibuat, sehingga implementasi roadmap tersebut perlu dilakukan dengan konsisten. Tidak ada sejarah keberhasilan pembangunan industri agromaritim yang tidak didukung oleh pembangunan sektor hulu pertanian dan kelautan, mulai dari peningkatan produktivitas, dukungan teknologi produksi dan penangkapan, serta pendampingan dan pemberdayaan petani, pekebun, nelayan dan pembudidaya ikan.

Pembangunan industri agromaritim perlu diletakkan dalam suatu platform sektor hulu dan sektor hilir yang lebih terintegrasi. Setidaknya terdapat tujuh strategi pembangunan industri agromaritim yang diturunkan dari Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2015, sebagai berikut: (1) Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pasokan; (2) Tekonologi cerdas dan presisi untuk nilai tambah; (3) Ketelurusan produk pertanian yang aman dan halal; (4) Perbaikan daya saing agro-industri untuk pasar global; (5) Keterpaduan hulu-hilir melalui sistem logistik efisien, (6) Investasi, produksi agro-industri dan perdagangan; (6) Penyediaan dan pengolahan *big data* yang komprehensif

Permasalahan berlarut-larut yang melingkupi sektor hulu, bahkan dapat mengganggu peta jalan pembangunan industri agromaritim secara umum. Fenomena disrupsi yang terjadi pada sektor hulu, apa pun penyebabnya, pasti akan mempengaruhi sektor hilir industri serta berbagai macam industri turunannya. Misalnya, industri berbasis kelapa sawit mengalami ketidakpastian sangat tinggi ketika tiba-tiba Pemerintah memberlakukan larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) pada bulan Mei 2022. Walaupun terjadi hanya satu bulan, larangan ekspor CPO dan produk turunannya tersebut justeru telah mengganggu kinerja industri pangan dan perdagangan luar negeri dan lain-lain. Demikian juga fenomena buruknya dukungan peningkatan produktivitas perkebunan kakao justeru telah mengganggu kinerja industri cokelat, cocoa butter, dll.

Tabel 2. Pengembangan Industri Berbasis Perkebunan dan Kehutanan

Komoditas	Lokus Prioritas	Diversifikasi Industri Produk Hilir Andalan	Debottlenecking Hulu, Kontinuitas pasokan	Roadmap menuju 2045
Kelapa Sawit	Sumut, Sumsel, Jatim	Pangan Fungsional (Oleokimia fatty acid, Vit A E, dll)	Reforma total replanting (PSR), legal, korporatisasi	KEK Sei Mangke, Tanjung Carat, Gresik, Mojokerto

Komoditas	Lokus Prioritas	Diversifikasi Industri Produk Hilir Andalan	Debottlenecking Hulu, Kontinuitas pasokan	Roadmap menuju 2045
Kelapa Dalam	Jatim, Sulut	Pangan Fungsional (Medium-chain trigliseride, flour)	Peningkatan produktivitas kelapa genjah (hibrida)	KEK Gresik, KEK Bitung
Karet Alam	Karawang (Dunlop Tyre)	Ban pesawat, karet alam nyaris wajib	Dominasi karet rakyat, perlu korporatisasi	Efisiensi produk hilir dan rantai nilai karet alam
	Karawang (Hyundai)	Ban mobil listrik kapasitas 12.000/th	Perlu GAP, bibit klonal, peningkatan produktivitas	Efisiensi produk hilir dan rantai nilai karet alam
Kayu lapis Plywood	Jatim, Jateng, Kaltim	Lemari, Rak buku, Kitchen-set bedroom-set	Kehutanan Kawasan Industri Hijau, Insentif premium plywood	KI Gresik, KI Cilacap, Kaltim-Industrial Estate
	Kalsel, Sulsel, Jabar, Kaltara	Lemari, Rak buku, Kitchen-set, dll	Dukungan Investment Authority SWF Danantara,	Tanah Bumbu, KI Palopo, Cikembar, Bulungan
Kayu Pelet (Wood pellet)	Jatim, Jateng, Jambi	Pembangkit listrik, Pemanas bangunan	Perbaikan iklim investasi, Optimalisasi SDA	KI Cikembar, KI Cilacap,
	Gorontalo, Kalteng, Kalbar	Pemanas bangunan perumahan & komersial	Dukungan khusus bagi Sustainable development	Gorontalo, Ketapang,
Getah Pinus	Jateng, Jabar	Pine chemical, Rosin ester, Maleic ester	Fasilitasi produksi getah, derivative gondorukem	Perhutani Pine-Chemical Industry, KITB Batang
	Aceh, Sulbar	Pine chemical, Rosin ester, Maleic ester	Fasilitasi jalan negara, Pengolahan lanjutan	PLTMH Arun II, Perluasan PLN Polman

Sumber: Diolah dari BKPM (2022) dan INDEF (2024)

Indonesia adalah produsen minyak sawit mentah (CPO) terbesar dunia, mencapai 51 juta ton atau 48 persen dari total produksi global. Produksi CPO sebesar merupakan setengah lebih dari produksi CPO global, karena Indonesia telah lama menjadi produsen CPO terbesar di dunia. Ketika Pandemi Covid-19 melanda ekonomi global, permintaan CPO sempat lesu sebelum akhirnya Indonesia menggenjot pengembangan biofuels B-30. Hasilnya ternyata sangat signifikan, karena harga CPO dan harga minyak goreng naik di atas 100 persen. Pemerintah melakukan intervensi kebijakan untuk stabilisasi harga minyak goreng, walau dengan instrument kebijakan yang berubah-ubah. Misalnya, Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng pada Januari 2022, kemudian berganti menjadi alokasi wajib domestik (DMO=*domestic market obligation*) dan kewajiban harga domestik (DPO=*domestic price obligation*).

Kebijakan yang tidak terlalu matang tersebut akhirnya justru membuat minyak goreng semakin langka dan harga semakin tidak terkendali. Antrian warga yang ingin membeli minyak goreng

terjadi di mana-mana dan sempat menimbulkan implikasi politik yang merisaukan. Pemerintah menetapkan HET hanya untuk minyak goreng curah, dengan maksud untuk memberikan subsidi bagi keluarga miskin. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dituhankan untuk mengganti selisih harga pasar dengan HET pada produsen minyak goreng.

Hilirisasi dan peningkatan nilai tambah diarahkan pada produk pangan fungsional seperti oleokimia dan kemurgi atau biodiesel B40 dan B50 yang dimulai Juli 2026 ini. Percepatan pembangunan KI dan KEK di Sei Mankei, Dumai, Bitung, Ketapan, Batulicin dll perlu terus diupayakan. Selain sawit, fokus hilirisasi juga telah dilakukan di kelapa dalam dan karet alam, seperti KEK Bitung, Kuala Enok, Gresik dll yang juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan petani di hulu.

Strategi pengembangan sawit berkelanjutan tampak tidak mudah, walaupun ekspektasinya adalah bahwa sawit berkelanjutan akan lebih inklusif dan komprehensif membawa dampak keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan industri pangan berbasis kelapa sawit ke depan diarahkan untuk melakukan diversifikasi industri dan produk hilir andalan, khususnya pangan fungsional berupa oleokimian, *fatty acid*, Vitamin A dan Vitamin E, dan lain-lain. Prasyaratnya percepatan pembangunan atau *debottlenecking* untuk menjamin kontinuitas dan kepastian suplai bahan baku adalah reforma total replanting atau peremajaan sawit rakyat, peningkatan status legal-formal lahan, terutama yang belum memiliki status *clear and clean* untuk dilakukan peremajaan sawit rakyat (PSR).

Industri kelapa dalam kembali mendapat perhatian karena Indonesia memiliki hamparan luas areal kelapa dalam sekitar 3,3 juta ton tersebar di hampir setiap provinsi yang memiliki garis pantai di Indonesia. Produksi kelapa dalam pada 2025 tercatat 2,77 juta ton, atau mengalami penurunan dari 2,84 juta ton pada 2023. Ekspor kopra sebagai turunan dari kelapa dalam cukup rendah, hanya beberapa 193 ribu ton saja pada 2024, sangat kontras dibandingkan dengan kelapa sawit yang mendapat perhatian memadai.

Kelapa dalam hampir seluruhnya diusahakan oleh petani atau pekebun kecil, sehingga produktivitas kelapa hanya berkisar 5 ton/ha dan nyaris tidak berubah selama beberapa tahun terakhir. Persoalan peremajaan yang lambat terjadi lebih banyak karena kapasitas pekebun, status legalitas lahan dan nyaris tidak terdapat program pemerintah untuk melakukan peremajaan kelapa dalam sebagaimana pada administrasi sebelumnya. Pada bidang pasca panen, tidak banyak aplikasi teknologi modern untuk menghasilkan kopra putih yang berharga lebih mahal. Hingga saat ini, komposisi kopra hitam masih lebih dominan dibandingkan dengan kopra hitam. Harga kopra yang stagnan dan rendah menjadi salah satu determinan dari rendahnya kinerja kelapa dalam selama ini.

Hal yang cukup menarik adalah bahwa Pemerintah saat ini sedang mengembangkan investasi industri pangan berbasis kelapa dalam, khususnya pangan fungsional untuk menghasilkan *medium-chain triglyceride*, tepung kelapa (*coconut flour*) dll. Upaya untuk melakukan *debottlenecking* di sektor hulu melalui peningkatan produktivitas, peremajaan atau revitalisasi perkebunan kelapa, pengembangan kelapa hibrida, dll perlu menjadi kebijakan prioritas pada tahun 2023 dan jangka menengah ke depan. Misalnya, pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan KEK Gresik ditugaskan sebagai ujung tombak dalam pengembangan industri pangan fungsional berbasis kelapa dalam.

Indonesia adalah produsen karet alam terbesar ke-2 dunia, setelah Thailand dan telah lama menggeser posisi Malaysia. Pada tahun 2025, produksi karet alam Indonesia mencapai 2,12 juta ton dan menunjukkan trend penurunan yang signifikan dari produksi 3 juta ton pada 2021. Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya karet alam dengan luas kebun terluas di dunia mencapai 2,84 juta hectare. Lebih dari 90 persen kebun karet alam di Indonesia merupakan kebun rakyat atau skala kecil dengan teknologi seadanya. Kebun karet swasta sekitar 5,67 persen dan kebun karet negara (PT Perkebunan Nusantara) sekitar 3,42 persen. Kebun karet rakyat melibatkan 2 juta rumah tangga petani (RTP) dan menyerap hampir 200 ribu tenaga kerja. Produktivitas karet masih rendah, yaitu hanya 1,1 ton/ha, masih jauh dari potensinya sekitar 3 ton/ha atau lebih.

Karet alam adalah kontributor penting industri agro Indonesia setelah kelapa sawit. Urutan berikutnya adalah kopi, kakao, kelapa, teh, minyak atsiri, dll. Pada tahun 2024, ekspor karet alam Indonesia dalam bentuk RSS3 dan TSR20 menghasilkan devisa US\$ 2,90 miliar atau sedikit lebih rendah dibandingkan nilai ekspor produk karet pada 2021 yang mencapai US\$ 4 miliar. Industri karet nasional menghadapi masalah kontinuitas bahan baku karet alam, karena produktivitas rendah di hulu dan hanya sedikit petani yang mempraktikkan teknik budidaya pertanian yang baik (*good agricultural practices*=GAP). Hampir seluruh sentra produksi karet di Sumatera dan Kalimantan memiliki pohon berumur tua, lebih dari 30 tahun, yang secara alamiah telah menurun produktivitas getah yang dihasilkan. Peremajaan karet menjadi agenda penting dan mendesak yang harus segera direalisasikan.

Permintaan dunia terhadap TSR20 cukup tinggi, karena penggunaan oleh industri yang tinggi. Pangsa ekspor Indonesia terhadap TSR20 mencapai hampir 40 persen. Perdagangan karet kategori jenis TSR20 ini cukup tinggi, karena permintaan dari China juga mengka pesat. Indonesia juga mengimpor TSR sebesar 12,16 ribu ton sebagai bahan baku industri karet domestik. Permintaan dunia terhadap produk RSS3 juga sangat tinggi, walaupun volume ekspor RSS3 Indonesia cenderung fluktuatif. Volume ekspor RSS3 global sekitar 62,34 ribu ton, walaupun Indonesia masi mengimpor RSS sekitar seribu ton. Indonesia mampu menyuplai kebutuhan RSS3 dunia sekitar 11 persen. Tingginya volume perdagangan karet global dalam kategori TSR20 dan RSS3 merupakan konsekuensi logis dari strategi hilirisasi yang diterapkan Indonesia. Akibatnya, perdagangan getah lateks cukup rendah, bahkan pangsa ekspor lateks Indonesia hanya 1 persen dari kebutuhan lateks global.

Tabel 3. Pengembangan Industri Berbasis Kelautan-Perikanan

Komoditas	Lokus Prioritas	Diversifikasi Industri Produk Hilir Andalan	Debottlenecking Hulu, Kontinuitas pasokan	Roadmap menuju 2045
Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT)	Sulut, Maluku, Maluku Utara, Bali, NTT	Olahan ikan (pangan) Pengalengan ikan	Verifikasi-validasi bahan baku, ketelusuran dan perbaikan dayasaing sektor	Peningkatan konsumsi pangan dan kualitas gizi: Kontribusi percepatan penurun stunting
	Jatim, Sulsel, Jabar, Banten	Fungsional (Minyak, tepung, gelatin, kolagen)	Kerjasama investasi dan jaringan industri pangan dan pemberdayaan nelayan	Peningkatan utilisasi industri, kapasitas produksi

Komoditas	Lokus Prioritas	Diversifikasi Industri Produk Hilir Andalan	Debottlenecking Hulu, Kontinuitas pasokan	Roadmap menuju 2045
Rajungan	Jatim-Jateng	Pangan Fungsional (Chitosan, chitin, suplemen), farmasi, kosmetik dll	Waspada overfishing, Pantura Jatim-Jateng banyak nelayan tradisional	KI PIER (Pasuruan-Industri Estate Rembang).
	Sultra	Olahan rajungan (meat, cake, dll), Pangan Fungsional, Suplemen	Dukungan energi-listrik, angkutan darat dan laut, dari Muna, Bombana, dll	Industri Rajungan Rebus dan diawetkan di Kawasn PPS Kendari).

Sumber: Diolah dari BKPM (2022) dan INDEF (2024)

Hilirisasi sektor kelautan dan perikanan adalah komponen penting dari pembangunan industri agromaritim untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi eksportir nomor satu dunia udang beku dan olahan, tuna-cakalang-tongkol (TCT) dan ranjungan. Hilirisasi kelautan dan perikanan memerlukan kepastian dan konsistensi pasokan bahan baku ikan, yang juga mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kebijakan pembagian zona penangkapan ikan terukur (Peraturan Pemerintah PP 11/2023) bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan sumberdaya ikan dan inklusivitas sektor kelautan-perikanan.

Misalnya, industri Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT). Indonesia sebenarnya masih menduduki peringkat pertama sebagai produsen tuna-cakalang-tongkol (TCT) di dunia, dengan kontribusi sekitar 15 persen, disusul Filipina 7 persen, Vietnam 6,6 persen, Ekuador 6 persen dan sebagainya. Pada tahun 2022, total produksi sekitar 1,4 juta ton dan masih akan meningkat pada 2023 karena potensi produksi memang sangat tinggi. Potensi produksi TCT di Indonesia sekitar 3,4 juta ton yang sebagian besar berada di perairan Indonesia Timur dan wilayah lain dengan wilayah pantai dan laut dalam. Sebagian besar atau sekitar 1,2 juta ton (87 persen) produksi TCT dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik dan sekitar 175 ribu ton sisanya (13 persen) untuk pasar ekspor.

Selama 10 tahun terakhir, Tunisia merupakan negara pengeksport ikan tuna (sektor hulu) terbesar dengan kontribusi 24 persen, sementara pangsa ekspor tuna Indonesia sangat kecil atau hanya sekitar 0,1 persen dari total perdagangan tuna global. Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan investasi industri pangan berbasis TCT, terutama di Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara Timur, khususnya untuk industri pangan olahan, pengalengan ikan dan lain-lain. Industri pangan berbasis TCT ini dapat berkontribusi pada peningkatan konsumsi pangan dan kualitas gizi, dan percepatan penurunan stunting. Industri pangan fungsional berbasis TCT berupa minyak ikan, tepung ikan, gelatin, kolagen dll dikembangkan di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Banten. Strategi debottlenecking atau pembenahan sektor hulu perikanan, dimulai dari pendampingan dan pemberdayaan nelayan, verifikasi dan validasi bahan baku dalam konteks ketelusuran bahan baku untuk meningkatkan daya saing sektor perikanan dan kelautan secara umum.

Pembangunan industri berbasis udang meliputi pengembangan produk udang dan turunannya, pengolahan produk samping menjadi chitin dan chitosan, yang memiliki permintaan tinggi di pasar internasional. Hilirisasi TCT di wilayah Indonesia Timur: Sulawesi Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) diarahkan untuk meningkatkan daya saing global. Investasi baru sektor swasta dalam rantai dingin, pengalengan ikan dan produk TCT olahan untuk pangan. Pengolahan lanjutan untuk pangan fungsional yang mampu menghasilkan minyak ikan, tepung ikan, gelatin, dan kolagen. Pembangunan industri agromaritim berbasis kelautan dan perikanan juga diharapkan berkontribusi pada perbaikan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting.

Industri rajungan dikembangkan menggunakan basis rajungan yang mengandung protein tinggi yang dapat berkontribusi pada peningkatan konsumsi dan kualitas gizi. Produksi terbesar rajungan diperoleh dari wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 712 yang meliputi Perairan Utara Jawa dan Perairan Timur menyumbangkan produksi rajungan sekitar 47,5 persen dari total produksi rajungan nasional. Sentra produksi rajungan terbesar selanjutnya yaitu WPP 713 dan WPP 711 yang berada di Kepulauan Bangka-Belitung, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Produksi rajungan Indonesia tahun 2022 hanya sekitar 100 ribu ton, jauh menurun dibandingkan dengan produksi tahun 2017 yang mencapai 270 ribu ton. Penurunan ini disebabkan dari fenomena penangkapan berlebihan (*overfishing*) di beberapa perairan dangkal sehingga kemampuan reproduksi rajungan menurun.

Produksi rajungan sebagian besar (71 persen) untuk konsumsi domestik dan 29 persen sisanya untuk pasar ekspor. Pangsa pasar ekspor rajungan dari Indonesia mencapai 7,6 persen atau berada pada posisi ke-4 di dunia. Hal yang menarik adalah bahwa neraca perdagangan internasional Indonesia untuk rajungan tercatat sebesar 24 ribu ton, dengan tujuan ekspor Amerika Serikat (47 persen), Tiongkok (25 persen) dan Malaysia (14 persen). Arah kebijakan investasi industri pangan berbasis rajungan pada 2023 adalah pada Kawasan Industri PIER (Pasaruan Industrial Estate Rembang) di Pasaruan, Jawa Timur. Industri pangan fungsional yang dikembangkan adalah chitosan, chitin, suplemen, farmasi dan kosmetik. Investasi industri rajungan rebus di Kendari dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah rajungan sekaligus untuk menghasilkan produk pangan fungsional, suplemen kesehatan dan lain-lain.

III. PENUTUP: REKOMENDASI PERUBAHAN KEBIJAKAN

Beberapa rekomendasi perubahan kebijakan pembangunan industri agromaritim untuk mampu berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Pertama, pembangunan industri agromaritim atau hilirisasi industri berbasis pertanian dan perikanan adalah bagian integral dari transformasi sistem pangan dan pertanian. Strategi hilirisasi industri berbasis pertanian dan perikanan dijalankan melalui keterpaduan hulu-hilir melalui sistem yang logistik efisien.

Kedua, strategi hilirisasi industri agromaritim pangan wajib mempertimbangkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal, meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja baru, dan berkontribusi pada pengembangan wilayah dan ekonomi lokal.

Ketiga, pembangunan industri agromaritim mensyaratkan kepastian hukum dan iklim usaha dalam suatu tataguna lahan, kejelasan zonasi, keseimbangan ekologis dalam pemanfaatan sumberdaya berkelanjutan, berbasis “Satu Data Indonesia” yang bermartabat;

Keempat, integrasi hulu-hilir industri agro-maritim dengan teknologi presisi dan digital, perbaikan infrastruktur yang menghubungkan sektor hulu dan pasar (*farm-to-market*). Sebaran industri hilir agromaritim ini mencakup berbagai wilayah strategis, sawit dan kelapa di Sumatera dan Kalimantan, udang di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, TCT di Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, rumput laut di NTT, Bali, Papua, dll.

Kelima, dukungan digitalisasi rantai nilai produk industri agromaritim melalui konsistensi kebijakan dalam negeri dalam pemberdayaan petani dan nelayan kecil, akses pembiayaan, teknologi perlu terintegrasi dengan strategi penguatan hilirasi yang lebih besar. Dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota amat diperlukan untuk percepatan implementasi di lapangan

DAFTAR PUSTAKA

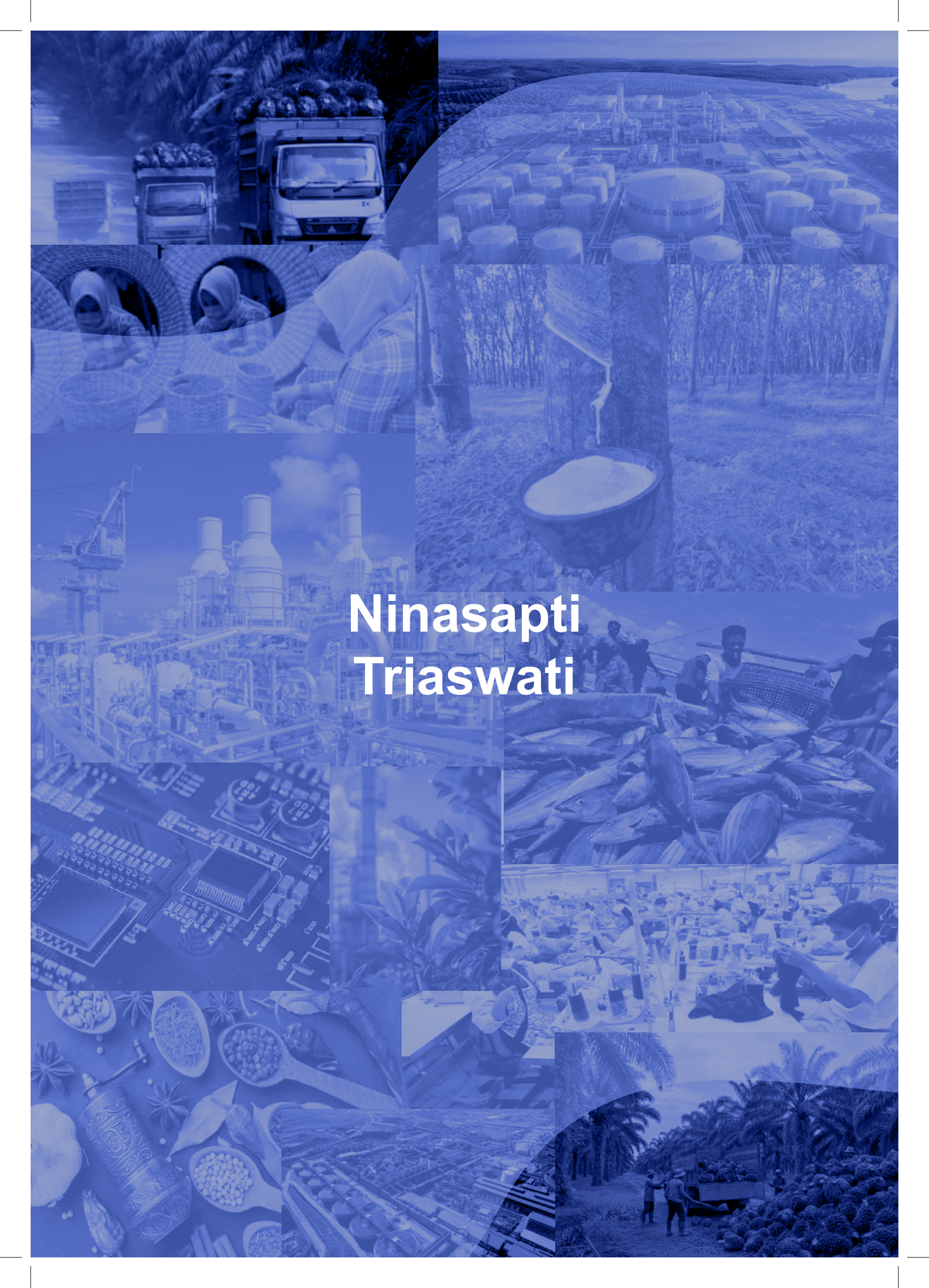
- Arifin, Bustanul. 2024. *Transformasi Sistem Pangan dan Pertanian*. Bogor: IPB Press. 229pp
- Asian Development Bank (ADB). 2019. “Policies to Support Investment Requirements of Indonesia’s Food and Agriculture Development during 2020-2045: A Report”. Washington, DC.: International Food Policy Research Institute (IFPRI), National Development Planning Agency (Bappenas), and Asian Development Bank. <http://dx.doi.org/10.22617/TCS190447-2>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (*National Development Planning Agency-Bappenas*). 2025. *Summary of Midterm of National Development Planning 2025-2029*. Jakarta: Bappenas
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Karakteristik Utama Sektor Pertanian* (Hasil Survei Pertanian Terintegrasi 2021). Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/12/19/ff6b345775e76a7c3bcbce1a/indikator-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-dan-karakteristik-utama-sektor-pertanian-2021--hasil-survei-pertanian-terintegrasi-.html>
- Dartanto, Teguh, Edith Z.W. Yuan, and Yusuf Sofiyandi. 2017. “Two decades of structural transformation and dynamics of income equality in Indonesia”. *ADB Working Paper Series* 783, 1-23. Tokyo: Asian Development Bank Institute (ADBI).
<https://www.adb.org/sites/default/files/publication/371316/adbi-wp783.pdf>
- European Environmental Agency (EEA). 2015. *Green Economy*. Copenhagen: European Environmental Agency (EEA). <https://www.eea.europa.eu/soer/2015/europe/green-economy>
- Jeon, Shinyoung. 2013. Agricultural Transformation and the Escape from the Middle-Income-Country Trap: Challenges Facing Small Farmers in Indonesia in a Time of Green Restructuring. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 49(3), 383–384. <https://doi.org/10.1080/00074918.2013.850636>

Mellor, John W. 2017. *Agricultural Development and Economic Transformation: Promoting Growth with Poverty Reduction*. New York: Palgrave MacMillan. 259 pages.

Organization of Economic Cooperation and Development (OECD). 2011. *Towards green growth*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

United National Environmental Programme (UNEP). 2011. *Towards a green economy: pathways to sustainable development and poverty eradication*. Nairobi, Kenya: UNEP.

Wiebe, Keith and Elisabetta Gotor (Eds). *"What Do We Know about the Future Food System?"*. Washington DC.: International Food Research Institute (IFPRI). 229 pages. <https://www.ifpri.org/ifpri-book/what-do-we-know-about-the-future-of-food-systems/>



Ninasapti Triaswati

Industrialisasi Inklusif:

Re-orientasi Pembangunan untuk Mewujudkan Kesempatan Kerja Produktif yang Mensejahterakan Rakyat

Ninasapti Triaswati, Ph.D

Ketua Fokus Grup Ketenagakerjaan, Kemiskinan dan Pelayanan Publik — PP-ISEI
Dosen Tetap FEB Universitas Indonesia

Dipresentasikan kepada Ekonom Indonesia | 2026

LATAR BELAKANG

Mengapa Pertumbuhan Ekonomi Tidak Otomatis Mensejahterakan Rakyat?

PRABOWO: PARADOKS INDONESIA

Negara kaya SDA dan SDM,
namun rakyat belum sejahtera
dan kemiskinan masih tinggi

TARGET vs REALITA

PDB tumbuh 5% per tahun,
namun ketimpangan antar
kelompok pendapatan masih
lebar

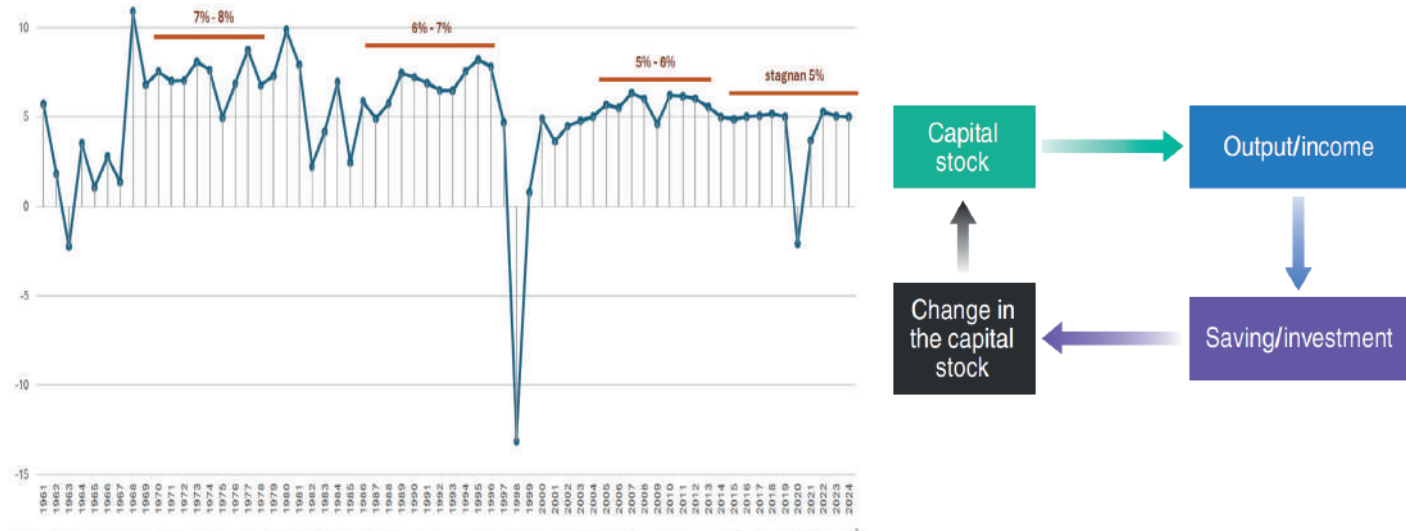
TESIS UTAMA

Diperlukan RE-ORIENTASI INSTITUSI:
bukan sekadar mengejar angka
pertumbuhan PDB 8%

Inspirasi: Pemikiran Sumitro Djojohadikusumo (1994) — relevan hingga hari ini

Pertumbuhan ekonomi: *produksi output apa vs. pendapatan siapa?*

Gambar 1: Pertumbuhan Ekonomi dan Prosesnya



2 / 12

WARISAN SUMITRO (1994): “Pembangunan, lebih luas dari pertumbuhan, merupakan proses tranformasi, ditandai oleh perubahan sturuktural kegiatan ekonomi maupun susunan masyarakat”

Tiga Masalah Pokok Pembangunan, menurut Sumitro (1994), yang Masih Relevan Hingga Kini:

01 Lapangan Kerja & Pengangguran

Ketimpangan produktivitas/pendapatan antar pekerja sektor pertanian, sekunder (industri & konstruksi), dan tersier, akibat investasi SDM & mobilitas TK

02 Ketimpangan Kekuatan Ekonomi

Ketidakseimbangan kekuatan di antara golongan-golongan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam proses produksi dan distribusi barang & jasa

03 Ketidakseimbangan Antardaerah

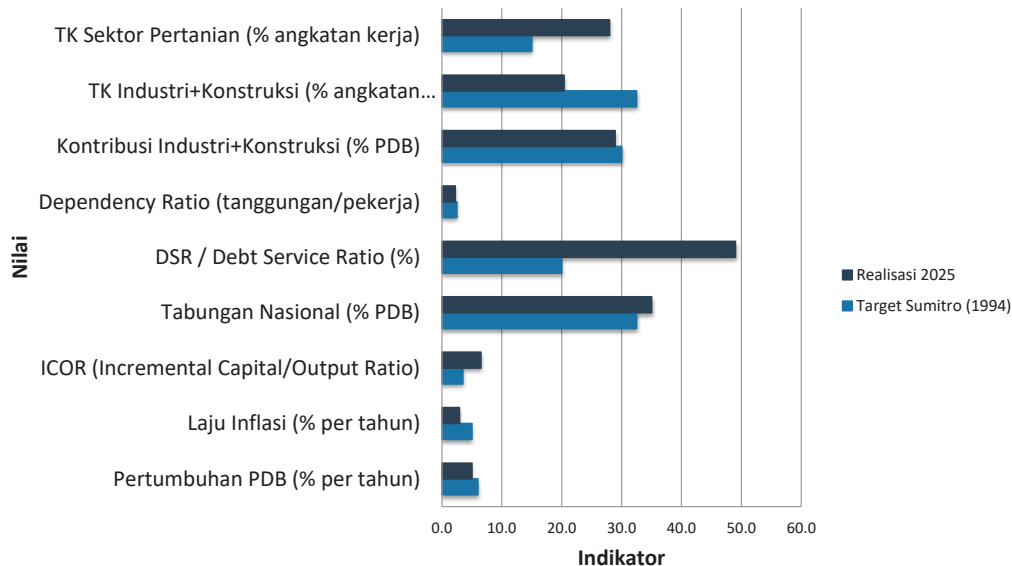
Kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, serta antara Kawasan Barat dan Timur Indonesia

Sumitro menargetkan ketiga masalah ini selesai dalam 25 tahun (1994–2019), namun sampai saat ini belum selesai.

3 / 12

Rapor 30 Tahun: Target Sumitro (1994) vs. Realisasi (2025)

Gambar 2: Target Sumitro (1994) vs. Realisasi 2025



TERCAPAI

Inflasi 2,92% (target <=5%)
 Tabungan 35% PDB
 Dependency Ratio 2,22

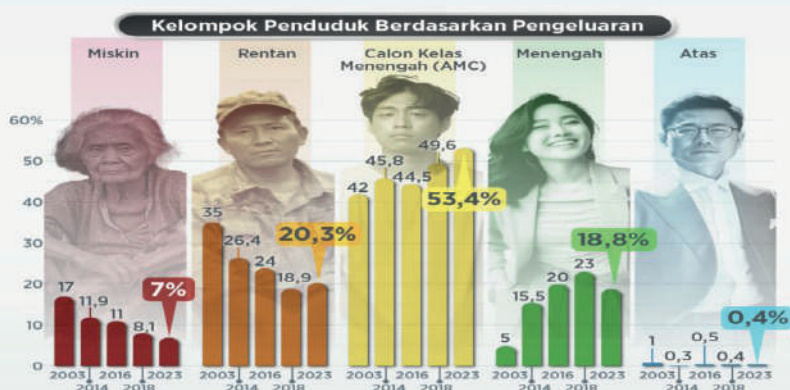
BELUM TERCAPAI

[X] PDB ~5% (target 6%)
 [X] ICOR 6,5 (target 3-3,5)
 [X] DSR 49% (target 20%)
 [X] TK Industri 20,4% (target 30-35%),
 TK Pertanian 28% (target 15%)

4 / 12

ANALISIS KEGAGALAN

Mengapa Kesejahteraan Gagal Tumbuh Merata? Kelas Menengah Turun? Tiga Kendala "Ekonomi-Institusi..."



Gambar 3: Kelompok Penduduk Berdasarkan Pengeluaran

Sumber: Katadata berdasarkan data BPS SUSENAS

1. KEBIJAKAN TIDAK TERINTEGRASI

Program kesejahteraan sosial tidak berkaitan erat dengan kebijakan produktivitas pekerja di sisi industrialisasi & perdagangan global

2. TARGET KEUANGAN, BUKAN KESEJAHTERAAN

Ukuran kinerja pemerintah: habiskan anggaran 100%. Bukan: ciptakan lapangan kerja atau peningkatan pendapatan pekerja formal/informal

3. KESEJAHTERAAN NAIKNYA TIDAK MERATA

Subsidi utama: kelompok termiskin, maka peran kelas menengah menurun pada 2018–2023 (–4,2%), peran kelas atas menurun pada 2003–2023 (–0,6%)

5 / 12

Dari *Serakahnomics* (penerimaan pajak & devisa kecil, hutang membesar) → menjadi: "Kemandirian Ekonomi, Pro-Kesejahteraan Rakyat"

SERAKAHNOMICS (Pra-Prabowo)

- Ekspor tanpa pengawasan ketat
- Underinvoicing/transfer pricing dibiarkan puluhan tahun
- Oligarki diuntungkan sistemik
- Penerimaan pajak & devisa kecil, hutang membesar



KEMANDIRIAN EKONOMI (Era Prabowo)

- >> PT DSI: badan ekspor satu pintu (→BPI Danantara)
- >> Penegakan hukum: transfer pricing & illegal trading
- >> Kerugian teridentifikasi: ~USD 908 miliar / 34 tahun
- >> Target: tingkatkan penerimaan pajak & devisa

Sumber: UN-Comtrade 2025;
Pidato Presiden Prabowo di DPR, 20 Mei 2026

USD 908 MILIAR

~ Rp 15.980 Triliun

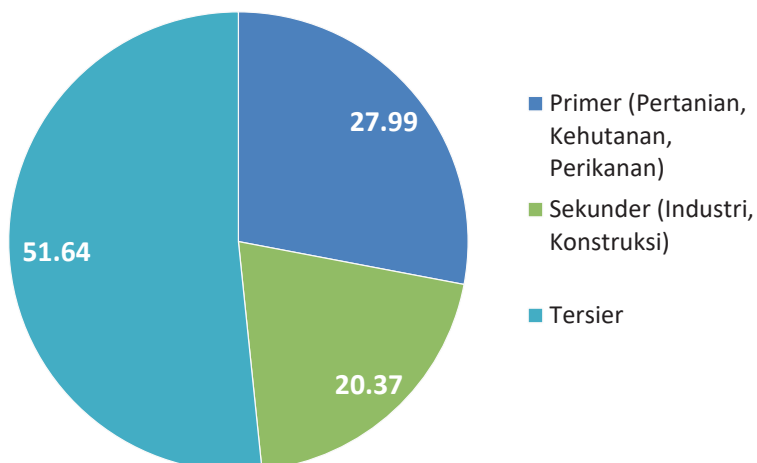
Estimasi total kerugian negara
akibat kecurangan ekspor-impor
selama 34 tahun terakhir

Jika kebocoran dihentikan:
- Devisa hasil ekspor meningkat
- Penerimaan pajak naik
- Cadangan devisa menguat

TANTANGAN 1

Industrialisasi & Hilirisasi (BPI Danantara/KEMENTERIAN INVESTASI, ESDM):
Primer → Sekunder, Padat Modal, Penyerapan Tenaga Kerja relatif kecil

Gambar 4: Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia
(November 2025)



TANTANGAN UTAMA

Hilirisasi = padat modal & teknologi
→ penyerapan Tenaga Kerja relatif kecil

Belum jelas ukuran kinerja keberhasilan
hilirisasi → penciptaan TK kerja formal?

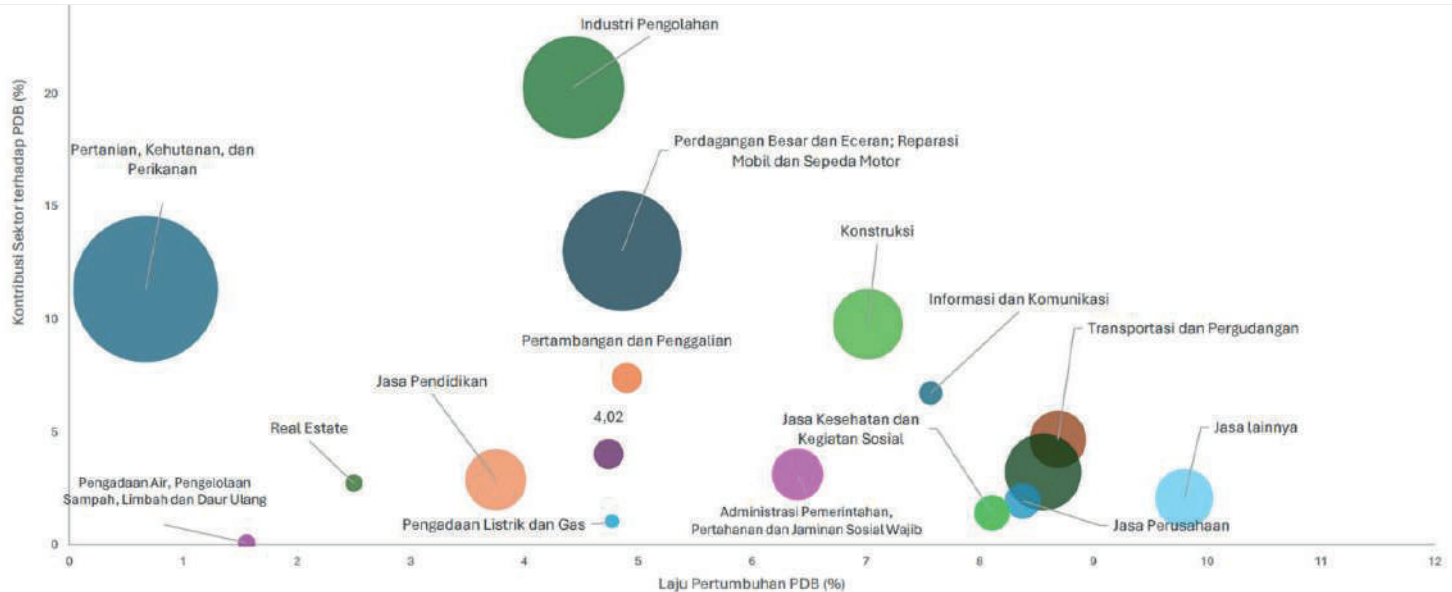
Risiko geopolitik ekonomi: jk pendek,
'Sell Indonesia' campaign (Juni 2026)
→ IHSG ke 5.342, IDR Rp18.209 /USD

Perlu kolaborasi kurikulum Pend Tinggi,
SMA & SMK sesuai kebutuhan industri

TANTANGAN 1

Industri Pengolahan → Padat Modal, Pertumbuhan Tinggi, Penyerapan Tenaga Kerja Kecil

Gambar 5: Pertumbuhan PDB, Kontribusi PDB dan Penyerapan Tenaga Kerja (BPS, 2025)



7 / 12

TANTANGAN 2

Reformasi Sistem Keuangan Publik (tujuan: Pelayanan Publik) → KEMENKEU: Dari Financial-Based → menuju Performance-Based

FINANCIAL-BASED (Paradigma Lama)

Ukuran keberhasilan:
habiskan anggaran 100%



REFORMASI YANG DIBUTUHKAN

PERFORMANCE-BASED (Paradigma Baru)

Ukuran keberhasilan:
ciptakan lapangan kerja, turunkan kemiskinan

STUDI KASUS: Program MBG → GIZI, PENDIDIKAN, MISKIN ?

Anggaran 2026

BGN: Rp 268 T; Cadangan Rp 67 T

Realisasi s.d. April 2026

Rp 75 T, 22,4% dari total Rp 335 T

Korupsi pimpinan BGN

Ditetapkan tersangka Juni 2026

Keracunan massal

Ribuan siswa penerima MBG

Tidak tepat sasaran

Penyimpangan tata kelola MBG

Trade-off

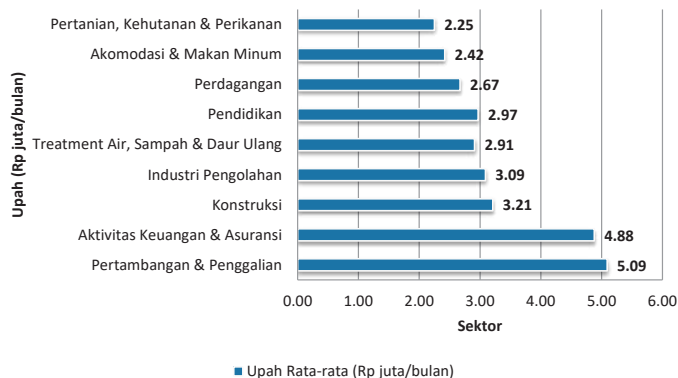
Dana MBG vs. dana pendidikan dan kesehatan (selain MBG)

8 / 12

TANTANGAN 3

Swasembada Pangan & Pembangunan Desa, Efisiensi vs Efektivitas: Subsidi Tidak Tepat Sasaran, UU Cipta Kerja membatasi jenis usaha Koperasi SP

Gambar 6:
Upah Formal Rata-rata Antarsektor
(Rp juta/bulan)
SAKERNAS Februari 2025



Subsidi Pertanian Tidak Langsung → tidak efektif

Moral hazard: pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran, ke pedagang antara & birokrat lokal. Petani membayar lebih mahal daripada harga acuan.

Koperasi Desa/Kel. Merah Putih → efektivitas regulasi

Potensi besar (80.000 koperasi), namun UU Cipta Kerja membatasi jenis usaha koperasi simpan pinjam

Contoh Kasus: BUMDes Gagal Massal (2014-2024)

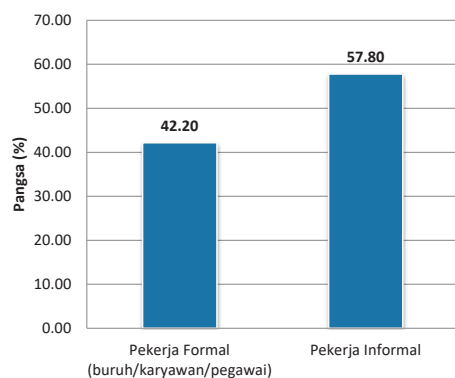
Hanya sekitar 200-an dari 80.000-an BUMDes yang benar-benar jadi pusat pertumbuhan ekonomi desa.

9 / 12

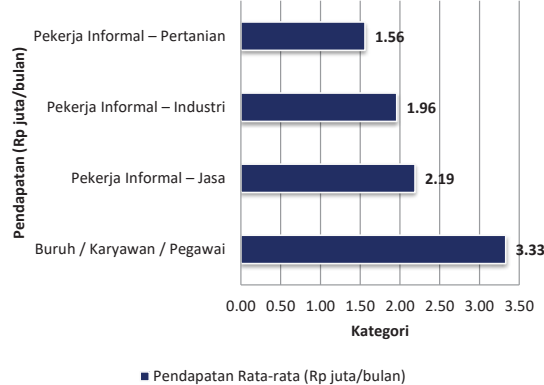
TANTANGAN 4

Investasi untuk peningkatan kualitas SDM: Kunci Jangka Panjang yang Masih Terabaikan

Gambar 7: Pangsa Pekerja
Formal vs. Informal (%)



Gambar 8: Pendapatan Pekerja
Formal vs. Informal (Rp juta/bulan)



HAMBATAN SDM:

5.700 desa & 4.400 dusun belum teraliri listrik (ESDM, Juni 2026)

1,2 juta Rumah Tangga yang belum menikmati akses Listrik (Okt 2025)

Butuh Rp 48 T untuk elektrifikasi penuh selama 5 tahun

Sekolah Rakyat: target 500 unit s.d. 2029 (baru 166 diresmikan)

Prioritas pembangunan fisik, sebabkan investasi SDM tertinggal

10 / 12

KESIMPULAN

Pertumbuhan Tinggi Tidak Cukup

Target 8% hanya bermakna jika

Disertai dengan penciptaan lapangan kerja formal yang merata di seluruh kelompok pendapatan.

Reformasi institusi harus sistematis:

dari regulasi investasi, penganggaran berbasis kinerja, hingga pengukuran output kesejahteraan.

Warisan Sumitro tetap relevan:

"Memperluas kesempatan kerja produktif " adalah inti sejati pembangunan Indonesia.

Perubahan arah kebijakan pada era Prabowo sudah dimulai,

Namun, evaluasi berkala, efektivitas, efisiensi dan konsistensi implementasi adalah kunci keberhasilan.

"Jika ukuran keberhasilan tetap hanya sekadar angka pertumbuhan PDB, bukan lapangan kerja formal, kita akan terus mengulang paradoks yang sama."

11 / 12

SARAN KEBIJAKAN

Empat Pilar Kebijakan Terintegrasi dari tingkat Nasional sampai Daerah

1. INDUSTRIALISASI & HILIRISASI	2. REFORMASI KEUANGAN	3. PANGAN: PETANI & PEMBERDAYAAN DESA	4. INVESTASI SDM JANGKA PANJANG
- Wajibkan pelaporan realisasi lapangan kerja formal per proyek Danantara & APBN - Tingkatkan R&D hilirisasi: kolaborasi APBN + Danareksa - Kurikulum SMK/PT sesuai pasar kerja/ kebutuhan industri strategis	- Kemenkeu memimpin transisi menuju performance-based budgeting - Indikator kinerja: lapangan kerja formal, produktivitas, dan kemiskinan - Evaluasi trade-off: MBG vs.dana pendidikan & kesehatan selain MBG	- Alihkan subsidi barang ke subsidi langsung kepada petani - Revisi regulasi koperasi: perluas jenis usaha KDKMP, proses bisnis/ operasional efektif dan efisien - Pendampingan profesional untuk BUMDes yang ada	- Perluas beasiswa berbasis prestasi, kelompok miskin dan daerah 3T - Elektrifikasi 1,2 juta RT, 5.700 desa, 4.400 dusun, dalam 5 tahun - Kembangkan ekosistem pendidikan-industrialisasi untuk kemajuan teknologi, peningkatan produktivitas, dan pendapatan pekerja

Kunci Keberhasilan: Keempat pilar ini harus berjalan TERINTEGRASI — antar Kementerian dan Lembaga Pemerintah

Ukuran sukses: *jumlah naiknya lapangan kerja formal, & peningkatan kesejahteraan, bukan sekadar anggaran yang terserap.*

11 / 12

Sumitronomics: Reformasi Kebijakan Ekonomi Untuk Mewujudkan Kesempatan Kerja Produktif Bagi Kesejahteraan Rakyat

Ninasapti Triaswati, Ph.D

**Ketua Fokus Grup Ketenagakerjaan, Kemiskinan dan Pelayanan
Publik, Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
(PP-ISEI); Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Indonesia**

ABSTRAK

Indonesia menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Namun, pertumbuhan tinggi tidak secara otomatis menghasilkan kesejahteraan yang merata. Artikel ini menganalisis mengapa tiga masalah pokok pembangunan yang diidentifikasi Sumitro Djojohadikusumo pada 1994 — lapangan kerja produktif, ketimpangan kekuatan ekonomi, dan ketidakseimbangan antardaerah — masih relevan tiga dekade kemudian, serta mengevaluasi arah kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meresponsnya. Dengan pendekatan analisis kebijakan berbasis data sekunder dan tinjauan regulasi, artikel ini membandingkan target kuantitatif yang ditetapkan Sumitro untuk Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (1994-2019) dengan realisasi hingga 2025-2026, menemukan bahwa dari sepuluh indikator utama, hanya empat yang tercapai (inflasi, rasio tabungan, dependency ratio, dan pembangunan infrastruktur antarpulau), sementara indikator terkait struktur produksi dan penyerapan tenaga kerja industri belum tercapai. Analisis institusional menunjukkan tiga penyebab utama: kebijakan kesejahteraan tidak terintegrasi dengan kebijakan industri dan perdagangan global, paradigma anggaran berbasis penyerapan dana (financial-based) alih-alih berbasis kinerja (performance-based), dan pemerataan yang timpang antarkelompok pendapatan, tercermin dari penyusutan kelas menengah sebesar 4,2 persen pada 2018-2023. Artikel ini kemudian mengkaji tiga tantangan institusional utama pada era Prabowo — industrialisasi dan hilirisasi melalui Badan Pengelola Investasi Danantara, reformasi sistem penganggaran publik, serta swasembada pangan dan pembangunan perdesaan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih — dan mengusulkan empat pilar kebijakan terintegrasi berbasis indikator kinerja kesejahteraan rakyat, bukan sekadar penyerapan anggaran atau angka pertumbuhan PDB.

Kata kunci: ekonomi kelembagaan; kesempatan kerja produktif; kesejahteraan rakyat; hilirisasi; penganggaran berbasis kinerja

I. PENDAHULUAN

Sumitro Djojohadikusumo, pendiri Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) pada 1955 dan menteri pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, meninggalkan warisan pemikiran yang kini menjadi salah satu inspirasi tujuan dan sasaran pembangunan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Astacita. Artikel ini bertujuan memberikan analisis dan saran kebijakan yang selaras dengan Astacita, khususnya dalam mewujudkan kesempatan kerja yang menyejahterakan rakyat Indonesia.

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029. Target tersebut hendak dicapai melalui berbagai program yang merujuk pada delapan janji kampanye Presiden, yaitu Astacita. Beberapa program Astacita yang relevan dengan pembahasan artikel ini antara lain: Astacita kedua, mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi

biru; Astacita ketiga, mendorong lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan pembangunan infrastruktur; Astacita keempat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender; Astacita kelima, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan Astacita keenam, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Pertanyaan mendasar yang melatarbelakangi artikel ini adalah: mengapa pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil selama tiga dekade terakhir tidak secara otomatis menghasilkan kesejahteraan yang merata bagi rakyat Indonesia, dan sejauh mana reorientasi kebijakan pemerintahan Prabowo saat ini mampu menjawab persoalan struktural yang telah diidentifikasi Sumitro Djojohadikusumo tiga dekade lalu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini menetapkan tiga tujuan: pertama, mengevaluasi capaian pembangunan Indonesia 1994-2025 dengan membandingkannya secara sistematis terhadap target kuantitatif yang disusun Sumitro pada 1994; kedua, menganalisis faktor ekonomi-institusi yang menyebabkan sejumlah target tersebut belum tercapai; dan ketiga, mengkaji arah reorientasi kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto serta merumuskan saran kebijakan yang terintegrasi agar pertumbuhan ekonomi benar-benar menghasilkan kesempatan kerja produktif yang menyejahterakan rakyat.

Kebaruan (novelty) artikel ini terletak pada penggabungan dua kerangka analisis yang jarang dipertemukan secara eksplisit dalam kajian kebijakan pembangunan Indonesia: kerangka teori pertumbuhan ekonomi neoklasik yang menekankan akumulasi faktor produksi, dan kerangka ekonomi kelembagaan (institutional economics) yang menekankan peran regulasi, tata kelola, dan insentif dalam menentukan hasil pembangunan. Dengan menggunakan target kuantitatif historis Sumitro Djojohadikusumo (1994) sebagai baseline evaluasi selama tiga puluh tahun, artikel ini menawarkan metode gap analysis yang jarang digunakan secara sistematis dalam literatur kebijakan publik Indonesia, sekaligus mengaitkannya dengan perkembangan kebijakan paling mutakhir pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, termasuk pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara, PT Danantara Sumberdaya Indonesia, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

II. TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor Produksi

Pemikiran Sumitro Djojohadikusumo tentang kebijakan pembangunan ekonomi sejalan dengan teori makroekonomi standar, baik dalam jangka pendek untuk memengaruhi permintaan agregat melalui kebijakan industri, perdagangan, fiskal, dan moneter (Keynes, 1936), maupun dalam jangka panjang untuk memengaruhi penawaran agregat melalui berbagai kebijakan dari sisi input produksi yang memengaruhi teori pertumbuhan ekonomi (Solow, 1956; Romer, 1990; Mankiw, Romer, & Weil, 1992; Blanchard, 2021). Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa output yang dihasilkan suatu negara merupakan hasil interaksi berbagai input produksi, yaitu modal fisik seperti mesin-mesin di pabrik, sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, teknologi yang memengaruhi kualitas modal fisik dan sumber daya manusia, serta sumber daya alam sebagai bahan baku produksi.

II.2 Ekonomi Kelembagaan (*Institutional Economics*)

Selain keempat faktor produksi tersebut, teori ekonomi kelembagaan menekankan faktor ekonomi-institusi sebagai penentu kinerja ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang (North, 1990; Kasper & Streit, 1998; Acemoglu & Robinson, 2012; Groenewegen, Spithoven, & van den Berg, 2010). Faktor ekonomi-institusi dipengaruhi oleh interaksi faktor sosial-politik-ekonomi, termasuk seperangkat peraturan hukum dan regulasi yang diterapkan dalam proses transaksi ekonomi di pasar — yaitu interaksi antara produsen dan konsumen — untuk menghasilkan kinerja ekonomi. Faktor ekonomi-institusi berupa regulasi dan peraturan perundang-undangan, sebagai hasil konsensus politik-ekonomi dan produk jasa pemerintahan/birokrasi, merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Acemoglu dan Robinson (2012) menegaskan bahwa perbedaan kemakmuran antarnegara pada dasarnya ditentukan oleh kualitas institusi ekonomi dan politik — apakah bersifat inklusif (memberi insentif luas bagi partisipasi ekonomi) atau ekstraktif (menguntungkan kelompok elite tertentu). Kerangka ini relevan untuk menganalisis mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil belum menghasilkan pemerataan kesejahteraan yang memadai.

II.3 Pemikiran Sumitro Djojohadikusumo tentang Pembangunan Ekonomi untuk Pemerataan Kesejahteraan Rakyat

Pembangunan ekonomi jauh lebih luas daripada sekadar peningkatan produksi sebagaimana diuraikan dalam teori pertumbuhan ekonomi konvensional, karena mencakup tujuan agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat secara merata. Oleh karena itu, hal yang amat penting dalam proses pembangunan adalah semakin meluasnya kesempatan kerja yang bersifat produktif (Sumitro Djojohadikusumo, 1994). Pemerintah perlu mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan kualitas lapangan kerja sekaligus mendorong peningkatan pendapatan rakyat.

Kewajiban pemerintah menurut Sumitro adalah mengatur kekuatan pasar agar mampu mewujudkan kesejahteraan umum, sebagaimana diuraikan dalam bukunya *Perdagangan dan Industri dalam Pembangunan*: “Pemerintah tidak akan menyerahkan diri pada permainan bebas dari kekuatan-kekuatan pasaran. Begitu muncul keganjilan-keganjilan kekuatan-kekuatan pasaran yang merugikan kepentingan umum, maka Pemerintah merasa wajib untuk memengaruhi faktor yang berada di belakang kekuatan-kekuatan pasaran guna menghilangkan keganjilan-keganjilan itu” (Sumitro Djojohadikusumo, 1985, h. 77).

Sumitro meyakini bahwa Indonesia mampu melakukan perubahan struktural untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yaitu dengan melakukan reorientasi dan realokasi kebijakan yang kemudian dijabarkan secara operasional melalui sasaran kebijakan kuantitatif untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam bukunya *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Sumitro Djojohadikusumo (1994) menguraikan tiga masalah pokok yang dihadapi pembangunan Indonesia dalam menghadapi Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (1994-2019): pertama, lapangan kerja produktif dan pengangguran, yaitu ketimpangan antara produktivitas sektor pertanian dan sektor sekunder (industri manufaktur dan konstruksi); kedua, ketimpangan dalam perimbangan kekuatan di antara golongan-golongan masyarakat yang terlibat aktif dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa; dan ketiga, ketidakseimbangan ekonomi antardaerah. Ketiga masalah tersebut ditargetkan Sumitro dapat diselesaikan dalam kurun 25 tahun (1994-2019), baik dalam jangka pendek (Pelita) maupun jangka menengah-panjang.

III. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan (*policy analysis*) yang bersifat deskriptif-kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*literature review*) dan analisis data sekunder. Data yang digunakan bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), data Kementerian Keuangan, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), basis data CEIC, basis data UN Comtrade, dokumen peraturan perundang-undangan, pidato dan pernyataan resmi pejabat negara, serta pemberitaan media nasional yang kredibel (Kompas, CNBC Indonesia, DDTC News, Katadata).

Teknik analisis utama yang digunakan adalah gap analysis, yaitu membandingkan secara sistematis sepuluh target kuantitatif pembangunan yang ditetapkan Sumitro Djojohadikusumo (1994) untuk periode 1994-2019 dengan realisasi capaian terakhir yang tersedia (2025-2026), guna menilai sejauh mana sasaran pembangunan tersebut telah tercapai. Selain itu, artikel ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) terhadap regulasi dan kebijakan yang diterbitkan pada periode 2024-2026 untuk mengidentifikasi arah reorientasi kebijakan ekonomi-institusi pemerintahan Prabowo Subianto, serta analisis studi kasus (*case study*) pada tiga program strategis, yaitu Badan Pengelola Investasi Danantara (dan PT Danantara Sumberdaya Indonesia); Program Makan Bergizi Gratis (MBG); dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), untuk mengilustrasikan tantangan implementasi kebijakan pada tingkat mikro-institusional.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1 Evaluasi Capaian Target Pembangunan Sumitro (1994-2025): Analisis Kesenjangan

Sumitro menargetkan sepuluh sasaran kuantitatif untuk periode 1994-2019 agar tiga masalah pokok pembangunan dapat teratasi. Tabel 1 merangkum perbandingan antara target dan realisasi terakhir.

Tabel 1. Perbandingan Target Sumitro Djojohadikusumo (1994) dan Realisasi 2025

No.	Indikator	Target Sumitro (1994)	Realisasi Terakhir	Status
1	Laju pertumbuhan PDB	Minimal rata-rata 6%/tahun	Stagnan sekitar 5% (2014-2024)	Belum tercapai
2	Laju inflasi	Rata-rata 5%/tahun	2,92% (Desember 2025, y.o.y)	Tercapai
3	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	Turun dari 5 menjadi 3-3,5	6,5 (data BPS 2025)	Belum tercapai
4	Tabungan nasional	30-35% dari PDB	35% dari PDB (Desember 2025)	Tercapai
5	Debt Service Ratio (DSR)	25% (1995) dan 20% (2000)	Sekitar 49% dari pendapatan negara (2025)	Belum tercapai
6	Dependency ratio	Turun dari 4 menjadi 2-2,5	2,22 (SUPAS 2025)	Tercapai
7	Kontribusi sektor sekunder terhadap PDB	30% dari PDB pada akhir PJP II	28,9% (industri manufaktur 19,07% + konstruksi 9,83%, BPS 2025)	Belum tercapai

No.	Indikator	Target Sumitro (1994)	Realisasi Terakhir	Status
8	Penyerapan tenaga kerja sektor sekunder	30-35% dari angkatan kerja	20,37% (industri manufaktur 13,86% + konstruksi 6,51%, SAKERNAS November 2025)	Belum tercapai
9	Tenaga kerja sektor pertanian	Turun dari 47% menjadi 15% dari angkatan kerja	27,99% (BPS, November 2025)	Belum tercapai
10	Investasi perhubungan antarpulau dan perhatian Indonesia Timur	Pemerataan infrastruktur dan SDM	Infrastruktur transportasi antarpulau relatif lebih merata; alokasi Dana Desa 3T, Dana Alokasi Khusus 3T, dan Otonomi Khusus Papua telah berjalan	Tercapai sebagian

Sumber: diolah dari BPS, SAKERNAS, SUPAS, CEIC, Kementerian Keuangan (2025), dan Sumitro Djojohadikusumo (1994).

Dari sepuluh indikator tersebut, empat indikator telah tercapai atau mendekati target — inflasi, rasio tabungan nasional, dependency ratio, dan pemerataan infrastruktur antarpulau — sementara enam indikator lainnya, yang sebagian besar berkaitan dengan efisiensi investasi, beban utang, dan struktur penyerapan tenaga kerja di sektor industri, belum tercapai. Temuan ini menunjukkan pola yang konsisten: indikator yang berkaitan dengan stabilitas makroekonomi (inflasi, tabungan) relatif lebih mudah dikendalikan pemerintah melalui kebijakan moneter dan fiskal konvensional, sedangkan indikator yang berkaitan dengan transformasi struktural — efisiensi investasi (ICOR), penyerapan tenaga kerja di sektor industri, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian — jauh lebih sulit dicapai karena memerlukan perubahan ekonomi-institusi yang lebih mendasar, bukan sekadar kebijakan makroekonomi jangka pendek.

Data ketenagakerjaan lebih lanjut memperkuat temuan ini. Berdasarkan SAKERNAS Februari 2025, rata-rata upah pekerja formal secara nasional adalah Rp 3,09 juta per bulan, dengan kesenjangan signifikan antarsektor: sepuluh dari tujuh belas sektor usaha memberi upah di atas rata-rata nasional, dipimpin sektor Pertambangan dan Penggalian (Rp 5,09 juta) serta Pengadaan Listrik, Gas, dan Uap/Air Panas (Rp 5,04 juta), sementara sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berada di posisi terendah (Rp 2,25 juta), hanya di atas sektor Aktivitas Jasa Lainnya (Rp 1,81 juta). Peran pekerja informal juga masih dominan: 59,4 persen pada Februari 2025, menurun sedikit menjadi 57,8 persen pada November 2025, dengan pendapatan bersih rata-rata hanya Rp 1,94 juta hingga Rp 3,33 juta per bulan — sekitar dua pertiga dari upah pekerja formal. Ketimpangan produktivitas antarsektor bagi pekerja informal juga terlihat jelas: sektor jasa memberikan pendapatan bersih tertinggi (Rp 2,19 juta), diikuti sektor industri (Rp 1,96 juta), dan sektor pertanian terendah (Rp 1,56 juta) (BPS, 2025).

IV.2 Mengapa Target Kesejahteraan Belum Tercapai: Analisis Kegagalan Institusional

Presiden Prabowo Subianto dalam bukunya *Paradoks Indonesia* mempertanyakan mengapa negara yang kaya sumber daya alam ternyata rakyatnya belum sejahtera dan tingkat kemiskinan

masih tinggi (Prabowo Subianto, 2019). Berdasarkan analisis artikel ini, jawabannya terletak pada tiga kegagalan ekonomi-institusi yang saling terkait.

Pertama, program peningkatan kesejahteraan rakyat tidak menjadi prioritas utama dan tidak terintegrasi dengan kebijakan industri, perdagangan global, dan keuangan, sehingga hasilnya tidak merata antarkelompok pendapatan. Pemerintahan pada periode 1994-2024 lebih memfokuskan pencapaian pertumbuhan ekonomi tinggi melalui investasi tinggi dan stabilitas makroekonomi, namun kurang memperhatikan masalah ekonomi-institusi seperti korupsi dan perdagangan ilegal. Pemerintahan Orde Baru (1969-1998) dan Orde Reformasi (1998-2024) berulang kali menggunakan tujuan pembangunan “Pertumbuhan, Stabilisasi, dan Pemerataan”, namun dalam pelaksanaannya realisasi desain program pembangunan tidak konsisten dengan tujuan besar tersebut. Salah satu penyebabnya adalah implementasi program pembangunan yang sangat difokuskan pada kelompok termiskin, sehingga keberhasilannya hanya dirasakan kelompok tersebut, sementara kesejahteraan kelompok menengah justru mengalami penurunan pada dekade 2020-an.

Analisis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) periode September 2000 hingga September 2025 menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi dinikmati secara tidak merata antarkelompok pendapatan, dengan pola yang berbeda-beda tergantung visi-misi kebijakan setiap periode pemerintahan (BPS, berbagai tahun; klasifikasi kelompok pendapatan mengacu pada World Bank, 2016). Persentase penduduk termiskin secara konsisten menurun pada periode 2003-2023, sejalan dengan fokus pemerintah menurunkan tingkat kemiskinan melalui program bantuan sosial bagi kelompok miskin (poor) dan mendekati miskin (near poor/rentan). Namun yang mengkhawatirkan, pada periode 2018-2023 persentase kelompok berpendapatan menengah (middle class) turun sekitar 4,2 persen, sementara kelompok rentan meningkat 1,4 persen dan kelompok calon kelas menengah (aspiring middle class) meningkat 3,8 persen — menandakan pergeseran sebagian kelas menengah ke kelompok di bawahnya. Perhitungan kurva pertumbuhan pendapatan (growth incidence curve) menggunakan data SUSENAS 2000-2022 juga menunjukkan bahwa kelompok pengeluaran terkaya tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan kelompok pengeluaran menengah (Dartanto & Can, 2015).

Kedua, penguatan faktor ekonomi-institusi dari tingkat makroekonomi hingga mikroekonomi merupakan prasyarat untuk menyejahterakan rakyat, namun paradigma perencanaan dan penganggaran nasional (Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan/BPK, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP) hingga 2024 hanya berfokus pada indikator keberhasilan keuangan (financial indicators) — yaitu penyerapan anggaran hingga 100 persen pada tahun fiskal berjalan — dan bukan pada indikator kinerja kesejahteraan rakyat (performance indicators) seperti penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan. Pemerintah bekerja dalam kotak-kotak birokrasi yang tidak efisien, dengan evaluasi keberhasilan anggaran yang sekadar mengukur ketercapaian target keuangan tanpa mencakup target kinerja peningkatan kesejahteraan. Alokasi dana pembangunan pada umumnya hanya mengutamakan ukuran keberhasilan fisik — misalnya jumlah gedung sekolah dan puskesmas yang dibangun, panjang jalan, atau jumlah lulusan perguruan tinggi — sementara ukuran kinerja berbasis prestasi (merit) masih sangat terbatas.

Ketiga, terdapat kendala struktural pada sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja. Dari sisi rumah tangga (penawaran pekerja), anak-anak dari keluarga miskin, terutama di perdesaan, memiliki akses informasi yang terbatas untuk memperoleh pendidikan dan beasiswa dari jenjang dasar hingga tinggi, yang diperparah oleh asimetri informasi akibat keterbatasan akses listrik, internet, dan telepon genggam. Dari sisi permintaan pekerja, pembangunan ekonomi juga dihadapkan pada persoalan *creative destruction*, yaitu ketika perubahan teknologi — robotisasi, digitalisasi, kecerdasan buatan — justru memperkecil jumlah lapangan kerja di berbagai sektor, tercermin dari melemahnya pusat perdagangan ritel perkotaan akibat pergeseran ke e-commerce sejak pandemi Covid-19 pada 2020, oversupply perkantoran akibat tren bekerja jarak jauh, serta pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di sektor teknologi digital.

IV.3 Reorientasi Kebijakan Era Prabowo: Dari Serakahnomics menuju Kemandirian Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai pidatonya menegaskan perubahan arah pembangunan dari yang disebutnya “Serakahnomics” menuju “Kemandirian Ekonomi” yang pro-kesejahteraan rakyat, setelah ditemukan bukti kecurangan ekspor yang mengakibatkan rendahnya penerimaan pajak Indonesia selama puluhan tahun. Laporan keuangan sejumlah perusahaan ekspor-impor — yang juga merupakan anak usaha perusahaan asing/mitra dagang dan telah beroperasi di Indonesia selama puluhan tahun — terbukti tidak akurat. Ditemukan permasalahan ekonomi-institusi di tingkat mikro berupa underinvoicing, yaitu bagian dari praktik trade misinvoicing pada sisi ekspor, di mana volume dan harga barang ekspor diperkecil di pelabuhan Indonesia namun dicatat lebih besar di pelabuhan tujuan, sehingga menguntungkan perusahaan induk di luar negeri namun merugikan penerimaan negara Indonesia. Selain itu, ditemukan pula praktik overinvoicing pada sisi impor dan transfer pricing yang membuat laporan laba perusahaan yang beroperasi di Indonesia menjadi sangat kecil karena beban biaya operasional dialokasikan pada entitas di Indonesia.

Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu 20 Mei 2026, terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, Presiden Prabowo mengumumkan perkiraan kerugian negara sekitar 908 miliar dolar Amerika Serikat, atau sekitar Rp 15.980,8 triliun (asumsi kurs Rp 17.600/USD), selama 34 tahun terakhir, dengan data bersumber dari UN-Comtrade (2025). Apabila kebocoran ini dapat dihentikan, Indonesia berpotensi meningkatkan pemasukan devisa ekspor sekaligus penerimaan pajak.

Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, pemerintah mendirikan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) sebagai badan eksportir tunggal bagi sejumlah komoditas strategis nasional, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis, yang berlaku sejak 1 Juni 2026. PT DSI dibentuk sebagai badan ekspor satu pintu untuk mengatasi masalah kecurangan ekspor — underreporting, misinvoicing, transfer pricing, perdagangan ilegal, dan penghindaran pajak (tax evasion) — sekaligus meningkatkan aliran devisa hasil ekspor yang selama ini mengendap di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).

Reorientasi kebijakan ini menghadapi resistensi. Pada awal Juni 2026, beredar narasi “*sell Indonesia*” yang berasal dari analisis sejumlah lembaga di Australia dan Singapura, yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok ke level 5.342 pada 8 Juni 2026 dan mata uang Rupiah terdepresiasi hingga lebih dari Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia merespons dengan menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,50 persen pada 9 Juni 2026. Investor dan trader saham domestik meresponsnya dengan tagline balasan “*sell Singapore*”, sehingga IHSG pulih ke level 6.377 pada 17 Juni 2026 dan Rupiah kembali menguat ke kisaran Rp 17.800 per dolar Amerika Serikat. Episode ini menggambarkan bahwa reorientasi ekonomi-institusi yang mengubah kepentingan kelompok yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama akan menghadapi resistensi, termasuk melalui mekanisme pasar modal dan opini publik global.

IV.4 Tantangan Institusional Industrialisasi dan Hilirisasi

Perubahan institusi terjadi secara cepat dalam pelaksanaan program-program prioritas (*quick win*) Presiden Prabowo, namun belum sepenuhnya sistematis dan memerlukan waktu evaluasi pada setiap tahap pelaksanaan. Pemerintah telah mengubah kerangka regulasi investasi dan BUMN secara signifikan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dengan peraturan pelaksana utama berupa Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Daftar Positif Investasi), yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 184 dan 185 Tahun 2024, terdapat dua entitas — Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) — yang berjalan paralel.

DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 pada 4 Februari 2025, sebagai perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dengan perubahan utama berupa pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) serta mandat pembentukan Holding Investasi dan Holding Operasional. Selanjutnya, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 pada 5 Oktober 2025, sebagai perubahan keempat, yang mencakup status penyelenggara negara bagi organ BUMN, kewenangan pemeriksaan BUMN oleh BPK, transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur BUMN, pembagian kewenangan antara Badan Pengatur BUMN dan BPI Danantara, kepemilikan saham BUMN dan perusahaan holding, serta perlakuan perpajakan bagi transaksi yang melibatkan BPI Danantara.

BPI Danantara, yang didirikan pada 24 Februari 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, dan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025, memiliki tugas pokok mengelola dividen dari holding investasi, holding operasional, dan BUMN; menyetujui penambahan atau pengurangan modal BUMN dari hasil pengelolaan dividen; menyetujui restrukturisasi BUMN termasuk merger, akuisisi, dan pemisahan usaha; serta membentuk holding investasi, holding operasional, dan BUMN baru. Sebagai sovereign wealth fund, Danantara — yang dipimpin oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM — fokus pada kegiatan

hilirisasi dan industrialisasi di sejumlah sektor prioritas, terutama untuk mencapai swasembada energi dan peningkatan nilai tambah, dengan masukan program dari Satuan Tugas Hilirisasi yang dipimpin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tantangan utama bagi BPI Danantara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penciptaan lapangan kerja adalah belum adanya standar operasional prosedur (SOP) untuk mengukur kinerja Danantara dan BUMN di bawahnya dalam dimensi kesejahteraan rakyat. Danantara dan BUMN pada dasarnya bertujuan menghasilkan laba, namun sekaligus memikul public service obligation (PSO) untuk tujuan kesejahteraan rakyat melalui penciptaan lapangan kerja — sebuah peran ganda yang membedakannya dari perusahaan swasta murni. Selain itu, program swasembada energi melalui hilirisasi sektor mineral dan tambang hanya menyerap lapangan kerja dalam jumlah relatif kecil, karena bersifat padat modal dan padat teknologi, meskipun tetap menjadi kunci keberhasilan industrialisasi nasional. Karena itu, diperlukan pengembangan sumber daya manusia berbasis pendidikan tinggi dan menengah yang relevan dengan kebutuhan riset dan pengembangan industri.

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini mengusulkan tiga saran kebijakan untuk pilar industrialisasi dan hilirisasi. Pertama, Kementerian Keuangan dan BPI Danantara perlu menerbitkan regulasi yang secara konsisten mendorong realisasi program kesejahteraan rakyat melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas (formal), antara lain dengan mewajibkan pelaporan resmi dan publik secara tahunan mengenai pertumbuhan jumlah pekerja formal dan informal pada setiap perusahaan maupun kegiatan di bawah BPI Danantara. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana dan fasilitas riset dan pengembangan hilirisasi/industrialisasi di berbagai sektor strategis nasional melalui kolaborasi Kementerian Keuangan (sumber APBN) dan Danareksa (sumber BUMN). Ketiga, pemerintah perlu mengembangkan kurikulum pendidikan tinggi dan sekolah menengah atas/kejuruan yang selaras dengan kebutuhan pengembangan teknologi pada berbagai program hilirisasi, diterapkan secara luas melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sekolah menengah domestik maupun lembaga pendidikan luar negeri yang relevan.

IV.5 Tantangan Reformasi Sistem Keuangan Publik: Dari *Financial-Based* ke *Performance-Based Budgeting*

Reorientasi kebijakan Prabowo yang mengutamakan pencapaian kesejahteraan rakyat memerlukan reorientasi institusi bagi kementerian/lembaga pengelola keuangan pemerintah di tingkat nasional (Kementerian Keuangan, BPK, dan BPKP) hingga tingkat daerah, dari paradigma financial-based — yaitu ukuran kinerja keuangan sekadar menghabiskan anggaran — menjadi performance-based, yaitu ukuran kinerja keberhasilan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Perubahan paradigma ini perlu diterapkan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi.

Pada awal tahun anggaran 2025, pemerintah telah melakukan realokasi dan efisiensi anggaran kementerian/lembaga sebesar sekitar Rp 700 triliun, dengan sebagian dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekitar Rp 71 triliun pada tahap pertama dan Rp 100 triliun pada tahap kedua, serta tambahan modal Danantara dari APBN sebesar Rp 300 triliun (pernyataan Presiden Prabowo, 24 Februari 2025, dikutip DDTC News, 2025). Realokasi ini menimbulkan trade-off antara dana pendidikan dan kesehatan dengan Program MBG, termasuk realokasi dana

peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dasar-menengah-tinggi serta program kesehatan. Realisasi dana Program MBG dari total anggaran Rp 171 triliun hanya terserap sekitar Rp 99 triliun, sementara sekitar Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden (Kompas, 13 Oktober 2025).

Studi kasus Program MBG mengilustrasikan konsekuensi dari lemahnya sistem penganggaran berbasis kinerja. Dasar hukum program ini adalah Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2024 tentang Program MBG dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN), namun hingga saat ini belum ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang menjadi payung hukum program tersebut. Meskipun tujuan program ini baik — meningkatkan gizi anak dan ibu hamil, terutama bagi kelompok rakyat miskin dan rentan miskin — pelaksanaannya menyimpang dari standar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menimbulkan sejumlah persoalan: kualitas makanan yang tidak memenuhi standar gizi hingga menyebabkan keracunan pada ribuan siswa penerima; ketidakefisienan alokasi kepada keluarga di luar kelompok miskin dan rentan miskin, yang menyebabkan sebagian besar makanan program subsidi ini justru terbuang; serta proses penunjukan pengelola SPPG dan tender anggaran MBG yang tidak transparan, sehingga menimbulkan biaya transaksi tinggi akibat pembagian rente ekonomi. Pada 2 Juni 2026, Pimpinan BGN dan kedua wakilnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi terkait mark-up biaya pengadaan motor listrik dan pengalokasian SPPG, sehingga Presiden Prabowo mengganti kepemimpinan BGN. Pimpinan baru BGN kemudian melakukan evaluasi terhadap sekitar 30 ribu SPPG yang telah beroperasi serta menetapkan moratorium sementara.

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini merumuskan saran kebijakan sebagai berikut. Pertama, Kementerian Keuangan perlu memimpin perubahan arah akuntabilitas keuangan publik dari *financial-based budgeting* menjadi *performance-based budgeting*, dengan mengukur target kinerja kesejahteraan rakyat — penciptaan lapangan kerja formal, peningkatan produktivitas dan pendapatan pekerja, serta penurunan kemiskinan individu maupun rumah tangga — sebagai indikator keberhasilan program pemerintah melalui APBN. Kedua, khusus untuk Program MBG, mengingat alokasi dananya yang masif (Rp 335 triliun pada tahun anggaran 2026, dengan porsi BGN sebesar Rp 268 triliun) dan dampaknya yang bersifat jangka panjang, diperlukan kerangka regulasi yang lengkap, dari undang-undang hingga regulasi operasional, agar hak dan kewajiban penyelenggara maupun penerima program menjadi jelas. Ketiga, alokasi Program MBG perlu diprioritaskan bagi keluarga miskin, rentan miskin, dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan prioritas penerima manfaat pada kelompok anak usia dini, ibu hamil, dan ibu menyusui, diikuti anak usia sekolah dasar (6-12 tahun), sementara anak usia di atas 12 tahun — khususnya jenjang SMA/SMK — tidak lagi menjadi prioritas program karena pengaruh peningkatan gizi terhadap perkembangan fisik mereka relatif kecil.

IV.6 Tantangan Swasembada Pangan dan Pembangunan Perdesaan

Program Swasembada Pangan, yang dijalankan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian/Badan Pangan Nasional, dan Perum BULOG, menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan petani melalui skema bantuan langsung belum menjadi prioritas dan belum menjadi indikator kinerja, baik di tingkat nasional maupun daerah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan sejumlah perubahan ekonomi-institusi yang mendukung capaian swasembada pangan saat ini (CNBC Indonesia, 2 Juni 2026), antara lain deregulasi rantai distribusi pupuk dari produsen langsung ke petani, sehingga harga di tingkat petani menjadi terjangkau dan

stok pupuk nasional meningkat menjadi 5,3 juta ton. Dalam satu tahun masa jabatannya, Menteri Pertanian mendorong terbitnya 16 Instruksi Presiden untuk mempermudah sarana produksi petani, salah satunya terkait distribusi pupuk yang sebelumnya melibatkan 12 kementerian, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota, kini disederhanakan menjadi tiga tahap: Kementerian Pertanian ke produsen, lalu langsung ke petani, direncanakan melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sebanyak 145 Peraturan Menteri Pertanian yang dinilai mempersulit petani berproduksi turut dicabut.

Meskipun demikian, secara konseptual berbagai program di tingkat kementerian/lembaga terkait sektor pertanian masih berfokus pada model peningkatan kesejahteraan secara tidak langsung, yaitu subsidi barang produksi seperti pupuk bersubsidi, dengan harapan distribusi tepat sasaran melalui pedagang antara. Analisis ekonomi-institusi menunjukkan kelemahan model ini: terjadi moral hazard akibat informasi tidak lengkap (*asymmetric information*) antara kelompok petani, pedagang, dan pemerintah, sehingga menimbulkan biaya transaksi tambahan — petani memperoleh pupuk dengan harga lebih tinggi daripada harga subsidi resmi, karena pedagang perantara mengambil margin keuntungan dan sebagian di antaranya disalurkan kepada pemburu rente ekonomi, termasuk aparat/birokrat pusat-daerah, aparat perusahaan pupuk BUMN, dan pedagang besar. Risiko serupa berpotensi terulang ketika Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memperoleh kewenangan mendistribusikan pupuk, karena entitas koperasi tetap memerlukan margin keuntungan dalam struktur harga jualnya kepada petani.

Sejak 2025, pemerintah mengubah orientasi pembangunan perdesaan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi KDKMP, melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP, yang menargetkan pendirian, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 KDKMP sejak 27 Maret 2025. Pada 21 Juli 2025, Presiden Prabowo meresmikan kelembagaan/badan hukum 80.081 KDKMP di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan pada 16 Mei 2026 meresmikan mulai beroperasinya 1.061 KDKMP di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025, unit usaha KDKMP meliputi kantor koperasi, pengadaan sembako, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, pergudangan/cold storage, logistik desa/kelurahan, serta usaha simpan pinjam, dengan pembiayaan bersumber dari APBN, APBD, APBDesa, dan sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 dan 63 Tahun 2025, Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025.

Peralihan orientasi ini didasari evaluasi bahwa program pembangunan desa melalui BUMDes selama lebih dari satu dekade belum efektif menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa. Jumlah BUMDes meningkat pesat dari 1.022 unit pada 2014 menjadi 58.065 unit pada 2023, namun Pendapatan Asli Desa (PAD) tahun 2023 hanya Rp 3,2 triliun — naik dari Rp 2,8 triliun pada 2022, tetapi jauh lebih kecil dibandingkan PAD tahun 2014 sebesar Rp 4,2 triliun yang saat itu hanya dihasilkan oleh 1.022 unit BUMDes (Asia, 2024). Dari hampir 80 ribu desa penerima Dana Desa selama satu dekade terakhir, diperkirakan hanya sekitar 200 BUMDes yang benar-benar

berhasil menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa, sebagian besar berupa usaha jasa pariwisata (Sujatmiko, 10 Juni 2026).

Namun demikian, KDKMP menghadapi kendala regulasi yang membatasi ruang geraknya sebagai koperasi serbausaha berskala besar. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai dasar hukum utama telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta diperkuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku sejak 31 Desember 2024. Setelah berlakunya Perppu Cipta Kerja, koperasi simpan pinjam yang murni melayani anggota sendiri (closed loop) tetap berada di bawah pembinaan Kementerian Koperasi, sementara koperasi simpan pinjam yang bersifat open loop berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan wajib memperoleh izin usaha dari OJK sesuai Pasal 202 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Koperasi simpan pinjam berskala besar (aset di atas Rp 1 miliar) juga dibatasi hanya pada satu jenis usaha, yakni simpan pinjam — ketentuan yang turut berlaku bagi KDKMP.

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini merumuskan tiga saran kebijakan. Pertama, model peningkatan kesejahteraan petani yang bersifat langsung di tingkat usaha mikro rumah tangga perlu menjadi prioritas dan ditetapkan sebagai indikator kinerja nasional hingga daerah. Kedua, diperlukan perubahan model pendanaan petani dari subsidi barang (misalnya subsidi kepada produsen pupuk dan alat pertanian) menjadi subsidi langsung yang diterima petani untuk meningkatkan produktivitas usaha taninya, mencakup bantuan modal untuk perluasan usaha melalui teknologi mutakhir, perluasan akses pasar domestik dan internasional, serta pendampingan profesional dalam pengelolaan produksi, keuangan, dan pemasaran. Ketiga, apabila KDKMP diharapkan berkembang menjadi koperasi aneka usaha skala menengah-besar termasuk dalam usaha simpan pinjam, pemerintah perlu merevisi peraturan perundang-undangan tentang Badan Hukum Koperasi di tingkat nasional hingga daerah, mengingat UU Cipta Kerja dan produk hukum turunannya saat ini justru mempersempit ruang usaha koperasi serbausaha, khususnya dalam bisnis simpan pinjam.

IV.7 Investasi Sumber Daya Manusia sebagai Fondasi Jangka Panjang

Prioritas utama perencanaan pembangunan selama ini cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek melalui proyek pembangunan fisik, tecermin dari alokasi dana Proyek Strategis Nasional yang jauh lebih besar dibandingkan alokasi investasi pendidikan untuk membentuk sumber daya manusia yang produktif dan mandiri, sebagaimana diharapkan Sumitro. Produktivitas pekerja melalui investasi pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan lapangan kerja formal berkualitas belum pernah menjadi fokus dan prioritas utama pemerintah sejak masa Orde Baru hingga saat ini.

Salah satu hambatan struktural utama adalah tingkat elektrifikasi yang belum merata. Data Kementerian ESDM hingga Juni 2026 menunjukkan masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik, serta 340 kecamatan yang belum mendapatkan akses listrik dari PT PLN, setara dengan 1,3 juta rumah tangga yang belum terlayani listrik. Untuk memberikan akses listrik ke seluruh wilayah Indonesia, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 48 triliun selama lima

tahun. Keterbatasan infrastruktur dasar ini memperkuat asimetri informasi yang menghambat akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin di perdesaan sebagaimana dibahas pada subbagian 4.2.

Presiden Prabowo menjalankan dua program unggulan investasi sumber daya manusia: Sekolah Rakyat, yang hanya menerima murid dari kelompok termiskin di bawah koordinasi Kementerian Sosial, dan Sekolah Unggulan, yang menerima murid dari seluruh kelompok pendapatan di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Tinggi. Program Sekolah Rakyat diumumkan pada awal 2025 dengan target membangun 500 unit hingga 2029. Presiden telah meresmikan 166 titik Sekolah Rakyat pada 12 Januari 2025, tersebar di Jawa (70 titik), Sumatra (35 titik), Sulawesi (28 titik), Kalimantan (13 titik), dan Maluku (7 titik). Kementerian Sosial menargetkan 183 Sekolah Rakyat beroperasi hingga akhir 2026, terdiri atas 80 sekolah rintisan, 93 sekolah permanen, dan 10 sekolah rintisan tambahan, dengan kapasitas total lebih dari 45 ribu siswa.

Berkaitan dengan program perumahan rakyat, pemerintah menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan 1 juta unit di perkotaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta pembangunan langsung. Realisasi per Oktober 2025 mencatat distribusi FLPP sebanyak 203.439 unit dan BSPS sekitar 23.500 unit; hingga 19 Desember 2025, FLPP telah menghasilkan 263.017 rumah subsidi senilai Rp 32,67 triliun, melibatkan 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, dan 7.998 pengembang yang tersebar di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota. Program ini berpotensi mendukung kesejahteraan rakyat melalui akses kepemilikan rumah, meskipun kriteria kelompok pendapatan penerima manfaat belum dijelaskan secara eksplisit.

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini merumuskan tiga saran kebijakan investasi sumber daya manusia. Pertama, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Agama perlu memetakan capaian hasil investasi pendidikan melalui perbandingan sistematis antara jalur pendidikan reguler, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggulan. Kedua, diperlukan pengembangan ekosistem pendidikan yang melakukan refocusing investasi untuk mendorong kemajuan teknologi dan industri nasional, termasuk perluasan elektrifikasi sebagai prasyarat dasar akses informasi dan pendidikan di perdesaan. Ketiga, prioritas subsidi dan beasiswa perlu diberikan kepada kelompok miskin dan berbasis prestasi (merit), dengan proses dan hasil yang diumumkan secara transparan dan akuntabel. Keempat, khusus Kementerian Perumahan Rakyat, diperlukan pelaporan hasil evaluasi pembagian subsidi rumah rakyat berdasarkan kriteria kelompok pendapatan penerima secara transparan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi tidak cukup untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata. Target pertumbuhan 8 persen pada 2029 hanya akan bermakna apabila disertai penciptaan lapangan kerja formal yang merata di seluruh kelompok pendapatan. Analisis gap terhadap sepuluh target kuantitatif Sumitro Djojohadikusumo (1994) menunjukkan bahwa setelah tiga puluh tahun, capaian pembangunan Indonesia masih timpang:

indikator stabilitas makroekonomi relatif tercapai, sementara indikator transformasi struktural — efisiensi investasi, penyerapan tenaga kerja industri, dan pergeseran struktur tenaga kerja dari pertanian — masih jauh dari target. Tiga faktor ekonomi-institusi menjelaskan kesenjangan ini: ketidakterintegrasian kebijakan kesejahteraan dengan kebijakan industri dan perdagangan global, paradigma penganggaran yang masih financial-based, dan pemerataan yang tidak seimbang antarkelompok pendapatan, tecermin dari penyusutan kelas menengah pada 2018-2023.

Reorientasi kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto — dari “Serakahnomics” menuju “kemandirian ekonomi pro-kesejahteraan rakyat”— telah dimulai, tercermin dari pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk mengatasi kebocoran devisa ekspor, transformasi BPI Danantara sebagai pengelola investasi strategis, serta pergeseran orientasi pembangunan desa dari BUMDes menuju Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Namun demikian, perubahan institusi ini berjalan cepat dan belum sepenuhnya sistematis, sehingga memerlukan evaluasi berkala terhadap efektivitas, efisiensi, dan konsistensi implementasinya — sebagaimana tergambar dari studi kasus Program Makan Bergizi Gratis yang menghadapi persoalan tata kelola serius sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Artikel ini mengusulkan empat pilar kebijakan terintegrasi. Pertama, pada pilar industri dan hilirisasi, pemerintah perlu mewajibkan pelaporan realisasi lapangan kerja formal per proyek Danantara, meningkatkan riset dan pengembangan hilirisasi melalui kolaborasi APBN dan Danareksa, serta menyelaraskan kurikulum SMK/ perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja industri strategis. Kedua, pada pilar reformasi keuangan, Kementerian Keuangan perlu memimpin transisi menuju performance-based budgeting dengan indikator kinerja berupa lapangan kerja formal, produktivitas, dan penurunan kemiskinan, disertai evaluasi menyeluruh terhadap trade-off Program MBG dengan sektor pendidikan dan kesehatan. Ketiga, pada pilar pangan, petani, dan pemberdayaan desa, pemerintah perlu mengalihkan subsidi barang menjadi subsidi langsung kepada petani, merevisi regulasi koperasi agar KDKMP dapat memperluas jenis usahanya, serta memberikan pendampingan profesional bagi BUMDes yang masih dapat dipertahankan. Keempat, pada pilar investasi sumber daya manusia jangka panjang, pemerintah perlu memperluas beasiswa berbasis prestasi bagi kelompok miskin dan daerah 3T, mempercepat elektrifikasi 1,3 juta rumah tangga dalam lima tahun ke depan dengan estimasi kebutuhan anggaran Rp 48 triliun, serta membangun ekosistem pendidikan-industri yang mendukung kemajuan teknologi nasional.

Kunci keberhasilan keempat pilar tersebut terletak pada implementasinya secara terintegrasi, bukan sebagai program silo di masing-masing kementerian/ lembaga. Ukuran keberhasilan pembangunan perlu diubah secara fundamental: bukan lagi sekadar jumlah anggaran yang terserap atau angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto, melainkan jumlah lapangan kerja formal yang benar-benar tercipta bagi rakyat Indonesia. Sebagaimana diingatkan Sumitro Djojohadikusumo, memperluas kesempatan kerja produktif adalah inti sejati pembangunan Indonesia — dan jika ukuran keberhasilan pembangunan tetap hanya berupa angka pertumbuhan PDB, bukan lapangan kerja formal, Indonesia berisiko terus mengulang paradoks yang sama: negara kaya sumber daya alam, namun rakyatnya belum sepenuhnya sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Laporan

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business.
- Blanchard, O. (2021). *Macroeconomics* (8th ed.). Pearson Education.
- Dartanto, T., & Can, U. T. (2015). Volatility and poverty in Indonesia: A dynamic panel data analysis. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(3), 421-444.
- Groenewegen, J., Spithoven, A., & van den Berg, A. (2010). *Institutional economics: An introduction*. Palgrave Macmillan.
- Kasper, W., & Streit, M. E. (1998). *Institutional economics: Social order and public policy*. Edward Elgar Publishing.
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. Macmillan.
- Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 107(2), 407-437.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Prabowo Subianto. (2019). *Paradoks Indonesia: Sebuah solusi*. Institute for Policy Studies.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71-S102.
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65-94.
- Sumitro Djojohadikusumo. (1985). *Perdagangan dan industri dalam pembangunan*. LP3ES.
- Sumitro Djojohadikusumo. (1994). *Dasar teori ekonomi pertumbuhan dan ekonomi pembangunan*. LP3ES.
- World Bank. (2016). *Aspiring Indonesia: Expanding the middle class*. World Bank Group.
- Data dan Publikasi Resmi
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Februari dan November 2025*. BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), September 2000-September 2025*. BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025*. BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Data pertumbuhan Produk Domestik Bruto dan kontribusi sektoral 2025, diolah Tim Satuan Tugas Hilirisasi*.
- CEIC Data. (2025). *Indonesia gross savings ratio to GDP, Desember 2025*.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2026). *Data elektrifikasi desa dan dusun, Juni 2026*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Laporan posisi utang pemerintah dan pendapatan negara per 31 Desember 2025.

UN-Comtrade. (2025). International trade statistics database.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2024 tentang Program Makan Bergizi Gratis.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 dan Nomor 185 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Unit Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025, Nomor 63 Tahun 2025, dan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pendanaan dan Pengalokasian Dana Desa serta Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa dalam Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Dukungan Bupati/Wali Kota dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.

Sumber Berita dan Pernyataan Resmi

Asia, M. I. M. (2024, 29 Januari). Keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa. Kompas.

CNBC Indonesia. (2026, 2 Juni). Wawancara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tentang reformasi distribusi pupuk dan swasembada pangan.

DDTC News. (2025, 24 Februari). Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang realokasi dan efisiensi anggaran kementerian/lembaga.

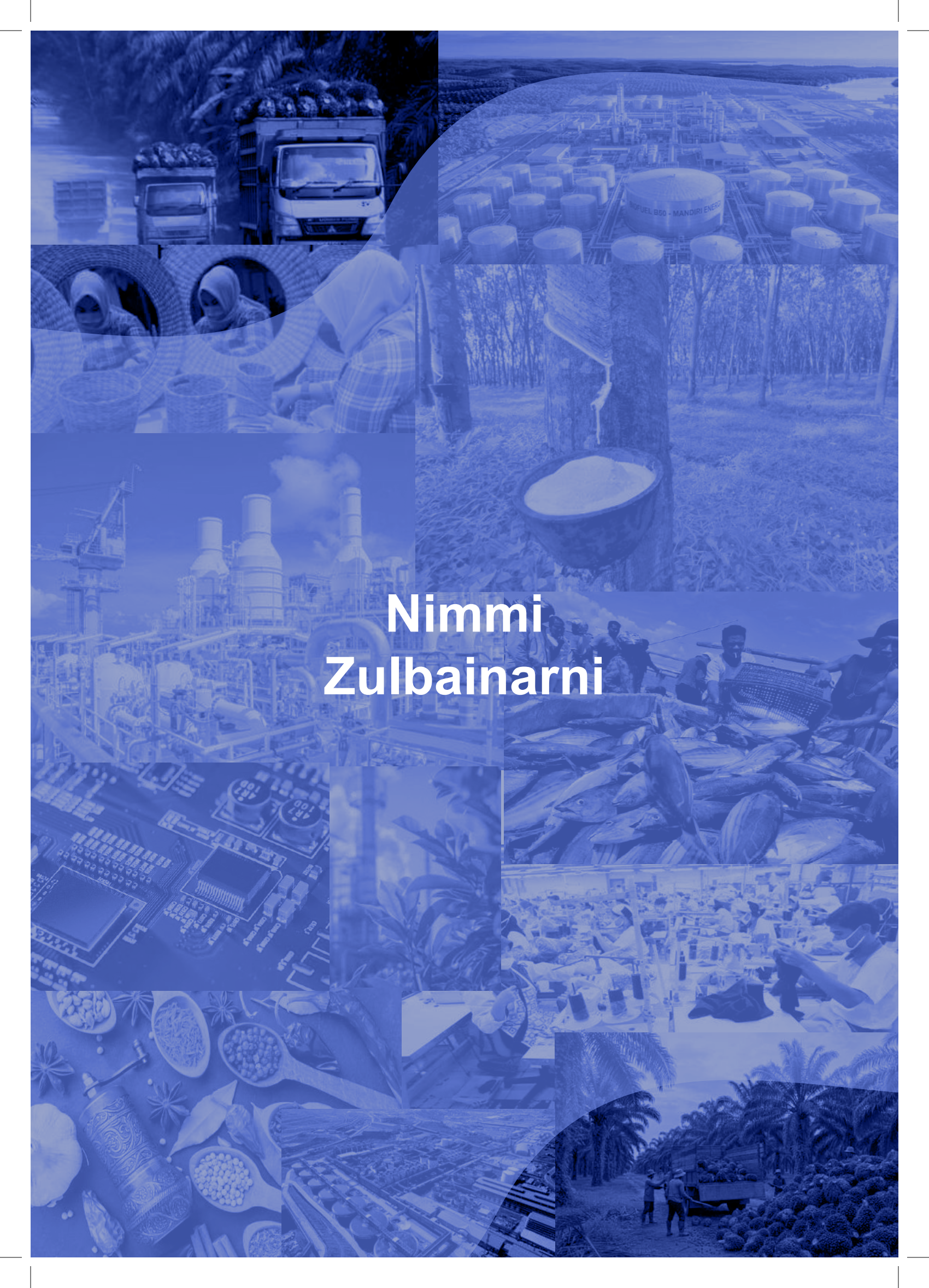
Katadata. (2025). Kelompok penduduk Indonesia berdasarkan pengeluaran, diolah dari data BPS SUSENAS.

Kompas. (2025, 13 Oktober). Pernyataan tertulis Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana tentang realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis.

Pidato Presiden Prabowo Subianto pada Rapat Paripurna DPR RI tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027. (2026, 20 Mei).

Pidato Presiden Prabowo Subianto tentang Inefisiensi Investasi dan Angka ICOR Indonesia. (2026, 29 April).

Sujatmiko, B. (2026, 10 Juni). Presentasi Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan tentang Sumitronomics [Presentasi]. Universitas Paramadina, Jakarta.



Nimmi Zulbainarni



FOCUS GROUP DISCUSSION BIDANG IV ISEI

EKONOMI BIRU DAN HILIRISASI KELAUTAN-PERIKANAN UNTUK PERTUMBUHAN INKLUSIF

Road to Pleno Bogor



19 Juni 2026



Presented By:

Assoc. Prof. Dr. Nimmi Zulbainarni, S.Pi., M.Si., CWM®
Ketua Focus Group Kelautan dan Perikanan



PENANGKAPAN



PENDARATAN



PENGOLAHAN



DISTRIBUSI



PASAR / EKSPOR

Hi-PER Menuju Indonesia Maju



FOCUS GROUP DISCUSSION BIDANG IV ISEI

KONTEKS STRATEGIS

KELAUTAN-PERIKANAN: SEKTOR STRATEGIS, TETAPI NILAI TAMBAH BELUM OPTIMAL



Gagasan Utama

- Ekonomi biru perikanan berarti mengubah komoditas ikan dan rumput laut menjadi produk bernilai tambah.
- Didukung rantai dingin, pengolahan, sertifikasi, dan traceability.
- Memperluas akses ekspor dan menciptakan lapangan kerja di kawasan pesisir.



Konteks ekonomi biru

- Pro Poor: memperluas manfaat bagi nelayan, pembudidaya, dan UMKM pesisir.
- Pro Job: menciptakan lapangan kerja di kawasan pesisir.
- Pro Growth: mendorong pertumbuhan melalui hilirisasi, investasi, dan ekspor.
- Pro Environment: menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
- Didukung inovasi pada pengolahan, rantai dingin, sertifikasi, dan traceability.

KINERJA UTAMA 2025 >>>



26,26
juta ton

Produksi 2025



11,48%

Pertumbuhan produksi
dari 2024



USD6,27
miliar

Ekspor 2025



USD5,60
miliar

Surplus perdagangan 2025

- Pasar ekspor masih terkonsentrasi pada AS, Tiongkok, ASEAN, Jepang, dan Uni Eropa.

(KKP, 2025)



PENANGKAPAN



PENDARATAN



PENGOLAHAN



SERTIFIKASI &
TRACEABILITY



PASAR EKSPOR



LAPANGAN KERJA
(PESISIR)



Hi-PER Menuju Indonesia Maju

2



DIAGNOSIS MASALAH

EMPAT BOTTLENECK YANG MENGUNCI HILIRISASI KP

Hilirisasi kelautan-perikanan tidak cukup dengan membangun industri pengolahan; rantai nilai harus dibebaskan dari empat sumbatan utama: PNBP, BBM, DHE, dan Tarif.



1. PNBP

Menentukan insentif kepatuhan, biaya usaha, dan kualitas tata kelola sumber daya ikan.



2. BBM

Menentukan biaya melaut, margin nelayan, dan harga bahan baku industri.



3. DHE

Menentukan likuiditas eksportir dalam membeli bahan baku cepat dari nelayan dan pembudidaya.



4. Tarif & Standar

Menentukan daya saing produk Indonesia di pasar global melalui harga, mutu, dan traceability.



Pesan Kunci

Keempat *bottleneck* saling terhubung: BBM menekan biaya hulu, PNBP memengaruhi formalitas dan insentif, DHE memengaruhi arus kas eksportir, sedangkan tarif menentukan daya saing pasar.



BOTTLENECK 1

PNBP PRODUKTIF: DARI PUNGUTAN KE REINVESTASI SEKTOR

PNBP pada sektor perikanan perlu bergeser dari instrumen penerimaan semata menjadi instrumen tata kelola, kepatuhan, dan pembiayaan kembali untuk memperkuat ekosistem hilirisasi.



Data Kunci 2025



Rp1,027 triliun

Realisasi PNBP SDA perikanan tangkap per 14 Desember 2025
(Sumber: KKP, 2025)



Rp1,19 triliun

Proyeksi PNBP SDA hingga akhir 2025
(Sumber: KKP, 2025)



7,85 juta ton

Proyeksi produksi perikanan tangkap 2025
(Sumber: KKP, 2025)



Diagnosis Masalah

- 1 PNBP masih sering dipersepsikan sebagai beban biaya tambahan, bukan instrumen layanan produktif.
- 2 Manfaat balik belum selalu terasa langsung dalam bentuk pelabuhan yang efisien, *cold chain*, sertifikasi, dan pengawasan.
- 3 Jika pungutan dianggap rumit atau tidak seimbang dengan layanan, risiko informalitas dan resistensi pelaku usaha meningkat.



Arah Solusi: PNBP Produktif



Pesan Kunci

PNBP harus bergeser dari *revenue extraction* menjadi *revenue recycling* agar memperkuat kepatuhan, produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan pelaku kelautan-perikanan.



BOTTLENECK 2

BBM PRESISI: PRASYARAT HILIRISASI YANG INKLUSIF

BBM bukan sekadar isu subsidi, tetapi penentu biaya melaut, margin nelayan, stabilitas bahan baku, dan daya saing industri pengolahan.



Pesan Kunci

BBM presisi harus diposisikan sebagai *kebijakan produktivitas*: menurunkan biaya hulu, menjaga pasokan industri, dan melindungi pendapatan nelayan kecil.

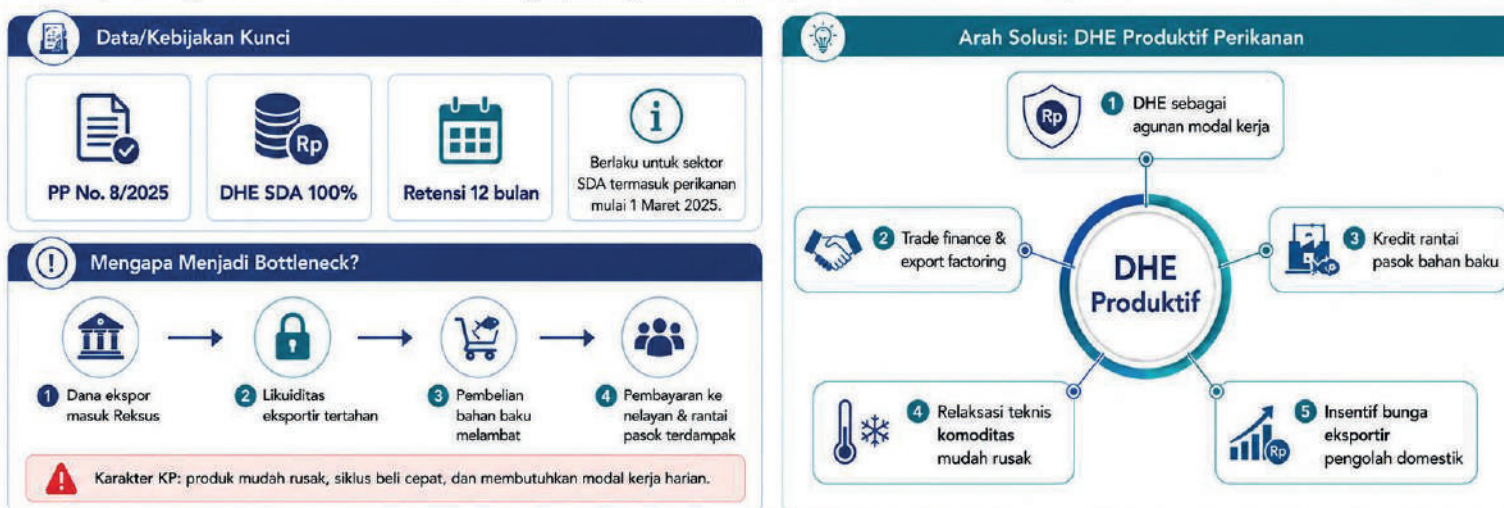
Sumber utama: DFW Indonesia (2025); BPH Migas (2025).



BOTTLENECK 3

DHE PRODUKTIF: MENJAGA STABILITAS MAKRO TANPA MEMUTUS CASHFLOW PERIKANAN

DHE SDA perlu menjadi instrumen stabilitas devisa sekaligus pembiayaan rantai pasok, bukan sumbatan likuiditas eksportir.



Pesan Kunci

DHE harus menjadi *liquidity enabler* bagi hilirisasi, bukan *bottleneck cashflow* rantai pasok perikanan.



BOTTLENECK 4

TARIF & AKSES PASAR: DAYA SAING DITENTUKAN OLEH MUTU, TRACEABILITY, DAN DIVERSIFIKASI

Ekspor perikanan Indonesia perlu menjawab tekanan tarif dan standar non-tarif melalui mutu, sertifikasi, produk olahan bernilai tambah, dan perluasan pasar.



SOLUSI 1

INVESTASI HILIRISASI: MEMBANGUN EKOSISTEM, BUKAN SEKADAR PABRIK

Investasi kelautan-perikanan harus diarahkan untuk menurunkan biaya logistik, memperkuat rantai dingin, mendekatkan pengolahan ke sumber bahan baku, dan memperluas nilai tambah.

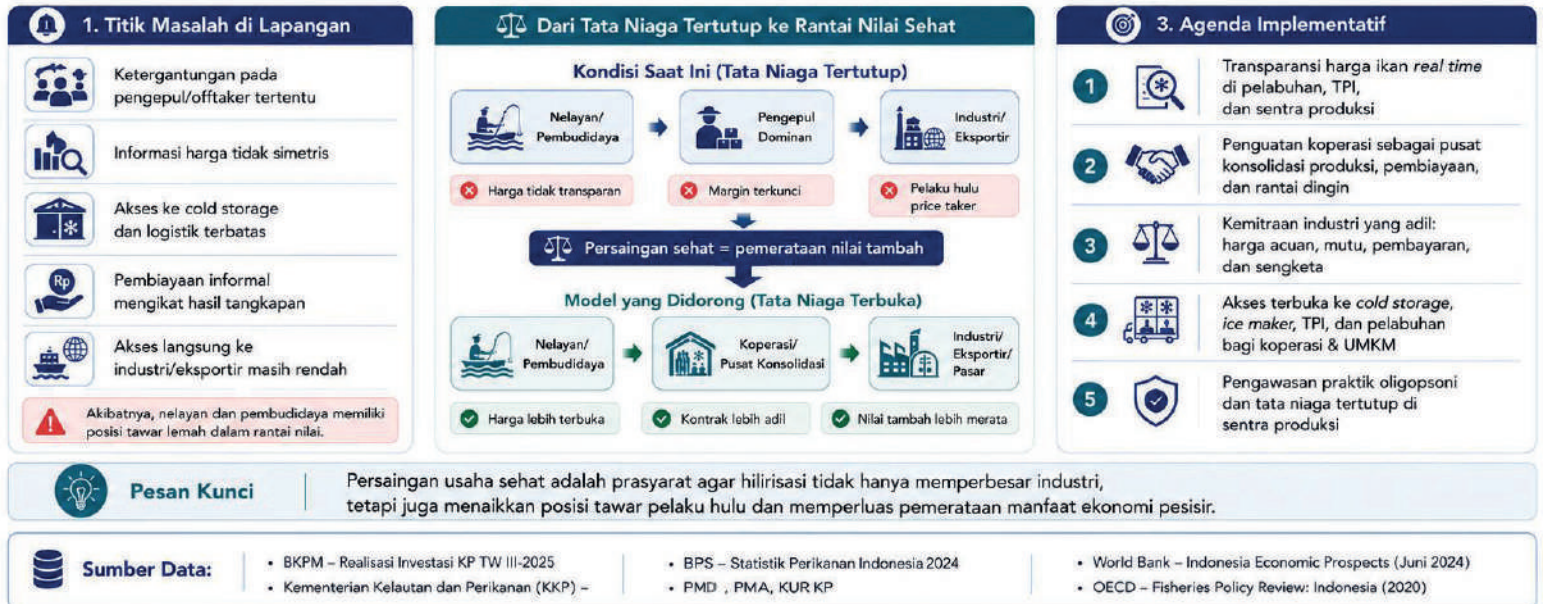




SOLUSI 2

PERSAINGAN USAHA SEHAT: NILAI TAMBAH TIDAK BOLEH TERKUNCI DI SEGELINTIR AKTOR

Hilirisasi yang inklusif membutuhkan tata niaga yang terbuka, transparan, dan kompetitif agar nelayan dan pembudidaya tidak tetap menjadi price taker.



SOLUSI 3

TENAGA KERJA KP: DARI PEKERJA HULU KE SDM INDUSTRI BERNILAI TAMBAH

Hilirisasi kelautan-perikanan hanya inklusif jika tenaga kerja pesisir naik kelas: dari pemasok bahan baku menjadi SDM pengolahan, mutu, *traceability*, logistik dingin, dan pemasaran.





REKOMENDASI

KEBIJAKAN TERINTEGRASI: DARI BOTTLENECK MENUJU AKSELERASI HILIRISASI KP

PNBP produktif, BBM presisi, DHE produktif, daya saing ekspor, investasi hilirisasi, persaingan usaha sehat, dan penguatan SDM perlu dijalankan sebagai satu arsitektur kebijakan yang saling terhubung.



Pesan Kunci

Transformasi sektor kelautan-perikanan memerlukan kebijakan yang terintegrasi, bukan intervensi parsial, agar hilirisasi benar-benar meningkatkan daya saing, lapangan kerja, dan kesejahteraan pesisir.



PENUTUP

EKONOMI BIRU & HILIRISASI KP: MENUJU PERTUMBUHAN INKLUSIF

Pertumbuhan inklusif di sektor kelautan-perikanan tidak lahir dari produksi besar saja, tetapi dari kemampuan mengubah sumber daya laut menjadi nilai tambah, daya saing ekspor, lapangan kerja, dan kesejahteraan pesisir.



Pesan Kunci

Transformasi sektor kelautan-perikanan memerlukan kebijakan yang terintegrasi, implementatif, dan berorientasi pada pemerataan manfaat ekonomi.



FOCUS GROUP DISCUSSION BIDANG IV ISEI

PENUTUP

TERIMA KASIH

Ekonomi Biru dan Hilirisasi KP untuk Pertumbuhan Inklusif

Semoga paparan ini dapat memperkaya diskusi mengenai arah hilirisasi kelautan-perikanan yang lebih produktif, kompetitif, dan inklusif.

“

Dari bottleneck menuju transformasi: PNBP produktif, BBM presisi, DHE produktif, daya saing ekspor, investasi hilirisasi, persaingan usaha sehat, dan penguatan SDM perlu dijalankan sebagai satu arsitektur kebijakan yang saling terhubung.



Assoc. Prof. Dr. Nimmi Zulbainarni, S.Pi., M.Si., CWM®
Ketua Focus Group Kelautan dan Perikanan



PENANGKAPAN



PENDARATAN



PENGOLAHAN



DISTRIBUSI



PASAR / EKSPOR

HI-PER Menuju Indonesia Maju

Ekonomi Biru dan Hilirisasi Kelautan-Perikanan untuk Pertumbuhan Inklusif

ABSTRAK

Sektor kelautan-perikanan memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun besarnya potensi sumber daya laut belum sepenuhnya terkonversi menjadi nilai tambah, daya saing pasar, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Paper ini menganalisis agenda hilirisasi kelautan-perikanan berbasis ekonomi biru dengan menggunakan pendekatan sintesis kebijakan atas bahan FGD ISEI 2026 serta dua kajian terdahulu mengenai optimalisasi PNBP sektor kelautan-perikanan di Sulawesi Utara/Bitung dan Bali, serta optimalisasi pemanfaatan cold chain produk perikanan laut di Sulawesi Selatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa hilirisasi kelautan-perikanan tidak cukup dimaknai sebagai pembangunan industri pengolahan, tetapi harus dipahami sebagai transformasi ekosistem rantai nilai dari hulu ke hilir. Hambatan utama hilirisasi meliputi PNBP, BBM, DHE, tarif dan standar pasar, rantai dingin, tata niaga, serta kapasitas SDM. Kasus Bitung menunjukkan pentingnya desain PNBP yang produktif, rasional, berbasis data, dan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan. Sementara itu, kasus Sulawesi Selatan menegaskan bahwa rantai dingin, pasokan es, transportasi dingin, kapabilitas pelaku, dan investasi berbasis titik kritis merupakan prasyarat penting dalam menjaga mutu, menekan losses, dan memperkuat daya saing. Paper ini merekomendasikan arsitektur kebijakan terintegrasi melalui PNBP produktif, BBM presisi, DHE produktif, investasi rantai dingin berbasis titik kritis, penguatan standar mutu dan traceability, tata niaga sehat, serta penguatan SDM pesisir. Hilirisasi yang berhasil adalah hilirisasi yang meningkatkan nilai tambah sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya dan membagi manfaat secara adil kepada masyarakat pesisir.

Kata kunci: ekonomi biru; hilirisasi kelautan-perikanan; PNBP produktif; rantai dingin; daya saing pasar.

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki bentang laut yang luas, sumber daya ikan yang besar, keanekaragaman hayati laut yang tinggi, serta posisi geografis yang memungkinkan sektor ini menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Laporan kajian PNBP sektor kelautan dan perikanan mencatat bahwa sekitar dua pertiga wilayah Indonesia merupakan laut, dengan cakupan sekitar 5,8 juta km² dan dikelilingi lebih dari 18.000 pulau. Indonesia juga disebut sebagai salah satu produsen perikanan tangkap utama dunia, dengan potensi lestari ikan laut yang sangat besar. Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penciptaan nilai tambah ekonomi. Sektor kelautan-perikanan selama ini masih terlalu sering diposisikan sebagai sektor produksi primer, yaitu sektor yang bertumpu pada aktivitas penangkapan, pendaratan, dan penjualan bahan baku. Padahal, dalam struktur ekonomi modern, kekuatan sektor perikanan tidak lagi hanya ditentukan oleh seberapa besar volume ikan yang ditangkap, tetapi oleh seberapa jauh hasil tangkapan tersebut mampu masuk ke dalam rantai nilai yang lebih panjang, mulai dari penanganan pasca-panen, pengolahan, penyimpanan dingin, distribusi, sertifikasi, traceability, hingga akses pasar domestik dan ekspor.

Ketimpangan antara potensi dan nilai tambah tersebut terlihat dari masih terbatasnya kontribusi optimal sektor perikanan terhadap perekonomian dan penerimaan negara. Dalam kajian PNBP, volume dan nilai produksi ikan dinyatakan seharusnya dapat menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan besaran penerimaan negara dari sektor perikanan. Akan tetapi, realisasi PNBP perikanan tangkap pada tahun 2023 hanya mencapai Rp0,64 triliun dari target Rp3,50 triliun, atau sekitar 18,29%. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya produksi dan potensi sumber daya belum sepenuhnya terkonversi menjadi penerimaan negara, tata kelola usaha yang kuat, maupun pembiayaan kembali bagi penguatan ekosistem perikanan. Dalam konteks tersebut, pendekatan ekonomi biru menjadi relevan. Ekonomi biru tidak hanya menempatkan laut sebagai sumber produksi, tetapi juga sebagai ruang pembangunan ekonomi yang harus dikelola secara produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam bahan FGD ISEI 2026, ekonomi biru sektor perikanan diarahkan untuk mengubah komoditas ikan dan rumput laut menjadi produk bernilai tambah melalui dukungan rantai dingin, pengolahan, sertifikasi, dan traceability. Pendekatan ini juga ditempatkan dalam kerangka pro-poor, pro-growth, pro-job, dan pro-environment, sehingga pembangunan sektor kelautan-perikanan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan manfaat bagi nelayan, pembudidaya, pengolah, UMKM, eksportir, dan masyarakat pesisir.

Oleh karena itu, hilirisasi kelautan-perikanan tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai pembangunan pabrik pengolahan semata. Hilirisasi perlu dipahami sebagai transformasi ekosistem nilai tambah dari hulu ke hilir. Rantai tersebut mencakup aktivitas penangkapan yang berkelanjutan, pendaratan ikan yang efisien, ketersediaan es dan cold storage, sistem transportasi berpendingin, pengolahan produk bernilai tambah, pembiayaan rantai pasok, pemenuhan standar mutu, sertifikasi, traceability, hingga penetrasi pasar ekspor. Tanpa integrasi antarmata rantai tersebut, peningkatan produksi justru dapat berakhir pada rendahnya harga di tingkat nelayan, tingginya losses, lemahnya mutu, dan rendahnya daya saing produk perikanan Indonesia.

Bahan FGD ISEI 2026 mengidentifikasi sedikitnya empat bottleneck utama yang mengunci proses hilirisasi kelautan-perikanan, yaitu PNBP, BBM, DHE, serta tarif dan standar. PNBP memengaruhi insentif kepatuhan, biaya usaha, dan kualitas tata kelola sumber daya ikan. BBM menentukan biaya melaut, margin nelayan, harga bahan baku, dan daya saing industri pengolahan. DHE menentukan likuiditas eksportir dalam membeli bahan baku dari nelayan dan pembudidaya. Sementara itu, tarif dan standar menentukan kemampuan produk Indonesia untuk masuk ke pasar global melalui persyaratan harga, mutu, traceability, dan keberlanjutan.

Pada sisi hilir, keterbatasan infrastruktur rantai dingin masih menjadi persoalan mendasar. Kajian optimalisasi cold chain di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa peningkatan kualitas produk perikanan membutuhkan dukungan teknologi dan infrastruktur, terutama karena produk perikanan merupakan komoditas mudah rusak. Kajian tersebut mencatat bahwa kebutuhan cold storage di Pulau Sulawesi pada tahun 2016 mencapai 251.359 ton, sedangkan kapasitas tersedia hanya 31.147 ton atau sekitar 12% dari total kebutuhan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa agenda hilirisasi tidak akan berjalan optimal apabila tidak disertai investasi logistik dingin yang memadai dan tepat sasaran.

Pentingnya rantai dingin juga berkaitan langsung dengan efisiensi ekonomi dan daya saing. Cold storage dan sistem logistik dingin berperan dalam meminimalkan economic loss karena ikan dapat terserap lebih maksimal oleh pasar, ekspor meningkat, harga ikan lebih stabil, dan limbah ikan yang tidak terserap pasar dapat dikurangi. Dengan demikian, rantai dingin bukan sekadar fasilitas teknis, tetapi merupakan prasyarat ekonomi bagi peningkatan mutu, stabilitas harga, keberlanjutan pasokan, dan perluasan pasar. Sulawesi Selatan menjadi contoh penting dalam melihat hubungan antara potensi perikanan, hilirisasi, dan kebutuhan infrastruktur. Wilayah ini memiliki potensi perikanan laut yang besar, tersebar di Selat Makassar, Teluk Bone, dan Laut Flores. Kajian cold chain mencatat bahwa Sulawesi Selatan memiliki luas wilayah perairan sebesar 189.480 km², garis pantai sepanjang 1.979,97 km, dan potensi perikanan laut sebesar 1,17 juta ton per tahun. Potensi tersebut memperlihatkan bahwa wilayah ini tidak hanya penting sebagai daerah produksi, tetapi juga sebagai basis pengembangan industri hilir perikanan yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, potensi besar tersebut juga menghadirkan tantangan. Jika produksi meningkat tanpa dukungan infrastruktur, tata niaga, standar mutu, dan akses pasar yang memadai, maka nilai tambah tidak akan terdistribusi secara adil. Nelayan tetap berisiko menjadi price taker, industri pengolahan kesulitan memperoleh bahan baku berkualitas, eksportir menghadapi tantangan standar pasar, dan daerah kehilangan peluang untuk meningkatkan pendapatan serta lapangan kerja. Karena itu, hilirisasi kelautan-perikanan harus dirancang sebagai strategi pembangunan yang menghubungkan produksi, logistik, industri, pembiayaan, pasar, dan kelembagaan. Di sisi lain, pembelajaran dari kajian PNBP di Sulawesi Utara/Bitung menunjukkan bahwa agenda hilirisasi juga harus memperhatikan aspek tata kelola fiskal dan keberlanjutan sumber daya. PNBP tidak cukup diperlakukan sebagai instrumen pungutan negara, tetapi perlu diarahkan menjadi instrumen tata kelola yang mendorong kepatuhan, pencatatan produksi, pengawasan sumber daya, dan pembiayaan kembali bagi ekosistem perikanan. Dengan kata lain, PNBP perlu bergerak dari pendekatan revenue extraction menuju revenue recycling, yaitu penerimaan negara yang sebagian manfaatnya kembali memperkuat pelabuhan, TPI, rantai dingin, sertifikasi, digitalisasi data, dan pengawasan sumber daya ikan.

Berdasarkan kondisi tersebut, paper ini menjadi penting karena menawarkan cara pandang yang lebih terpadu terhadap hilirisasi kelautan-perikanan. Hilirisasi tidak dapat dilepaskan dari struktur biaya di hulu, kualitas logistik di tengah rantai pasok, kemampuan pengolahan di hilir, serta daya saing produk di pasar global. Dengan menjadikan bahan FGD ISEI 2026 sebagai kerangka utama dan didukung oleh kajian lapangan di Sulawesi Utara/Bitung serta Sulawesi Selatan, paper ini berupaya menyusun sintesis kebijakan mengenai bagaimana sektor kelautan-perikanan dapat menjadi sumber pertumbuhan inklusif dalam kerangka ekonomi biru. Dengan demikian, tulisan ini berangkat dari tesis bahwa sektor kelautan-perikanan tidak lagi cukup dipandang sebagai sektor produksi primer, tetapi harus ditempatkan sebagai sumber pertumbuhan baru yang menghubungkan penangkapan, pendaratan, pengolahan, distribusi, pembiayaan, sertifikasi, traceability, dan pasar ekspor. Hilirisasi yang berhasil bukan hanya hilirisasi yang memperbesar kapasitas industri, melainkan hilirisasi yang mampu menjaga keberlanjutan sumber daya, memperkuat daya saing produk, meningkatkan penerimaan negara secara produktif, dan memastikan nilai tambah mengalir kepada masyarakat pesisir.

I.2 Pertanyaan penelitian

- Bottleneck apa saja yang menghambat hilirisasi kelautan-perikanan?
- Bagaimana pembelajaran dari Sulawesi Utara/Bitung dan Sulawesi Selatan dapat digunakan untuk merumuskan agenda hilirisasi KP yang inklusif?
- Kebijakan apa yang perlu diprioritaskan untuk memperkuat hilirisasi berbasis ekonomi biru?

I.3 Tujuan penelitian

- Menganalisis hambatan utama hilirisasi kelautan-perikanan Indonesia
- Menganalisis pembelajaran dari Sulawesi Utara/Bitung dan Sulawesi Selatan sebagai dasar perumusan agenda hilirisasi kelautan-perikanan yang inklusif.
- Merumuskan agenda kebijakan terintegrasi untuk mendorong hilirisasi kelautan-perikanan yang inklusif, produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

II. KERANGKA KONSEPTUAL

Hilirisasi kelautan-perikanan berbasis ekonomi biru perlu dipahami sebagai proses transformasi rantai nilai yang menghubungkan potensi sumber daya laut dengan penciptaan nilai tambah, pertumbuhan inklusif, dan daya saing pasar. Proses tersebut tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi atau pembangunan industri pengolahan, tetapi juga oleh dukungan tata kelola yang produktif, rantai dingin yang memadai, standar mutu, akses pasar, tata niaga yang sehat, serta penguatan SDM dan kelembagaan di sepanjang rantai nilai. Atas dasar itu, paper ini menggunakan kerangka konseptual berikut untuk menjelaskan hubungan antara ekonomi biru, hilirisasi, pertumbuhan inklusif, dan daya saing pasar. Kerangka konseptual ini menggambarkan bahwa hilirisasi kelautan-perikanan berbasis ekonomi biru tidak dapat dipahami sebagai proses industrialisasi hilir semata, melainkan sebagai transformasi menyeluruh terhadap rantai nilai sektor kelautan-perikanan. Ekonomi biru ditempatkan sebagai kerangka pembangunan utama karena menekankan keseimbangan antara produktivitas ekonomi, inklusivitas sosial, penciptaan lapangan

kerja, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, pembangunan sektor kelautan-perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan volume produksi, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut berlangsung secara bertanggung jawab, memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir, serta menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Di bawah kerangka ekonomi biru, hilirisasi kelautan-perikanan diposisikan sebagai strategi transformasi dari komoditas primer menuju produk bernilai tambah. Proses ini berlangsung melalui rangkaian aktivitas yang saling terhubung, mulai dari penangkapan, pendaratan, penyimpanan dingin, pengolahan, distribusi, hingga pasar domestik dan ekspor. Setiap mata rantai memiliki fungsi strategis. Penangkapan menentukan keberlanjutan pasokan bahan baku, pendaratan menentukan kualitas awal dan pencatatan produksi, penyimpanan dingin menjaga mutu dan menekan kerugian pasca-panen, pengolahan menciptakan nilai tambah, distribusi menentukan efisiensi logistik, sedangkan pasar menjadi ruang akhir bagi penciptaan nilai ekonomi. Kerangka ini juga menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi harus diukur dari dua keluaran utama, yaitu pertumbuhan inklusif dan daya saing pasar. Pertumbuhan inklusif berarti nilai tambah yang tercipta dari hilirisasi tidak hanya dinikmati oleh industri besar atau eksportir, tetapi juga mengalir kepada nelayan, pembudidaya, pengumpul, UMKM pengolah, pekerja rantai dingin, dan masyarakat pesisir. Sementara itu, daya saing pasar menunjukkan kemampuan produk kelautan-perikanan Indonesia untuk memenuhi tuntutan pasar domestik dan global melalui mutu yang terjaga, keamanan pangan, traceability, sertifikasi, kontinuitas pasokan, standar keberlanjutan, serta biaya logistik yang efisien.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Hilirisasi Kelautan-Perikanan Berbasis Ekonomi Biru

Namun, hubungan antara ekonomi biru, hilirisasi, pertumbuhan inklusif, dan daya saing pasar tidak berjalan secara otomatis. Kerangka ini menunjukkan adanya sejumlah faktor pengunci atau determinan kebijakan yang menentukan keberhasilan transformasi tersebut. Faktor tersebut mencakup PNBP produktif, BBM presisi, DHE produktif, tarif dan standar pasar, investasi rantai dingin, tata niaga sehat, serta penguatan SDM dan kelembagaan. PNBP perlu diarahkan sebagai instrumen tata kelola dan pembiayaan kembali sektor, BBM harus mendukung efisiensi biaya melaut, DHE perlu menjaga likuiditas rantai pasok ekspor, sementara tarif dan standar harus dijawab melalui peningkatan mutu, sertifikasi, diplomasi dagang, dan diversifikasi pasar. Dengan demikian, kerangka konseptual ini memperlihatkan bahwa hilirisasi kelautan-perikanan berbasis ekonomi biru merupakan agenda lintas rantai nilai dan lintas kebijakan. Hilirisasi tidak cukup dilakukan dengan membangun industri pengolahan, tetapi harus ditopang oleh rantai dingin yang memadai, tata niaga yang transparan, pembiayaan yang lancar, standar mutu yang kuat, dan kapasitas SDM yang meningkat. Apabila seluruh faktor tersebut dapat diintegrasikan, maka sektor kelautan-perikanan tidak hanya akan menghasilkan peningkatan nilai tambah, tetapi juga peningkatan pendapatan nelayan, penciptaan lapangan kerja baru, optimalisasi penerimaan negara, keberlanjutan sumber daya laut, serta peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

III. METODE

Paper ini menggunakan pendekatan sintesis kebijakan berbasis studi dokumen dan kajian lapangan terdahulu. Pendekatan ini dipilih karena tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai riset lapangan baru, melainkan sebagai paper konseptual-kebijakan yang menyusun kembali gagasan, temuan, dan rekomendasi dari bahan FGD ISEI 2026 serta dua kajian terdahulu mengenai PNBP dan rantai dingin sektor kelautan-perikanan. Sumber utama yang digunakan dalam paper ini terdiri atas tiga dokumen. Pertama, bahan FGD ISEI 2026 yang memberikan kerangka besar mengenai ekonomi biru, hilirisasi kelautan-perikanan, serta empat bottleneck utama, yaitu PNBP, BBM, DHE, serta tarif dan standar pasar. Kedua, kajian optimalisasi PNBP sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Utara/Bitung dan Bali yang digunakan untuk membaca hubungan antara tata kelola fiskal, penerimaan negara, investasi, dan keberlanjutan sumber daya ikan. Ketiga, kajian optimalisasi pemanfaatan cold chain produk perikanan laut di Sulawesi Selatan yang digunakan untuk memperkuat analisis mengenai rantai pasok, infrastruktur dingin, pengendalian mutu, efisiensi logistik, serta dampaknya terhadap perekonomian daerah.

Analisis dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan isu-isu utama ke dalam beberapa tema, yaitu potensi dan nilai tambah sektor kelautan-perikanan, hambatan hilirisasi, tata kelola PNBP, efisiensi biaya input, likuiditas ekspor, standar dan akses pasar, rantai dingin, tata niaga, investasi, serta penguatan SDM. Setiap tema kemudian dibaca dalam kerangka ekonomi biru, yaitu sejauh mana kebijakan hilirisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga keberlanjutan sumber daya, memperluas lapangan kerja, dan mendistribusikan manfaat kepada masyarakat pesisir. Melalui pendekatan tersebut, paper ini tidak hanya menyajikan ulang temuan dari dokumen yang ada, tetapi menyusunnya menjadi sintesis kebijakan terintegrasi. Hasil akhir dari pendekatan ini adalah rumusan agenda hilirisasi kelautan-perikanan yang menempatkan PNBP produktif, BBM presisi, DHE produktif, rantai dingin, tata niaga sehat, standar mutu,

traceability, diversifikasi pasar, serta penguatan SDM sebagai elemen yang saling berkaitan dalam membangun sektor kelautan-perikanan yang inklusif, produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

IV. PEMBAHASAN

IV.1 Konteks Strategis Kelautan-Perikanan dan Ekonomi Biru

Sektor kelautan-perikanan memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki sumber daya laut yang besar, keragaman hayati tinggi, serta basis produksi perikanan yang tersebar di berbagai wilayah pengelolaan perikanan. Kajian PNBP sektor kelautan dan perikanan mencatat bahwa sekitar dua pertiga wilayah Indonesia merupakan laut, dengan cakupan sekitar 5,8 juta km² dan dikelilingi lebih dari 18.000 pulau. Posisi geografis tersebut menjadikan sektor kelautan-perikanan bukan hanya penting sebagai penyedia pangan, tetapi juga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penyerap tenaga kerja, penghasil devisa, dan basis pembangunan wilayah pesisir. Secara ekonomi, sektor ini menunjukkan kinerja yang signifikan. Dalam bahan FGD ISEI 2026, kinerja utama kelautan-perikanan tahun 2025 digambarkan melalui produksi sebesar 26,26 juta ton, pertumbuhan produksi 11,48%, ekspor sebesar USD6,27 miliar, serta surplus perdagangan sebesar USD5,60 miliar. Data tersebut memperlihatkan bahwa sektor kelautan-perikanan telah memiliki basis produksi dan perdagangan yang kuat. Namun, pasar ekspor masih terkonsentrasi pada beberapa tujuan utama, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, ASEAN, Jepang, dan Uni Eropa. Konsentrasi pasar ini menunjukkan bahwa sektor kelautan-perikanan Indonesia masih memerlukan penguatan diversifikasi pasar, peningkatan mutu, dan perluasan produk bernilai tambah agar daya saingnya lebih berkelanjutan.

Meskipun demikian, besarnya potensi dan kinerja produksi belum sepenuhnya mencerminkan nilai tambah yang optimal. Bahan FGD ISEI 2026 secara tegas menempatkan kelautan-perikanan sebagai sektor strategis, tetapi nilai tambahnya masih belum optimal. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara kapasitas produksi dengan kemampuan sektor untuk menghasilkan produk bernilai tambah, memperkuat industri hilir, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan posisi tawar pelaku hulu. Dengan kata lain, tantangan utama sektor kelautan-perikanan bukan lagi semata-mata meningkatkan volume produksi, melainkan mengubah struktur ekonomi sektor ini dari berbasis komoditas primer menuju rantai nilai yang lebih produktif dan kompetitif. Kesenjangan antara potensi dan nilai tambah juga terlihat dari aspek penerimaan negara. Kajian PNBP menunjukkan bahwa volume dan nilai produksi ikan seharusnya dapat menjadi salah satu tolok ukur dalam menentukan penerimaan negara dari sektor perikanan. Namun, realisasi PNBP perikanan tangkap pada tahun 2023 hanya mencapai Rp0,64 triliun dari target Rp3,50 triliun, atau sekitar 18,29%. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya potensi sumber daya dan produksi belum sepenuhnya terkonversi menjadi penerimaan negara yang optimal, sekaligus menandakan perlunya penguatan tata kelola fiskal, pencatatan produksi, kepatuhan pelaku usaha, dan desain PNBP yang lebih produktif.

Dalam konteks tersebut, ekonomi biru menjadi kerangka penting untuk mendorong transformasi sektor kelautan-perikanan. Ekonomi biru tidak hanya menempatkan laut sebagai sumber produksi, tetapi sebagai ruang ekonomi yang harus dikelola secara produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam bahan FGD ISEI 2026, ekonomi biru sektor perikanan diarahkan untuk

mengubah komoditas ikan dan rumput laut menjadi produk bernilai tambah melalui dukungan rantai dingin, pengolahan, sertifikasi, dan traceability. Pendekatan ini juga dikaitkan dengan prinsip pro-poor, pro-growth, pro-job, dan pro-environment, sehingga orientasi pembangunan sektor kelautan-perikanan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan manfaat dan keberlanjutan sumber daya laut. Transformasi menuju ekonomi biru menuntut perubahan orientasi kebijakan dari produksi menuju nilai tambah. Sektor kelautan-perikanan tidak cukup hanya menghasilkan ikan dalam jumlah besar, tetapi harus mampu menjaga mutu sejak penangkapan, memperkuat sistem pendaratan, memastikan ketersediaan rantai dingin, mengembangkan industri pengolahan, memenuhi standar mutu, membangun traceability, serta memperluas pasar domestik dan ekspor. Dengan demikian, hilirisasi kelautan-perikanan harus dipahami sebagai penguatan ekosistem hulu-hilir, bukan sekadar pembangunan industri pengolahan.

Pembelajaran dari Sulawesi Selatan menunjukkan pentingnya pendekatan tersebut. Provinsi ini memiliki potensi perikanan laut sebesar 1,17 juta ton per tahun yang tersebar di Selat Makassar, Teluk Bone, dan Laut Flores. Pada tahun 2021, volume perikanan tangkap Sulawesi Selatan mencapai 387.177 ton dengan nilai sekitar Rp9,73 triliun. Data tersebut menunjukkan bahwa wilayah pesisir memiliki peran penting sebagai basis produksi sekaligus basis hilirisasi. Namun, potensi tersebut hanya dapat dikonversi menjadi nilai tambah apabila didukung oleh infrastruktur pasca-panen, sistem rantai dingin, pengolahan, dan akses pasar yang memadai. Karakter produk perikanan yang mudah rusak menjadikan rantai dingin sebagai salah satu prasyarat utama ekonomi biru. Kajian cold chain Sulawesi Selatan menegaskan bahwa pengembangan industri perikanan yang lebih terintegrasi membutuhkan peningkatan kapasitas pengolahan ikan, pengembangan produk olahan bernilai tambah tinggi, serta peningkatan efisiensi rantai pasok dari penangkapan hingga distribusi. Tanpa dukungan rantai dingin dan penanganan pasca-panen yang baik, peningkatan produksi berisiko tidak menghasilkan nilai tambah yang optimal karena mutu ikan menurun, kerugian pasca-panen meningkat, dan daya saing pasar melemah.

Dengan demikian, konteks strategis kelautan-perikanan Indonesia menunjukkan dua hal penting. Pertama, sektor ini memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, devisa, pangan, dan lapangan kerja. Kedua, potensi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan nilai tambah karena rantai nilai masih menghadapi persoalan tata kelola, biaya input, infrastruktur pasca-panen, standar mutu, pembiayaan, dan akses pasar. Oleh karena itu, ekonomi biru perlu ditempatkan sebagai kerangka transformasi yang menghubungkan keberlanjutan sumber daya, hilirisasi, pertumbuhan inklusif, dan daya saing pasar. Atas dasar itu, pembahasan berikutnya akan diarahkan pada bottleneck utama yang menghambat hilirisasi kelautan-perikanan, terutama PNPB, BBM, DHE, serta tarif dan standar pasar, yang masing-masing berpengaruh terhadap struktur biaya, kepatuhan, likuiditas, mutu, dan daya saing produk perikanan Indonesia.

IV.2 Bottleneck Hilirisasi Kelautan-Perikanan

Hilirisasi kelautan-perikanan tidak cukup dipahami sebagai proses pembangunan industri pengolahan di bagian hilir. Dalam praktiknya, hilirisasi sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor pengunci yang menentukan apakah hasil perikanan dapat bergerak dari komoditas primer menjadi produk bernilai tambah. Bahan FGD ISEI 2026 mengidentifikasi empat bottleneck utama yang menghambat hilirisasi kelautan-perikanan, yaitu PNPB, BBM, DHE, serta tarif dan standar

pasar. Keempat faktor tersebut bekerja pada titik yang berbeda dalam rantai nilai, tetapi saling berkaitan dalam memengaruhi biaya usaha, kepatuhan, likuiditas, mutu produk, akses pasar, dan daya saing ekspor.

IV.2.1 PNBP: dari Beban Pungutan menuju Instrumen Produktivitas

PNBP merupakan salah satu instrumen penting dalam tata kelola sektor kelautan-perikanan. Namun, dalam praktiknya, PNBP masih sering dipersepsikan sebagai beban pungutan yang menambah biaya usaha pelaku perikanan. Persepsi ini muncul ketika PNBP belum dirasakan manfaatnya secara langsung oleh pelaku usaha, misalnya dalam bentuk peningkatan layanan pelabuhan, fasilitas TPI, ketersediaan data produksi yang akurat, pengawasan sumber daya ikan, fasilitas rantai dingin, sertifikasi, dan traceability. Dalam kerangka hilirisasi, PNBP seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen produktivitas dan tata kelola. Artinya, PNBP perlu diarahkan untuk memperkuat kepatuhan, memperbaiki pencatatan produksi, meningkatkan kualitas layanan pelabuhan, memperkuat pengawasan sumber daya ikan, dan mendorong pembiayaan kembali bagi ekosistem kelautan-perikanan. Dengan demikian, PNBP tidak lagi hanya menjadi mekanisme pungutan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem yang mendukung peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sektor.

Bahan FGD ISEI 2026 menekankan bahwa PNBP perlu bergeser dari pendekatan revenue extraction menuju revenue recycling. Dalam pendekatan ini, penerimaan dari sektor kelautan-perikanan tidak hanya ditarik sebagai pendapatan negara, tetapi sebagian manfaatnya dikembalikan untuk memperkuat ekosistem hilirisasi, seperti modernisasi pelabuhan dan TPI, digitalisasi data pendaratan, pengawasan kepatuhan, fasilitas mutu dan sertifikasi, serta cold storage dan logistik ikan. Urgensi perubahan desain PNBP juga terlihat dari capaian penerimaan negara yang belum optimal. Kajian PNBP menunjukkan bahwa volume dan nilai produksi ikan seharusnya dapat menjadi salah satu tolok ukur dalam menentukan besaran PNBP perikanan. Namun, realisasi PNBP perikanan tangkap tahun 2023 hanya mencapai Rp0,64 triliun dari target Rp3,50 triliun, atau sekitar 18,29%. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi produksi yang besar belum sepenuhnya terkonversi menjadi penerimaan negara yang optimal.

Kasus Bitung memperlihatkan bahwa desain PNBP harus memperhatikan keseimbangan antara penerimaan negara, investasi, kepatuhan pelaku usaha, dan keberlanjutan sumber daya. Kajian PNBP mencatat bahwa potensi SDI Bitung sebesar 59.832,33 ton dengan JTB sebesar 43.079,27 ton dan tingkat pemanfaatan 112% apabila dihitung dengan pendekatan biologi, sehingga cenderung over-exploited. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa hilirisasi tidak boleh hanya mendorong peningkatan ekstraksi ikan, tetapi harus dikendalikan melalui tata kelola sumber daya yang lebih presisi, berbasis data, dan berorientasi keberlanjutan. Dengan demikian, PNBP produktif harus memenuhi tiga prinsip. Pertama, rasional secara ekonomi, sehingga tidak menurunkan minat investasi dan tidak mendorong pelaku usaha keluar dari sistem formal. Kedua, akurat secara data, sehingga perhitungan pungutan berbasis pada produksi, karakteristik kapal, wilayah tangkap, dan kapasitas usaha. Ketiga, berkelanjutan secara ekologis, sehingga pungutan tidak mendorong eksploitasi berlebihan terhadap stok ikan. Dalam konteks ini, PNBP harus menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat hilirisasi, bukan sekadar instrumen fiskal jangka pendek.

IV.2.2 BBM: Penentu Biaya Melaut dan Stabilitas Bahan Baku

BBM merupakan komponen biaya utama dalam kegiatan perikanan tangkap. Bagi nelayan, BBM menentukan biaya melaut, jarak operasi penangkapan, frekuensi trip, dan margin usaha. Ketika harga BBM meningkat atau akses terhadap BBM terbatas, nelayan akan menghadapi tekanan biaya yang lebih besar. Tekanan tersebut dapat mengurangi margin nelayan, menurunkan intensitas melaut, atau menaikkan harga bahan baku yang masuk ke rantai industri pengolahan. Dalam bahan FGD ISEI 2026, BBM ditempatkan sebagai prasyarat hilirisasi yang inklusif. BBM bukan hanya isu subsidi energi, tetapi juga berkaitan langsung dengan produktivitas sektor, biaya melaut, stabilitas bahan baku, dan daya saing industri pengolahan. Slide FGD mengenai BBM Presisi menegaskan bahwa BBM yang mahal atau tidak mudah diakses dapat meningkatkan biaya melaut, menaikkan harga bahan baku, dan melemahkan daya saing hilir.

Dalam rantai hilirisasi, biaya BBM tidak berhenti pada level nelayan. Kenaikan biaya melaut akan memengaruhi harga ikan di tingkat pendaratan, kemudian berdampak pada biaya bahan baku industri pengolahan. Jika harga bahan baku terlalu tinggi, industri akan menghadapi tekanan margin dan kehilangan daya saing, terutama untuk produk yang harus bersaing di pasar ekspor. Dengan demikian, BBM merupakan faktor hulu yang berpengaruh langsung terhadap kelayakan hilirisasi di hilir. Oleh karena itu, kebijakan BBM sektor perikanan perlu diarahkan menjadi BBM presisi. Presisi berarti alokasi BBM harus berbasis pada data kapal, ukuran kapal, alat tangkap, wilayah tangkap, musim penangkapan, dan karakteristik usaha. Kebijakan BBM yang tidak presisi dapat menimbulkan dua masalah. Pertama, dukungan BBM tidak sampai kepada nelayan atau pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan. Kedua, biaya produksi tetap tinggi sehingga pasokan bahan baku bagi industri pengolahan menjadi tidak stabil.

Dengan demikian, BBM presisi merupakan bagian dari strategi hilirisasi. Tujuannya bukan hanya menekan biaya melaut, tetapi juga menjaga kontinuitas pasokan bahan baku, melindungi pendapatan nelayan, dan memperkuat daya saing industri pengolahan. Hilirisasi yang inklusif membutuhkan biaya input yang terkendali agar manfaat nilai tambah tidak hanya dinikmati oleh pelaku hilir, tetapi juga dirasakan oleh nelayan sebagai pelaku utama di hulu.

4.2.3 DHE: Menjaga Stabilitas Makro tanpa Memutus Cashflow Perikanan

Devisa Hasil Ekspor atau DHE memiliki fungsi penting bagi stabilitas makroekonomi. Dari sisi negara, DHE dapat memperkuat ketersediaan devisa, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mendukung pembiayaan domestik. Namun, dalam sektor perikanan, kebijakan DHE perlu dirancang secara hati-hati karena kegiatan ekspor perikanan sangat bergantung pada arus kas yang cepat dan berulang. Bahan FGD ISEI 2026 menempatkan DHE sebagai salah satu bottleneck hilirisasi apabila kebijakannya terlalu kaku. Slide DHE Produktif menekankan bahwa DHE perlu menjaga stabilitas makro tanpa memutus cashflow perikanan. Pesan kuncinya adalah DHE harus menjadi liquidity enabler bagi hilirisasi, bukan bottleneck arus kas rantai pasok perikanan.

Dalam sektor perikanan, eksportir tidak bekerja secara terpisah. Eksportir terhubung dengan nelayan, pembudidaya, pengumpul, pengusaha, industri pengolahan, cold storage, jasa logistik, dan pembeli luar negeri. Arus kas eksportir menentukan kemampuan mereka membeli bahan baku dari pelaku hulu. Apabila likuiditas eksportir tertahan, dampaknya dapat menjalar ke rantai pasok

dalam bentuk tertundanya pembayaran, melemahnya pembelian bahan baku, atau turunnya harga di tingkat nelayan dan pengumpul. Karena itu, DHE perlu didesain sebagai instrumen pembiayaan rantai pasok, bukan sekadar instrumen retensi devisa. DHE produktif dapat diarahkan menjadi basis kredit rantai pasok, fasilitas pembiayaan bahan baku, atau instrumen modal kerja bagi eksportir dan industri pengolahan domestik. Dengan cara ini, kebijakan DHE tetap mendukung stabilitas makro, tetapi tidak menghambat perputaran modal kerja sektor perikanan.

DHE yang produktif akan memperkuat hilirisasi karena memastikan arus pembelian bahan baku tetap berjalan, industri pengolahan tetap memperoleh pasokan, dan nelayan tetap memiliki pasar yang menyerap hasil tangkapan. Sebaliknya, DHE yang terlalu kaku dapat mengganggu rantai nilai, terutama pada sektor perikanan yang karakter produknya mudah rusak dan membutuhkan transaksi cepat.

4.2.4 Tarif dan Standar Pasar: Penentu Daya Saing Ekspor

Daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global tidak cukup ditentukan oleh harga murah. Pasar ekspor semakin menuntut mutu, keamanan pangan, traceability, sertifikasi, keberlanjutan, kontinuitas pasokan, dan efisiensi logistik. Oleh karena itu, tarif dan standar pasar menjadi bottleneck penting dalam hilirisasi kelautan-perikanan. Bahan FGD ISEI 2026 menempatkan tarif dan standar sebagai faktor yang menentukan daya saing produk Indonesia di pasar global melalui harga, mutu, dan traceability. Pada slide Tarif & Akses Pasar, ditekankan bahwa ekspor perikanan Indonesia perlu menjawab tekanan tarif dan standar non-tarif melalui penguatan mutu, sertifikasi, produk olahan bernilai tambah, dan perluasan pasar.

Dalam konteks hilirisasi, standar pasar harus dipahami sebagai bagian dari strategi nilai tambah. Produk perikanan Indonesia tidak cukup hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah atau produk primer. Hilirisasi harus mendorong pengembangan produk bernilai tambah, seperti frozen product, fillet, ready-to-cook seafood, produk olahan, dan produk turunan. Semakin tinggi nilai tambah produk, semakin penting pula pemenuhan standar mutu, keamanan pangan, dan traceability dari hulu sampai hilir. Traceability menjadi elemen penting karena pasar global semakin menuntut kejelasan asal-usul produk. Produk perikanan harus dapat ditelusuri sejak penangkapan, pendaratan, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi. Tanpa sistem traceability yang kuat, produk Indonesia akan sulit memasuki pasar premium, meskipun memiliki basis produksi besar. Oleh karena itu, hilirisasi harus terhubung dengan digitalisasi data, pencatatan pendaratan, sertifikasi, dan sistem pengawasan mutu.

Selain standar, diversifikasi pasar juga perlu diperkuat. Ketergantungan pada pasar tertentu membuat produk perikanan Indonesia rentan terhadap perubahan tarif, regulasi impor, standar teknis, dan preferensi konsumen. Karena itu, hilirisasi perlu diarahkan untuk memperluas pasar ekspor, memperkuat pasar domestik, serta mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan berbagai segmen pasar. Dengan demikian, tarif dan standar pasar bukan hanya isu perdagangan, tetapi juga isu hilirisasi. Produk bernilai tambah hanya akan kompetitif apabila memiliki mutu yang konsisten, memenuhi standar, dapat ditelusuri, dan masuk ke pasar yang lebih luas. Hilirisasi yang tidak diikuti penguatan standar hanya akan menghasilkan produk dengan nilai tambah terbatas dan daya saing yang rapuh.

4.2.5 Investasi, Tata Niaga, dan SDM sebagai Bottleneck Pendukung

Selain empat bottleneck utama, hilirisasi kelautan-perikanan juga ditentukan oleh investasi, tata niaga, dan SDM. Ketiganya menjadi faktor pendukung yang menentukan apakah transformasi rantai nilai dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. Pertama, investasi hilirisasi harus diarahkan untuk membangun ekosistem, bukan sekadar pabrik. Bahan FGD ISEI 2026 menegaskan bahwa investasi hilirisasi perlu mencakup pelabuhan perikanan dan rantai dingin, industri pengolahan, pembiayaan biru, produk turunan bernilai tinggi, serta budidaya unggulan. Investasi yang hanya berfokus pada pabrik pengolahan berisiko tidak optimal apabila tidak didukung bahan baku yang stabil, logistik dingin, sertifikasi, dan akses pasar.

Kedua, tata niaga yang tidak sehat dapat membuat nilai tambah terkunci pada segelintir aktor. Dalam rantai pasok perikanan, nelayan sering kali memiliki keterbatasan akses terhadap informasi harga, cold storage, pembiayaan, dan pembeli akhir. Kajian cold chain Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa rantai pasok perikanan tangkap melibatkan nelayan, punggawa, pengumpul, transshipment, agent, eksportir, dan konsumen. Rantai ini membutuhkan koordinasi yang baik agar mutu ikan terjaga dan nilai tambah dapat terdistribusi lebih adil. Ketiga, penguatan SDM menjadi prasyarat agar hilirisasi tidak hanya dinikmati oleh pelaku besar. Hilirisasi membutuhkan keterampilan baru, seperti penanganan pasca-panen, sortasi mutu, penggunaan es dan rantai dingin, sanitasi, HACCP, traceability, pengemasan, digitalisasi transaksi, serta pemasaran. Kajian cold chain Sulawesi Selatan mencatat berbagai masalah di rantai dingin, antara lain kurangnya skill dan modal nelayan, kurangnya pendinginan, kualitas ikan yang bervariasi dan belum memenuhi standar, transportasi belum mumpuni, lemahnya PPI, biaya produksi tinggi di industri, serta tantangan sertifikasi dan kerusakan produk pada level eksportir.

4.3 Pembelajaran Kasus Sulawesi Utara/Bitung

Kasus Sulawesi Utara, khususnya Kota Bitung, memberikan pembelajaran penting mengenai hubungan antara potensi perikanan, tata kelola PNBP, investasi, dan keberlanjutan sumber daya ikan. Bitung memiliki posisi strategis sebagai salah satu simpul perikanan pelagis besar di Indonesia. Kajian PNBP mencatat bahwa Kota Bitung merupakan wilayah strategis dalam pemanfaatan sumber daya perikanan karena aktivitas ekonominya didominasi oleh kegiatan laut dan pesisir. Keberadaan Pelabuhan Internasional Bitung juga memberi peluang bagi kota ini untuk menjadi pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Posisi tersebut diperkuat oleh karakter produksi perikanan Bitung yang didominasi oleh perikanan laut. Bitung disebut sebagai kota penghasil ikan terbesar di Sulawesi Utara sekaligus pemasok penting bagi pemenuhan konsumsi ikan di provinsi tersebut. Produksi perikanan laut Bitung pada 2023 mencapai 54.253 ton, dengan harga rata-rata ikan Rp18.700 per kg, sehingga nilai produksinya diperkirakan mencapai sekitar Rp1,015 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa Bitung bukan hanya memiliki fungsi produksi, tetapi juga potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan sebagai simpul hilirisasi perikanan.

Dari sisi komoditas, perikanan Bitung sangat relevan dengan agenda hilirisasi karena didominasi oleh komoditas bernilai ekonomi tinggi, terutama tuna dan cakalang. Kajian PNBP juga mencatat bahwa Bitung memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan banyak usaha yang bergerak di bidang perikanan. Armada penangkapan di wilayah ini terdiri atas pancing ulur, huhate, pukat cincin, dan rawai, yang memperlihatkan bahwa aktivitas perikanan Bitung memiliki basis produksi dan struktur usaha yang relatif kuat. Namun, potensi ekonomi tersebut

perlu dikelola secara hati-hati karena sumber daya ikan memiliki batas ekologis. Kajian PNBP menunjukkan bahwa hasil tangkapan rata-rata perairan Bitung sebesar 48.131,67 ton, sedangkan hasil tangkapan MSY sebesar 59.832,33 ton. Secara produksi lestari, hasil tangkapan masih berada di bawah MSY. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, tingkat pemanfaatan sumber daya pelagis besar pada periode 2019–2023 cenderung over-exploited atau melebihi 100%.

Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa strategi hilirisasi tidak boleh hanya diarahkan pada peningkatan volume tangkapan. Jika hilirisasi hanya dimaknai sebagai dorongan untuk memperbesar bahan baku, maka tekanan terhadap stok ikan dapat meningkat. Karena itu, hilirisasi di wilayah seperti Bitung seharusnya diarahkan pada peningkatan nilai tambah dari hasil tangkapan yang terkendali, melalui penguatan mutu, rantai dingin, pengolahan, sertifikasi, traceability, dan akses pasar. Dengan pendekatan ini, nilai ekonomi dapat meningkat tanpa harus selalu mendorong ekspansi penangkapan. Dari sisi PNBP, Bitung juga menjadi contoh penting karena kontribusi PNBP pasca-produksinya cukup dominan di Sulawesi Utara. Pada 2023, PPS Bitung mencatat nilai PNBP pasca-produksi sebesar Rp29,37 miliar, dengan 1.736 frekuensi pembongkaran dan 320 kapal. Nilai tersebut jauh lebih besar dibandingkan pelabuhan pangkalan lain di Sulawesi Utara. Hal ini menegaskan bahwa Bitung merupakan simpul yang relevan untuk menilai efektivitas desain PNBP pasca-produksi dalam mendukung tata kelola perikanan.

Kajian PNBP membandingkan potensi PNBP pra-produksi, pasca-produksi, dan pasca-produksi dengan reformulasi. Secara umum, kajian tersebut menunjukkan bahwa potensi PNBP PHP pra-produksi dengan formula eksisting di Perairan Bitung dan Bali sebesar Rp10,80 juta, sedangkan potensi PNBP pasca-produksi mencapai Rp669,61 miliar. Namun, ketika dilakukan reformulasi menggunakan simulasi berdasarkan skala usaha dan GT kapal, hasil perhitungan PNBP menjadi jauh lebih kecil dibandingkan formula eksisting. Untuk Perairan Bitung, simulasi reformulasi PNBP pasca-produksi menghasilkan nilai yang bervariasi. Pada simulasi 1, potensi PNBP pasca-produksi reformulasi sebesar Rp862,93 juta per tahun; simulasi 2 sebesar Rp1,28 miliar; simulasi 3 sebesar Rp2,16 miliar; simulasi 4 sebesar Rp2,23 miliar; simulasi 5 sebesar Rp1,33 miliar; dan simulasi 6 sebesar Rp1,29 miliar. Variasi ini menunjukkan bahwa desain PNBP sangat dipengaruhi oleh asumsi skala usaha, karakter kapal, alat tangkap, dan struktur produktivitas di lapangan.

Temuan utama dari kajian tersebut adalah bahwa hasil reformulasi PNBP yang lebih kecil dinilai lebih logis dan lebih menarik bagi pelaku usaha untuk masuk ke bisnis perikanan. Hal ini memberi pelajaran penting bahwa optimalisasi PNBP tidak dapat hanya dilihat dari besarnya pungutan jangka pendek. PNBP yang terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan karakter usaha dapat menurunkan minat investasi, mendorong resistensi pelaku usaha, dan menghambat formalitas usaha. Sebaliknya, PNBP yang rasional dapat memperluas basis kepatuhan, memperkuat pencatatan produksi, dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap kebijakan fiskal sektor perikanan. Dengan demikian, pembelajaran dari Bitung menunjukkan bahwa PNBP harus didesain sebagai instrumen produktif, bukan sekadar instrumen pungutan. PNBP perlu berbasis data yang akurat, mempertimbangkan kelayakan usaha, dan dikaitkan dengan peningkatan layanan sektor. Peningkatan pencatatan data dari hulu ke hilir juga menjadi penting karena data yang lengkap dan relevan merupakan dasar bagi pengambilan keputusan kebijakan yang tepat.

Implikasi kebijakan dari kasus Bitung adalah perlunya membangun desain PNBP yang produktif, rasional, berbasis data, dan kompatibel dengan investasi serta keberlanjutan stok ikan. PNBP produktif berarti penerimaan negara tidak berhenti sebagai pungutan, tetapi dikembalikan untuk memperkuat ekosistem perikanan melalui peningkatan fasilitas pelabuhan, modernisasi TPI, digitalisasi pendaratan ikan, pengawasan sumber daya, cold chain, sertifikasi, dan traceability. Dengan pendekatan ini, PNBP dapat menjadi bagian dari arsitektur hilirisasi, bukan faktor yang memperlemah daya saing. Pembelajaran Bitung juga menegaskan bahwa ekonomi biru membutuhkan keseimbangan antara produktivitas dan keberlanjutan. Ketika tingkat pemanfaatan sumber daya pelagis besar telah menunjukkan kecenderungan over-exploited, kebijakan hilirisasi perlu menggeser orientasi dari sekadar peningkatan tangkapan menuju peningkatan nilai tambah. Dengan demikian, Bitung dapat menjadi contoh bahwa hilirisasi kelautan-perikanan yang sehat bukan hanya memperbesar volume produksi, tetapi meningkatkan nilai ekonomi dari sumber daya yang dikelola secara hati-hati, terukur, dan berkelanjutan.

4.4 Pembelajaran Kasus Sulawesi Selatan

Kasus Sulawesi Selatan memberikan pembelajaran penting bahwa hilirisasi kelautan-perikanan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan rantai dingin yang memadai. Sulawesi Selatan memiliki basis sumber daya perikanan yang kuat, baik dari sisi potensi produksi, sebaran wilayah perairan, maupun keterlibatan pelaku usaha di sepanjang rantai pasok. Kajian cold chain mencatat bahwa Sulawesi Selatan memiliki luas wilayah perairan sebesar 189.480 km², garis pantai sepanjang 1.979,97 km, serta potensi perikanan laut sebesar 1,17 juta ton per tahun yang tersebar di Selat Makassar, Teluk Bone, dan Laut Flores. Pada tahun 2021, volume perikanan tangkap Sulawesi Selatan mencapai 387.177 ton dengan nilai sekitar Rp9,73 triliun. Potensi tersebut menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan bukan hanya wilayah produksi, tetapi juga memiliki peluang besar untuk menjadi basis hilirisasi kelautan-perikanan di kawasan timur Indonesia. Namun, karakter produk perikanan yang mudah rusak membuat peningkatan produksi tidak otomatis menghasilkan peningkatan nilai tambah. Ikan membutuhkan penanganan pasca-panen yang cepat, penyimpanan suhu rendah, distribusi yang efisien, serta standar mutu yang konsisten agar dapat masuk ke industri pengolahan dan pasar ekspor. Karena itu, rantai dingin menjadi prasyarat utama untuk menghubungkan potensi produksi dengan peningkatan nilai tambah.

Kajian cold chain Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa rantai pasok perikanan tangkap melibatkan banyak aktor, mulai dari nelayan sebagai pelaku hulu, punggawa atau pengepul sebagai perantara, pasar, hingga konsumen akhir. Setelah ikan didaratkan oleh nelayan, ikan diambil oleh punggawa dan pengumpul di tempat pendaratan ikan pribadi, pelelangan ikan, maupun pangkalan pendaratan ikan. Selanjutnya, ikan disortir, dibersihkan, dimasukkan ke dalam kontainer styrofoam atau truk pendingin, lalu dibawa ke industri pengolahan ikan lokal maupun industri perikanan di KIMA. Dari titik tersebut, ikan kemudian bergerak ke eksportir, retail, hotel, restoran, dan pasar tradisional. Struktur rantai pasok tersebut memperlihatkan bahwa kualitas produk perikanan sangat ditentukan oleh koordinasi antarpelaku. Nelayan menentukan mutu awal hasil tangkapan, punggawa dan pengumpul berperan dalam penanganan dan konsolidasi pasokan, industri pengolahan menentukan peningkatan nilai tambah, sedangkan eksportir, retail, hotel, restoran, dan pasar tradisional menjadi penghubung akhir dengan konsumen. Apabila

salah satu mata rantai tidak memiliki akses terhadap es, penyimpanan dingin, transportasi dingin, atau fasilitas penanganan yang memadai, maka mutu ikan dapat menurun dan nilai ekonominya berkurang.

Dalam konteks tersebut, titik kritis rantai dingin menjadi sangat penting. Kajian cold chain merujuk empat tahap kritis dalam sistem rantai pendingin produk beku, yaitu penanganan saat proses awal, penyimpanan dan pengolahan saat tiba di darat, transportasi ke lokasi tujuan, serta bongkar muat dan distribusi ke konsumen. Pada setiap tahap tersebut, suhu, waktu, sanitasi, dan cara penanganan menjadi faktor yang menentukan apakah mutu ikan dapat dipertahankan atau justru mengalami penurunan. Permasalahan rantai dingin di Sulawesi Selatan tidak hanya terkait dengan ketersediaan cold storage, tetapi juga dengan kualitas penanganan pasca-panen, pasokan es, infrastruktur, energi, transportasi, dan kapabilitas pelaku. Pada beberapa lokasi, penangkapan dan penanganan ikan masih dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan nilai optimal perikanan tangkap belum sepenuhnya diperoleh. Kajian lapangan di Bulukumba, misalnya, mencatat bahwa ketersediaan cold storage masih belum maksimal, pabrik es yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan es balok pelaku perikanan, dan TPI belum dimanfaatkan sebagaimana fungsi pelelangan pada umumnya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan rantai dingin tidak dapat disederhanakan sebagai pembangunan cold storage besar di setiap wilayah. Kebutuhan rantai dingin bersifat spesifik pada titik kritis rantai pasok. Pada beberapa wilayah, kebutuhan yang lebih mendesak justru berupa pabrik es, box penyimpanan, transportasi berpendingin, peningkatan fungsi TPI, ketersediaan listrik, dan peningkatan keterampilan penanganan ikan. Dengan kata lain, investasi rantai dingin harus berbasis kebutuhan aktual pelaku dan alur pergerakan ikan, bukan hanya berbasis target pembangunan infrastruktur fisik. Hal ini diperkuat oleh hasil kajian yang menyimpulkan bahwa sistem cold chain perikanan di Sulawesi Selatan masih memerlukan optimalisasi melalui dua kebijakan utama, yaitu capability support dan penambahan investasi pabrik es sesuai titik kritis rantai dingin. Capability support menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aktor rantai pasok agar sistem rantai dingin dapat berfungsi secara efisien dan efektif. Sementara itu, penambahan investasi pabrik es diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas rantai dingin sesuai kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha perikanan.

Kajian tersebut juga menegaskan bahwa penambahan cold storage di tingkat kabupaten tidak disarankan secara umum, karena banyak cold storage ditemukan dalam kondisi idle dan biaya operasionalnya tinggi. Biaya sewa cold storage juga dinilai masih lebih tinggi dibandingkan harga ikan, sementara jarak dari fishing base ke industri KIMA atau konsumen akhir masih dapat dijangkau oleh pengumpul atau punggawa. Karena itu, preferensi rantai dingin di lapangan masih lebih banyak menggunakan es, box, mobil, dan unit pendukung lain yang lebih sesuai dengan pola distribusi perikanan setempat. Pembelajaran dari Sulawesi Selatan juga menunjukkan bahwa rantai dingin memiliki implikasi langsung terhadap harga, losses, kualitas, dan ekspor. Cold storage dan sistem logistik dingin berperan dalam meminimalkan economic loss karena ikan dapat terserap lebih maksimal oleh pasar, ekspor meningkat, harga ikan lebih stabil, dan limbah ikan yang tidak terserap pasar dapat dikurangi. Selain itu, infrastruktur yang baik dapat mengurangi biaya logistik dan mempercepat distribusi produk perikanan dari wilayah produksi ke pasar domestik maupun luar negeri.

Dari sisi kebijakan, kasus Sulawesi Selatan memberi pelajaran bahwa hilirisasi membutuhkan investasi yang lebih presisi. Pembangunan infrastruktur rantai dingin harus diawali dengan pemetaan rantai pasok, identifikasi titik kritis, evaluasi kebutuhan es dan penyimpanan, analisis biaya operasional, serta kesiapan pelaku. Dengan cara ini, investasi tidak berhenti pada penyediaan fasilitas, tetapi benar-benar menjawab masalah mutu, efisiensi, dan daya saing di sepanjang rantai nilai. Implikasi kebijakan dari kasus Sulawesi Selatan adalah bahwa cold chain harus ditempatkan sebagai fondasi hilirisasi kelautan-perikanan. Tanpa rantai dingin yang memadai, peningkatan produksi berisiko tidak menghasilkan nilai tambah karena mutu ikan menurun, harga tidak stabil, losses meningkat, dan peluang ekspor melemah. Sebaliknya, rantai dingin yang dirancang tepat dapat memperkuat kualitas bahan baku industri, memperbesar peluang produk olahan, menstabilkan harga, mengurangi kerugian pasca-panen, dan meningkatkan daya saing produk perikanan Sulawesi Selatan.

4.5 Integrasi Temuan — Dari Bottleneck ke Arsitektur Kebijakan

Temuan dari pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa hambatan hilirisasi kelautan-perikanan tidak berdiri sendiri. PNBP, BBM, DHE, tarif dan standar, cold chain, tata niaga, serta SDM merupakan bagian dari satu ekosistem kebijakan yang saling memengaruhi. Karena itu, agenda hilirisasi kelautan-perikanan tidak dapat diselesaikan melalui intervensi parsial, melainkan memerlukan arsitektur kebijakan yang menghubungkan hulu, pasca-panen, industri pengolahan, pembiayaan, logistik, standar mutu, dan pasar. Bahan FGD ISEI 2026 menegaskan bahwa empat bottleneck utama hilirisasi kelautan-perikanan adalah PNBP, BBM, DHE, serta tarif dan standar pasar. Keempatnya menentukan biaya usaha, insentif kepatuhan, likuiditas eksportir, dan daya saing produk perikanan Indonesia. Sementara itu, pembelajaran dari Bitung dan Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa bottleneck tersebut harus dibaca bersama dengan isu keberlanjutan stok ikan, reformulasi PNBP, rantai dingin, investasi pabrik es, tata niaga, dan kapasitas pelaku usaha. Kajian PNBP menunjukkan bahwa reformulasi PNBP yang lebih rasional dinilai lebih logis dan lebih menarik bagi pelaku usaha, sedangkan kajian cold chain Sulawesi Selatan menegaskan perlunya capability support dan investasi pabrik es pada titik kritis rantai dingin. Secara ringkas, integrasi temuan tersebut disusun pada Tabel 1.

Tabel 1, menunjukkan bahwa hilirisasi kelautan-perikanan harus bergerak dari pendekatan sektoral menuju pendekatan ekosistem. PNBP tidak cukup dipahami sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi harus menjadi instrumen tata kelola dan pembiayaan kembali sektor. BBM tidak cukup diposisikan sebagai subsidi, tetapi sebagai faktor produktivitas yang menentukan biaya melaut dan stabilitas bahan baku. DHE tidak cukup dilihat sebagai instrumen stabilitas makro, tetapi juga harus menjaga kelancaran cashflow eksportir dan rantai pasok. Tarif dan standar tidak cukup dinegosiasikan di meja perdagangan, tetapi harus dijawab melalui penguatan mutu, sertifikasi, traceability, dan diversifikasi produk. Pada saat yang sama, cold chain menjadi fondasi operasional bagi hilirisasi. Pembelajaran dari Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa masalah utama tidak selalu terletak pada ketiadaan cold storage besar, tetapi pada kurang tepatnya penempatan infrastruktur, terbatasnya pabrik es, biaya operasional tinggi, dan belum meratanya kapabilitas pelaku rantai pasok. Oleh karena itu, investasi rantai dingin perlu diarahkan berdasarkan titik kritis rantai nilai, bukan semata-mata berdasarkan target pembangunan fasilitas fisik. Kajian cold chain bahkan menegaskan bahwa penambahan cold storage tingkat kabupaten tidak selalu disarankan karena banyak fasilitas yang idle dan membutuhkan biaya operasional tinggi.

Tabel 1. Integrasi temuan ke arah kebijakan

Bottleneck	Masalah Utama	Dampak pada Hilirisasi	Arah Kebijakan
PNBP	Masih dipersepsikan sebagai pungutan dan beban biaya usaha	Kepatuhan rendah, formalitas usaha lemah, investasi tertahan	PNBP produktif dan revenue recycling untuk pelabuhan, TPI, data, cold chain, sertifikasi, dan pengawasan
BBM	Biaya melaut tinggi dan akses belum sepenuhnya presisi	Margin nelayan turun, harga bahan baku naik, daya saing industri melemah	BBM presisi berbasis data kapal, alat tangkap, wilayah tangkap, musim, dan skala usaha
DHE	Likuiditas eksportir berpotensi terganggu	Pembelian bahan baku dari nelayan dan pembudidaya tersendat	DHE produktif sebagai modal kerja dan pembiayaan rantai pasok
Tarif dan standar	Mutu, sertifikasi, traceability, dan keberlanjutan belum kuat	Daya saing ekspor rendah dan akses pasar terbatas	Penguatan sertifikasi, traceability, diplomasi mutu, dan diversifikasi pasar
Cold chain	Pasokan es, energi, transportasi dingin, dan infrastruktur belum merata	Losses tinggi, mutu turun, harga tidak stabil, peluang ekspor melemah	Investasi rantai dingin berbasis titik kritis, terutama pabrik es, box, transportasi dingin, dan peningkatan kapasitas pelaku
Tata niaga	Informasi harga tidak transparan dan relasi rantai pasok belum seimbang	Nelayan menjadi price taker dan nilai tambah terkonsentrasi pada aktor tertentu	Tata niaga terbuka, kontrak pasok adil, akses pembiayaan, dan penguatan kelembagaan nelayan/UMKM
SDM	Kapabilitas pelaku belum merata	Hilirisasi tidak inklusif dan pelaku kecil tertinggal	Pelatihan mutu, HACCP, sanitasi, traceability, digitalisasi, pengolahan, dan pemasaran ekspor

Integrasi temuan juga menegaskan bahwa hilirisasi yang berhasil bukan hanya hilirisasi yang memperbesar kapasitas industri pengolahan. Hilirisasi harus memastikan bahwa bahan baku tersedia secara berkelanjutan, mutu ikan terjaga sejak pendaratan, biaya logistik terkendali, pembiayaan berjalan lancar, standar pasar terpenuhi, dan pelaku hulu memperoleh bagian nilai tambah yang lebih adil. Dengan kata lain, hilirisasi kelautan-perikanan harus dirancang sebagai arsitektur kebijakan yang menghubungkan produksi, fiskal, energi, logistik, industri, perdagangan, pembiayaan, dan SDM. Arsitektur kebijakan yang dibutuhkan adalah arsitektur yang mampu mengubah bottleneck menjadi pengungkit. PNBP diubah menjadi instrumen produktif; BBM diubah menjadi kebijakan presisi berbasis data; DHE diubah menjadi instrumen likuiditas rantai pasok; tarif dan standar dijawab melalui sertifikasi dan traceability; cold chain diarahkan pada titik kritis; tata niaga dibuka agar lebih transparan; dan SDM diperkuat agar masyarakat pesisir tidak tertinggal dalam proses hilirisasi.

4.6 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan integrasi temuan dari FGD ISEI 2026, kajian PNBP di Sulawesi Utara/Bitung dan Bali, serta kajian cold chain di Sulawesi Selatan, hilirisasi kelautan-perikanan perlu diarahkan melalui kebijakan yang lebih operasional, terukur, dan saling terhubung. Rekomendasi kebijakan

tidak cukup hanya menekankan pembangunan industri pengolahan, tetapi harus memperkuat seluruh ekosistem dari hulu ke hilir, mulai dari produksi, pendaratan, logistik dingin, pembiayaan, tata niaga, standar mutu, hingga pasar.

4.6.1 Mendorong PNBP Produktif

PNBP sektor kelautan-perikanan perlu diarahkan bukan hanya sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola dan reinvestasi sektor. Selama ini, PNBP masih sering dipersepsikan sebagai beban biaya oleh pelaku usaha karena manfaatnya belum selalu dirasakan kembali dalam bentuk layanan pelabuhan, pencatatan data, fasilitas rantai dingin, sertifikasi, dan pengawasan sumber daya. Karena itu, desain PNBP perlu digeser dari pendekatan revenue extraction menuju revenue recycling. Dalam pendekatan PNBP produktif, sebagian manfaat penerimaan perlu dikembalikan untuk memperkuat ekosistem perikanan, terutama pada pelabuhan perikanan, TPI, sistem pencatatan pendaratan ikan, digitalisasi data produksi, pengawasan kepatuhan, sertifikasi mutu, traceability, dan fasilitas cold chain. Dengan cara ini, PNBP tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mendorong kepatuhan, memperbaiki formalitas usaha, dan memperkuat daya saing sektor kelautan-perikanan.

Kasus Bitung menunjukkan bahwa desain PNBP harus memperhatikan keseimbangan antara penerimaan negara, minat investasi, kelayakan usaha, dan keberlanjutan sumber daya ikan. Kajian PNBP memperlihatkan bahwa reformulasi PNBP yang lebih rasional dapat lebih menarik bagi pelaku usaha untuk masuk ke bisnis perikanan, sehingga optimalisasi PNBP tidak semata-mata diukur dari besarnya pungutan jangka pendek, tetapi dari kemampuannya memperluas basis kepatuhan dan memperkuat tata kelola sektor.

4.6.2 Membangun Skema BBM Presisi

BBM merupakan komponen biaya utama dalam kegiatan perikanan tangkap. Karena itu, kebijakan BBM nelayan perlu dirancang secara presisi agar tidak hanya menjadi bantuan biaya, tetapi juga menjadi instrumen produktivitas. Akses BBM perlu berbasis pada data kapal, ukuran kapal, jenis alat tangkap, wilayah tangkap, musim penangkapan, dan pola operasi nelayan. Skema BBM presisi perlu diarahkan untuk memastikan bahwa dukungan BBM diterima oleh pelaku yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam jumlah yang sesuai kebutuhan usaha. Dengan demikian, kebijakan BBM dapat menekan biaya melaut, menjaga margin nelayan, menstabilkan harga bahan baku, dan memperkuat daya saing industri pengolahan.

Dalam konteks hilirisasi, BBM bukan hanya isu subsidi energi, tetapi juga isu rantai pasok. Apabila biaya BBM tinggi, harga bahan baku ikan akan meningkat dan industri pengolahan akan kehilangan daya saing. Oleh karena itu, integrasi data kapal, produksi, wilayah tangkap, dan distribusi BBM perlu menjadi prioritas awal agar kebijakan BBM benar-benar mendukung hilirisasi yang inklusif.

4.6.3 Menjadikan DHE sebagai Instrumen Likuiditas Rantai Pasok

Kebijakan Devisa Hasil Ekspor atau DHE penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Namun, dalam sektor perikanan, DHE perlu dirancang agar tidak mengganggu cashflow eksportir. Hal ini penting karena arus kas eksportir berhubungan langsung dengan pembelian bahan baku

dari nelayan, pembudidaya, pengumpul, dan industri pengolahan. DHE perlu didorong menjadi instrumen likuiditas rantai pasok, bukan sekadar instrumen retensi devisa. Salah satu opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah skema kredit rantai pasok berbasis DHE, yaitu menjadikan dana DHE sebagai dasar pembiayaan modal kerja bagi eksportir dan pengolah domestik. Skema ini dapat digunakan untuk menjamin kelancaran pembelian bahan baku dari pelaku hulu, sehingga kebijakan DHE tetap mendukung stabilitas makro tanpa memutus perputaran ekonomi sektor perikanan.

Dengan desain tersebut, DHE dapat berfungsi ganda: menjaga stabilitas devisa nasional sekaligus memperkuat pembiayaan hilirisasi. Kebijakan ini penting karena sektor perikanan memiliki karakter produk yang mudah rusak dan membutuhkan transaksi cepat, terutama dalam pembelian bahan baku, penyimpanan dingin, pengolahan, dan ekspor.

4.6.4 Investasi Rantai Dingin Berbasis Titik Kritis

Investasi cold chain perlu diarahkan berdasarkan titik kritis rantai pasok, bukan sekadar membangun cold storage besar di berbagai daerah. Kajian Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa kebutuhan rantai dingin tidak selalu berupa penambahan cold storage, karena beberapa cold storage ditemukan dalam kondisi idle dan membutuhkan biaya operasional tinggi. Dalam banyak kasus, kebutuhan yang lebih mendesak justru berupa pabrik es, box penyimpanan, mobil berpendingin, energi, dan peningkatan penanganan pasca-panen. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pusat perlu melakukan pemetaan titik kritis rantai dingin terlebih dahulu sebelum menetapkan jenis investasi. Pemetaan tersebut harus mencakup lokasi pendaratan ikan, volume produksi, jarak ke industri pengolahan, kebutuhan es, kapasitas transportasi dingin, akses listrik, biaya operasional, serta kesiapan pelaku usaha.

Investasi rantai dingin yang tepat akan berdampak langsung pada penurunan losses, peningkatan mutu ikan, stabilisasi harga, penguatan bahan baku industri, dan peningkatan peluang ekspor. Dengan demikian, cold chain harus diposisikan sebagai fondasi hilirisasi, bukan sekadar fasilitas pendukung.

4.6.5 Penguatan Standar Mutu, Sertifikasi, dan Traceability

Hilirisasi kelautan-perikanan harus menjadikan standar mutu, sertifikasi, keamanan pangan, dan traceability sebagai bagian utama dari strategi nilai tambah. Produk perikanan Indonesia tidak cukup hanya bersaing melalui harga atau volume produksi. Pasar global semakin menuntut produk yang memiliki mutu konsisten, asal-usul yang jelas, standar keberlanjutan, serta jaminan keamanan pangan. Karena itu, penguatan traceability perlu dilakukan sejak tahap penangkapan, pendaratan, penyimpanan, pengolahan, hingga ekspor. Sistem pencatatan produksi, sertifikasi kapal, standar penanganan ikan, digitalisasi data pendaratan, dan pengawasan mutu perlu diintegrasikan agar produk perikanan Indonesia dapat memasuki pasar premium.

Dalam bahan FGD ISEI 2026, tarif dan standar pasar ditempatkan sebagai salah satu bottleneck utama daya saing ekspor. Hal ini menunjukkan bahwa hilirisasi tidak hanya membutuhkan industri pengolahan, tetapi juga sistem mutu dan traceability yang kuat agar produk Indonesia dapat memenuhi persyaratan pasar global.

4.6.6 Membangun Tata Niaga yang Sehat dan Transparan

Hilirisasi yang inklusif membutuhkan tata niaga yang lebih sehat dan transparan. Dalam rantai pasok perikanan, nelayan sering kali berada pada posisi tawar yang lemah karena keterbatasan informasi harga, akses cold storage, akses pembiayaan, dan hubungan langsung dengan pembeli industri. Akibatnya, nelayan cenderung menjadi price taker, sementara nilai tambah lebih banyak terkonsentrasi pada aktor tertentu di tengah dan hilir rantai pasok. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dibangun sistem harga yang lebih terbuka, kontrak pasok yang adil, serta akses langsung nelayan, koperasi, dan UMKM terhadap pembeli industri, cold storage, pembiayaan, dan pasar. Penguatan kelembagaan nelayan dan UMKM juga menjadi penting agar pelaku kecil dapat masuk ke rantai nilai yang lebih formal dan memperoleh manfaat lebih besar dari hilirisasi.

Tata niaga yang sehat bukan berarti menghilangkan peran perantara, tetapi memastikan bahwa hubungan antaraktor berlangsung lebih transparan, efisien, dan adil. Punggawa, pengumpul, industri, dan eksportir tetap memiliki peran dalam konsolidasi pasokan, tetapi mekanisme harga, kualitas, dan pembayaran perlu diperbaiki agar nilai tambah tidak terkunci pada segelintir pelaku.

4.6.7 Penguatan SDM Pesisir dan Pelaku Hilir

Hilirisasi kelautan-perikanan membutuhkan jenis tenaga kerja baru. Selain nelayan dan pengolah tradisional, sektor ini memerlukan operator cold chain, tenaga quality control, pengolah ikan, tenaga logistik dingin, tenaga sertifikasi, ahli keamanan pangan, digital marketer, eksportir muda, dan pengelola data traceability. Karena itu, penguatan SDM menjadi prasyarat agar hilirisasi benar-benar inklusif. Pelatihan perlu diarahkan pada keterampilan praktis yang langsung berhubungan dengan rantai nilai, seperti penanganan pasca-panen, penggunaan es, sortasi mutu, sanitasi, HACCP, pengemasan, pengolahan produk bernilai tambah, digitalisasi transaksi, pencatatan produksi, dan pemasaran ekspor. Pelatihan ini perlu menyasar nelayan, pembudidaya, pengumpul, UMKM pengolah, koperasi, pekerja cold chain, dan pelaku usaha muda di kawasan pesisir.

Penguatan SDM juga perlu dihubungkan dengan kelembagaan. Koperasi, kelompok nelayan, BUMDes, UMKM, dan asosiasi pelaku usaha perlu diperkuat agar mampu mengelola fasilitas rantai dingin, membangun kontrak pasok, mengakses pembiayaan, dan memenuhi standar pasar. Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya menciptakan industri yang lebih besar, tetapi juga menciptakan pelaku lokal yang lebih kompeten dan berdaya saing.

4.7 Roadmap Implementasi

Roadmap implementasi diperlukan agar rekomendasi kebijakan hilirisasi kelautan-perikanan tidak berhenti pada level konseptual, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam tahapan kerja yang operasional. Roadmap ini dibagi ke dalam tiga horizon waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembagian ini penting karena sebagian kebijakan dapat segera dilakukan melalui integrasi data dan koordinasi kelembagaan, sementara sebagian lainnya membutuhkan investasi, perubahan tata kelola, penguatan kapasitas pelaku, dan pembentukan ekosistem industri yang lebih matang.

4.7.1 Jangka Pendek: 0–6 Bulan

Pada tahap awal, prioritas utama adalah membangun fondasi data, koordinasi, dan pemetaan titik kritis. Pemerintah perlu mengintegrasikan data kapal, produksi, BBM, PNBP, ekspor, lokasi pendaratan ikan, kapasitas rantai dingin, dan pelaku usaha. Integrasi data ini menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan BBM presisi, PNBP produktif, traceability, dan investasi rantai dingin yang lebih tepat sasaran. Langkah berikutnya adalah melakukan pemetaan titik kritis cold chain di pelabuhan, TPI, PPI, sentra pendaratan ikan, lokasi pengumpul, industri pengolahan, dan jalur distribusi. Pemetaan ini penting karena kajian Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa persoalan rantai dingin tidak selalu dapat diselesaikan dengan pembangunan cold storage besar, tetapi sering kali membutuhkan pabrik es, box, mobil berpendingin, pasokan energi, dan peningkatan penanganan pasca-panen pada titik tertentu.

Selain itu, perlu dibentuk desk koordinasi DHE sektor perikanan yang melibatkan otoritas fiskal, moneter, perdagangan, perbankan, eksportir, industri pengolahan, dan asosiasi pelaku usaha. Desk ini bertugas memastikan agar kebijakan DHE mendukung stabilitas makro tanpa mengganggu cashflow eksportir dan pembelian bahan baku dari nelayan maupun pembudidaya. Pada fase 0–6 bulan, output yang perlu dicapai disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Roadmap jangka pendek

Agenda Cepat	Output Utama
Integrasi data kapal, produksi, BBM, PNBP, dan ekspor	Basis data terpadu sektor KP
Pemetaan titik kritis cold chain	Peta kebutuhan es, box, transportasi dingin, energi, dan fasilitas pasca-panen
Desk koordinasi DHE sektor perikanan	Mekanisme koordinasi pembiayaan dan likuiditas eksportir
Identifikasi pelabuhan/TPI prioritas	Daftar lokasi pilot project hilirisasi KP

4.7.2 Jangka Menengah: 6–18 Bulan

Pada tahap menengah, agenda utama adalah menjalankan pilot project dan memperkuat instrumen operasional hilirisasi. Pertama, pemerintah dapat memulai pilot project PNBP produktif di simpul perikanan strategis, seperti Bitung, Benoa, dan wilayah pendaratan utama lainnya. Pilot ini perlu menguji skema PNBP yang lebih rasional, berbasis data, dan dikaitkan dengan peningkatan layanan pelabuhan, digitalisasi pendaratan, cold chain, sertifikasi, serta pengawasan sumber daya. Kedua, pembangunan atau optimalisasi pabrik es perlu dilakukan pada titik kritis rantai dingin. Kajian Sulawesi Selatan menegaskan bahwa optimalisasi cold chain membutuhkan capability support dan penambahan investasi pabrik es sesuai titik kritis, sementara penambahan cold storage tingkat kabupaten tidak selalu disarankan karena banyak fasilitas berisiko idle dan biaya operasionalnya tinggi.

Ketiga, sistem traceability nasional perlu diperkuat dari kapal hingga ekspor. Traceability harus mencakup data asal ikan, lokasi pendaratan, pelaku rantai pasok, penanganan dingin, pengolahan, sertifikasi, dan tujuan pasar. Sistem ini penting untuk menjawab tuntutan standar pasar global, memperkuat mutu produk, dan meningkatkan daya saing ekspor. Keempat, perlu dikembangkan skema pembiayaan rantai pasok untuk eksportir dan pengolah. Skema ini dapat diarahkan untuk modal kerja pembelian bahan baku, pembiayaan cold chain, sertifikasi, dan pengembangan produk bernilai tambah. Dalam konteks ini, DHE dapat diarahkan sebagai instrumen likuiditas yang mendukung perputaran modal kerja sektor perikanan. Output jangka menengah yang perlu dicapai disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Roadmap jangka menengah

Agenda 6–18 Bulan	Output Utama
Pilot project PNBPN produktif di simpul strategis	Model PNBPN berbasis data, kepatuhan, layanan, dan reinvestasi sektor
Optimalisasi pabrik es di titik kritis	Penurunan losses, peningkatan mutu ikan, dan stabilisasi pasokan bahan baku
Penguatan traceability nasional	Sistem ketertelusuran dari kapal/pembudidaya sampai ekspor
Skema pembiayaan rantai pasok	Modal kerja eksportir, pengolah, koperasi, dan UMKM hilir

4.7.3 Jangka Panjang: Lebih dari 18 Bulan

Pada tahap jangka panjang, agenda hilirisasi perlu diarahkan pada penguatan struktur industri dan pembentukan klaster ekonomi biru berbasis kawasan. Fokusnya tidak lagi hanya pada perbaikan tata kelola dasar, tetapi pada ekspansi produk turunan bernilai tambah, penguatan pasar ekspor nontradisional, pengembangan SDM, serta integrasi industri perikanan dengan logistik, pembiayaan, dan teknologi. Pertama, ekspansi industri produk turunan bernilai tambah perlu menjadi prioritas. Produk kelautan-perikanan tidak boleh hanya bergantung pada ekspor bahan mentah atau produk primer. Industri perlu diarahkan pada produk olahan, frozen product, fillet, ready-to-cook seafood, produk berbasis rumput laut, fish oil, collagen, gelatin, dan produk turunan lain yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Kedua, penguatan pasar ekspor nontradisional perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu. Diversifikasi pasar akan memperkuat ketahanan ekspor Indonesia terhadap perubahan tarif, standar impor, regulasi teknis, dan preferensi konsumen di negara tujuan utama. Ketiga, pembentukan klaster hilirisasi KP berbasis kawasan perlu dikembangkan pada wilayah yang memiliki basis produksi, pelabuhan, industri pengolahan, rantai dingin, akses pembiayaan, dan pasar. Klaster ini dapat menghubungkan nelayan, pembudidaya, koperasi, UMKM, industri, eksportir, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah dalam satu ekosistem ekonomi biru.

Keempat, vokasi dan sertifikasi tenaga kerja sektor KP perlu diperkuat secara berkelanjutan. Hilirisasi membutuhkan tenaga kerja baru, seperti operator cold chain, quality control, tenaga HACCP, petugas traceability, pengolah produk, teknisi mesin pendingin, digital marketer, dan eksportir muda. Penguatan SDM ini penting agar hilirisasi tidak hanya memperbesar industri,

tetapi juga menciptakan mobilitas ekonomi bagi masyarakat pesisir. Output jangka panjang yang perlu dicapai disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Roadmap jangka panjang

Agenda Lebih dari 18 Bulan	Output Utama
Ekspansi produk turunan bernilai tambah	Produk KP lebih beragam, margin meningkat, dan ketergantungan pada bahan mentah berkurang
Penguatan pasar ekspor nontradisional	Risiko pasar menurun dan akses ekspor lebih luas
Pembentukan klaster hilirisasi KP berbasis kawasan	Ekosistem hulu-hilir yang terintegrasi di wilayah strategis
Vokasi dan sertifikasi tenaga kerja KP	Tenaga kerja pesisir lebih siap masuk ke rantai nilai modern

Secara keseluruhan, roadmap ini menempatkan hilirisasi kelautan-perikanan sebagai proses bertahap. Tahap awal menekankan integrasi data dan pemetaan masalah; tahap menengah menekankan pilot project, investasi titik kritis, traceability, dan pembiayaan; sedangkan tahap panjang menekankan penguatan industri, pasar, klaster, dan SDM. Dengan tahapan tersebut, hilirisasi kelautan-perikanan dapat bergerak dari agenda kebijakan menjadi transformasi ekonomi biru yang nyata, terukur, dan inklusif.

V. PENUTUP

Hilirisasi kelautan-perikanan berbasis ekonomi biru harus dipahami sebagai pembangunan ekosistem hulu-hilir, bukan sekadar peningkatan produksi atau pembangunan industri pengolahan. Potensi sumber daya laut Indonesia yang besar hanya dapat menghasilkan nilai tambah apabila didukung oleh rantai nilai yang terintegrasi, mulai dari penangkapan, pendaratan, penyimpanan dingin, pengolahan, distribusi, pembiayaan, sertifikasi, traceability, hingga akses pasar domestik dan ekspor. Pembahasan dalam paper ini menunjukkan bahwa hambatan hilirisasi kelautan-perikanan bersifat sistemik. PNBP, BBM, DHE, tarif dan standar, cold chain, tata niaga, serta SDM tidak dapat diselesaikan secara parsial. PNBP perlu diarahkan menjadi instrumen produktif dan reinvestasi sektor; BBM harus dikelola secara presisi agar mendukung produktivitas nelayan dan stabilitas bahan baku; DHE perlu dirancang sebagai instrumen likuiditas rantai pasok; sedangkan tarif dan standar harus dijawab melalui peningkatan mutu, sertifikasi, traceability, diplomasi pasar, dan diversifikasi produk.

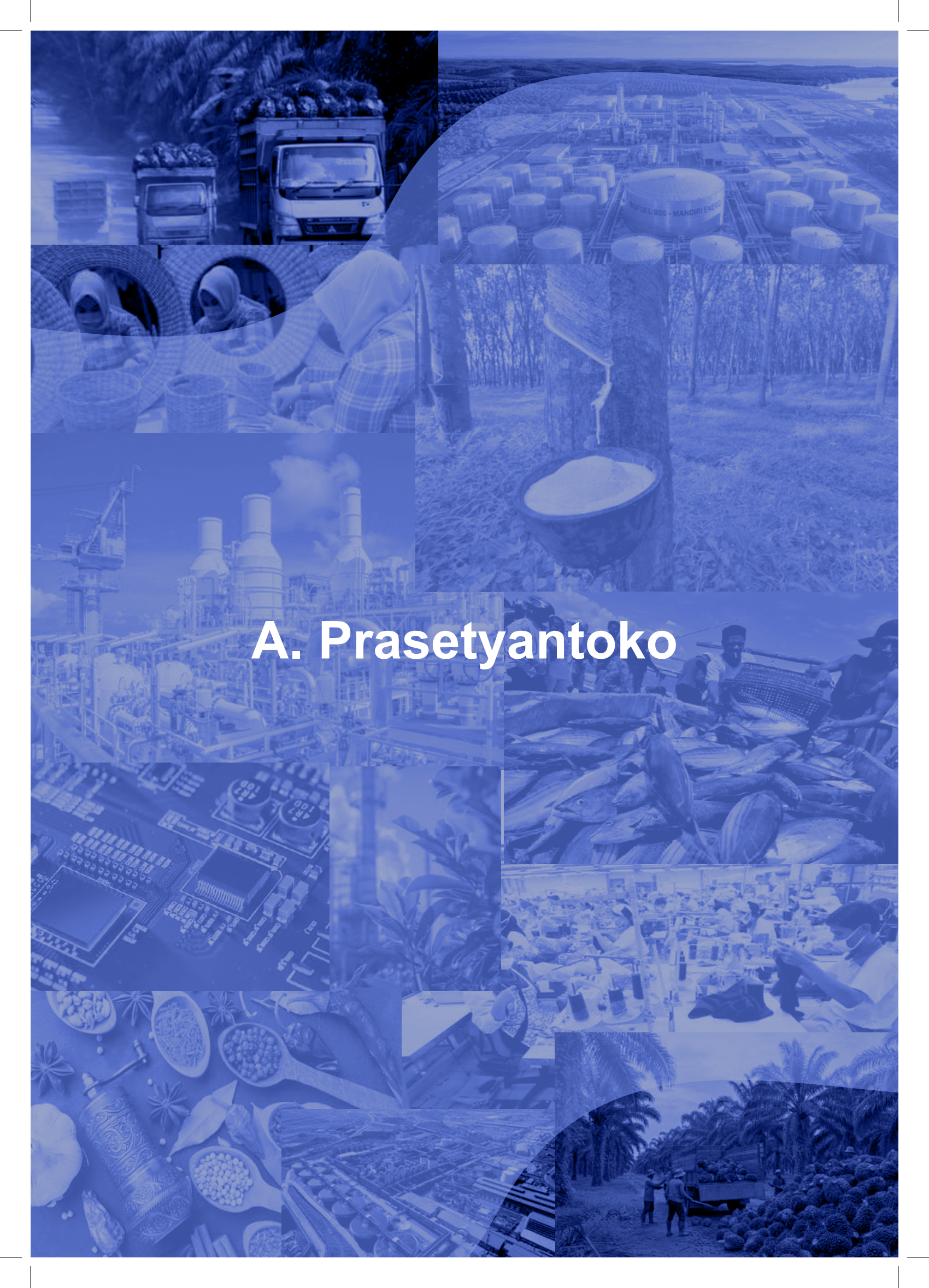
Pembelajaran dari Sulawesi Utara/Bitung menegaskan pentingnya tata kelola fiskal yang rasional, berbasis data, dan selaras dengan keberlanjutan sumber daya ikan. Desain PNBP tidak boleh semata-mata mengejar penerimaan jangka pendek, tetapi harus mempertimbangkan kelayakan usaha, minat investasi, kepatuhan pelaku, serta tekanan terhadap stok ikan. Dengan demikian, PNBP produktif dapat menjadi instrumen untuk memperkuat tata kelola, bukan sekadar pungutan yang menambah beban usaha. Sementara itu, pembelajaran dari Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa rantai dingin merupakan fondasi penting dalam hilirisasi kelautan-perikanan. Peningkatan produksi tidak akan menghasilkan nilai tambah optimal apabila tidak didukung oleh penanganan pasca-panen, pasokan es, transportasi dingin, energi, kapabilitas pelaku, dan investasi

berbasis titik kritis. Oleh karena itu, pembangunan cold chain harus berbasis kebutuhan nyata rantai pasok, bukan sekadar pembangunan cold storage besar yang berisiko tidak termanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, hilirisasi kelautan-perikanan yang berhasil adalah hilirisasi yang mampu meningkatkan nilai tambah tanpa mengabaikan keberlanjutan sumber daya dan pemerataan manfaat. Hilirisasi harus memperkuat daya saing produk, meningkatkan pendapatan nelayan, membuka lapangan kerja baru, memperluas peluang UMKM dan industri pengolahan, meningkatkan penerimaan negara secara produktif, serta memastikan masyarakat pesisir memperoleh bagian yang adil dari transformasi ekonomi biru.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2026). *Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Christopher, M. (2016). *Logistics & supply chain management* (5th ed.). Pearson Education.
- FAO. (2024). *The state of world fisheries and aquaculture 2024: Blue transformation in action*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Focus Group Discussion Bidang IV ISEI. (2026). *Ekonomi biru dan hilirisasi kelautan-perikanan untuk pertumbuhan inklusif: Road to Pleno Bogor*. Bahan Presentasi FGD ISEI 2026.
- Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. *Review of International Political Economy*, 12(1), 78–104.
- Kaplinsky, R., & Morris, M. (2001). *A handbook for value chain research*. International Development Research Centre.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2025). *Rilis data kelautan dan perikanan triwulan I 2025*. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2026). *Ekspor perikanan tembus USD 6,27 miliar di 2025: Komoditas Indonesia makin bernilai di pasar global*. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur*. JDIH Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 187 Tahun 2023 tentang Pelabuhan Pangkalan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Pelabuhan Pangkalan yang Telah Memenuhi Syarat Penarikan Pasca Produksi*. JDIH Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. Free Press.
- Presiden Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan*. JDIH Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Presiden Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam*. JDIH BPK RI.

- World Bank & United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2017). *The potential of the blue economy: Increasing long-term benefits of the sustainable use of marine resources for small island developing states and coastal least developed countries*. World Bank.
- Zulbainarni, N., Maarif, S., Suhendi, Sari, L. K., Abdullah, A., Shalihati, F., Holis, A., Khumaira, N. I., Fadilah, S. D., & Firyanza, E. (2023). *Optimalisasi pemanfaatan cold chain produk perikanan laut dalam rangka penerapan blue economy di Provinsi Sulawesi Selatan*. Sekolah Bisnis IPB dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.
- Zulbainarni, N. (2024). *Kajian optimalisasi penerimaan negara bukan pajak sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Utara dan Bali*. Sekolah Bisnis IPB dan Kantor Badan Kebijakan Fiskal.

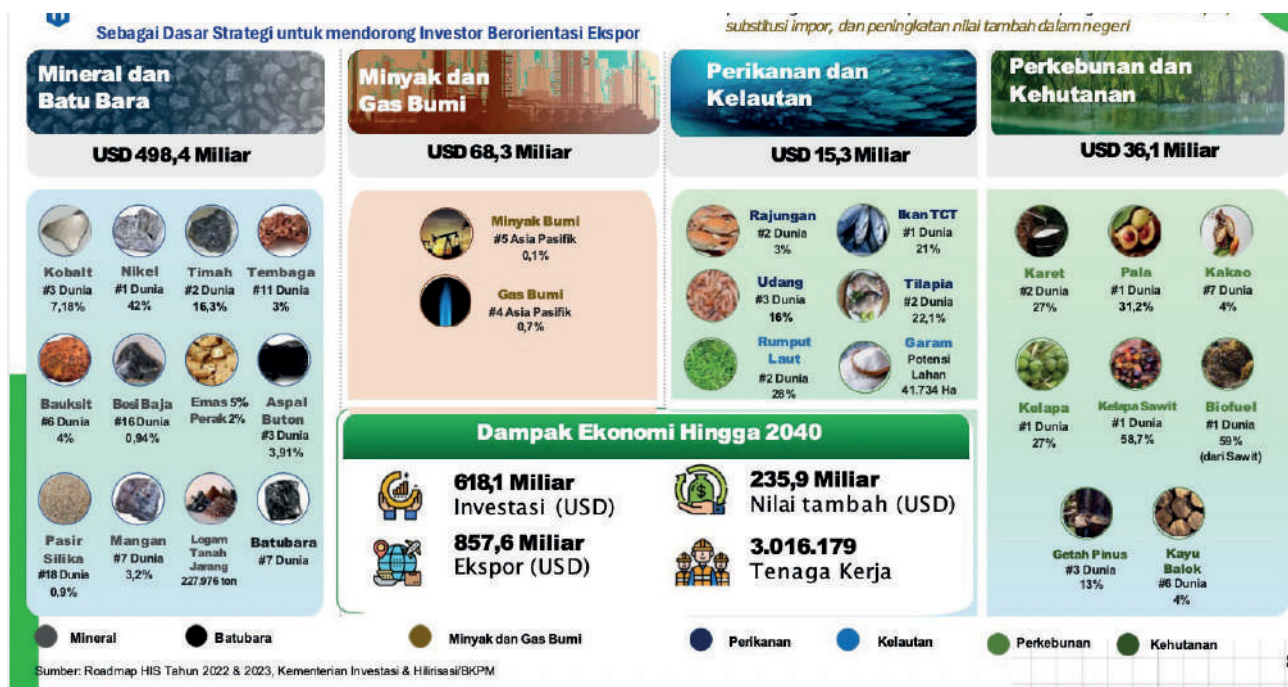


A. Prasetyantoko

Strategi Investasi dan Hilirisasi untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

FGD ISEI, 19 Juni 2026





Peran Negara Diperlukan, Tetapi Bukan Menggantikan Peran Sektor Swasta dalam Perekonomian Nasional

Peran Negara diperlukan untuk memastikan adanya "trickle down effect" tetapi bukan untuk menggantikan peran sektor swasta

2025



2026



Private Sector BUMN & Danantara APBN & APBD

Data diatas menunjukkan investasi nasional ditargetkan meningkat dari Rp6.900 triliun pada 2025 menjadi Rp7.500 triliun pada 2026, dengan peningkatan kontribusi BUMN/Danantara dari 9% menjadi 15% dalam mendukung akselerasi investasi dan perdagangan global.

Sumber: Kementerian Keuangan, BPS, CEIC (diolah, 2025)

Evaluasi 18 Proyek Strategis Hilirisasi

Rp618 T

Estimasi Awal
(Satgas Hilirisasi)

→ Rp250 T

Setelah Koreksi
(Danantara Review)

18

Proyek Strategis
Tahap I



! Insight Kunci

Beberapa proyek bergeser dari wilayah timur ke barat karena pertimbangan keekonomian & kesiapan infrastruktur.

Proyek harus berbasis feasibility, bukan hanya kedekatan bahan baku.

Materi FG Hilirisasi dan Investasi.pdf

Pelajaran dari Hilirisasi Nikel

Studi LPEM UI: Strategi downstreaming nikel mendorong ekspor & pertumbuhan, namun manfaatnya belum merata.



Hilirisasi Nikel Indonesia

#1

Produsen Nikel
Dunia

40%

Share Ekspor
Nikel Global



Ketimpangan Ekonomi

Pertumbuhan daerah belum diikuti penurunan kemiskinan & peningkatan kualitas kerja



Tekanan Lingkungan

Deforestasi, pencemaran, & emisi karbon tinggi akibat ketergantungan batubara



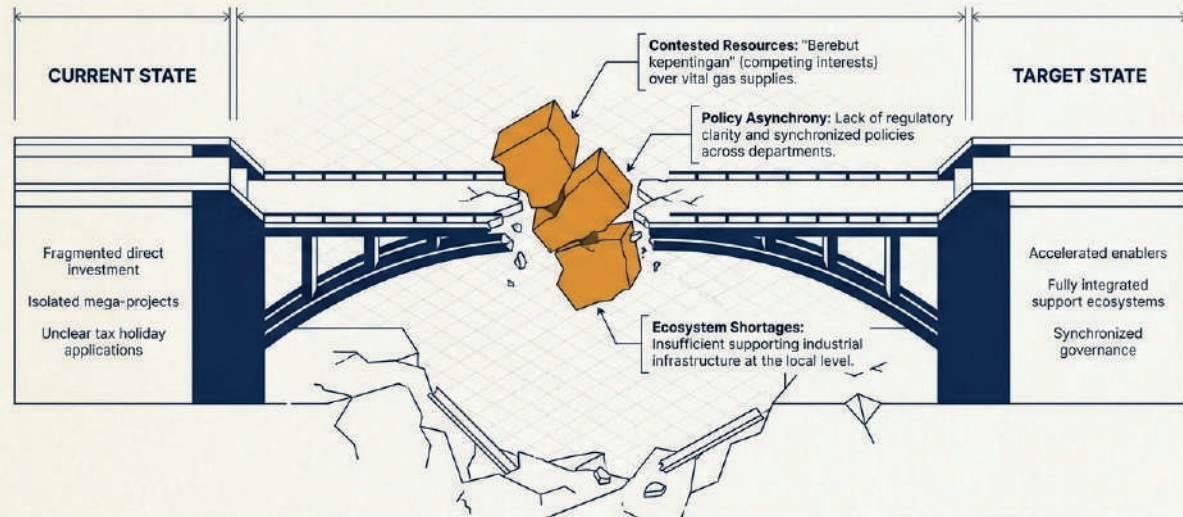
Kondisi Ketenagakerjaan

Kualitas kerja, upah, & kondisi sosial pekerja perlu diperbaiki agar inklusif

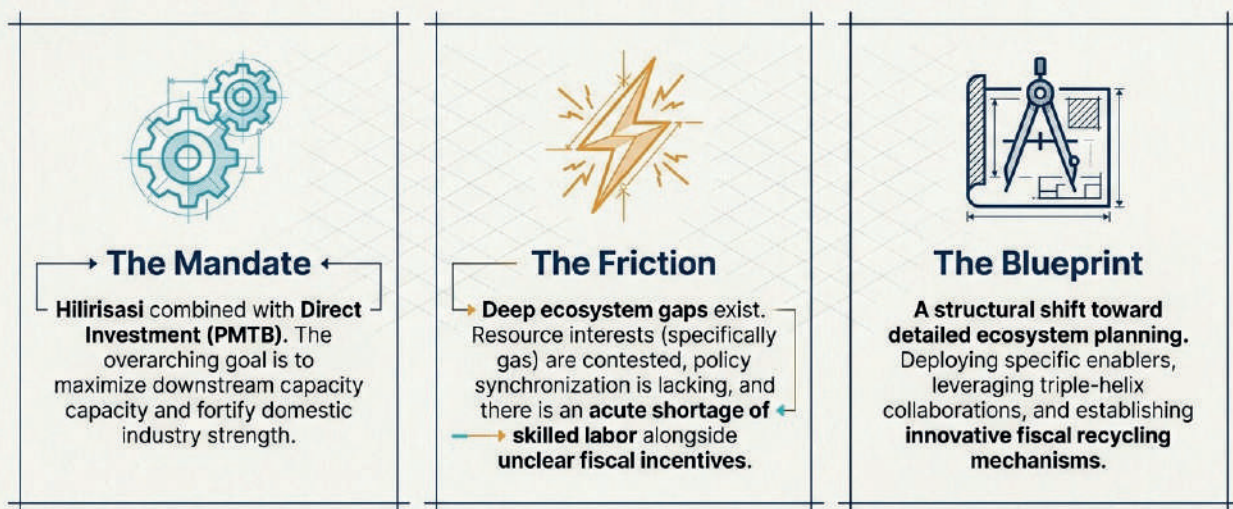
Sumber: Kementerian ESDM, 2024

Sumber: LPEM FEB UI — *Balancing Act: Complementary Strategies for Indonesia's Sustainable Nickel Downstream Industry*

Critical Shortages Stalling the Acceleration of Downstream Investment



Defining the Mandate, the Friction, and the Blueprint



Peta Jalan Hilirisasi & Investasi Industri: Mengatasi Hambatan Menuju Transformasi Ekonomi

Peta Persoalan Hilirisasi

Gap Investasi (PMTB) yang Signifikan
Adanya kesenjangan besar antara target investasi langsung dengan realisasi di lapangan yang menghambat laju hilirisasi.

Kurangnya Ekosistem Enabler
Akselerasi industri terhambat karena elemen pendukung seperti infrastruktur dasar dan pendukung di lokasi industri tidak mencukupi.



Krisis Pasokan Gas & Energi
Terjadi persaingan kepentingan dalam alokasi gas bumi yang vital bagi energi dan bahan baku industri.

Shortage Tenaga Kerja Ahli (Skill Labor)
Kurangnya tenaga kerja dengan keterampilan spesifik yang dibutuhkan untuk mengoperasikan teknologi di industri hilir.



Ketimpangan Wilayah: Papua vs Barat
Ekosistem industri di daerah dekat situs sumber daya (seperti Papua) belum mencukupi dibandingkan wilayah Barat, sehingga aspek keekonomian menjadi sulit.

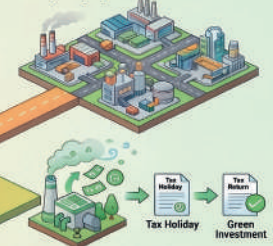
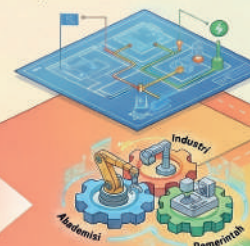


Regulasi Tidak Konsisten & Kurang Jelas
Ketidaktepatan aturan dan kurangnya sinkronisasi kebijakan antar lembaga menurunkan kepercayaan investor yang sudah ada (existing investors).

Rekomendasi Strategis

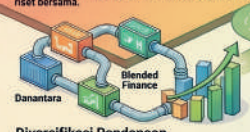
Perencanaan Detail Ekosistem
Menyusun peta jalan yang mendetail untuk setiap elemen pendukung (enabler) guna menjamin kesiapan ekosistem industri dari hulu ke hilir.

Industrial Clustering (Kawasan Industri)
Mendorong pengelompokan industri di dalam kawasan terpadu untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing logistik.



Kolaborasi Triple Helix
Memperkuat sinergi antara akademisi, industri, dan pemerintah dalam pengembangan teknologi melalui riset bersama.

Optimalisasi Insentif Fiskal
Penerapan Tax Holiday dan pengembalian pajak (tax return) untuk proyek karbon guna mendorong investasi ramah lingkungan.

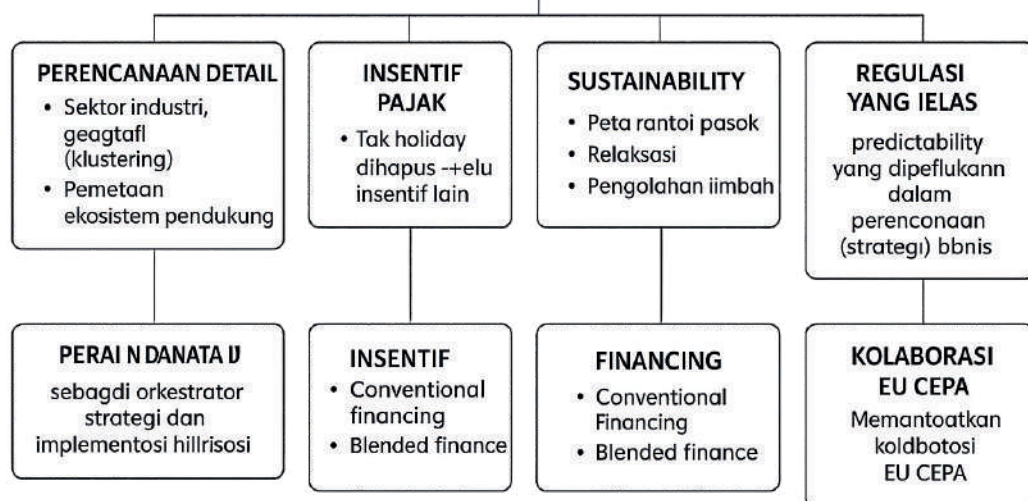


Diversifikasi Pendanaan (Blended Finance & Danantara)
Memfasilitasi peran Danantara dan skema pembiayaan campuran untuk mengatasi kendala permodalan dalam skala besar.

Peta Rantai Pasok & Kerja Sama Internasional
Membangun rantai pasok berkelanjutan dan memaksimalkan kolaborasi global melalui perjanjian seperti EU CEPA untuk akses pasar yang lebih luas.

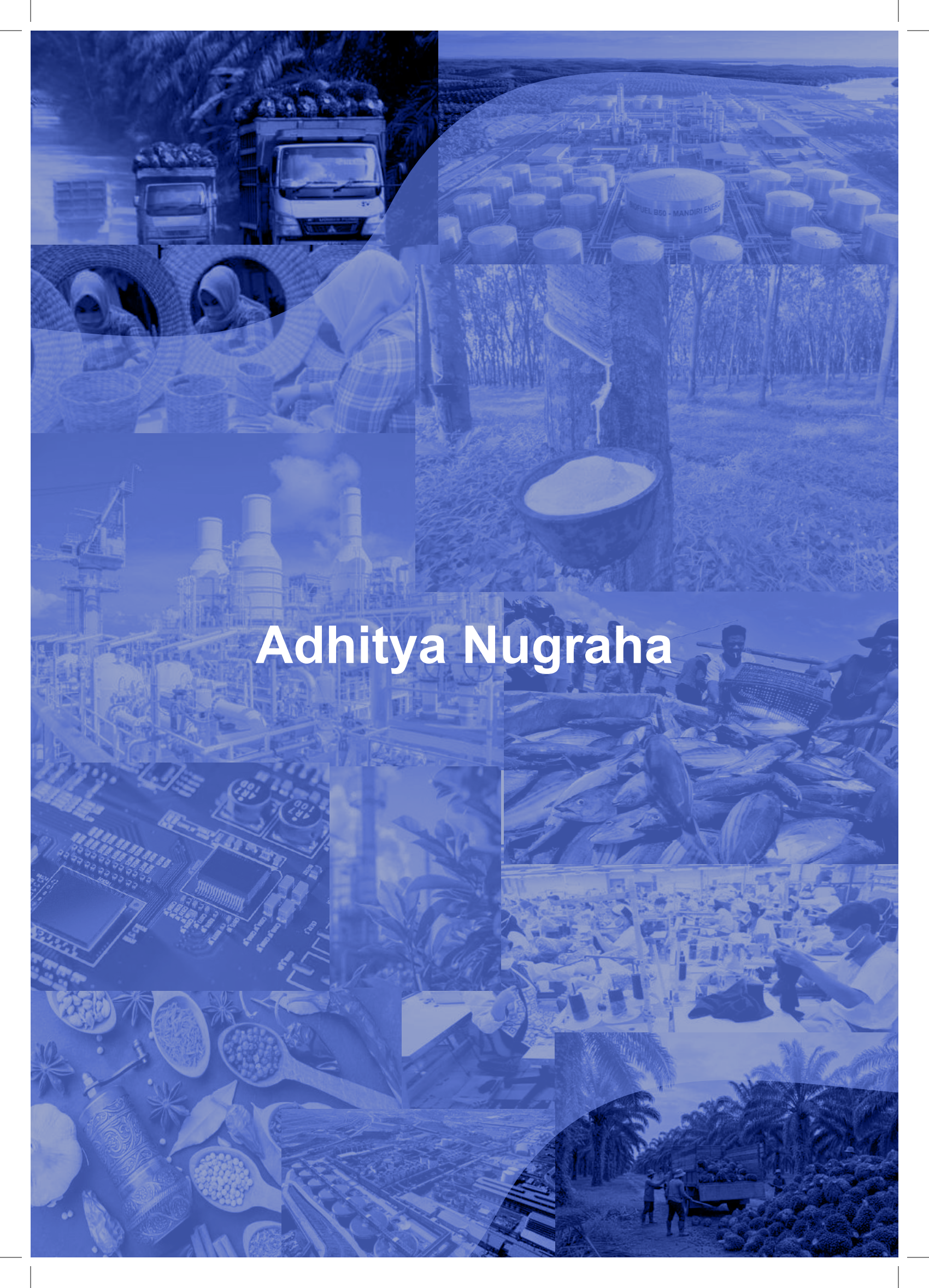
Rekomendasi

STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN INVESTASI NASIONAL



Tim penyusun – FG Hilirisasi dan Industrialisasi

- A.Prasetyantoko
- Nurul Ichwan
- Reza Hafiz
- Jahen Fachrul Rezky



Adhitya Nugraha

Hilirisasi Sektor Energi

sebagai Pilar Reindustrialisasi Indonesia

Strategi Menuju Ketahanan Energi Nasional

Analisa kritis di hilirisasi minyak dan gas

Dr. Adhitya Nugraha

FG Energi dan Sumber Daya Mineral

19 Juni 2026

Pandangan dan pendapat yang disampaikan dalam presentasi ini merupakan pandangan pribadi pembicara dan tidak mencerminkan posisi resmi atau kebijakan Perusahaan

KONTEKS

Dua Paradoks...

PARADOKS EKSPOR-IMPOR

Indonesia produsen migas, namun:

- 41% produk kilang masih diimpor
- Impor minyak mentah lebih dari 30% kebutuhan nasional
- Total nilai impor produk kilang mencapai hampir USD 27 miliar per tahun.
- Hilirisasi tumbuh 43 % pada 2025, namun strukturnya perlu diperkuat

PARADOKS DEFISIT 2040

Tanpa akselerasi hilirisasi:

7 s.d. 12 juta KL

Defisit Gasoline 2040 (PP KEN No.40/2025)

+43%

Pertumbuhan investasi hilirisasi 2025

Hilirisasi energi yang belum tuntas berarti risiko ketahanan pasokan, beban fiskal, dan daya saing industri yang tertahan sekaligus

Sumber: PP No.40/2025 tentang KEN

SITUASI TERKINI

Krisis Hormuz 2026: Biaya Nyata Ketergantungan Impor

Hilirisasi yang belum tuntas terbukti mahal saat guncangan eksternal terjadi



HARGA	OPERASIONAL	PASOKAN
- Brent: USD 94,40/bbl saat ini, sempat USD 126,41/bbl (+50 s.d. 68% YTD) - LNG melonjak 50% di Eropa dan 40% di Asia - Avtur naik 16,2% (Apr ke Mei 2026)	2 kapal terjebak di Timur Tengah - Kilang memodifikasi mode produksi akibat crude spesifikasi langka	- Stok LPG menurun - Kapasitas air cargo Asia ke Timur Tengah turun, pengiriman katalis terhambat - Freight cost VLCC meningkat

Setiap dollar yang belum diinvestasikan ke hilirisasi energi domestik, perlu membayar mahal saat krisis terjadi

SUMITRONOMICS — PILAR 1

Stabilitas Dinamis: Dilema Struktural Fiskal Energi

Akar masalah yang saling mengunci dan perlu diurai bersama



Hilirisasi Energi: Lima lini yang perlu diakselerasi

01 KILANG PRODUK HILIR	02 OIL STORAGE KETAHANAN STOK	03 KONVERSI LPG KE GAS DOMESTIK	04 GASIFIKASI BATUBARA (DME)	05 BIOFUELS: BIODIESEL & BIOETANOL
- Kilang Gasoline - Hasil: tambahan Gasoline, Propylene, LPG per tahun	Fuel Terminal baru	- Existing plan: kurangi impor LPG - Accelerated plan: substitusi dengan dukungan pemerintah - Jargas (sesuai Permen ESDM No.6/2026) - CNG: reaktivasi dan SPBG baru	- DME (Dimethyl Ether) via gasifikasi batubara sebagai substitusi LPG - Jalur: batubara kalori rendah menjadi DME melalui metanol (metanol-ke-DME) atau langsung	- Biodiesel B40 (berlaku ke B50 (mulai 1 Jul 2026): kurangi impor gasoil dan perkuat devisa - Bioetanol E5/E10: mandatori pencampuran Bensin non-PSO (Kepmen ESDM 113.K/EK.05/MEM.E/2026) - Feedstock: molases tebu, singkong, sorgum

Sumber: PP No.40/2025 tentang KEN; Permen ESDM No.6/2026; Kepmen ESDM 113.K/EK.05/MEM.E/2026; Analisis

Paparan ini berfokus pada hilirisasi di sektor energi (BBM, gas, dan bahan bakar alternatif). Hilirisasi petrokimia (misalnya propylene, LCO, DCO dari residu kilang) merupakan tahap lanjutan yang relevan namun di luar cakupan utama presentasi ini.

Ekonomi Inklusif: Hilirisasi Energi

Energi terjangkau dan andal di seluruh wilayah sebagai prasyarat industrialisasi yang merata

Subsidi Energi: Terjaga, namun Rentan	Jargas dan CNG: Solusi Inklusif Sekaligus Strategis
- LPG 3 kg mencatat kontribusi positif - Krisis Hormuz 2026 mengekspos kerentanan: sourcing dari Timur Tengah terganggu, stok sempat di bawah level minimum operasional	- Harga Jargas PSO lebih terjangkau dan tidak bergantung impor - Jargas: tambahan 2.996 ribu SR kumulatif 2026 s.d. 2030, menjangkau Sumatera hingga kawasan timur (Permen ESDM No.6/2026) - CNG potensi substitusi impor LPG
Pemerataan Energi sebagai Prasyarat Industrialisasi	Kaitan ke Agenda Hilirisasi
- Fuel Terminal baru - Daya beli masyarakat kelas bawah terlindungi. Namun daya beli kelas menengah perlu terus dipantau - Konsumsi energi wilayah tumbuh positif	- Ketika hilirisasi maju dan harga BBM lebih stabil: sinyal pemulihan daya beli kelas menengah dan UMKM - Hilirisasi energi dan ekonomi kerakyatan bukan dua hal yang terpisah

Sumber: Permen ESDM No.6/2026; Analisis

Usulan Strategis Hilirisasi Energi: Dari Proyek ke Ketahanan Nasional

JANGKA PENDEK 2026 s.d. 2030	JANGKA MENENGAH 2030 s.d. 2035
Jargas dan CNG sebagai prioritas alokasi gas <i>Permen ESDM No.6/2026</i>	Target CPE 2035 tercapai: Bensin 9,64 juta barel, LPG 525,78 rb MT <i>Perpres No.96/2024</i>
Cadangan Penyangga Energi: target 2035 <i>Perpres No.96/2024</i>	Supplier Held Stock (SHS) sebagai skema bisnis oil storage <i>Kerangka PP KEN ada, regulasi PLB/KEK perlu ditinjau.</i>
Kilang Gasoline <i>PP KEN ada, mekanisme penugasan belum</i>	Akselerasi konversi LPG ke 1,72 MTPA <i>Existing plan 0,51 MTPA, akselerasi butuh regulasi baru</i>
Fuel Terminal baru <i>Program ketahanan ada, pembiayaan O&M belum</i>	Petrokimia dari residu kilang gasoline (Propylene, LCO, DCO) <i>Belum ada regulasi pendorong hilirisasi petrokimia kilang BBM</i>
CNG: reaktivasi dan 58 SPBG baru <i>Permen ESDM No.6/2026 ada, Permen 25 perlu ditinjau.</i>	DME gasifikasi batubara sebagai substitusi LPG skala komersial <i>Belum ada regulasi dan skema pembiayaan khusus</i>
Biodiesel B50 (mulai Jul 2026) dan Bioetanol E5/E10 (Kepmen ESDM 2026) <i>Regulasi ada, kesiapan pasokan FGE perlu diperkuat</i>	Bioetanol E10 skala nasional dan pengembangan bioetanol generasi kedua <i>Belum ada regulasi nasional untuk skala penuh</i>
Kilang Mini <i>Belum ada regulasi dan skema pendanaan khusus</i>	

■ Sudah ada regulasi ■ Perlu penguatan ■ Belum ada/usulan baru

Sumber: PP No.40/2025 tentang KEN; Perpres No.96/2024; Permen ESDM No.6/2026; Kepmen ESDM 113.K/EK.05/MEM.E/2026

REKOMENDASI KEBIJAKAN

PEMERINTAH	DUNIA USAHA	AKADEMISI / ISEI
Formalisasikan mekanisme kompensasi atas capping harga BBM dan percepat revisi Formula Harga Dasar agar responsif terhadap harga pasar	Realisasi Kilang	Riset desain subsidi energi yang tahan guncangan, berbasis target penerima bukan komoditas
Dukungan fiskal terukur untuk kilang: tax holiday (PMK No.130), alokasi crude lokal	Pengembangan bisnis oil storage bernilai tambah	Kajian kelayakan model oil storage hub untuk Indonesia
Selaraskan regulasi PLB dan KEK untuk membuka skema Supplier Held Stock.	Diversifikasi crude slate kilang dan sumber impor LPG, kurangi ketergantungan.	Analisis kompleksitas ekonomi: jalur Indonesia dari komoditas menuju manufaktur berbasis energi
Percepat penugasan Jargas dan CNG.	Akselerasi skenario Jargas dan CNG untuk substitusi impor LPG	Studi dampak hilirisasi kilang terhadap ekuitas daerah dan pemerataan akses energi
Tinjau kebijakan mandatori biodiesel secara dinamis sesuai keseimbangan harga, kapasitas kilang, dan ketahanan devisa	Dukung pengembangan ekosistem bioetanol: DMO molase, kemitraan pabrik FGE, dan kesiapan blending	Kajian dampak implementasi B50 dan bioetanol terhadap neraca devisa dan ketahanan energi jangka panjang
Tingkatkan anggaran R&D nasional secara bertahap		

*Hilirisasi energi bukan pilihan. Ini adalah keharusan strategis.
Setiap tahun kita tunda, kita kehilangan potensi penghematan devisa yang bisa
dicapai melalui integrasi investasi hulu dan hilir.*

*Krisis Hormuz 2026 bukan sekadar bencana geopolitik.
Ini adalah peringatan nyata untuk menuntaskan agenda yang sudah lama tertunda.*

Energy Sector Downstreaming as a Pillar of Indonesia's Reindustrialization: A Descriptive-Analytical Study Toward National Energy Resilience

Adhitya Nugraha^{1*}, Widhyawan Prawiraatmadja²

1 Member of Focus Group Energy and Mineral Resources, The Indonesian Economists Association

2 Head of Focus Group Energy and Mineral Resources, The Indonesian Economists Association

**Corresponding author: adhitya.nugraha@gmail.com*

ABSTRACT

Purpose: This study examines the structural paradoxes in Indonesia's oil and gas downstream sector and analyzes how an integrated, three-pillar energy downstreaming framework can strengthen national energy resilience. The research problem centers on why Indonesia, despite its long history as an oil and gas producer, continues to depend heavily on imports of refined fuel products and crude oil, and how this structural vulnerability manifested during the external supply shock of 2026. The specific gap addressed is the limited integration, within existing literature, of energy downstreaming policy, fiscal sustainability, and inclusive regional energy access into a single analytical framework.

Methods: The study adopts a descriptive-analytical design based on secondary data drawn from Indonesian energy regulations (Government Regulation No. 40/2025 on the National Energy Policy; Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 6/2026; Presidential Regulation No. 96/2024; and Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 113.K/EK.05/MEM.E/2026), market indicators recorded during the February–June 2026 Strait of Hormuz crisis, an original quantitative estimation developed for this study of the fiscal and foreign-exchange impact of raising the biodiesel mandate from B40 to B50 under different price regimes, and the proceedings of the Focus Group Discussion, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), held on 19 June 2026. No formal statistical or econometric testing is performed; the analysis synthesizes policy documents, real-time market data, and relevant academic literature within the "Sumitronomics" framework.

Findings: The analysis identifies two structural paradoxes: an export–import paradox, in which 41% of refined fuel products and more than 30% of national crude oil requirements are still imported despite Indonesia's producer status, at an annual import value of nearly USD 27 billion; and a projected 2040 deficit paradox, in which a gasoline shortfall of 7 to 12 million kilolitres is anticipated absent accelerated downstreaming. Both paradoxes trace back to a self-reinforcing fiscal-structural dilemma, in which insufficient refining capacity raises costly imports, which in turn increases subsidy expenditure and narrows the fiscal space available for downstream investment. Five downstreaming lines requiring acceleration are identified: gasoline refining

capacity, oil storage and buffer stock, LPG-to-domestic-gas conversion, coal-to-dimethyl-ether (DME) gasification, and biofuels. The 2026 Strait of Hormuz crisis served as a real-world stress test, during which Brent crude prices rose 50–68% year-to-date, LPG stocks fell below minimum operational levels, and freight costs increased, empirically confirming that delayed downstreaming carries measurable fiscal and price costs. A closer, price-regime-contingent examination of the B50 biodiesel mandate specifically finds that its net fiscal and foreign-exchange benefit is not unconditional: it turns positive only during transient geopolitical price spikes, while under normal long-term market conditions it reduces national foreign-exchange flows, and its implementation is further constrained by domestic FAME supply capacity and, once refinery expansion reduces import needs, by a risk of domestic gasoil oversupply. Equitable energy access, particularly through city gas network and CNG expansion, emerges as a necessary precondition for inclusive industrialization across regions, rather than a merely complementary programme.

Implications: The findings imply that Indonesian energy policy should treat downstreaming as a structural precondition for fiscal resilience and inclusive growth rather than a discretionary industrial project, and that specific mandates such as B50 biodiesel should be implemented as flexible, price-regime-contingent instruments rather than fixed targets. Recommendations are directed at three stakeholder groups: government (formalizing price-capping compensation mechanisms, fiscal incentives for refineries, accelerated jargas/CNG rollout, and a dynamic, price-contingent biodiesel mandate); business (refinery realization, oil storage business models, diversification of crude and LPG sources, and expansion of domestic FAME production capacity); and academia (research on shock-resilient subsidy design, oil storage hub feasibility, and Indonesia’s economic complexity trajectory).

Originality: The originality of this study lies in integrating real-time evidence from the 2026 Strait of Hormuz supply shock, together with an original quantitative analysis of the B40-to-B50 biodiesel transition developed for this study, into a structured tri-pillar framework that explicitly links energy security, fiscal sustainability, and inclusive downstream industrialization, an integration not yet found in the existing literature on Indonesia’s energy transition and downstreaming policy.

Keywords: energy downstreaming; energy security; fiscal policy; inclusive economic growth; biodiesel blending policy

I. INTRODUCTION

Indonesia's position as a historical oil and gas producer sits uneasily alongside its persistent dependence on imported refined fuel and crude oil for domestic consumption. Refining capacity has not expanded meaningfully in three decades, refined product imports account for a substantial share of national fuel supply, and this structural gap places sustained pressure on the state budget through subsidies and on the balance of payments through import bills (Rahman, Dargusch and Wadley, 2021). Although downstream investment grew by 43% in 2025, the underlying structure of the sector requires further strengthening, and the National Energy Policy (Government Regulation No. 40/2025) projects a gasoline deficit of 7 to 12 million kilolitres by 2040 absent accelerated downstreaming.

The urgency of this structural weakness was demonstrated empirically rather than theoretically in early 2026, when a blockade of the Strait of Hormuz disrupted a corridor through which roughly one-fifth of global oil and a comparable share of global LNG trade normally transits. Brent crude prices climbed from roughly USD 75 per barrel to a peak of USD 126.41 per barrel, LNG prices rose 50% in Europe and 40% in Asia, and Indonesia's domestic LPG stocks fell below minimum operational levels as sourcing from the Middle East was disrupted. This episode illustrates, in real time, the fiscal and price costs that a net oil-importing country incurs when downstreaming remains unfinished.

A body of literature has examined discrete dimensions of Indonesia's energy transition. Rahman, Dargusch and Wadley (2021) apply a political economy lens to identify Indonesia's high dependence on oil imports, its persistent oil subsidy, and its lack of strategic oil buffers as central weaknesses in the nation's energy security. Studies on biofuels (Sahara et al., 2022; Yudiartono, Windarta and Adiarso, 2023) evaluate the macroeconomic and long-term supply implications of biodiesel mandates and renewable energy transition pathways, while a separate stream of research (Anggarani, Wibowo and Rulianto, 2014; Gao, Zhu and Li, 2020) assesses the technical and economic feasibility of dimethyl ether (DME) as a substitute for LPG produced through coal gasification. Gobel et al. (2024) examine the distributional inequities of Indonesia's household energy subsidy regime, finding that existing subsidies disproportionately benefit affluent households rather than the vulnerable groups they are intended to protect.

What remains absent from this literature is an integrated framework that connects energy downstreaming acceleration, fiscal sustainability, and inclusive regional energy access as interdependent components of a single policy problem, and that tests such a framework against a concrete, real-time external shock. This study addresses that gap by organizing the discussion around the "Sumitronomics" framework, comprising Dynamic Stability, Energy Downstreaming, and Inclusive Economy as three mutually reinforcing pillars, and by using the 2026 Strait of Hormuz crisis, together with the most current quantitative evidence on the B50 biodiesel mandate, as empirical stress tests of the framework's central propositions. The paper asks three questions: first, what structural paradoxes explain Indonesia's continued dependence on imported refined petroleum products despite its status as an oil and gas producer; second, how did the 2026 Hormuz supply shock, and the price-regime-contingent economics of the B50 mandate, reveal the fiscal and economic costs and constraints of unfinished downstreaming; and third, how can a tri-pillar policy framework be structured to address these paradoxes going forward. The remainder of

the paper synthesizes secondary policy and market data to answer these questions and proposes policy recommendations for government, business, and academic stakeholders.

II. METHODOLOGY

This study adopts a descriptive-analytical design rather than a formal econometric or hypothesis-testing approach, consistent with a policy-synthesis paper intended to structure a fragmented regulatory and market landscape into a coherent analytical framework. Four categories of secondary data are used. First, primary legal and regulatory documents, comprising Government Regulation No. 40/2025 on the National Energy Policy (Kebijakan Energi Nasional, KEN), Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 6/2026 on gas allocation priority for city gas networks (jargas) and compressed natural gas (CNG), Presidential Regulation No. 96/2024 on the Cadangan Penyangga Energi (Energy Buffer Reserve) targeted for 2035, and Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 113.K/EK.05/MEM.E/2026 on mandatory bioethanol blending. Second, market indicators recorded between February and June 2026, covering Brent crude prices, LNG spot prices in Europe and Asia, avtur (jet fuel) prices, the Rupiah–US Dollar exchange rate, and domestic LPG stock levels, compiled to document the trajectory of the Strait of Hormuz crisis as it unfolded. Third, an original quantitative estimation, developed for this study, of the impact of raising the biodiesel mandate from B40 to B50 on Indonesia’s foreign-exchange balance under different gasoil–biodiesel price regimes, incorporating official production, demand, and price data from SKK Migas, HEESI-KESDM, GAPKI, and prevailing international commodity price benchmarks. Fourth, the proceedings of the Focus Group Discussion (FGD) from Energy and Mineral Resources, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), held on 19 June 2026, in which the coal-face policy issues addressed in this paper were first presented and discussed among practitioners and academics.

These sources are analyzed descriptively and organized within the Sumitronomics tri-pillar framework: Pillar 1 (Dynamic Stability) frames the fiscal-structural interdependencies among refining capacity, import costs, and subsidy expenditure; Pillar 2 (Energy Downstreaming) enumerates and evaluates five downstreaming lines against their regulatory status and technical-economic feasibility as documented in the wider academic literature and, for the biodiesel line specifically, against the price-regime-contingent quantitative estimates developed for this study; and Pillar 3 (Inclusive Economy) evaluates the distributional and regional-equity dimensions of energy access policy. Because the analysis is descriptive rather than causal-inferential, findings should be read as a structured synthesis of the current policy landscape rather than as statistically validated causal claims. The principal limitation of this approach is the absence of formal, independently peer-reviewed quantitative modelling (for example, computable general equilibrium or input-output shock propagation) of the fiscal and welfare effects discussed, beyond the scenario-based estimates developed for the B50 case in this study; this limitation is addressed further in the concluding section.

III. RESULTS AND DISCUSSION

III.1 Two Structural Paradoxes

The first paradox concerns the coexistence of Indonesia's status as an oil and gas producer with its dependence on imports to meet domestic demand. As Table 1 summarizes, 41% of refined fuel products consumed domestically are imported, crude oil imports exceed 30% of national requirements, and the combined annual import value of refined products reaches nearly USD 27 billion. Although downstream investment grew 43% in 2025, indicating policy momentum, the underlying structure (insufficient refining capacity relative to demand) has not yet been resolved. The second paradox is prospective: absent an acceleration of downstreaming, the National Energy Policy projects a gasoline deficit of 7 to 12 million kilolitres by 2040. Together, these paradoxes indicate that Indonesia's energy security exposure is not a distant risk but a near-term structural condition.

III.2 The 2026 Strait of Hormuz Crisis as a Real-Time Stress Test

The theoretical costs of unfinished downstreaming became concrete during the Strait of Hormuz crisis of February–June 2026. Table 1 traces the sequence of events: a blockade of the Strait in February 2026 was followed by Brent crude reaching USD 126 per barrel in March, Rupiah depreciation to 17,863 per US Dollar in April, domestic LPG stocks falling below minimum operational levels in May, and a preliminary United States–Iran agreement signed on 18 June 2026, with sanctions and nuclear issues still under negotiation. At the time of writing, Brent had eased to USD 94.40 per barrel, still 50 to 68% above the level recorded at the start of the year. This episode is consistent with the broader literature on Hormuz chokepoint risk, which documents the Strait's role as the transit route for roughly one-fifth of global oil consumption and a comparable share of global LNG trade, and identifies diversification of supply routes and strategic reserves as the principal available mitigations (International Energy Agency, 2026; Brookings Institution, 2026).

Period	Event / Indicator
February 2026	Blockade of the Strait of Hormuz begins
March 2026	Brent crude reaches USD 126/bbl
April 2026	Rupiah depreciates to IDR 17,863/USD
May 2026	Domestic LPG stock falls below minimum operational level
18 June 2026	US–Iran agreement signed; nuclear and sanctions issues still under negotiation
Current (reporting date)	Brent at USD 94.40/bbl (+50 to 68% year-to-date); LNG +50% in Europe, +40% in Asia; avtur +16.2% (April–May 2026)

Table 1. Timeline of the 2026 Strait of Hormuz Crisis and Associated Market Indicators.

Source: FGD ISEI proceedings, 19 June 2026; compiled by authors.

Beyond price effects, the crisis produced operational disruptions consistent with those documented in the broader chokepoint-risk literature: vessels became stranded in the Middle East, refineries were forced to modify production modes owing to scarce crude specifications, air cargo capacity from Asia to the Middle East fell (delaying catalyst shipments), and Very Large

Crude Carrier (VLCC) freight costs increased. These operational effects illustrate that Hormuz-type disruptions propagate through supply chains beyond the price channel alone.

III.3 Pillar 1, Dynamic Stability: The Structural Fiscal Dilemma

The first Sumitronomics pillar frames the interlocking fiscal mechanism that both paradoxes share. Insufficient refining capacity, amid declining crude production, forces reliance on imported refined products; these imports are costly, particularly during global price shocks; costly imports raise subsidy expenditure to maintain affordable domestic prices; and rising subsidy expenditure tightens fiscal space, which in turn constrains the investment needed to expand refining capacity, closing a self-reinforcing loop. This dynamic mirrors the political economy account offered by Rahman, Dargusch and Wadley (2021), who identify continuing oil subsidies and the absence of strategic oil buffers as central, mutually reinforcing weaknesses in Indonesia's energy security architecture. The 2026 Hormuz crisis demonstrated this loop in compressed form: within roughly four months, the sequence moved from an external blockade to elevated global prices, to currency depreciation, to a domestic LPG stock shortfall, with each stage amplifying the fiscal burden of the stage before it.

III.4 Pillar 2, Energy Downstreaming: Five Lines Requiring Acceleration

The second pillar identifies five specific downstreaming lines, each at a different stage of regulatory maturity. First, gasoline refinery expansion, intended to increase output of gasoline, propylene, and LPG; the National Energy Policy provides the policy basis, but the mechanism for project assignment remains undetermined. Second, oil storage and buffer stock expansion through new fuel terminals, for which the financing and operations-and-maintenance mechanism remains to be finalized despite an existing resilience programme. Third, LPG-to-domestic-gas conversion, comprising city gas network expansion and CNG reactivation with new fuelling stations, governed by Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 6/2026, which prioritizes gas allocation for these purposes.

Fourth, coal-to-DME gasification, in which low-calorie coal is converted into dimethyl ether, either directly or via a methanol intermediate, as a substitute for imported LPG. The technical and economic feasibility of this pathway is supported in the international literature: Anggarani, Wibowo and Rulianto (2014) demonstrate the physicochemical compatibility of DME with existing household LPG stoves and infrastructure, while Gao, Zhu and Li (2020) provide a techno-economic feasibility assessment specific to Indonesia's substitution of LPG with coal-based DME, concluding that the pathway is viable but requires a dedicated financing and regulatory scheme, a conclusion that matches the FGD proceedings' own assessment that this line currently has neither regulation nor a dedicated financing scheme in place. Fifth, biofuels, specifically biodiesel, mandated to rise from B40 to B50 from 1 July 2026, and bioethanol (E5/E10), mandated for non-PSO gasoline blending under Minister Decree No. 113.K/EK.05/MEM.E/2026, sourced from sugarcane molasses, cassava, and sorghum feedstock.

The B50 line merits closer scrutiny, since it is the downstreaming measure with the nearest implementation horizon and the one for which the most granular quantitative evidence is available. This study's own analysis models the change in Indonesia's net foreign-exchange flows,

defined as CPO export proceeds, less methanol and used cooking-oil methyl ester (SMO) import requirements, plus export levy and duty receipts, less solar (gasoil) import needs, under a ten-percentage-point increase in the blending rate, from B40 to B50, across two price regimes. Under the long-term, normal-trend regime observed for most of 2019–2025, in which the domestic biodiesel price index (HIP Biodiesel) trades above the Mean of Platts Singapore gasoil price by roughly IDR 5,000 to 6,000 per litre, raising the blend from B40 to B50 is estimated to reduce net foreign-exchange flows by approximately USD 2.29 billion, a 9% decline, driven by lower CPO export receipts and higher methanol and SMO import requirements that outweigh the accompanying reduction in gasoil imports. Only during a transient geopolitical price spike, as observed following the escalation of the 2026 Iran–United States conflict, when gasoil prices rose above biodiesel prices, does the same ten-percentage-point increase generate a positive foreign-exchange benefit, estimated at approximately USD 459 million, or 2%, driven primarily by avoided gasoil imports (Table 2).

Price Regime	Gasoil–Biodiesel Price Relationship	Net FX Impact of +10pp Blend (B40→B50)	Primary Driver
Normal / long-term trend (2019–2025 average)	Biodiesel price above gasoil price (~IDR 5,000–6,000/L)	–USD 2.29 billion (–9%)	Lower CPO export receipts; higher methanol and SMO imports
Geopolitical conflict (e.g., 2026 Iran–US war)	Gasoil price above biodiesel price	+USD 459 million (+2%)	Avoided gasoil imports

Table 2. Estimated Foreign-Exchange Impact of Raising the Biodiesel Blend from B40 to B50, by Price Regime.

Source: authors' analysis based on SKK Migas, HEESI-KESDM, and GAPKI production and demand data.

Two further constraints qualify the case for an unconditional B50 mandate. First, the same analysis finds that once the Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan reaches full operation, adding up to approximately 5 million kilolitres per year of domestic gasoil production, national solar import requirements fall so substantially that a further increase to B50 risks creating a domestic gasoil oversupply that would itself need to be mitigated, reducing the urgency of B50 as an import-substitution tool specifically. Second, domestic FAME (fatty acid methyl ester) production capacity, confirmed by biodiesel producers to the Ministry of Energy and Mineral Resources as of June 2026, stands at approximately 1.49 million kilolitres per month against installed capacity of roughly 22.0 million kilolitres per year, whereas B50-level demand for the second half of 2026 is projected at approximately 1.63 million kilolitres per month, implying a supply deficit of roughly 142 thousand kilolitres per month, or approximately 854 thousand kilolitres cumulatively, over the July–December 2026 implementation window. This study's analysis further notes that the retail pricing formula for non-subsidized diesel (Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022) still bases the retail base price on 100% gasoil rather than the blended product, and that the underlying conversion-cost constant in the biodiesel price-index formula (Kepmen ESDM No.

3.K/EK.05/DJE/2024, set at USD 85 per tonne since 2021) has not been revisited against updated cost-breakdown estimates; a cost-breakdown study by Saputra et al. (2022) estimates the actual net conversion cost from CPO to FAME at approximately USD 77.3 per tonne once by-product revenue (glycerol and palm fatty acid distillate) is accounted for, suggesting the current formula constant may overstate production costs. Both the outdated retail pricing formula and the un-revisited conversion constant risk compressing distributor margins and inflating the biodiesel price index unnecessarily as the blending rate rises. Taken together, these findings suggest that the B50 mandate would be more robustly implemented as a flexible, price-regime-contingent blending mechanism, varying with the prevailing gasoil–biodiesel price gap, refinery-driven gasoil supply, and domestic FAME capacity, rather than as a fixed target applied uniformly regardless of market conditions.

Yudiartono, Windarta and Adiarso (2023) situate these biofuel pathways within Indonesia’s longer-term 2050 energy transition trajectory, alongside urban gas networks and electric vehicles, reinforcing that downstreaming and long-run decarbonization objectives are complementary rather than competing agendas, provided that, as the B50 case illustrates, mandate design remains responsive to price conditions and domestic supply constraints rather than fixed by calendar date alone.

III.5 Pillar 3, Inclusive Economy: Equitable Energy Access as a Precondition for Industrialization

The third pillar addresses the distributional dimension of energy policy. Subsidized 3-kilogram LPG has recorded a positive contribution to household welfare, but the 2026 Hormuz crisis exposed its vulnerability: Middle East sourcing was disrupted and stocks fell below minimum operational levels. City gas networks and CNG are framed in this study as inclusive and strategic substitutes rather than merely technical alternatives: jargas connections are targeted to grow by 2,996 thousand household connections cumulatively between 2026 and 2030 under Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 6/2026, extending from Sumatra to eastern Indonesia, at prices more affordable than import-exposed LPG. This expansion is consistent with the equity concerns raised by Gobel et al. (2024), who find that Indonesia’s existing commodity-based energy subsidy design disproportionately benefits affluent households while leaving female-headed households, persons with disabilities, and low-income elderly households under-served; a shift toward regionally distributed, infrastructure-based energy access, such as jargas and CNG, offers a structurally different distributional profile than price subsidies on an internationally exposed commodity such as LPG. The link between downstreaming and inclusive growth is therefore not incidental: as downstreaming advances and fuel prices stabilize, purchasing power recovery signals for the middle class and micro, small, and medium enterprises (MSMEs) become more likely, indicating that energy downstreaming and popular economic resilience are not separable agendas but two expressions of the same structural objective.

III.6 Policy Roadmap and Recommendations

Table 3 summarizes the regulatory status of short-term (2026–2030) and medium-term (2030–2035) downstreaming priorities identified across the two paradoxes and three pillars discussed above.

Horizon	Priority	Regulatory Status
Short-term (2026–2030)	Jargas and CNG as gas allocation priority	Regulated (Permen ESDM No. 6/2026); implementation to be strengthened
Short-term (2026–2030)	Energy buffer reserve, 2035 target	Regulated (Perpres No. 96/2024)
Short-term (2026–2030)	Gasoline refinery capacity	Policy basis exists; project-assignment mechanism undetermined
Short-term (2026–2030)	New fuel terminals	Resilience programme exists; financing/O&M mechanism undetermined
Short-term (2026–2030)	Biodiesel B50 and bioethanol E5/E10	Regulated; net FX benefit price-regime-contingent; domestic FAME supply and retail pricing formula need review
Medium-term (2030–2035)	Coal-to-DME gasification at commercial scale	No dedicated regulation or financing scheme yet
Medium-term (2030–2035)	Petrochemical products from refinery residue	No dedicated downstreaming regulation yet

Table 3. Downstreaming Policy Roadmap, 2026–2035.

Source: PP No. 40/2025; Perpres No. 96/2024; Permen ESDM No. 6/2026; Kepmen ESDM No. 113.K/EK.05/MEM.E/2026; FGD ISEI proceedings, 19 June 2026; authors' analysis.

Based on this roadmap, three sets of recommendations follow. For government, priorities include formalizing a compensation mechanism for fuel price capping and accelerating revision of the base-price formula so that it responds more promptly to market prices; providing measurable fiscal support for refineries, including tax holidays and local crude allocation; accelerating jargas and CNG project assignment; reviewing the biodiesel mandate dynamically against price balance, refining capacity, and foreign exchange resilience, including adopting a price-regime-contingent blending mechanism rather than a fixed B50 target, and revising the non-PSO diesel retail pricing formula and the biodiesel price-index conversion constant so that both reflect current cost structures; and incrementally increasing national research and development budgets. For business, priorities include realizing planned refinery capacity; developing value-added oil storage business models; diversifying crude slate and LPG import sources to reduce concentration risk; accelerating jargas and CNG deployment as LPG import substitutes; and expanding domestic FAME production capacity and supporting the bioethanol ecosystem through domestic molasses obligations, feedstock-processing partnerships, and blending readiness. For academia, priorities include research on shock-resilient subsidy design based on beneficiary targeting rather than commodity subsidy; feasibility studies of an oil storage hub model for Indonesia; economic-complexity analysis of Indonesia's trajectory from commodity exporter toward energy-based manufacturing; regional-equity studies of refinery downstreaming's distributional effects; and further independent modelling of the fiscal, balance-of-payments, and supply-chain implications of the B50 mandate and bioethanol implementation across a wider range of price and production scenarios than currently available.

IV. CONCLUSION

This study has shown that Indonesia's continued dependence on imported refined fuel and crude oil, despite decades of standing as an oil and gas producer, reflects a self-reinforcing structural condition rather than a transient market fluctuation, and that the 2026 Strait of Hormuz crisis converted this theoretical vulnerability into a measurable fiscal and price cost within a matter of months. Organizing the evidence within the Sumitronomics tri-pillar framework indicates that dynamic fiscal stability, accelerated downstreaming across five specific lines, and inclusive, infrastructure-based energy access are not independent policy agendas but interlocking components of a single structural objective; addressing one pillar in isolation is unlikely to resolve the export–import paradox or avert the projected 2040 gasoline deficit. The closer examination of the B50 biodiesel mandate reinforces this conclusion at a more granular level: even a downstreaming measure with strong strategic rationale can carry a negative net fiscal effect under normal market conditions, and its implementation is bound by domestic supply capacity and pricing-formula design as much as by policy intent, underscoring that the effectiveness of any single downstreaming line depends on how well it is calibrated to prevailing price regimes and domestic production constraints rather than pursued as a fixed, calendar-driven target. The analysis further suggests that policies such as city gas network and CNG expansion carry a dual justification, functioning simultaneously as energy security instruments and as inclusive-growth instruments, a duality that existing subsidy-equity research supports but has not yet fully connected to downstreaming project selection. These conclusions should, however, be read in light of the study's descriptive-analytical design: beyond the scenario-based estimates developed in this study for the B50 case, the paper does not provide an independent quantitative estimate of the fiscal savings, welfare distribution, or macroeconomic multipliers associated with the proposed downstreaming acceleration, nor does it model counterfactual scenarios in which downstreaming had proceeded on a faster timetable prior to the 2026 shock. Future research employing computable general equilibrium modelling or multi-regional input-output shock propagation, calibrated specifically to Indonesia's refining, LPG, biodiesel, and coal-gasification sectors, would allow the fiscal and distributional claims advanced descriptively here to be tested quantitatively across a wider set of price and policy scenarios, while region-specific studies of jargas and CNG rollout could clarify how equitably the inclusive-growth dividend of downstreaming is in fact being distributed across Indonesia's provinces.

Use of AI tools declaration

The authors used the AI assistant Claude (Anthropic) to assist in restructuring presentation materials into academic manuscript format, to develop and integrate supplementary quantitative estimates on the B50 biodiesel mandate into the existing manuscript, to identify and verify relevant academic literature, and to support language editing. The authors are fully responsible for the content of this publication, including the accuracy of all data, citations, and conclusions presented.

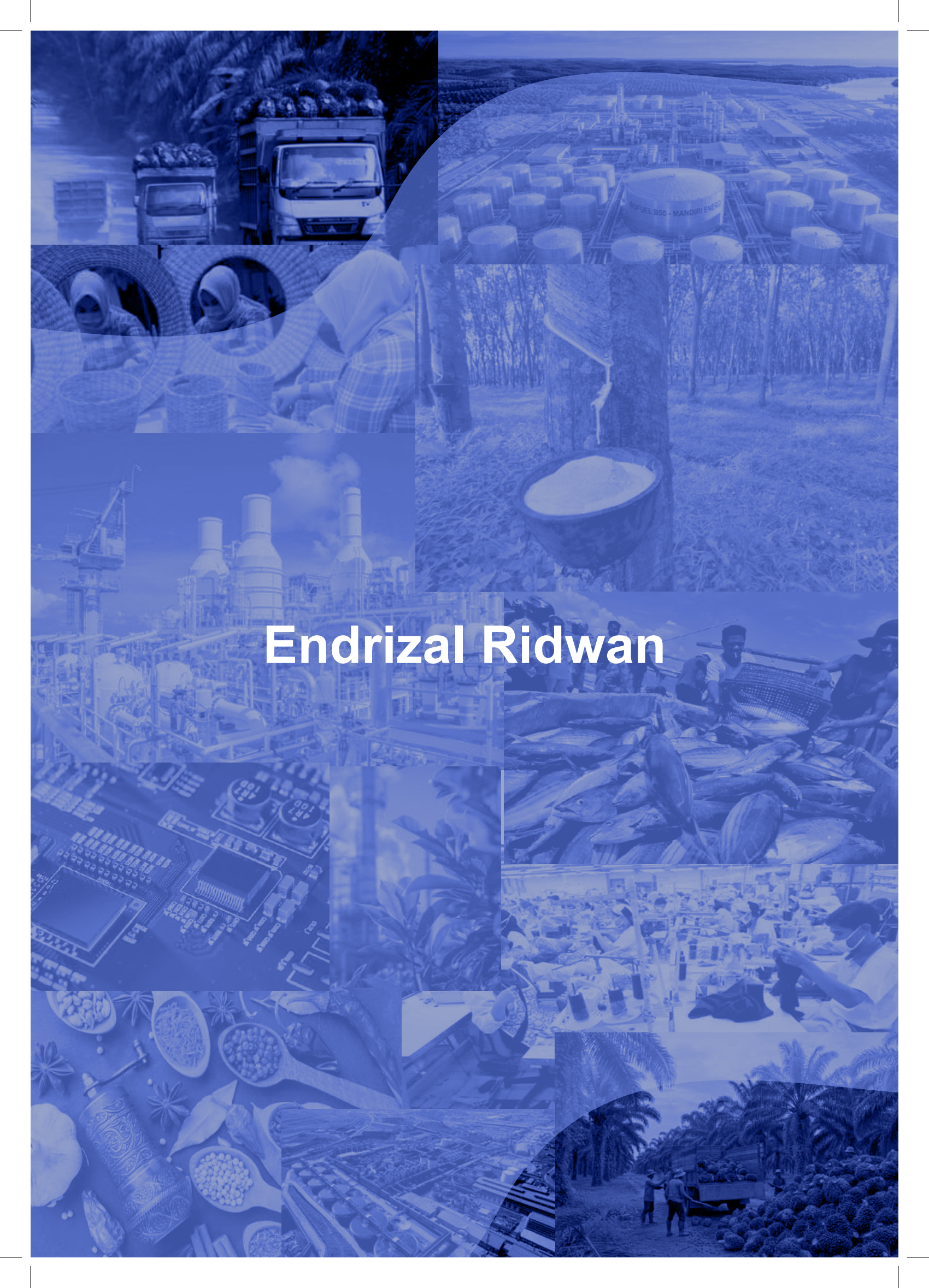
Conflict of interest

The authors declare that there are no conflicts of interest regarding the publication of this paper. The views expressed are the authors' own and do not reflect the official position or policy of any employing institution. The research was conducted independently without any financial, commercial, or personal relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

REFERENCES

- Anggarani, R., Wibowo, C.S. and Rulianto, D. (2014) 'Application of dimethyl ether as LPG substitution for household stove', *Energy Procedia*, 47, pp. 227–234. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.01.218>.
- Brookings Institution (2026) From chokepoint to crisis: The Strait of Hormuz and global oil markets. Available at: <https://www.brookings.edu/articles/from-chokepoint-to-crisis-the-strait-of-hormuz-and-global-oil-markets/> (Accessed: 6 July 2026).
- Gao, L., Zhu, W. and Li, C. (2020) 'Sustainable energy security in Indonesia: A feasibility study of DME substitution for LPG', *International Journal of Energy Research*, 44(7), pp. 5556–5569. DOI: <https://doi.org/10.1002/er.5149>.
- Gobel, R.K., Laksmono, B.S., Huseini, M. and Siscawati, M. (2024) 'Equity and efficiency: An examination of Indonesia's energy subsidy policy and pathways to inclusive reform', *Sustainability*, 16(1), 407. DOI: <https://doi.org/10.3390/su16010407>.
- Government of Indonesia (2025) Government Regulation No. 40/2025 on the National Energy Policy (Kebijakan Energi Nasional). Jakarta: Government of Indonesia.
- Government of Indonesia (2024) Presidential Regulation No. 96/2024 on the Energy Buffer Reserve (Cadangan Penyangga Energi). Jakarta: Government of Indonesia.
- Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) (2026) Proceedings of the Focus Group Discussion: Energi dan Sumber Daya Mineral. Jakarta: ISEI, 19 June 2026 (unpublished presentation materials).
- International Energy Agency (2026) Strait of Hormuz. Available at: <https://www.iea.org/about/oil-security-and-emergency-response/strait-of-hormuz> (Accessed: 6 July 2026).
- Ministry of Energy and Mineral Resources, Republic of Indonesia (2026) Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 6/2026 on Gas Allocation Priority for City Gas Networks and Compressed Natural Gas. Jakarta: Ministry of Energy and Mineral Resources.
- Ministry of Energy and Mineral Resources, Republic of Indonesia (2026) Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 113.K/EK.05/MEM.E/2026 on Mandatory Bioethanol Blending. Jakarta: Ministry of Energy and Mineral Resources.
- Ministry of Energy and Mineral Resources, Republic of Indonesia (2024) Directorate General of Electricity Decree No. 3.K/EK.05/DJE/2024 on the Biodiesel Price Index Formula. Jakarta: Ministry of Energy and Mineral Resources.
- Ministry of Energy and Mineral Resources, Republic of Indonesia (2022) Decree No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 on the Retail Selling Price of Non-Subsidized Diesel Fuel. Jakarta: Ministry of Energy and Mineral Resources.
- Rahman, A., Dargusch, P. and Wadley, D. (2021) 'The political economy of oil supply in Indonesia and the implications for renewable energy development', *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 144, 111027. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111027>.
- Sahara, Dermawan, A., Amaliah, S., Irawan, T. and Dilla, S. (2022) 'Economic impacts of biodiesel policy in Indonesia: A computable general equilibrium approach', *Journal of Economic Structures*, 11(1), 22. DOI: <https://doi.org/10.1186/s40008-022-00281-9>.

- Saputra, W., Ichsan, M., Permatasari, A. and Syakira, T. (2022) Pandangan pemangku kepentingan terhadap risiko ekonomi dan lingkungan dalam kebijakan biodiesel di Indonesia. Jakarta: [publisher to be confirmed].
- Yudiartono, Windarta, J. and Adiarso, A. (2023) 'Sustainable long-term energy supply and demand: The gradual transition to a new and renewable energy system in Indonesia by 2050', *International Journal of Renewable Energy Development*, 12(2). DOI: <https://doi.org/10.14710/ijred.2023.50361>.



Endrizal Ridwan



ISEI CABANG PADANG

INDUSTRIALISASI BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN SUMATERA BARAT

Pertanian, Perkebunan, dan Ekonomi Rakyat Daerah

BIDANG IV ISEI
2 JULI 2026

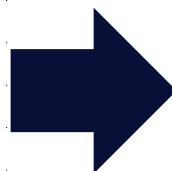
PRESENTED BY
Endrizal Ridwan PhD

Sumbar Menuju Pendapatan
per Kapita US\$30,300 di 2045



300 T

PDRB



216 T

KEBUTUHAN INVESTASI

12%

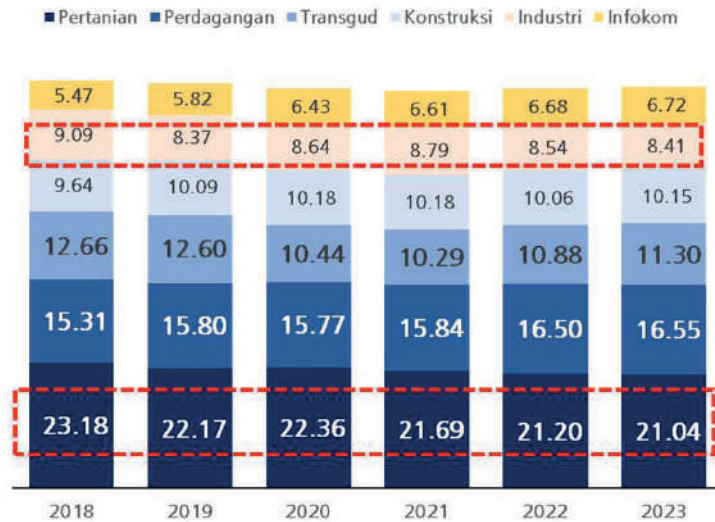
Pertumbuhan Ekonomi

Breaking News

PMTB 2023 = 94 T

SEEMS TO BE PROBLEMS

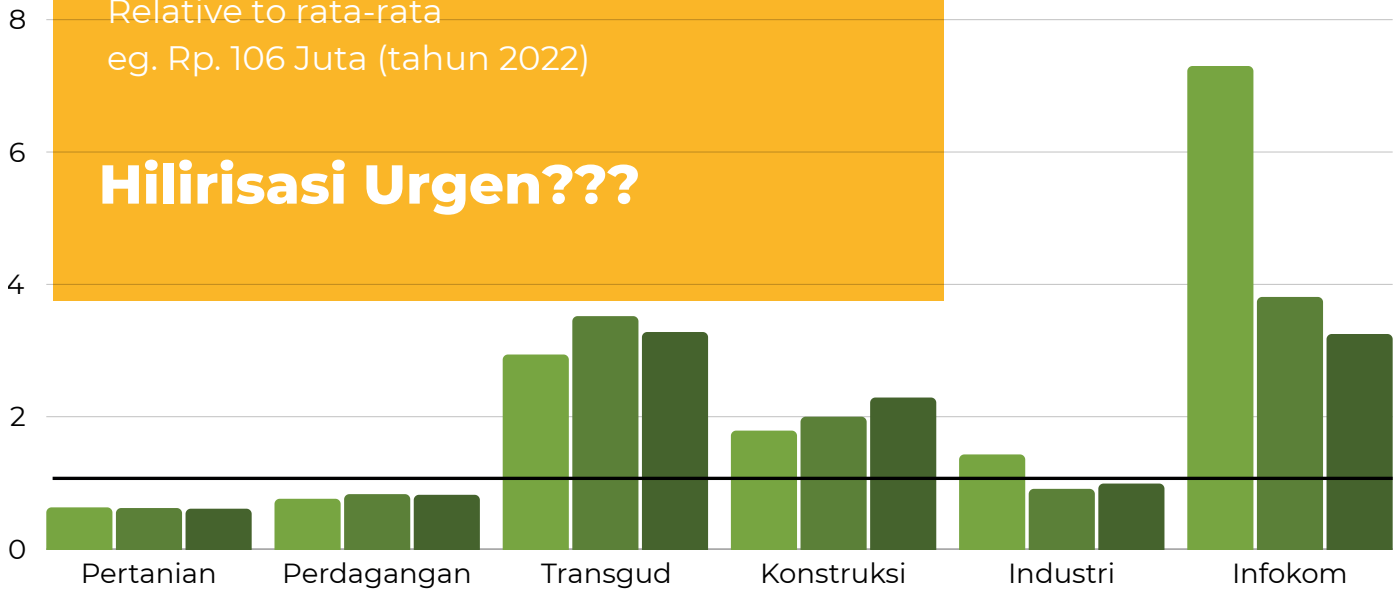
Deindustrialisasi - Deagrikulturalisasi



PDRB Per Worker 2015-22

Relative to rata-rata
eg. Rp. 106 Juta (tahun 2022)

Hilirisasi Urgen???



SUMITRONOMICS: DARI RAKYAT, OLEH RAKYAT, UNTUK RAKYAT



Pertumbuhan Ekonomi

Sektor mana yang harus digenjot? Berapa harus diproduksi?



Pemerataan Pembangunan

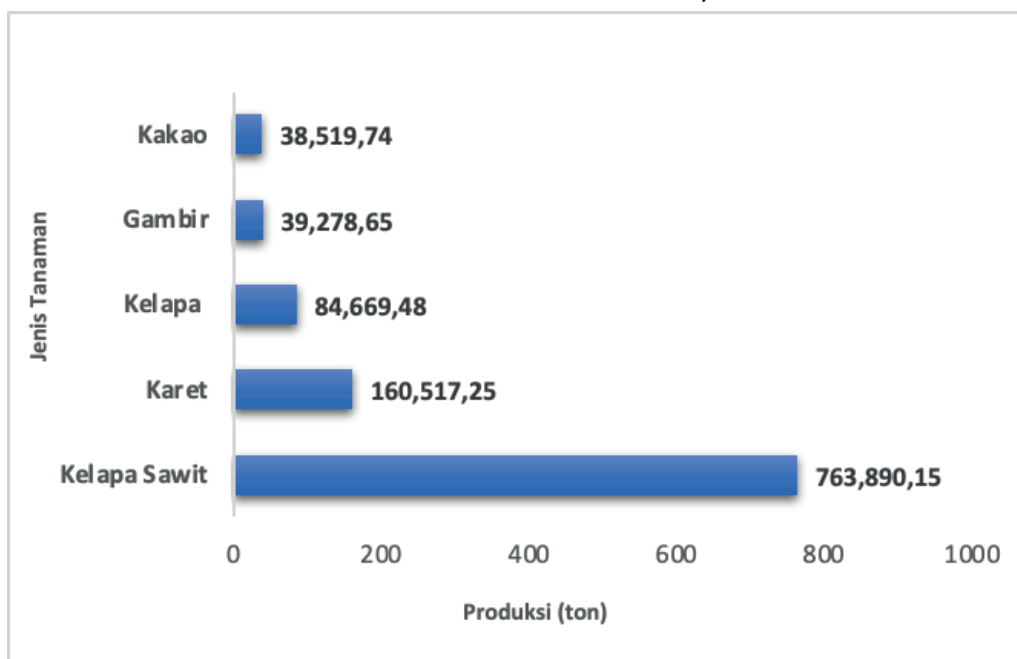
Siapa yang menikmati hasil produksi? Bagaimana distribusinya?



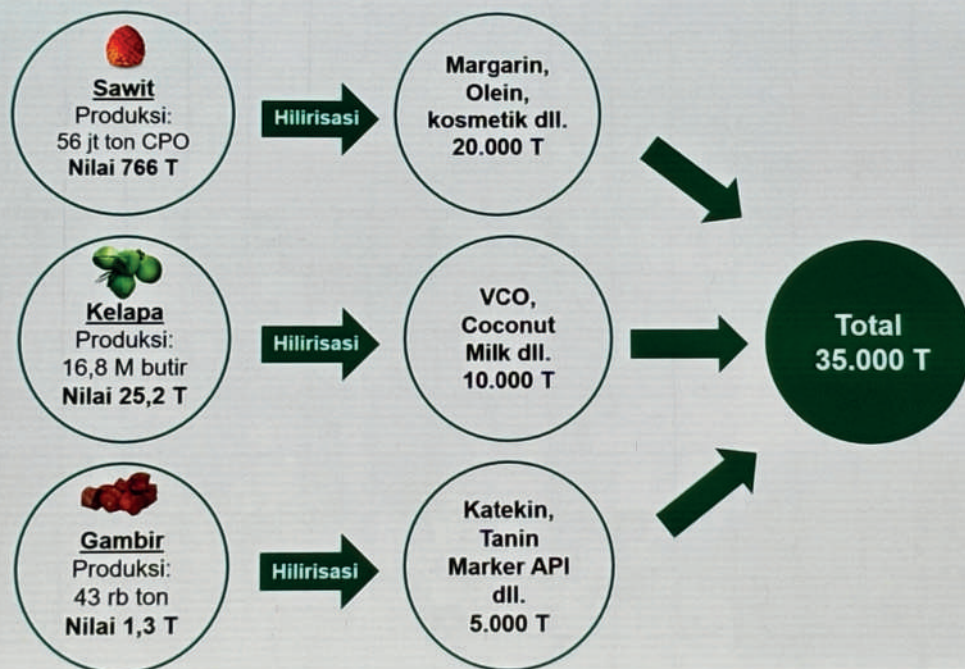
Stabilitas Nasional

Kondisi Dasar Yang Juga Produk dari Pertumbuhan dan Pemerataan

Produksi Perkebunan Rakyat Provinsi Sumatera Barat, 2025



PRIORITAS PEMERINTAH HILIRISASI 6 KOMODITAS STRATEGIS



HILIRISASI PRODUK GAMBIR

Potensi Indonesia:

- Produsen terbesar dunia (80% pasokan)
- Sumber mata pencaharian ribuan Petani

Peran dalam industri:

- Bahan baku industri farmasi
- Kosmetik, pangan, penyamakan kulit dll



Bentuk Produk Gambir	Harga	% Terhadap Bobot Bahan	Maks Nilai per 100kg Daun Gambir	Nilai Ekonomi Masyarakat (Produksi 20Ribu ton/th)
Daun Gambir (Panen Segar)	3000/kg	100%	Rp. 300.000 (100%)	Rp. 60 M
Getah Gambir	30.000/kg	6 - 12 %	Rp. 360.000 (120%)	Rp. 600 M
Tanin ≥70%	2.000.000/kg	1.8 - 4.8%	Rp. 9.600.000 (3200%)	Rp. 40 Triliun
Katekin ≥90%	2.500.000/kg	0,48 - 1,8%	Rp. 4.500.000 (1500%)	Rp. 50 Triliun
Marker-API ≥99%	250.000.000/kg	0,05 - 0,4%	Rp. 96.000.000 (32000%)	Rp. 5000 Triliun

Sumber: Dr. Makki Universitas Andalas



Hilirisasi SDA didorong melalui Peta Jalan Hilirisasi 28 komoditas di 8 sektor

Hingga 2040, potensi investasi mencapai USD618,1 miliar & penciptaan 3 juta lapangan kerja langsung

Mineral & Batu Bara

USD 498,4 Miliar



15 Komoditas Prioritas Hilirisasi sesuai RPJMN 2025-2029

Minyak & Gas Bumi

USD 68,3 Miliar



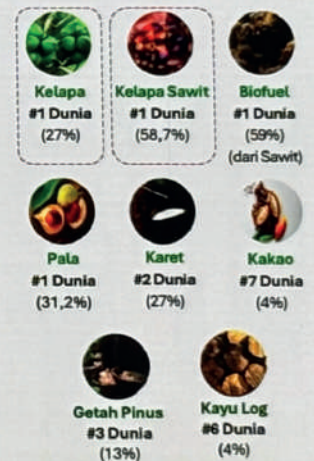
Perikanan & Kelautan

USD 15,3 Miliar



Perkebunan & Kehutanan

USD 36,1 Miliar



Dampak Ekonomi hingga 2040



USD 618,1 Miliar
Investasi



235,9 Miliar
Dampak Ekonomi



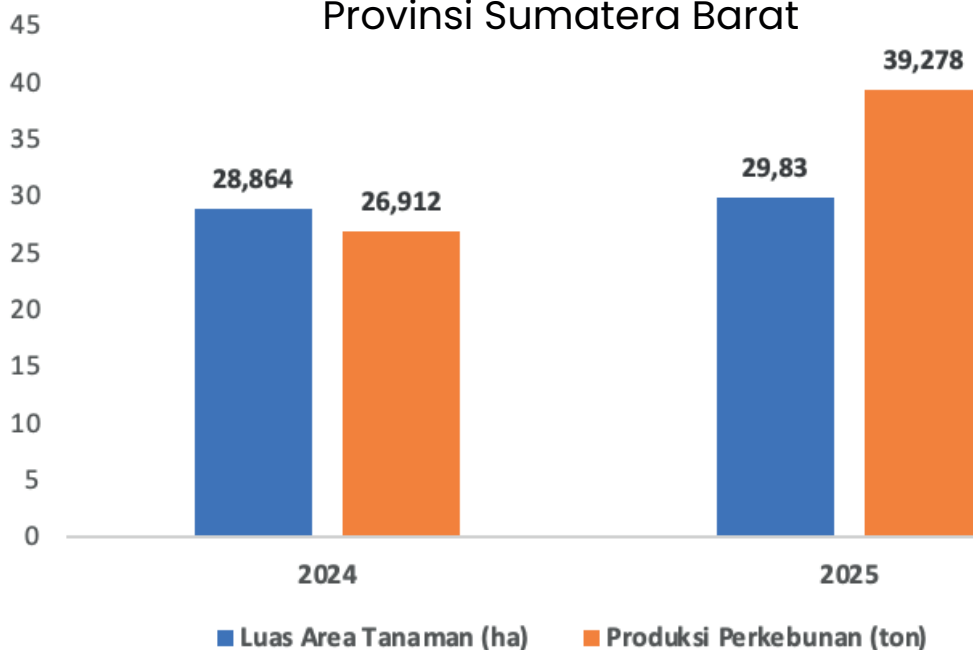
USD 857,6 Miliar
Ekspor



3.103.852
Tenaga Kerja

Sumber: Roadmap Hilirisasi Investasi Strategis Tahun 2022 & 2023, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

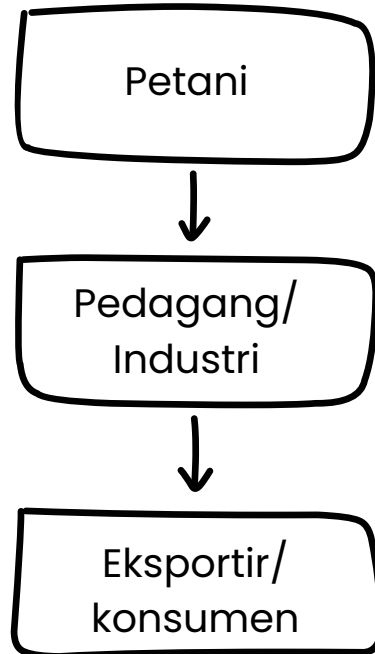
Luas Area Tanaman dan Produksi Gambir Provinsi Sumatera Barat



Jumlah KK Tani

2024	35,054
2025	36,857

Agen Hilirisasi?



Komoditas Gambir Sumatera Barat Yang Terpapar Penyakit Adverse Selection

Oleh Endrizal Ridwan, Ph.D.
Ketua ISEI Cabang Padang

Gambir dengan nama latin *uncaria gambir roxb* merupakan komoditas spesifik Sumatera Barat karena daerah ini memasok sekitar 80 persen kebutuhan pasar gambir dunia. Tidak pula di semua daerah Sumatera Barat gambir dapat bertumbuh dengan baik, tapi hanya di daerah dengan ketinggian tertentu saja seperti di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sejak zaman kolonial, komoditi ini menjadi salah satu komoditi penting dan menjadi sumber mata pencaharian utama sebahagian masyarakat Sumatera Barat. Secara tradisional gambir digunakan sebagai pelengkap makan sirih dan ramuan obat diare, luka bakar, dan kumur-kumur. Secara modern ia digunakan sebagai bahan baku industri tekstil, kosmetik, farmasi, dan makanan. Pada Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024, sebahagian tinta pemilu berasal dari produk hilirisasi gambir hasil inovasi dari peneliti-peneliti Universitas Andalas Padang.



petani. Harga di tingkat petani sangat berfluktuasi tergantung kepada beberapa hal seperti jumlah produksi dan harga dunia.

Gambir sudah lama dinyatakan sebagai komoditi unggulan daerah di Provinsi Sumatera Barat. Melalui SK Bupati Lima Puluh Kota nomor 74 tahun 2003 Kabupaten Lima Puluh Kota mencanangkan gambir sebagai komoditi unggulan dan menetapkan pengembangan kawasan sentra produksi gambir untuk mendorong peningkatan produksi yang signifikan. Di samping itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan juga mengatur tentang pengolahan, pembelian, dan pemasaran gambir sebagai salah satu komoditi unggulan daerah. Meski beberapa program pembangunan sudah dicanangkan untuk peningkatan kesejahteraan petani gambir melalui pembinaan pembudidayaan, bantuan teknologi pengolahan, dan sistem resi gudang, gambir masih jauh dari mampu mensejahterakan petani. Beberapa permasalahan yang mengemuka mulai dari pembibitan hingga pengolahan pasca panen secara teknis sudah dicoba carikan jalan keluar oleh pihak terkait. Namun permasalahan yang tidak kalah penting yang disorot tulisan ini adalah persoalan *adverse selection* yang disebabkan informasi asimetris, yakni ketika pembeli gambir tidak bisa memastikan kualitas gambir yang dijual petani.

Take Away Hilirisasi Gambir Sumatera Barat



Hilirisasi Urgen untuk Pertumbuhan dan/atau Pemerataan: Potensi ada, Masyarakat yang Terlibat Banyak



Sulit Hilirisasi Dilaksanakan di Level Petani dengan berbagai Alasan: Kecendrungan Hilirisasi diikuti Monopoli



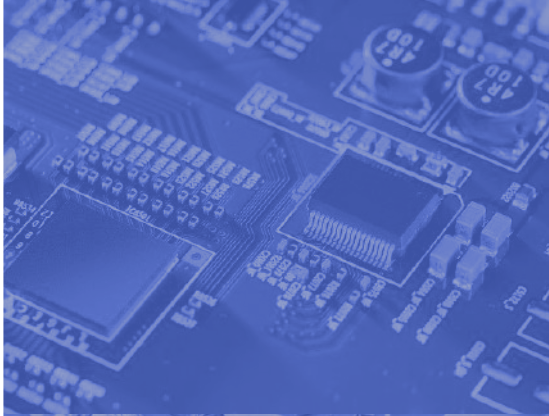
Persoalan Asymmetric Information Tetap Terjadi Meskipun Hilirisasi Terlaksana: Perlu inovasi dasar.

13

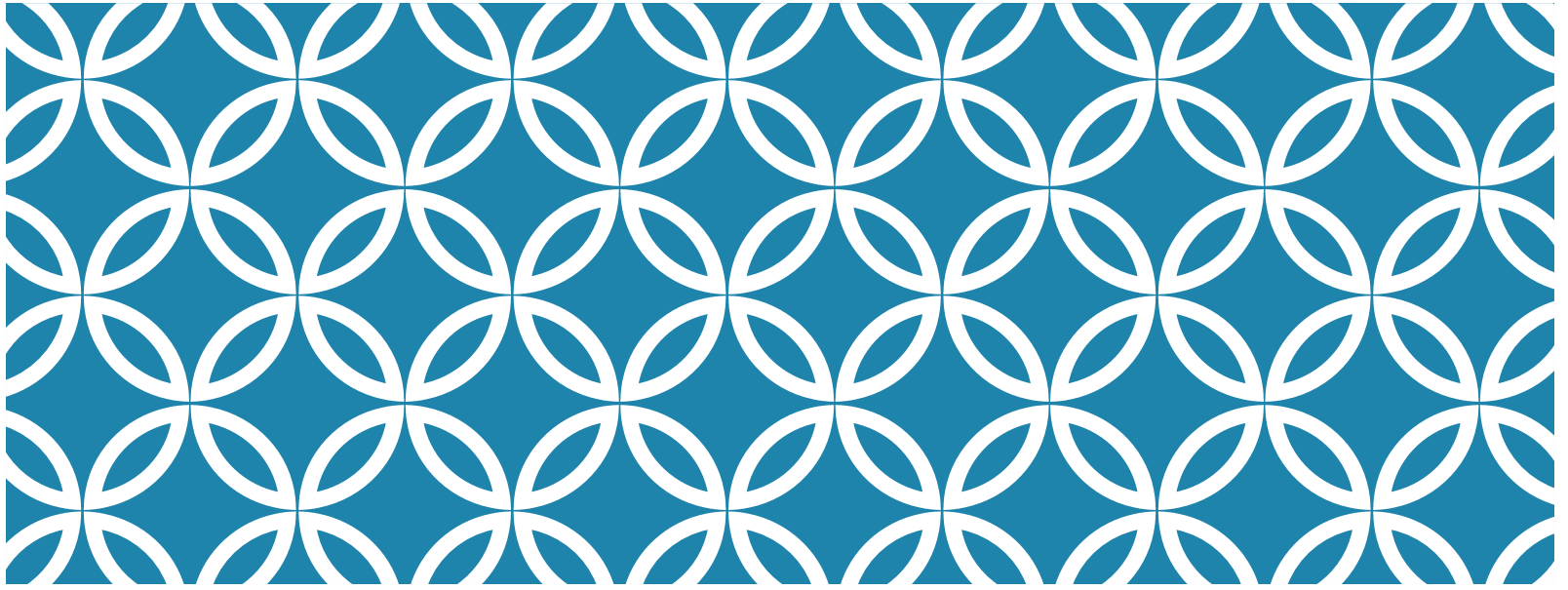
Terima Kasih

**ENDRIZAL
RIDWAN**

FEB Universitas Andalas
eridwan@eb.unand.ac.id



Lukman Hakim



INVOLUSI EKONOMI DAN DEINDUSTRIALIASI: MENYONGSONG INDONESIA EMAS 2045

Lukman Hakim, SE, MSi, Ph.D
Koordinator Wilayah Tengah
ISEI/ Dosen FEB UNS

BERSYUKUR DAN IKHLAS

POLITIK CEPAT DAN EKONOMI LAMBAT

- ❖ Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia. Dengan penyelesaian politik yang damai dan aman.
- ❖ Yang masih gagal selama 80 tahun Indonesia merdeka adalah justru memberikan kemakmuran dan kesejahteraan,

HIDUP KITA DIKENDALIKAN OLEH DISCOURSE ATAU WACANA

- ❖ Development atau pembangunan muncul pada tahun 1950an
- ❖ Transformation atau transformasi lahir pada tahun 1970an
- ❖ Agglomeration atau aglomerasi muncul pada tahun 1980an
- ❖ Stakeholders atau pemangku kepentingan lahir pada tahun 1990an
- ❖ Governance atau tata kelola yang lahir pada tahun 2000an

NOBEL EKONOMI 2024: PENTINGNYA GOVERNANCE TATA KELOLA



Nobel tahun 2024 bidang ekonomi diberikan kepada Acemoglu, Robison dan Johnson yang merupakan pengarang buku "Why Nations Fail", "Mengapa Negara-negara Gagal". Apakah Indonesia akan termasuk di dalamnya?

ACEMOGLU DAN ROBINSON: MENGAPA NEGARA GAGAL?



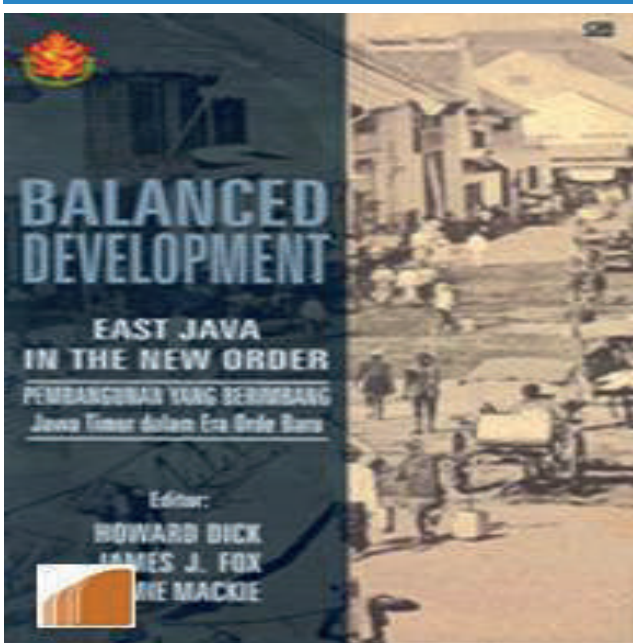
Kegagalan sebuah bangsa tidak disebabkan oleh faktor Sejarah, budaya, geograri, tetapi lebih disebabkan masalah Institusional, governance Pemerintah. Jika pemerintah gagal membuat Tata Kelola yang baik good corporate governance, maka negara tersebut akan gagal.

KOTA NOGALES YANG TERBELAH JADI DUA DI MEXICO DAN AMERIKA SERIKAT



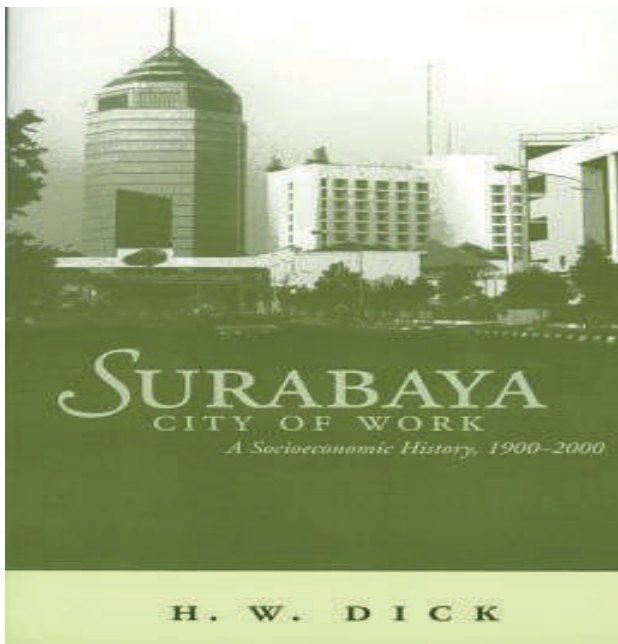
Dalam Buku itu ada contoh empirik dimana ada sebuah kota Namanya Nogales, yang terpisah 100 tahun lebih. Yang satu ikut Arizona Amerika Serikat menjadi kota yang makmur dan maju, sementara yang ikut Mexico menjadi kota yang mundur.

JAWA TIMUR “PEMBANGUNAN KESEIMBANGAN”



Howard Dick, dalam buku ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Jatim menjadi pembangunan keseimbangan, karena “politik jalan” sejak masa Gubernur Mr Mohamad Noer 1970-an.

SURABAYA “KOTA KERJA”



Buku Kedua Howard Dick, adalah tentang Surabaya kota terbesar kedua di Indonesia tetapi tidak dikenal di dunia luar.

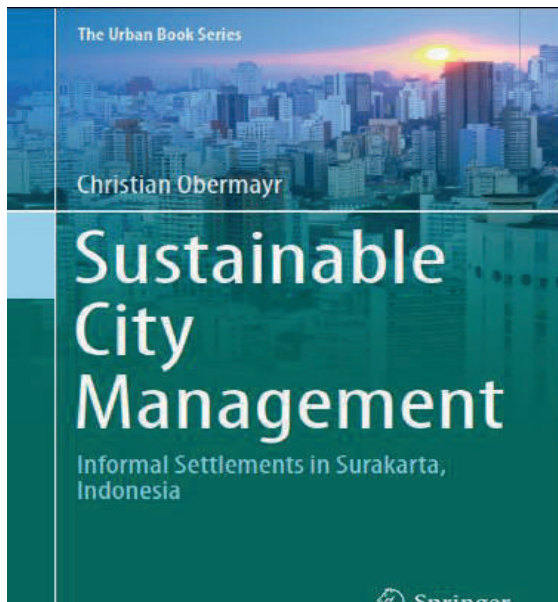
Pada tahun 1900, Surabaya adalah kota yang lebih besar dari Jakarta dan salah satu pusat perdagangan utama di Asia. Namun pada masa boom ekspor tahun 1990-an, Surabaya kembali terkenal sebagai kawasan industri non-ibukota-kota di Asia Tenggara.

SOLO “KOTA PEMBANGUNAN INKLUSIF”



Buku ini mencoba merekonstruksi kembali nilai-nilai pembangunan di perkotaan, sesuai dengan konsep inklusi sosial yang bertujuan tercapainya kualitas hidup, berkembangnya hubungan sosial, kohesi sosial, dan partisipasi sosial serta modal sosial di Kota Solo

SOLO “SUSTAINABLE CITY MANAGEMENT”



Buku ini menganalisis bagaimana Kota Surakarta menjadi contoh kota yang melakukan relokasi kawasan kumuh ke kawasan yang lebih layak untuk tinggal dan berusaha.

Pendekatan partisipatif yang humanis menjadi kunci proses transformasi menjadi kota yang berkelanjutan

TRANSFORMASI EKONOMI PERIODE 1975-2023(PERSEN): DEINDUSTRIALISASI DATANG LEBIH CEPAT

No	Sektor	1975	1985	1995	2005	2015	2020	2023
A.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan	36,8	23,3	16,1	14,5	13,9	14,2	13,1
B.	Penggalian dan Pertambangan	10,9	18,2	9,3	9,4	7,9	6,7	11,0
I	Pertanian/Primer	47,7	41,5	25,4	23,9	21,8	20,9	24,1
C	Industri Pengolahan	11,1	15,8	23,9	28,4	21,7	20,6	19,5
D	Listrik, Gas dan Air Minum	0,65	0,4	1,1	0,7	1,2	1,2	1,2
E	Bangunan/Konstruksi	4,8	5,3	7,6	5,8	10,5	11,3	10,1
II	Industri/Sekunder	16,4	21,5	32,6	34,9	33,7	33,1	31,0
F	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	17,0	15,6	15,7	16,8	13,7	13,4	13,5
G	Pengangkutan dan Komunikasi	4,0	5,3	7,1	6,2	11,8	11,9	13,3
H	Bank, Keuangan, Real Estate	3,9	5,4	5,9	9,2	8,8	9,7	8,8
I	Jasa Pemerintahan	7,4	6,6	4,3	4,2	4,2	3,9	3,0
J	Jasa Swasta	3,6	3,7	9,2	5,0	6,2	7,2	6,2
III	Jasa/Tersier	35,9	36,6	42,2	41,4	44,7	46,1	44,8
K	Total	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, beberapa tahun, diolah

INVOLUSI EKONOMI TERULANG LAGI

- ❖ Tulisan klasi tentang ekonomi Indonesia, pernah ditulis oleh seorang antropolog Clifford Geertz tentang Involusi pertanian (kemandekan sektor pertanian) pada awal kemerdekaan)
- ❖ Hari ini kita saksikan bahwa tidak hanyas sektor pertanian, tetapi sektor industri dan jasa juga mengalami kemandekan.
- ❖ Maka yang terjadi hari ini adalah kemandekan di semua sektor ekonomia atau Involusi Ekonomi Indonesia.

DEINDUSTRIALIASI DATANG LEBIH CEPAT

- ❖ Dalam berbagai kesempatan para pakar dan birokrat mengatakan “deindustrialisasi” datang lebih cepat dari yang diharapkan.
- ❖ Bahkan ekspor kita justru set back seperti pada masa Kolonial yang kita ekspor adalah barang-barang ekstraktif seperti batu bara, emas, dan bahan tambah yang lain.
- ❖ Sementara itu sektor manufaktur tidak menghasilkan barang ekspor, malah sebagian besar digantikan barang impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

ABSENNYA STRATEGI INDUSTRIALISASI: PASKA ORDE BARU



ISEI SOLO MENGUSULKAN KEMENTERIAN SANDANG



Tiga kebutuhan dasar yakni pangan, papan dan sandang telah mendapatkan perhatian yang berbeda. Ketahanan pangan terdapat Bulog dan Kementerian Pertanian, Ketahanan papan adalah Kementerian perumahan dan PUPR, sementara untuk sandang hanya diurus oleh Direktur TPT di Kementerian Perindustrian. Maka ISEI Solo mengusulkan Kementerian Sandang, seperti yang ada di China dan India,

SELAN KAMPANYE HILIRASI, HULU JUGA SEMAKIN DIPERKUAT

- ❖ Kampanye yang dilakukan oleh semua pihak tentang pentingnya hilirisasi patut dicermati, karena masalah kita tidak hanya di hilir yang akan menghasilkan nilai tambah yang tinggi, Tetapi juga masalah hulu.
- ❖ Dalam sektor pertambangan, perkebunan di sektor hulu masih menyisakan masalah lingkungan, yang pada saat ini justru menimbulkan bencana local dan regional.
- ❖ Sementara di sektor manufaktur, pada sektor hulu justru mengalami kemorotan yang sangat tajam seperti pada sektor tekstil

SUDAH BANYAK AGLOMERASI DI INDONESIA BAIK YANG NATURAL ATAUPUN YANG BY DESIGN



Jabodetabekjur Pasca perpindahan ibu kota ke IKN, Jakarta kini didefinisikan sebagai pusat kawasan aglomerasi yang mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur.

Gerbangkertosusila: Wilayah aglomerasi di Jawa Timur yang mencakup Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan.

TINGKATKAN AGLOMERASI JAWA TENGAH



- ❖ Subasukawonosraten, industri tekstil dan jasa perdagangan
- ❖ Kedungsepur, perikanan dan industri ringan
- ❖ Barlingmascakeb, argopolitan pertanian dan perkebunan
- ❖ Kedu Raya, pertanian dan perkebunan
- ❖ Pati Raya, industri makanan dan minuman
- ❖ Tegal Raya, onderdil dan suku cadang otomotif

APA YANG HARUS DILAKUKAN UNTUK MENDORONG AGLOMERASI

- ❖ Payung hukum yang jelas dan tegas di tingkat local, regional bahkan nasional. Karena tanpa ini semua pihak akan kesulitan bila berhadapan dengan regim keuangan.
- ❖ Organisasi yang kokoh dan kuat Kerjasama ABG, akademisi seperti perguruan tinggi, Bisnis seperti Kadin, dan Government yakni Pemerintah Kab/kota dan Propinsi.
- ❖ Road map, program dan dashboard untuk melakukan aksi, evaluasi yang terukur dan terpantau sehingga hasilnya seperti yang diharapkan.

SUBOSUKA WONOSRATEN TRANSFORMASI SEKTORAL TAHUN 2025

	Surakarta	Boyolali	Sukoharjo	Karanganyar	Wonogiri	Sragen	Klaten	Rata-Rata
Pertanian	0,3%	21%	8%	12%	29%	13%	12%	13,7%
Industri	28,3%	38%	42%	52%	24%	44%	41%	38,4%
Jasa	71,4%	41%	50%	36%	47%	43%	47%	47,9%
Sumber: BPS, 2025								

SEKTOR JASA MASIH PALING KUAT DI SOLO RAYA



Solo Raya Great Sale 2025 dengan transaksi 10,7 T merupakan bukti bahwa sektor jasa masih paling kuat.

Hampir 50 persen di Solo Raya adalah sektor jasa, maka diperlukan leverage policy untuk mendorong aglomerasi berbasisan sektor jasa.

Di sinilah Kadin se Solo Raya akan dapat terus bisa berperan mendorong aglomerasi di wilayah ini.

TERIMA KASIH DAN MATUR NUWUN

Kegagalan Transformasi Struktural: Deindustrialisasi Datang Lebih Cepat?

Lukman Hakim, SE, MSi, Ph.D

Dosen FEB Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo
Koordinator ISEI Wilayah Tengah

I. PENDAHULUAN

Transformasi struktural merupakan proses pergeseran tenaga kerja dan nilai tambah dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Indonesia telah mengalami proses transformasi struktural sejak 1960-an, namun sejak 2010-an terjadi perlambatan dan munculah gejala deindustrialisasi. Berdasarkan studi-studi lama tentang perubahan struktural (*structural change*) seperti dilakukan Chenery & Syrquin (1975) dan Chenery (1979), suatu negara akan mengalami transformasi dimana sumbangan sektor pertanian semakin menurun, sementara sektor industri dan jasa mengalami peningkatan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan nasional dan juga PDB per kapita, struktur ekonomi pasti mengalami perubahan dengan pola yang mirip-mirip di semua negara.

Tabel 1. Perbandingan Klasifikasi Negara dalam Transformasi ekonomi

Indikator	Negara Miskin	Negara Menengah	Negara Kaya
Sektor PDB	Pertanian > 30%	Industri naik 25-35%	Jasa > 60%
Tenaga Kerja	Pertanian > 60%	Industri naik 20-30%	Jasa > 70%
Perdagangan	Ekspor komoditi pertanian dan tambang	Ekspor Manufaktur	Ekspor Jasa & Teknologi
Industrialisasi	Industri Substitusi Impor (ISI)	ISI dan Industri Promosi Ekspor (IPE)	IPE

Chenery & Syrquin (1979)

Beberapa karakteristik negara miskin adalah sumbangan sektor pertanian terhadap PDB masih di atas 30%. Tenaga kerja di sektor pertanian juga masih di atas 60%, sedangkan perdagangan internasionalnya didominasi oleh ekspor barang-barang pertanian dan tambang. Pada fase ini strategi industrialisasinya masih tahap industrialisasi substitusi impor (ISI). Negara menengah

sektor industri manufaktur meningkat 25-35%, tenaga kerja di sektor industri juga naik menjadi 20-30%, perdagangan sudah mulai didominasi oleh barang-barang hasil industri. Pada tingkat ini, strategi industrialisasinya masih industri substitusi impor (ISI), namun sudah mulai masuk pada industri promosi ekspor (IPE). Sementara itu, negara kaya mempunyai struktur ekonomi dimana sektor jasa menyumbang hampir 60% terhadap PDB, demikian pula tenaga kerjanya hampir 70% juga pada sektor jasa. Perdagangan mengarah kepada ekspor jasa dan teknologi, sedangkan strategi industrialisasinya adalah industri promosi ekspor (IPE).

Namun dalam perkembangannya, studi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa beberapa negara justru mengalami proses deindustrialisasi. Beberapa tulisan-tulisan terbaru seperti menjelaskan karakteristik seperti Araujo et al., (2021), Liboreiro et al. (2021) dan Vu et al. (2021) bisa dirangkum di bawah ini:

Tabel 2. Karakteristik Deindustrialisasi

Struktur PDB	1. Kontribusi industri Manufaktur terhadap PDB menjadi di bawah <20% 2. Yang naik justru pengeluaran untuk konstruksi: karena proyek-proyek tapi ini tidak berkelanjutan 3. Produktivitas agregat stagnan: sudah pindah dari industri ke jasa, tapi jasanya produktivitas rendah
Ketenagakerjaan	1. Penyerapan TK Industri Stagnan, mentok di angka 13% - 15%. 2. Tenaga Kerja Lari ke Jasa Informal: 3. PHK Massal di Sektor Padat Karya: Tekstil, alas kaki tutup karena kalah bersaing
Perdagangan LN	1. Ekspor Manufaktur Turun: Yang naik ekspor bahan mentah: nikel, batubara, CPO 2. Impor Produk Manufaktur Naik, sebaliknya banjir barang-barang impor elektronik, mesin 3. Neraca Perdagangan Rentan: Kalau harga komoditas turun, langsung deficit sehingga semakin memperlemah nilai tukar (kurs)
Penyebab	1. Dutch Disease: Kaya SDA → Rupiah kuat → Industri ekspor mati 2. Banjir Produk Impor, terutama barang dari China murah masuk, industri lokal kalah 3. Otomasi & Robot: 1 robot gantiin 10 buruh. Jadi industri nggak butuh orang banyak 4. Ekonomi Biaya Tinggi: Listrik, logistik, bunga bank mahal

Sumber: beberapa sumber diolah

Karakteristik deindustrialisasi yang paling menonjol adalah merosotnya sumbangan sektor manufaktur terhadap PDB di bawah 20%. Sebaliknya peran pemerintah terutama pada sektor konstruksi justru semakin besar. Dengan menurunnya sektor manufaktur mendorong sektor jasa semakin membesar, namun kurang berkualitas. Karena pada sektor jasa terutama sektor perdagangan biasanya didominasi oleh sektor informal. Mengapa bisa begini, banyak para pakar yang menengarai karena pengaruh globalisasi, banyak negara besar yang memproduksi

barang-barang murah dan membanjiri negara-negara sedang berkembang. Sementara komoditi domestic cenderung mahal dan tidak dapat bersaing seperti dalam studinya Rekha & Suresh Babu (2022), Cassini (2023) dan Almeida & Balanco (2024) fenomena ini disebut dengan “prematur deindustrialisasi.

II. DEINDUSTRIALISASI DATANG LEBIH CEPAT?

Berdasarkan data sumbangan sektoral terhadap PDB Indonesia periode 1975-2025, terlihat bahwa sub sektor pertanian, peternakan, kehutanan mengalami penurunan yang cukup tajam. Jika tahun 1975 masih sekitar 36,8%, sepuluh tahun kemudian (1985) sudah menurun menjadi 23,3%, demikian pula pada tahun 1995 telah merosot menjadi 16,1%. Setelah regim Orde Baru tumbang, pada tahun 2005 sumbangan sektor pertanian, peternakan, kehutanan menjadi 14,5%, kemudian tahun 2015 menjadi 13,9%, namun pada tahun 2020 sempat naik menjadi 14,2% dan tahun 2025 kembali menurun menjadi 13,6%.

Yang menarik adalah sub sektor penggalian dan pertambangan. Pada masa Orde Baru masih sangat tinggi, bahkan pada tahun 1980an mencapai 18,2%, kemudian mengalami penurunan menjadi sekitar 9,3% pada tahun 1995. Sementara pada masa reformasi tetap tinggi misalkan pada tahun 2005 masih sekitar 9,4, sempat mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2020 yakni masing-masing menjadi 7,9% dan 6,7%, namun setelah Covid 19 meningkat lagi seperti pada tahun 2025 naik menjadi 9,2%. Secara umum, sumbangan sektor pertanian mengalami penurunan drastis sejak dekade 90an, seperti ditunjukkan angka tahun 1995 yang mencapai sekitar 20% yakni tepatnya 25,4%, pada masa reformasi sektor pertanian sempat turun menjadi 20,9 pada tahun 2020, namun pada tahun 2025 naik kembali menjadi 22,8% yang lebih disebabkan kenaikan sub sektor penggalian dan pertambangan. Jadi justru perekonomian Indonesia saat ini sangat tergantung terhadap komoditi yang bersifat ekstraktif atau langsung mengeduk dari bumi seperti batu bara dan komoditi tambang yang lain.

Tabel 3. Sumbangan Sektoral Terhadap PDB Indonesia Periode 1975-2025 (prosentase)

No	Sektor	1975	1985	1995	2005	2015	2020	2025
A.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan	36,8	23,3	16,1	14,5	13,9	14,2	13,6
B.	Penggalian dan Pertambangan	10,9	18,2	9,3	9,4	7,9	6,7	9,2
I	Pertanian/Primer	47,7	41,5	25,4	23,9	21,8	20,9	22,8
C	Industri Pengolahan	11,1	15,8	23,9	28,4	21,7	20,6	19,9
D	Listrik, Gas dan Air Minum	0,65	0,4	1,1	0,7	1,2	1,2	1,2
E	Bangunan/Konstruksi	4,8	5,3	7,6	5,8	10,5	11,3	10,2
II	Industri/Sekunder	16,4	21,5	32,6	34,9	33,7	33,1	31,3
F	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	17,0	15,6	15,7	16,8	13,7	13,4	13,8
G	Pengangkutan dan Komunikasi	4,0	5,3	7,1	6,2	11,8	11,9	13,3
H	Bank, Keuangan, Real Estate	3,9	5,4	5,9	9,2	8,8	9,7	8,7
I	Jasa Pemerintahan	7,4	6,6	4,3	4,2	4,2	9,1	7,4
J	Jasa Swasta	3,6	3,7	9,2	5,0	6,2	2,0	2,7
III	Jasa/Tersier	35,9	36,6	42,2	41,4	44,7	46,1	45,9
K	Total	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, beberapa tahun, diolah

Sementara itu, transformasi struktural seperti disampaikan secara teori di atas, dimana penurunan sektor pertanian akan digantikan oleh sektor industri telah terjadi seperti ditunjukkan pada tabel 3 itu. Sektor sekunder atau sektor industri yang utama terdiri sub sektor manufaktur atau pengolahan, sub sektor listrik, gas dan air minum, dan sub sektor konstruksi. Untuk sub sektor Listrik, gas dan air minum hanya menyumbang sekitar 1 % saja. Sementara untuk sektor konstruksi terdapat kecenderungan untuk meningkat, bahkan pada era reformasi sampai saat ini mencapai 10% lebih sumbangannya terdapat GDP. Secara umum sektor industri pengolahan (manufaktur) yang pada tahun 1975 sekitar 11,1% mengalami peningkatan signifikan pada tahun 1985 menjadi 15,8%. Memasuki decade 1990an mengalami peningkatan yang cukup pesat yakni mencapai 23,9%. Pada awal reformasi sektor industri terus mengalami peningkatan 28,4% pada tahun 2005, namun kemudian mengalami penurunan pelan-pelan pada tahun 2015 menjadi 21,7%, pada tahun 2020 menjadi 20,6% dan tahun 2029 semakin turun 19,9%. Kalau menggunakan kriteria tentang fenomena deindustrialisasi, ini menandakan dari tahun ke tahun pada sektor industri mengalami kemerosotan yang semakin parah, beberapa pakar mengklasifikasikan sebagai "deindustrialisasi".

Sebaliknya, karena penurunan sumbangan sektor industri itu, maka dikompensasi dengan meningkatnya sektor jasa. Seperti ditunjukkan prosentase sektor jasa pada tahun 1975 baru sekitar 35,9% menjadi 45,9% pada tahun 2025. Pada sektor ini masih didominasi sub sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi 13,5% dan sub sektor pengangkutan komunikasi mencapai 13,3%, kemudian disusul sub sektor, bank, keuangan, real estate yang mencapai 8,7% pada tahun 2025. Yang menarik bahwa lima belas tahun terakhir, peran pemerintah semakin kuat yakni seperti ditunjukkan angka pada tahun 2020 sekitar 9,9% dan pada tahun 2025 menjadi 7,4%. Jadi memang yang disampaikan oleh Chenery (1979) bahwa sektor jasa ke depan akan semakin membesar sesuai dengan data empiris di Indonesia.

Namun di sini lain semakin besarnya sektor jasa juga, sebagai akibat merosotnya sektor manufaktur, dapat menunjukkan bahwa proses "deindustrialisasi" telah hadir lebih cepat dari yang diperkirakan. Namun yang menarik adalah bahwa proses "deindustrialisasi" ini hampir di semua negara seperti yang dilakukan oleh Araujo et al. (2021). Penelitian ini membandingkan kecepatan datangnya deindustrialisasi, dimana yang paling cepat sampai yang lambat dimulai dari sub sahara Afrika, Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara, Amerika Latin dan Karibia, Asia Tenggara dan Asia Timur. Dalam kajian jelas bahwa, Asia Tenggara dianggap relative lambat proses deindustrialisasinya dibandingkan dengan negara lain. Asia Tenggara hanya kalah dengan Asia Timur. Jika dieksplorasi lebih dalam Asia Tenggara yang diteliti adalah Indonesia, Malaysia dan Thailand dimana sumbangan industri terhadap PDB masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara di kawasan lain.

Bukti Empiris: Studi Kasus Solo Raya

Secara empiris di Solo Raya, gejala deindustrialisasi juga terjadi. Pertama, di sektor pertanian mengalami kemerosotan BPS (2025) mencatat penyusutan lahan sawah nasional sebesar 1,2 juta hektar dalam 10 tahun terakhir akibat alih fungsi. Di wilayah Surakarta Raya, khususnya Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, rata-rata kepemilikan lahan petani hanya 0,3 hektar per rumah tangga. Dengan jumlah anggota keluarga yang tetap bertambah, maka rasio tenaga kerja per hektar meningkat. Satu hektar sawah kini digarap 4-5 orang. Akibatnya output total naik

tipis, namun pendapatan per kapita turun. Ini adalah bukti klasik involusi. Ini menegaskan bahwa involusi semakin menguat, dimana petani yang dilahirkan adalah petani gurem dan buruh tani.

Kedua, di sektor industri. Data BPS (2025) menunjukkan deindustrialisasi. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB nasional turun dari 20,5% pada tahun 2019 menjadi 18,1% pada tahun 2024. Penyerapan tenaga kerja industri juga melambat. Di Kota Surakarta, implikasinya nyata. Pelemahan industri tekstil mendorong eks-buruh beralih ke sektor informal seperti pedagang di Pasar Klewer, UMKM batik, dan driver transportasi online. BPS Provinsi Jawa Tengah (2024) mencatat 58,3% tenaga kerja di Solo Raya bekerja di sektor informal. Berdasarkan fenomena di Solo Raya itu, memang ada gejala premature deindustrialisasi di wilayah ini

III. KESIMPULAN

Deindustrialisasi di Indonesia datang lebih cepat dari yang diprediksi Chenery di atas. Seharusnya, pada tingkat pendapatan menengah PDB per kapita \$5.000, sektor manufaktur masih menjadi mesin utama pertumbuhan dengan kontribusi 25%-30%. Namun realitanya, kontribusi manufaktur Indonesia justru turun menjadi 19,9% pada 2025. Oleh para pakar fenomena ini juga kadang disebut dengan "Premature Deindustrialization". Ini terjadi karena tiga (3) tekanan besar sekaligus: yakni pertama serbuan produk manufaktur China; kedua, otomasi dan robot yang membuat industri tidak lagi padat karya; ketiga, Dutch Disease akibat ketergantungan ekspor Sumber Daya Alam. Akibatnya, Indonesia "melompati" fase industrialisasi, dari yang seharusnya bertumpu ke sektor manufaktur, melompek ke sektor jasa yang kurang berkualitas. Tenaga kerja tidak terserap di pabrik, melainkan lari ke sektor jasa informal dengan produktivitas rendah. Jika kondisi ini tidak segera dikoreksi melalui strategi hulu dan hilirisasi sert penguatan manufaktur berbasis teknologi, Indonesia berisiko gagal memanfaatkan bonus demografi dan terjebak dalam middle income trap.

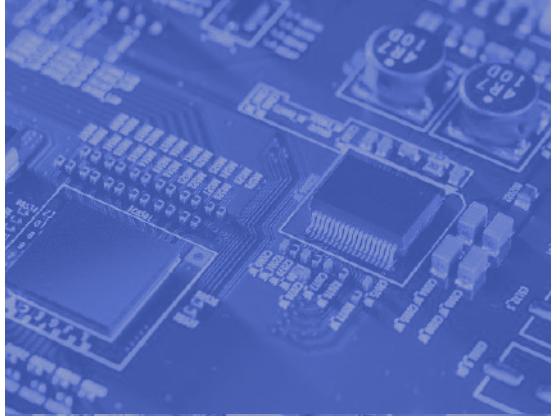
DAFTAR PUSTAKA

- Almeida, L. M. de L., & Balanco, P. A. de F. (2024). Deindustrialization in a Marxian perspective: An empirical study of the Brazilian economy between 1995-2010. *Structural Change and Economic Dynamics*, 68(May 2023), 224-239. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2023.10.012>
- Araujo, E., Araújo, E., Peres, S. C., & Punzo, L. F. (2021). An investigation into shapes and determinants of deindustrialization processes: Theory and evidence for developed and developing countries (1970-2017). *Economia*, 22(2), 129-143. <https://doi.org/10.1016/j.econ.2021.03.001>
- Cassini, L. (2023). Path-dependent productive specialization: Should prematurely deindustrialized countries shift to a KIBS export-led strategy? *Structural Change and Economic Dynamics*, 65(May 2022), 199-209. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2023.02.016>
- Chenery, H. (1979). *Structural Change and Development Policy*. Oxford University Press. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

- Chenery, H., & Syrquin, M. (1975). *Patterns of Development 1950-1970*. Oxford University Press. https://doi.org/10.9774/gleaf.978-1-907643-38-5_5
- Liboreiro, P. R., Fernández, R., & García, C. (2021). The drivers of deindustrialization in advanced economies: A hierarchical structural decomposition analysis. *Structural Change and Economic Dynamics*, 58, 138–152. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2021.04.009>
- Rekha, R., & Suresh Babu, M. (2022). Premature deindustrialisation and growth slowdowns in middle-income countries. *Structural Change and Economic Dynamics*, 62, 377–389. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2022.04.001>
- Vu, K., Haraguchi, N., & Amann, J. (2021). Deindustrialization in developed countries amid accelerated globalization: Patterns, influencers, and policy insights. *Structural Change and Economic Dynamics*, 59, 454–469. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2021.09.013>



Sultan Suhab





Hilirisasi-Industrialisasi & Penguatan Ekonomi Rakyat (HI-PER) Menuju Indonesia Maju: Hilirisasi Kelautan, Perikanan, dan Agro-Maritim Kawasan Timur Indonesia

Dr. Sultan Suhab

Kapus PPKP-LPPM • Dosen FEB Universitas Hasanuddin
Wakil Ketua Bidang Pengembangan Organisasi • Korwiltim PP-ISEI

Tujuan FGD



Menganalisis

Perkembangan situasi ekonomi nasional dan global terkini



Merumuskan

Strategi hilirisasi-industrialisasi yang berpihak pada ekonomi kerakyatan.



Mengali

Relevansi kerangka pikir SUMITRONOMICS dalam konteks Indonesia masa kini.



Menyusun

Rekomendasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi (8%) menuju 'Indonesia Maju'.

Hilirisasi KP & Agro-Maritim KTI, Fokus Pada:



KERANGKA PIKIR SUMITRONOMICS. (1) Pilar Stabilitas Dinamis: menjaga keseimbangan fiskal-moneter di Tengah krisis global; (2) **Pilar Hilirisasi SDA: strategi industrialisasi berbasis sumber daya alam untuk nilai tambah; dan (3) Pilar Ekonomi Kerakyatan: pemberdayaan UMKM, koperasi, dan petani/nelayan sebagai basis ekonomi nasional.**



USAHA MENUJU PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI (8%), yang diwujudkan dalam: (1) Strategi investasi dan inovasi industri; (2) Reformasi fiskal, moneter dan kelembagaan; dan (3) Peran Pendidikan, riset, dan teknologi dalam akselerasi produktivitas.

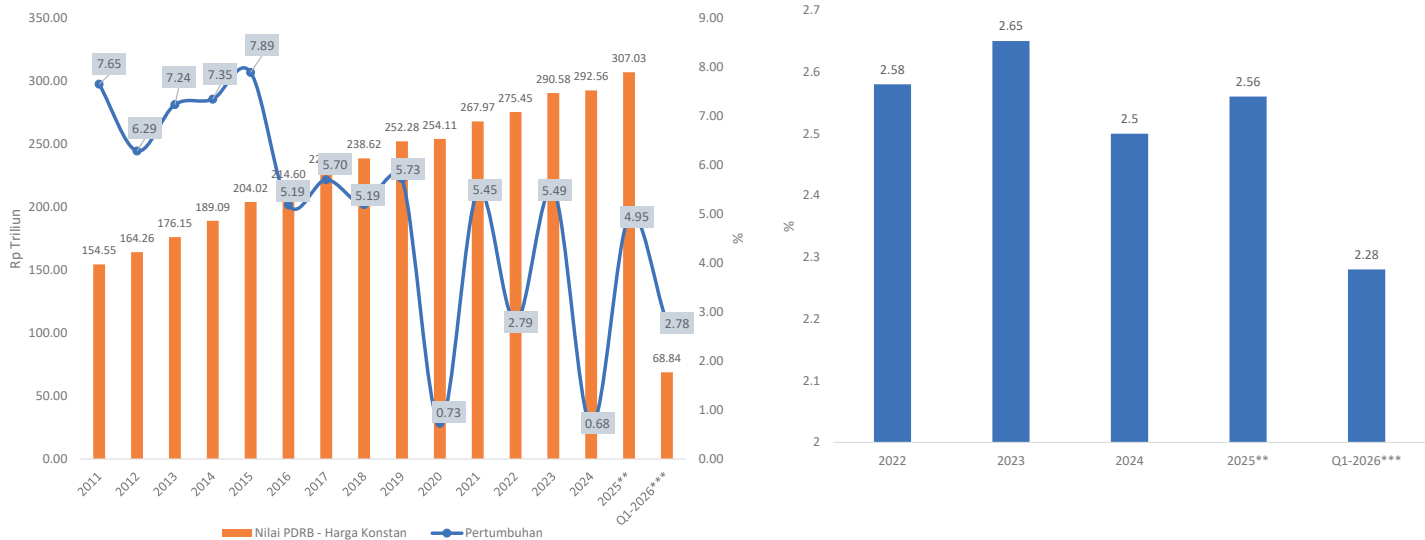


Data & Informasi serta Permasalahan & Isu Strategis

Kinerja PDB Sektor Perikanan

Kinerja PDB Sektor Perikanan cenderung fluktuatif selama periode 2016-2026q1

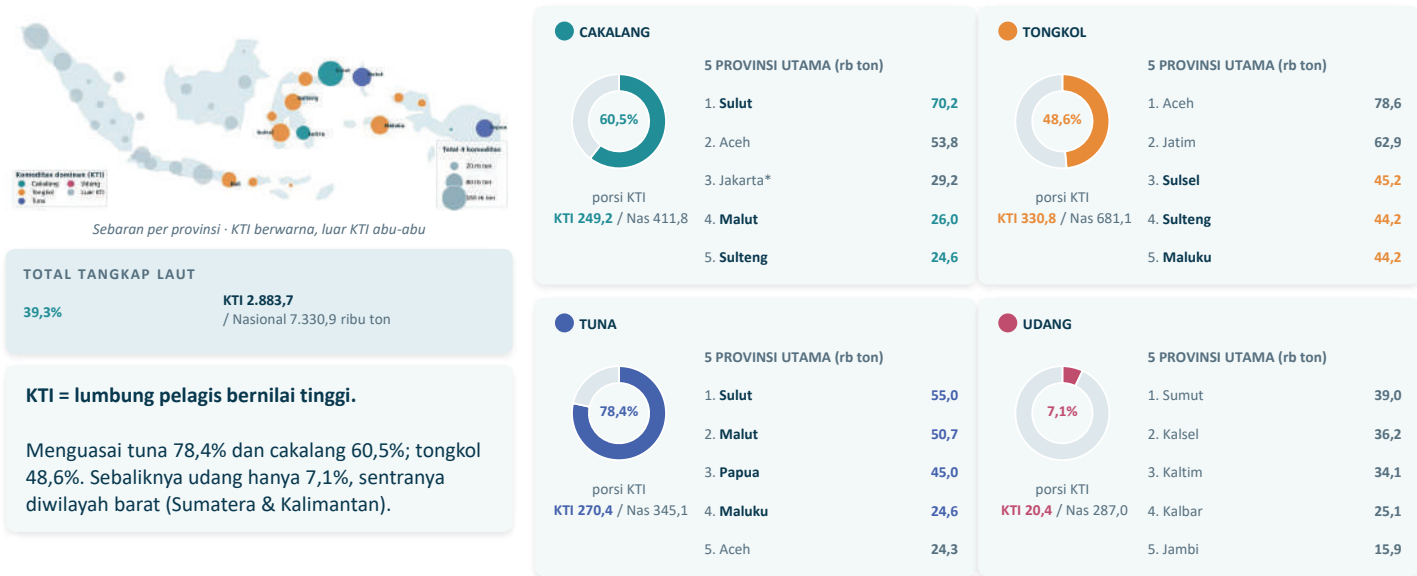
Kontribusi sektor perikanan terhadap total PDB nasional rata-rata mencapai 2,5%.



Sumber: Statistik KKP, diolah

Kontribusi KTI & Lima Provinsi Utama per Komoditas Tangkap Laut, 2024

Lingkaran = porsi KTI terhadap nasional (%) · 5 provinsi utama dalam ribu ton



KTI = Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua (tanpa Kalimantan). Untuk udang, kelima provinsi teratas berada di luar KTI (porsi KTI udang 7,1%). *Jakarta = pendaratan pelabuhan samudera, bukan tangkapan lokal. Volume dalam ribu ton. Sumber: Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Provinsi & Komoditas Utama, 2024 (diolah).

Sumber: BPS, diolah

Kontribusi KTI & Lima Provinsi Utama per Komoditas Budidaya, 2024

Lingkaran = porsi KTI terhadap nasional (%) · 5 provinsi utama dalam ribu ton



TOTAL BUDIDAYA

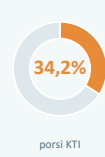
58,6%

KTI 9.228,8
/ Nas 15.754,6 rb ton

KTI = lumbung budidaya, terutama rumput laut.

Rumput laut KTI 79,8% nasional; Sulsel produsen rumput laut terbesar (4.018,7 rb ton) dan Sulut sentra nila (418,2). Nila, bandeng, udang lebih merata.

NILA



5 PROVINSI UTAMA (rb ton)

1. Sulut	418,2
2. Jabar	275,8
3. Jateng	111,4
4. Sumbar	107,8
5. Sumut	98,0

porsi KTI
KTI 534 / Nas 1.563

BANDENG



5 PROVINSI UTAMA (rb ton)

1. Sulsel	193,9
2. Jatim	163,3
3. Jabar	82,3
4. Jateng	76,5
5. Sultra	60,0

porsi KTI
KTI 332 / Nas 793

RUMPUT LAUT

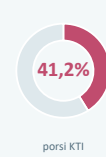


5 PROVINSI UTAMA (rb ton)

1. Sulsel	4.018,7
2. NTT	1.467,7
3. Kaltara	857,8
4. Jatim	755,5
5. Sulteng	752,2

porsi KTI
KTI 7.865 / Nas 9.854

UDANG



5 PROVINSI UTAMA (rb ton)

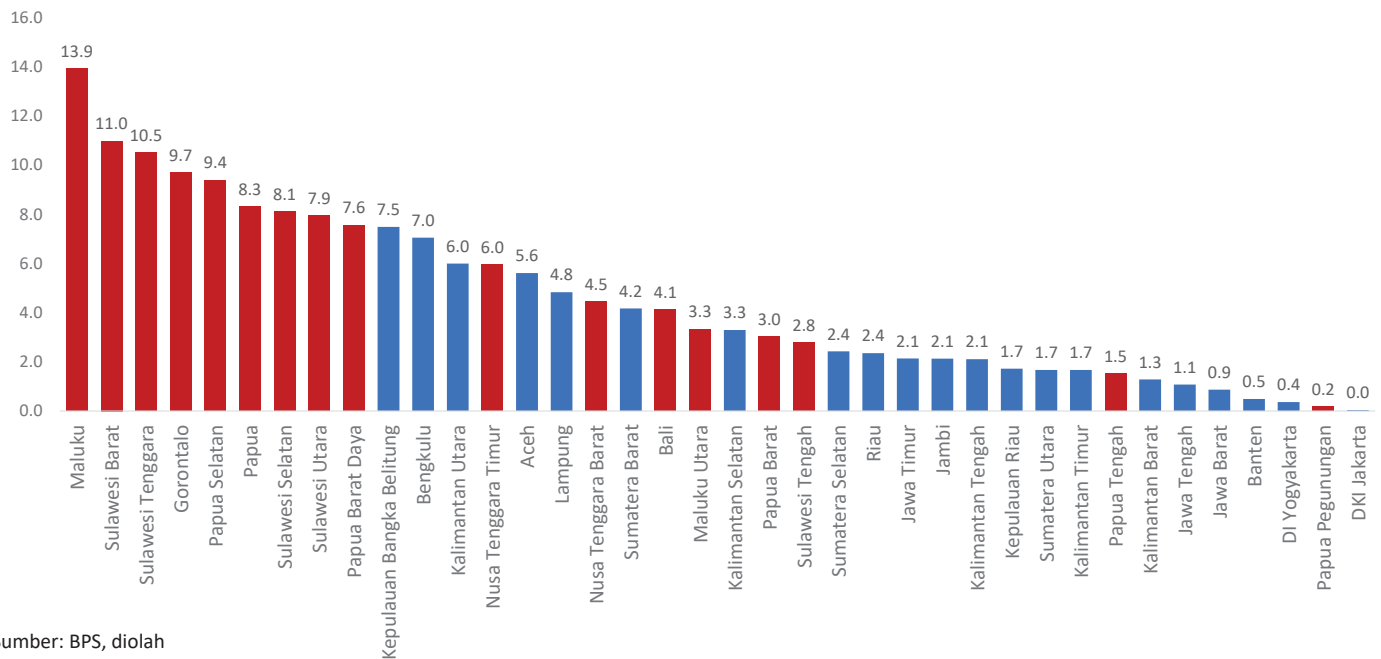
1. NTB	196,6
2. Jabar	124,0
3. Jateng	123,7
4. Sulsel	68,7
5. Lampung	45,0

porsi KTI
KTI 395 / Nas 959

KTI = Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua (tanpa Kalimantan), Rumput laut mendominasi volume budidaya (=63% produksi nasional). Kalimantan Utara (857,8 rb ton rumput laut) tergolong luar KTI. Volume dalam ribu ton. Sumber: Produksi Perikanan Budidaya Menurut Provinsi & Komoditas, 2024 (diolah).

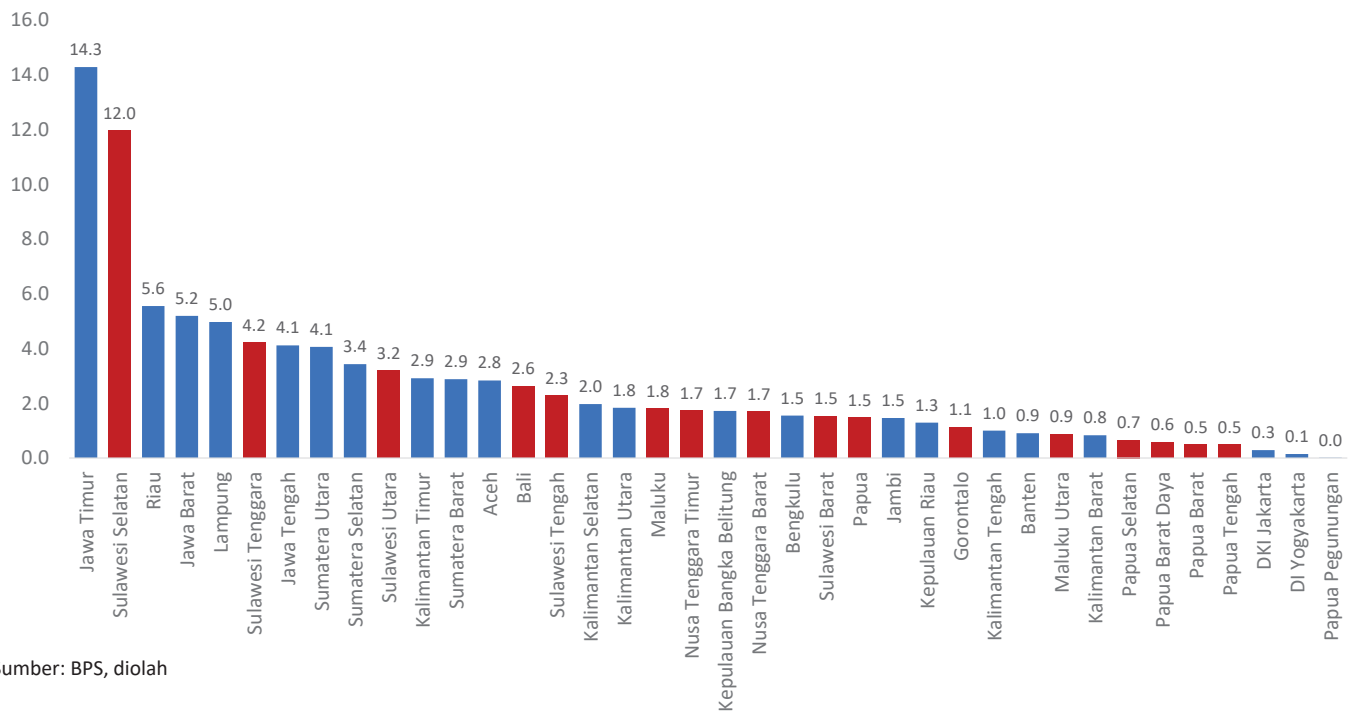
Sumber: BPS, diolah

Kontribusi PDRB Sektor Perikanan terhadap total PDRB per provinsi



Sumber: BPS, diolah

Kontribusi PDRB Sektor Perikanan masing-masing Provinsi terhadap Total PDB Perikanan Nasional



Produksi Jelas di Timur, Lalu Nilai Tambahnya?



Jika bahan baku ada di Timur tetapi simpul pengolahan dan rantai dingin ada di Barat, maka hilirisasi yang sesungguhnya belum terjadi di KTI.

Skala dan Sebaran Cold Storage Nasional



899.178,3 ton

Total kapasitas terpasang



2.287 unit

Jumlah fasilitas cold storage



37 provinsi

Cakupan wilayah (dari 38 provinsi)



275 kab/kota

Titik sebaran tingkat daerah

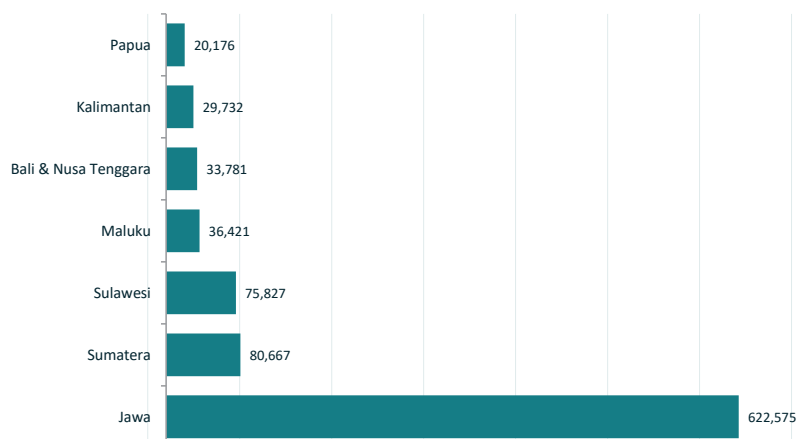


Angka nasional menyembunyikan ketimpangan yang tajam. Hampir 900 ribu ton kapasitas tersebar sangat tidak merata, terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang justru menjadi sentra produksi perikanan hanya memperoleh porsi kecil. Rata-rata kapasitas nasional 393,2 ton per unit.

Sumber: Portal Data KKP (portaldata.kkp.go.id), 30 Juni 2026. Total dari 37 provinsi yang melaporkan data; agregasi penulis.

Hampir 7 dari 10 Ton Kapasitas Berada di Jawa

Kapasitas cold storage menurut gugus pulau (ton)



69,2%

kapasitas nasional terpusat di 6 provinsi di Pulau Jawa saja



Titik terpadat

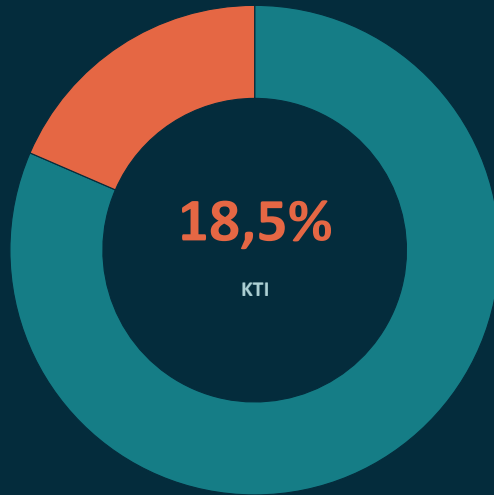
192.091 ton

Kota Jakarta Utara sendiri menampung 21,4% dari seluruh kapasitas cold storage nasional, lebih besar dari gabungan Sumatera dan Papua.

Sumber: Portal Data KKP, 30 Juni 2026. Gugus pulau diagregasi dari 37 provinsi

Kapasitas cold storage: KAWASAN BARAT vs KAWASAN TIMUR

Kawasan Timur Indonesia Tertinggal Jauh



Dua kawasan, dua dunia kapasitas



KBI — Kawasan Barat

Sumatera & Jawa

732.974 ton

81,5%

1.508 unit



KTI — Kawasan Timur

Sulawesi, Bali—Nusra, Maluku, Papua

166.205 ton

18,5%

779 unit

Sumber: Portal Data KKP, 30 Juni 2026. Dalam pembagian ini Kalimantan dikelompokkan ke KBI; KTI mencakup Sulawesi, Bali—Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (16 provinsi).

Banyak Fasilitas, Tetapi Berkapasitas Kecil

KTI tidak kekurangan jumlah unit, yang langka adalah skala. Fasilitasnya kecil-kecil dan terfragmentasi.

Porsi KTI dari
JUMLAH UNIT nasional

34,1%

779 dari 2.287 unit

Porsi KTI dari
KAPASITAS nasional

18,5%

166.205 dari 899.178,3 ton

Rata-rata kapasitas per unit

KBI **486,1 ton**

KTI **213,4 ton**

Fasilitas di Barat rata-rata 2,3× lebih besar daripada di Timur.

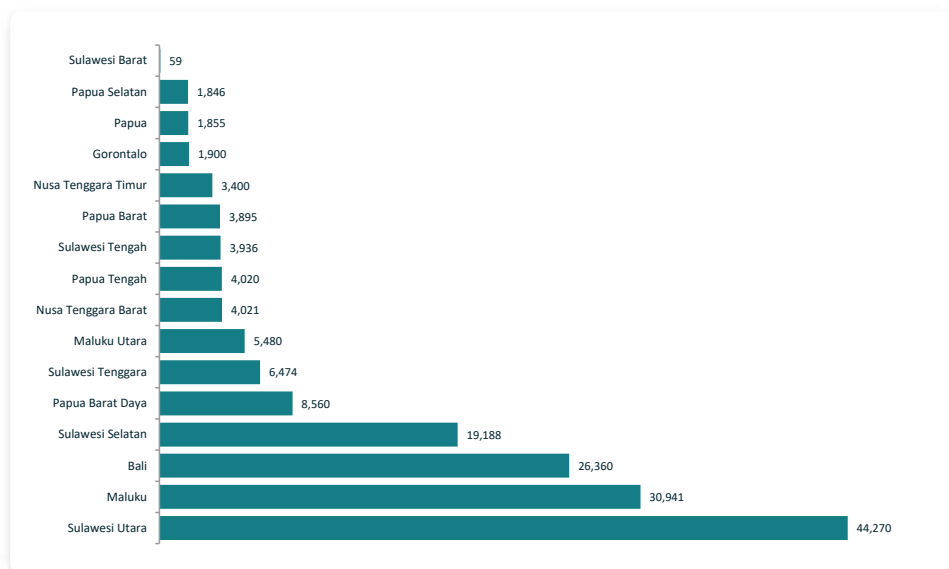


Implikasi: KTI menanggung lebih dari sepertiga (34,1%) titik fasilitas nasional namun hanya 18,5% kapasitas. Banyaknya unit kecil menyulitkan efisiensi rantai dingin, menaikkan biaya operasi per ton, dan membatasi kemampuan menyerap lonjakan hasil tangkapan pada musim puncak.

Sumber: Portal Data KKP, 30 Juni 2026; perhitungan rata-rata oleh penulis.

ZOOM KAWASAN TIMUR

Peta Kapasitas 16 Provinsi Kawasan Timur



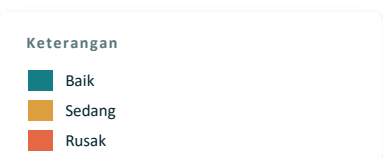
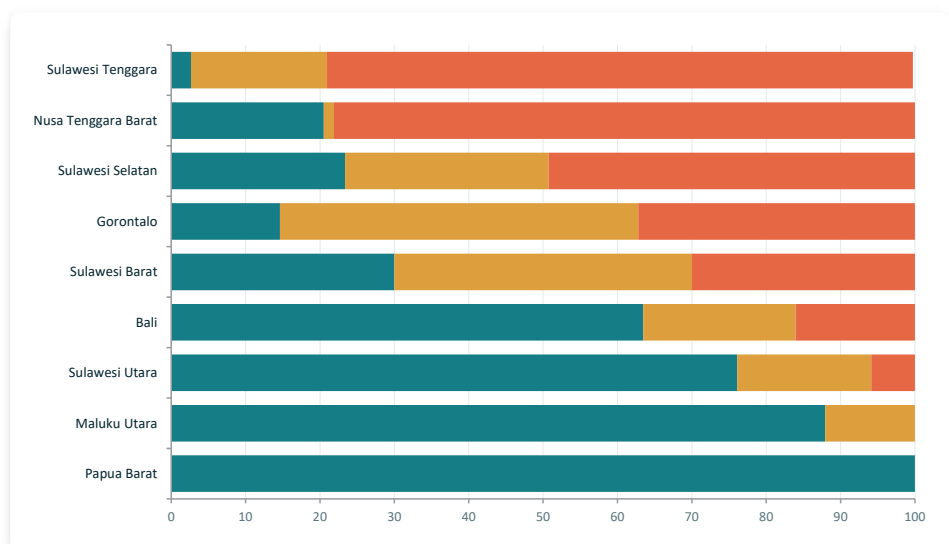
Sumber: Portal Data KKP, Nilai dalam ton; agregasi tingkat provinsi



Timpang di dalam KTI sendiri. Tiga provinsi teratas (Sulut, Maluku, Bali) menguasai lebih dari separuh kapasitas KTI, sementara daratan Papua & Sulbar nyaris kosong.

Bukan Hanya Infrastruktur, Tekanan Lingkungan mulai mengancam

Komposisi kondisi hutan mangrove pada provinsi KTI yang memiliki data (% luas per provinsi)

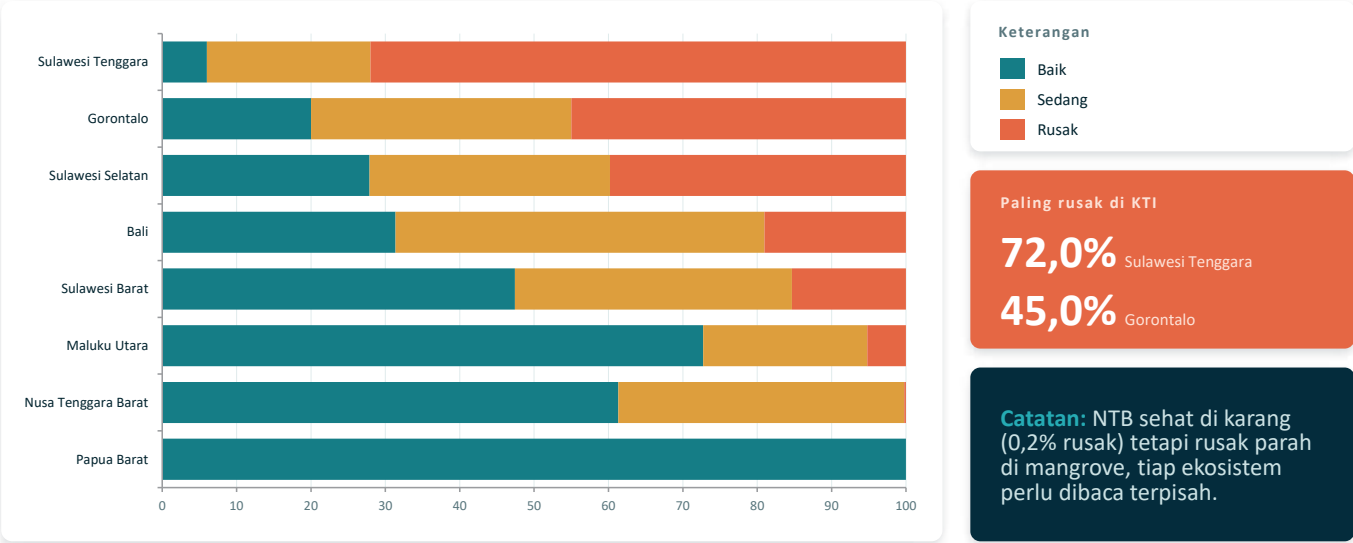


Lima provinsi KTI : Sultra, NTB, Gorontalo, Sulsel, dan Sulbar, memiliki lebih dari 70% kawasan mangrove dalam kondisi Sedang atau Rusak.

Sumber: Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2025, BPS

Terumbu Karang: Pola Tekanan yang Serupa di Timur

Komposisi kondisi terumbu karang pada provinsi KTI yang memiliki data (% luas per provinsi)



Sumber: Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2025, BPS

Mangrove dan Karang Rusak Bersamaan di Sulawesi

Persentase kawasan dalam kondisi Rusak - dua ekosistem pesisir, tekanan yang sejalan



Beban ganda Kawasan Timur. Mangrove dan terumbu karang adalah tempat pemijahan dan asuhan ikan, penahan abrasi, sekaligus penyimpan karbon biru. Ketika dua ekosistem penopang produksi ini rusak bersamaan sementara infrastruktur rantai dingin untuk menambah nilai juga tipis, hilirisasi perikanan di KTI tertekan dari hulu sekaligus hilir.

Catatan data: hanya provinsi dengan data kondisi yang dibandingkan; sejumlah provinsi (a.l. NTT, Maluku, Papua) “tidak teridentifikasi”, dan banyak data (?) masih 2022. Degradasi juga tinggi di sebagian wilayah Barat. Sumber: BPS — diolah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, 2025 (kondisi 2024).

Sumber: Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2025, BPS

Sejumlah Referensi dengan Permasalahan Terkait di KTI

 Rantai dingin Sekitar 27% produksi ikan dunia hilang sebelum sampai ke konsumen; di negara berkembang kehilangan pascapanen 20–75%, dengan lemahnya rantai dingin sebagai pemicu utama. FAO — The State of World Fisheries (2022)	 Modal alam Hasil tangkapan meningkat seiring kelimpahan mangrove; spesies terkait mangrove menyumbang 32% pendaratan perikanan skala kecil, bernilai ≈US\$37.500 per hektar tepi mangrove/tahun. Aburto-Oropeza dkk. — PNAS (2008)	 Hilirisasi Sekitar 90% produksi rumput laut Indonesia berasal dari Kawasan Timur, namun sekitar 65% diekspor sebagai rumput laut kering mentah — nilai tambah karagenan tercipta di luar negeri. Kajian industri rumput laut Indonesia (Aquaculture, 2021; 2023)
--	---	---

MENGAPA INI PENTING: Inti Permasalahan

Kesenjangan yang Menggerus Nilai Tambah Perikanan

 01 Produksi ada di Timur Wilayah Pengelolaan Perikanan paling produktif (Laut Banda, Arafura, Sulawesi, Maluku) berada di KTI — namun infrastruktur rantai dinginnya paling tipis.	 02 Susut pasca-panen tinggi Tanpa cold storage memadai, hasil tangkapan cepat menurun mutunya. Susut & penurunan kualitas menekan harga jual nelayan di sentra produksi.	 03 Nilai tambah lari ke Barat Ikan dikirim mentah ke Jawa untuk diproses dan disimpan. Pengolahan, lapangan kerja, dan margin keuntungan terkonsentrasi jauh dari sumber daya.
---	---	---

Inti masalah: infrastruktur rantai dingin tidak mengikuti peta sumber daya — penghambat utama hilirisasi perikanan di Kawasan Timur Indonesia.



Alternatif Arah Kebijakan Pengembangan



**Peta Sumber Daya Ada di Timur,
Peta Kapasitas Masih di Barat**

18,5%

porsi kapasitas
Kawasan Timur

81,5%

porsi kapasitas
Kawasan Barat

213,4

ton/unit rata-rata KTI
(vs 486,1 di KBI)

Mempersempit jurang ini adalah prasyarat hilirisasi perikanan dan pemerataan nilai tambah bagi nelayan di Kawasan Timur Indonesia.

Menutup Kesenjangan Rantai Dingin di Timur



Konsolidasi kapasitas

Prioritaskan cold storage berskala di hub produksi KTI (Bitung, Ambon, Kendari, Sorong, Merauke) — bukan menambah unit kecil tercerai-berai.



Energi & keandalan listrik

Cold storage padat energi. Pasokan listrik andal dan opsi energi terbarukan menentukan kelayakan operasi di daerah terpencil.



Integrasi logistik tol laut

Sambungkan cold storage dengan jadwal tol laut & pelabuhan perikanan agar produk dingin mengalir efisien dari timur ke pasar.



Pembiayaan campuran (blue finance)

Kombinasikan APBN/APBD, blue financing, dan investasi swasta untuk menutup kesenjangan modal infrastruktur di KTI.

Mencapai Tujuan:



KERANGKA PIKIR SUMITRONOMICS:

- Hilirisasi SDA: Inovasi teknologi usaha Perikanan Kelautan dari hulu-hilir
- Ekonomi Kerakyatan: Nelayan local sebagai actor utama dan daerah sebagai basis utama ekonomi nasional.



USAHA MENUJU PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI (8%) dan BERKELANJUTAN:

- Efisiensi dan Daya Saing
- Nilai Tambah & Mutu Terjaga Sepanjang Rantai
- Sistem Produksi Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan



DUKUNGAN INFRASTRUKTUR EKOSISTEM USAHA HULU-HILIR, APBN/APBD dan Investasi:

- Penangkapan dan Budidaya
- Pelabuhan/Pangkalan Pendaratan Ikan – Cold Storage berskala di hub
- Mobilisasi/Transportasi dan Karantina QC
- Perusahaan Industri Perikanan

SKEMA JALUR BISNIS USAHA INDUSTRI PERIKANAN TANGKAP

Executive Summary Alur Produksi Hulu dan Pemasaran Hilir



PPKP-LPPM UNHAS
Pusat Pengembangan
Kebijakan Pembangunan



Terima Kasih

Menutup Gap Rantai Nilai Hilirisasi Kelautan, Perikanan dan Agro-Maritin di KTI untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berkeadilan

Oleh

Sultan Suhab*) & Salman Samir**)

*) Kepala Pusat PPKP-LPPM & Dosen FEB Universitas Hasanuddin, Makassar

**) Dosen FEB & Staf Fungsional PPKP-LPPM Universitas Hasanuddin, Makassar

I. PENDAHULUAN

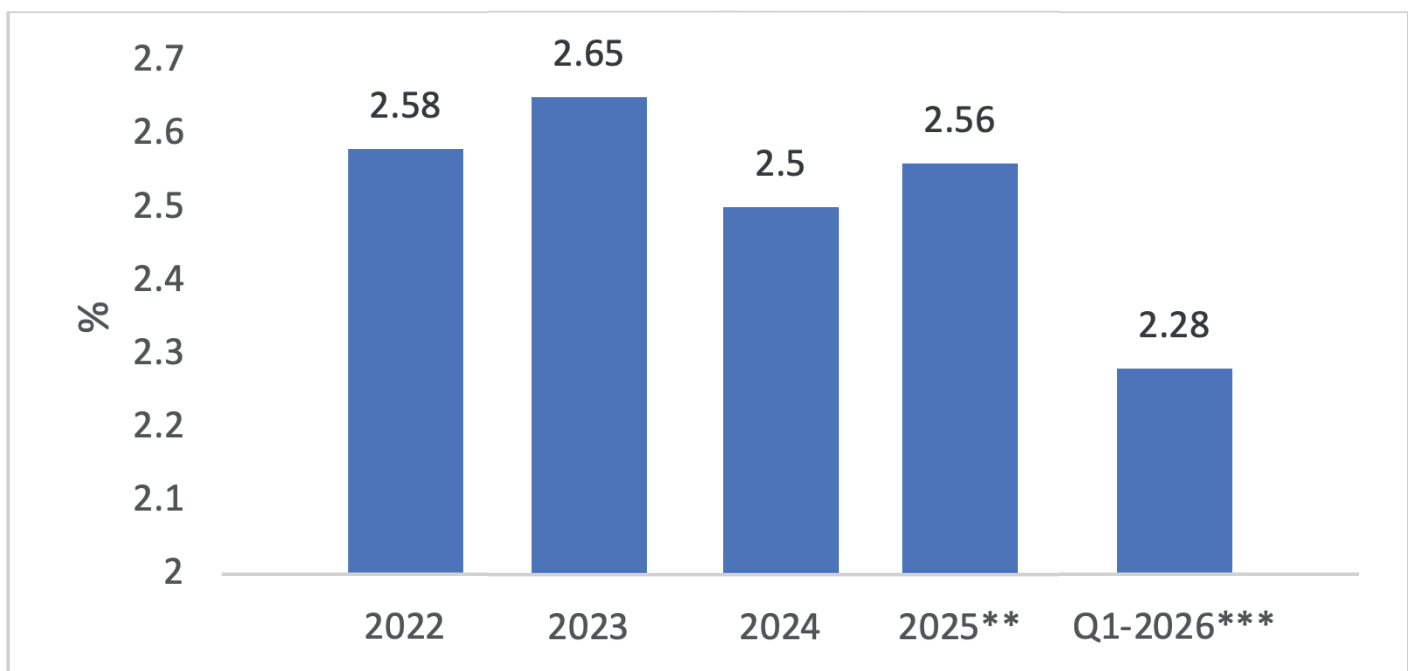
Program Hilirisasi-Industrialisasi dan Penguatan Ekonomi Rakyat (HI-PER) diarahkan untuk mendorong strategi hilirisasi-industrialisasi yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Tantangan ekonomi nasional dan global terkini dengan merumuskan strategi hilirisasi yang berpihak pada ekonomi rakyat. Perspektif historis, menggali relevansi kerangka berpikir SUMITRONOMICS dalam konteks Indonesia masa kini, guna mendukung cita-cita besar dan optimisme ekonomi Indonesia setara negara maju tahun 2045, seratus tahun Indonesia Merdeka. Melalui pendekatan developmentalism, ekonomi nasional diharapkan konsisten bertumbuh di atas 8% setiap tahun, sebuah kebijakan pro-growth untuk Indonesia Maju. Kajian ini secara khusus berfokus pada hilirisasi kelautan, perikanan, dan agro-maritim di Kawasan Timur Indonesia (KTI) — kawasan yang, sebagaimana akan ditunjukkan sepanjang naskah ini, secara faktual menjadi lumbung produksi nasional namun belum menjadi lumbung nilai tambah.

Kerangka berpikir bertumpu pada tiga pilar Sumitronomics. *Pertama*, stabilitas dinamis menjaga keseimbangan fiskal-moneter di tengah tekanan krisis global. *Kedua*, hilirisasi sumber daya alam merupakan strategi industrialisasi berbasis SDA untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri. *Ketiga*, ekonomi kerakyatan menempatkan UMKM, koperasi, serta petani dan nelayan sebagai basis ekonomi nasional. Stabilitas makro memberi ruang fiskal untuk membangun infrastruktur hilirisasi, sementara hilirisasi hanya bermakna apabila nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat di titik produksi, bukan mengalir ke tempat lain. Target pertumbuhan ekonomi tinggi 8% yang menjadi tujuan akhir kerangka ini diwujudkan melalui tiga jalur — strategi investasi dan inovasi industri, reformasi fiskal-moneter-kelembagaan, serta peran pendidikan, riset, dan teknologi dalam mengakselerasi produktivitas — namun target agregat tersebut akan kehilangan makna keadilannya apabila sumbernya hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu. Persoalan struktural inilah yang menjadi fokus perhatian, menelaah kinerja dan permasalahan usaha sektor kelautan dan perikanan yang merupakan potensi utama penggerak ekonomi masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

II. KINERJA DAN PETA PRODUKSI SEKTOR PERIKANAN

Secara makro, kinerja PDB sektor perikanan cenderung fluktuatif sepanjang periode 2016 hingga kuartal I 2026. Nilai PDRB harga konstan tumbuh dari sekitar Rp154,5 triliun pada 2011 menjadi Rp307 triliun pada 2025, namun lintasan pertumbuhannya tidak stabil — melambat tajam ke 0,7% pada 2020 akibat pandemi, sempat pulih ke 5,5% pada 2023, lalu kembali melambat ke 0,68% pada 2024. Kontribusinya terhadap PDB nasional rata-rata hanya sekitar 2,5%, bahkan menyusut ke 2,28% pada kuartal I 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa meski Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi kelautan besar, sektor perikanan belum menjadi mesin pertumbuhan utama perekonomian nasional.

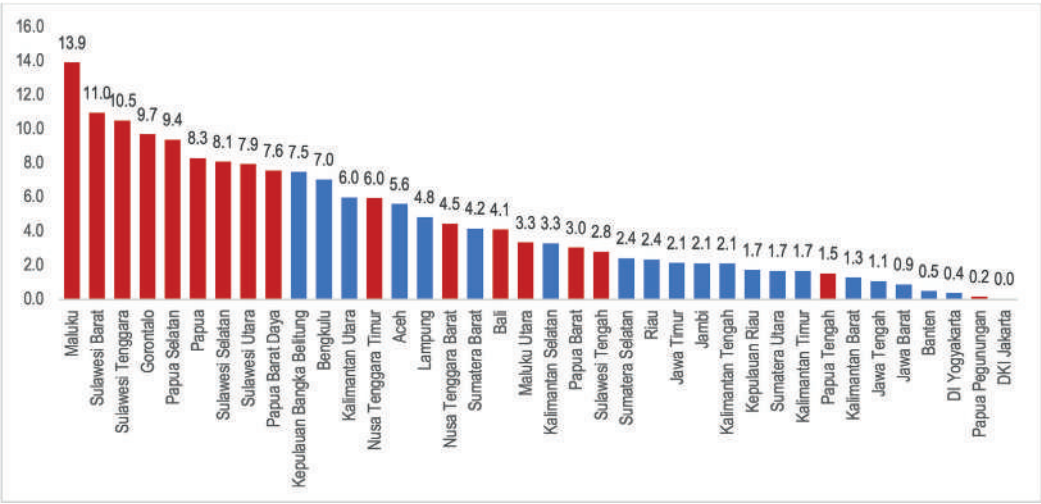
Gambar-1. Kontribusi Sektor Perikanan dan Kelautan Terhadap Total PDB Nasional, 2022-Q₁-2026 (Persen)



Sumber: Statistik KKP (diolah)

Ketika ditelusuri lebih jauh ke tingkat produksi, peran KTI justru sangat dominan. Pada 2024, KTI menyumbang 39,3% dari total tangkapan laut nasional, setara 2.883,7 dari 7.330,9 ribu ton. Komposisi per komoditas memperlihatkan pola yang lebih tajam: KTI menguasai 78,4% produksi tuna nasional dan 60,5% cakalang, menjadikannya lumbung pelagis bernilai tinggi, sementara untuk udang KTI hanya menyumbang 7,1%, karena sentranya berada di Sumatera dan Kalimantan. Pada sisi budidaya, dominasi KTI bahkan lebih besar lagi, mencapai 58,6% dari total produksi nasional, dengan rumput laut sebagai komoditas andalan — KTI menguasai 79,8% produksi rumput laut nasional, dipimpin Sulawesi Selatan dengan 4.018,7 ribu ton — sementara komoditas lain seperti nila, bandeng, dan udang tersebar lebih merata dengan porsi KTI berkisar 34 hingga 42%.

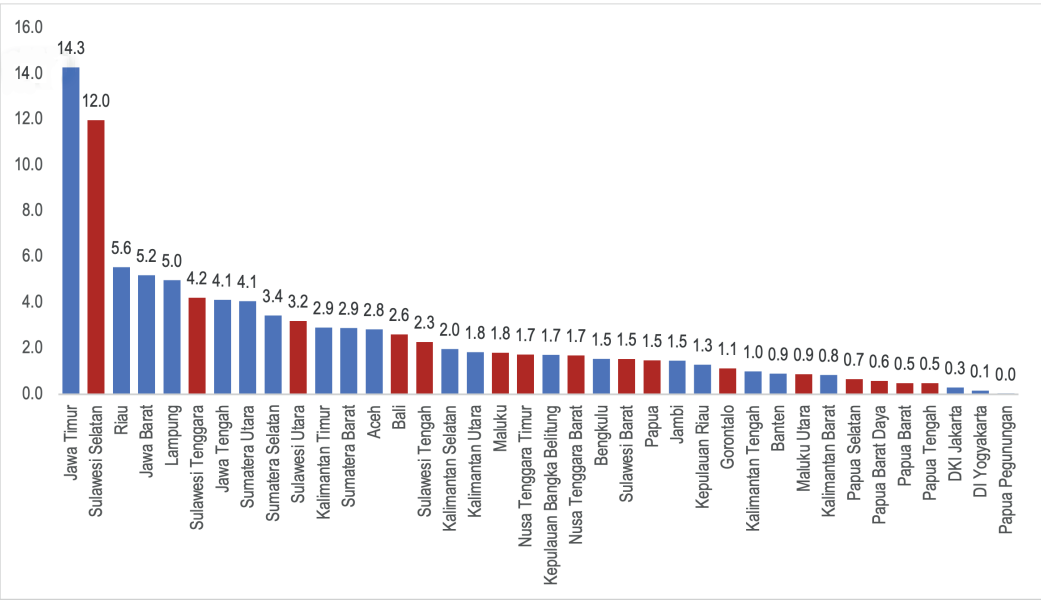
Gambar-2. Kontribusi PDRB Sektor Perikanan dan Kelautan Terhadap Total PDRB Provinsi Tahun 2024 (Persen)



Sumber: BPS (diolah)

Dominasi produksi ini sejalan dengan tingkat ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor perikanan. Provinsi-provinsi KTI mendominasi peringkat kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB provinsi masing-masing: Maluku (13,9%), Sulawesi Barat (11,0%), Sulawesi Tenggara (10,5%), Gorontalo (9,7%), dan Papua Selatan (9,4%), jauh di atas provinsi-provinsi di Jawa yang berada di bawah 2%. Namun ketika dilihat dari kontribusi absolut terhadap total PDB perikanan nasional, urutan justru berbalik — Jawa Timur memimpin dengan 14,3%, diikuti Sulawesi Selatan dengan 12,0%. Kesenjangan antara kedua ukuran inilah yang menjadi temuan kunci pertama dalam kajian ini: KTI sangat bergantung pada sektor perikanan sebagai penopang ekonomi daerahnya, tetapi nilai ekonomi yang dihasilkannya belum terwujud secara maksimal dalam struktur PDB nasional sektor tersebut.

Gambar-3. Kontribusi PDRB Sektor Perikanan dan Kelautan Provinsi Terhadap PDB Perikanan dan Kelautan Indonesia, Tahun 2024 (Persen)



Sumber: BPS (diolah)

III. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN

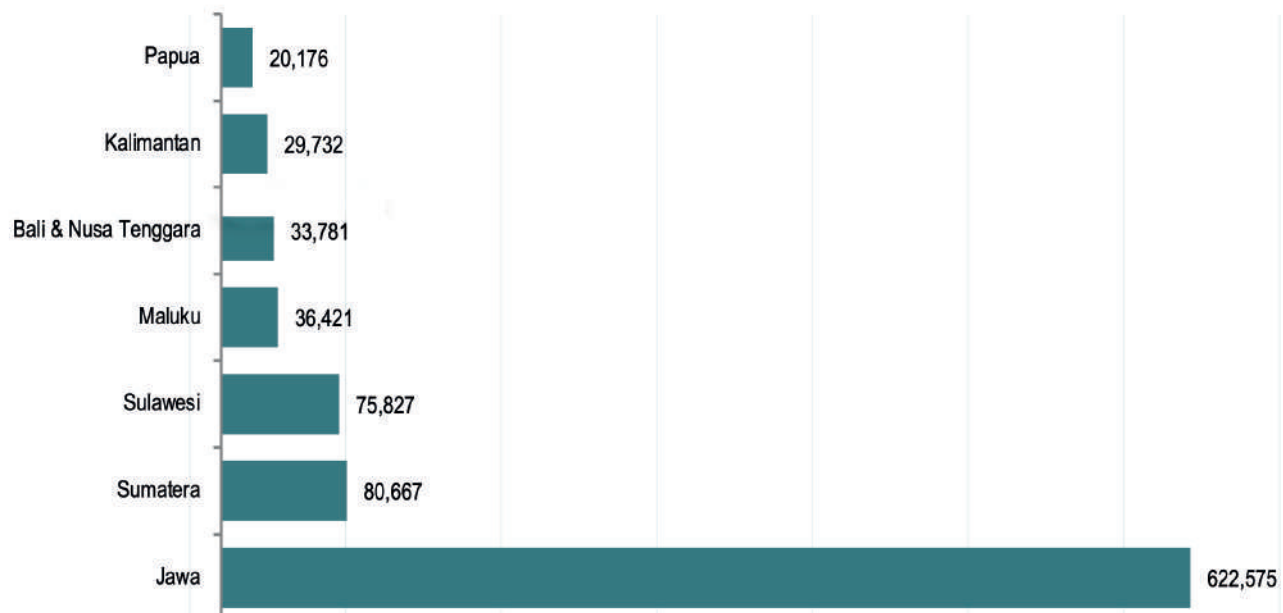
Selain permasalahan kesenjangan infrastruktur perikanan untuk memastikan nilai tambah bagi nelayan tercipta di KTI, juga menghadapi tekanan pada modal alam. Kita sedang menghadapi tekanan lingkungan, mangrove dan karang rusak bersamaan, hingga berbagai hasil riset menemukan permasalahan besar dihadapi pengembangan lapangan usaha sector perikanan di KTI, bukan hanya nilai tambah yang rendah, inklusifitas sector inipun terasa sermakin menjauh.

1. Simpul yang Hilang: Dari Produksi Menuju Nilai Tambah

Untuk memahami sumber kesenjangan tersebut, alur rantai nilai perikanan dapat digambarkan dalam tiga simpul. Simpul hulu — tangkap dan budidaya — terkonsentrasi di KTI, sebagaimana telah ditunjukkan di atas. Simpul tengah — pengolahan dan rantai dingin — justru menjadi bagian paling tipis di Timur. Simpul hilir — nilai tambah dan ekspor — dengan margin dan lapangan kerja yang justru terserap di Barat atau bahkan di luar negeri. Logika struktural ini tegas: apabila bahan baku berada di Timur tetapi simpul pengolahan dan rantai dingin berada di Barat, maka hilirisasi yang sesungguhnya belum terjadi di KTI. Bagian-bagian berikut menelusuri secara rinci bagaimana ketimpangan infrastruktur rantai dingin ini terbentuk.

Secara nasional, kapasitas *cold storage* terpasang mencapai 899.178,3 ton, tersebar di 2.287 unit fasilitas, menjangkau 37 dari 38 provinsi dan 275 kabupaten/kota, dengan rata-rata kapasitas 393,2 ton per unit. Angka agregat ini menyembunyikan ketimpangan yang tajam: 69,2% dari total kapasitas nasional terkonsentrasi di Pulau Jawa, hanya pada enam provinsi. Titik terpadatnya, Kota Jakarta Utara, sendirian menampung 192.091 ton atau 21,4% dari seluruh kapasitas cold storage nasional — lebih besar dari gabungan kapasitas Sumatera dan Papua sekaligus.

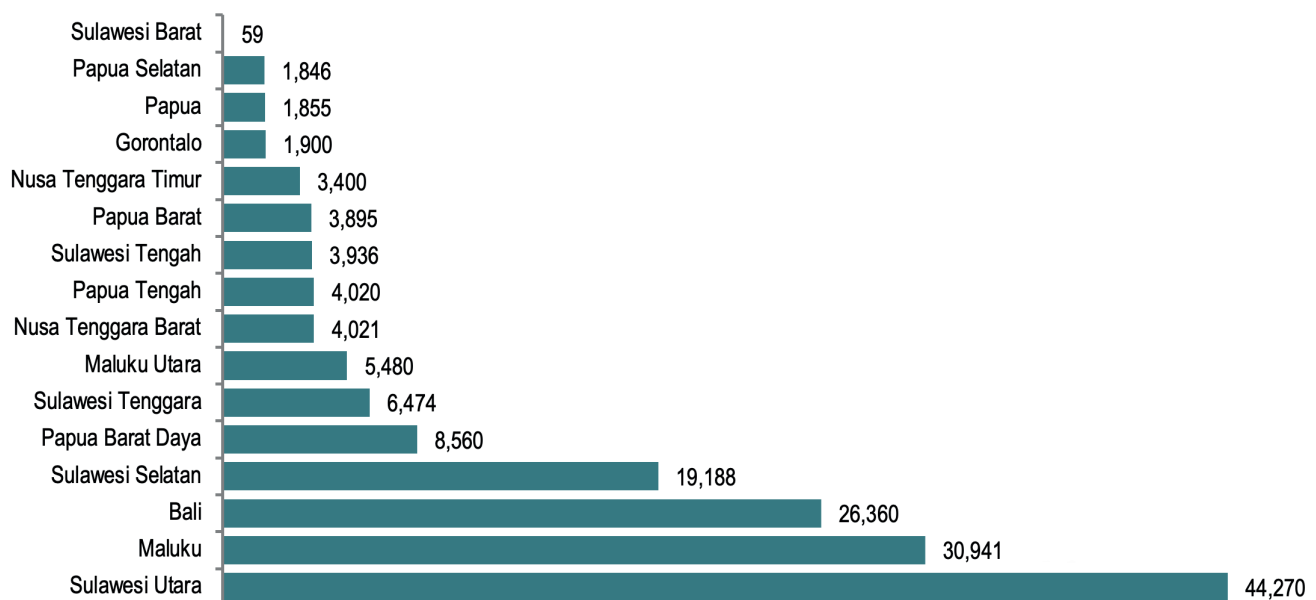
Gambar 4. Kapasitas Cold Storage Menurut Gugus Pulau, Tahun 2026 (Ton)



Sumber: Portal Data KKP, 30 Juni 2026, Gugus Pulau Diagregasi dari 37 Provinsi

Ketika dipetakan pada dua kawasan besar, ketimpangan ini semakin jelas. Kawasan Barat Indonesia — Sumatera, Jawa, dan Kalimantan — menguasai 81,5% kapasitas nasional, setara 732.974 ton dari 1.508 unit. Kawasan Timur Indonesia — Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, mencakup 16 provinsi — hanya memperoleh 18,5%, setara 166.205 ton dari 779 unit, padahal KTI adalah penghasil tuna, cakalang, dan rumput laut terbesar nasional. Persoalannya bukan sekadar jumlah unit: KTI menanggung 34,1% dari total unit fasilitas nasional namun hanya menguasai 18,5% dari total kapasitas, sehingga rata-rata kapasitas per unit di KTI hanya 213,4 ton dibandingkan 486,1 ton di KBI — fasilitas di Barat rata-rata 2,3 kali lebih besar dibandingkan di Timur. Banyaknya unit kecil dan terfragmentasi ini menyulitkan efisiensi rantai dingin, menaikkan biaya operasi per ton, dan membatasi kemampuan menyerap lonjakan hasil tangkapan pada musim puncak. Dengan kata lain, KTI tidak kekurangan jumlah unit — yang langka adalah skala.

Gambar 5. Ketimpangan Internal KTI - Kapasitas *Cold Storage* 16 Provinsi di KTI, Agregasi Tingkat Provinsi (ton)



Sumber: Portal Data KKP (2026)

Ketimpangan bahkan berlanjut di dalam KTI sendiri. Tiga provinsi teratas — Sulawesi Utara (44.270 ton), Maluku (30.941 ton), dan Bali (26.360 ton) — menguasai lebih dari separuh kapasitas cold storage se-KTI, sementara Sulawesi Barat hanya memiliki 59 ton dari dua unit dan wilayah daratan Papua nyaris kosong kapasitasnya. Sulawesi Selatan sendiri, meski merupakan sentra rumput laut terbesar nasional, hanya menempati peringkat keempat di KTI dan kesepuluh secara nasional, dengan 19.188 ton dari 97 unit.

2. Tekanan pada Modal Alam

Persoalan hilirisasi perikanan di KTI tidak hanya menyangkut infrastruktur buatan manusia, tetapi juga modal alam yang menopang produksi itu sendiri dan kini mulai terancam. Pada ekosistem mangrove, lima provinsi KTI — Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat — memiliki lebih dari 70% kawasan mangrove dalam kondisi

sedang atau rusak, dengan Sulawesi Tenggara sebagai yang terparah (78,8% rusak). Pola serupa terjadi pada terumbu karang, dengan Sulawesi Tenggara kembali menjadi yang terparah (72,0% rusak), diikuti Gorontalo (45,0%). Nusa Tenggara Barat menunjukkan pengecualian menarik — relatif sehat pada terumbu karang (hanya 0,2% rusak) meski parah pada mangrove, sebuah temuan yang menegaskan bahwa setiap ekosistem pesisir perlu dibaca secara terpisah, tidak dapat digeneralisasi.

Yang lebih mengkhawatirkan, di Sulawesi kerusakan mangrove dan terumbu karang terjadi bersamaan pada provinsi yang sama: Sulawesi Tenggara mencatat mangrove rusak 78,8% berbarengan dengan karang rusak 72,0%; pola serupa terlihat di Sulawesi Selatan (49,3% dan 39,8%), Gorontalo (37,2% dan 45,0%), serta Sulawesi Barat (30,0% dan 15,3%). Mangrove dan terumbu karang adalah tempat pemijahan dan asuhan ikan, penahan abrasi, sekaligus penyimpan karbon biru. Ketika kedua ekosistem penopang produksi ini rusak secara bersamaan, sementara infrastruktur rantai dingin untuk menambah nilai juga tipis, hilirisasi perikanan di KTI tertekan dari hulu sekaligus dari hilir — sebuah beban ganda yang menuntut perhatian kebijakan yang terintegrasi.

3. Sejalan dengan Sejumlah Fakta Empiris

Temuan-temuan di atas selaras dengan sejumlah kajian empiris internasional dan nasional. Terkait rantai dingin, FAO dalam laporan *The State of World Fisheries* (2022) mencatat bahwa sekitar 27% produksi ikan dunia hilang sebelum sampai ke konsumen, dengan kehilangan pascapanen di negara berkembang berkisar 20 hingga 75%, dan lemahnya rantai dingin sebagai pemicu utamanya. Terkait modal alam, penelitian Aburto-Oropeza dan kawan-kawan yang dipublikasikan di PNAS (2008) menunjukkan bahwa hasil tangkapan meningkat seiring kelimpahan mangrove, dengan spesies terkait mangrove menyumbang 32% pendaratan perikanan skala kecil, bernilai sekitar 37.500 dolar AS per hektar tepi mangrove per tahun. Terkait hilirisasi, kajian industri rumput laut Indonesia yang dipublikasikan di jurnal *Aquaculture* (2021 dan 2023) menemukan bahwa sekitar 90% produksi rumput laut Indonesia berasal dari Kawasan Timur, namun sekitar 65% di antaranya diekspor sebagai rumput laut kering mentah — nilai tambah karagenan justru tercipta di luar negeri, bukan di dalam negeri, apalagi di kawasan penghasilnya sendiri. Ketiga rujukan ini memperkuat bahwa pola yang terjadi di KTI bukanlah gejala lokal semata, melainkan konsisten dengan literatur global mengenai kesenjangan rantai nilai perikanan di negara berkembang.

Seluruh temuan di atas dapat dirangkum dalam tiga poin yang saling terkait. Produksi ada di Timur — Wilayah Pengelolaan Perikanan paling produktif seperti Laut Banda, Arafura, Sulawesi, dan Maluku berada di KTI, namun infrastruktur rantai dinginnya justru paling tipis. Susut pascapanen tinggi — tanpa cold storage yang memadai, hasil tangkapan cepat menurun mutunya, dan susut serta penurunan kualitas ini menekan harga jual di tingkat nelayan, tepat di sentra produksi. Nilai tambah lari ke Barat — ikan dikirim mentah ke Jawa untuk diproses dan disimpan, sehingga pengolahan, lapangan kerja, dan margin keuntungan terkonsentrasi jauh dari tempat sumber dayanya berada. Inti masalahnya dapat dirumuskan dalam satu kalimat: infrastruktur rantai dingin tidak mengikuti peta sumber daya, dan inilah penghambat utama hilirisasi perikanan di Kawasan Timur Indonesia.

IV. ARAH KEBIJAKAN DAN KERANGKA IMPLEMENTASI

Mempersempit jurang kapasitas — 81,5% di Barat berbanding 18,5% di Timur, dengan rata-rata kapasitas per unit 213,4 ton di KTI berbanding 486,1 ton di KBI — merupakan prasyarat bagi hilirisasi perikanan dan pemerataan nilai tambah bagi nelayan di Kawasan Timur Indonesia. Atas dasar itu, empat arah kebijakan yang saling melengkapi diusulkan.

Pertama, konsolidasi kapasitas: memprioritaskan pembangunan cold storage berskala besar di hub-hub produksi utama KTI, seperti Bitung, Ambon, Kendari, Sorong, dan Merauke, alih-alih menambah unit-unit kecil yang tercerai-berai. *Kedua*, energi dan keandalan listrik: mengingat cold storage adalah infrastruktur padat energi, pasokan listrik yang andal — termasuk opsi energi terbarukan — menjadi penentu kelayakan operasional di daerah-daerah terpencil. *Ketiga*, integrasi logistik tol laut: menyambungkan cold storage dengan jadwal tol laut dan pelabuhan perikanan, agar produk dingin dapat mengalir efisien dari Timur ke pasar. *Keempat*, pembiayaan campuran atau *blue financing*: menggabungkan APBN/APBD, pembiayaan biru, dan investasi swasta untuk menutup kesenjangan modal infrastruktur di KTI.

Dalam kerangka yang lebih operasional pada tingkat kelompok masyarakat pelaku usaha perikanan dan kelautan di KTI, berikut disajikan kerangka implementasi peningkatan nilai tambah kegiatan usaha nelayan tangkap berbasis kelompok. Penguatan basis pertumbuhan ekonomi daerah di KTI dapat diakselerasi melalui sektor perikanan tangkap dengan pendekatan peningkatan nilai tambah yang dikelola oleh kelompok masyarakat nelayan. Kerangka implementasi ini dirancang untuk menjawab permasalahan rendahnya nilai tambah, lemahnya rantai pasok, dan tingginya losses pasca tangkap yang selama ini dialami nelayan. Dengan menempatkan kelompok masyarakat sebagai subjek utama, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat inklusif karena melibatkan nelayan kecil, dan berkelanjutan karena memperhatikan aspek ekologi dan kelembagaan.

Implementasi dimulai dari tahap hulu di wilayah penangkapan. Pada tahap ini kelompok nelayan didorong untuk menerapkan praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berbasis ekosistem. Penggunaan teknologi konservasi produktif seperti H@RI - Habitat Rumah Ikan menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan stok ikan dan habitat. Selain itu, kapasitas kelompok perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan terkait pemahaman *fish target and behaviour*, kondisi oseanografi, dan karakteristik habitat. Dengan basis pengetahuan tersebut, aktivitas penangkapan menjadi lebih terarah, efisien dalam penggunaan BBM, dan meminimalkan *by-catch*. Pendekatan ini memastikan bahwa basis produksi tidak mengorbankan daya dukung lingkungan untuk jangka panjang.

Selanjutnya pada tahap antara di Pelabuhan Pendaratan Ikan - PPI dan *Fishing Base*, peran kelompok masyarakat diperkuat melalui pengelolaan bersama. Di PPI, kegiatan bongkar muat, *fish handling* dan sanitasi perlu dilakukan sesuai standar untuk menjaga mutu awal produk. Penyediaan sarana penunjang seperti BBM, air bersih, dan pabrik es juga harus dikelola secara kolektif oleh kelompok agar efisien dan terjangkau. Sementara itu, *Fishing Base* difungsikan sebagai pusat kegiatan ekonomi kelompok. Di titik ini dilakukan pengumpulan hasil tangkapan, diseminasi informasi harga, dan koordinasi logistik. Penguatan fishing base akan memutus ketergantungan nelayan pada tengkulak dan meningkatkan posisi tawar kelompok dalam rantai nilai.

Tahap distribusi dan mobilisasi merupakan simpul penting untuk menjaga kualitas dan efisiensi. Untuk itu kelompok nelayan perlu membentuk unit usaha transportasi bersama yang dilengkapi sistem rantai dingin. Penggunaan ice 0°C, palka, dan *styrofoam* menjadi standar minimal dalam setiap pengiriman. Tiga indikator utama yang harus dipenuhi adalah: menjaga mutu selama perjalanan, mengendalikan waktu tempuh, dan efisiensi rute serta BBM. Pembangunan konektivitas fisik dan informasi antara Fishing Base - Industri Pengolahan - Pasar juga harus dibangun oleh kelompok. Dengan jaringan ini, produk dapat didistribusikan lebih cepat ke pasar yang lebih luas dan harga di tingkat produsen menjadi lebih stabil.

Pada tahap hilir di perusahaan industri perikanan dan pasar, kelompok didorong untuk naik kelas dari sekadar produsen bahan baku menjadi pelaku usaha pengolahan. Hal ini dapat dilakukan melalui kemitraan dengan industri atau pembentukan badan usaha milik kelompok seperti Koperasi dan BUMDes/BUMD. Kegiatan *fishery processing* yang dilakukan akan menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi. Pemasaran diarahkan pada dua segmen: pasar domestik meliputi pasar ikan, restoran/warung, dan rumah tangga, serta pasar ekspor yang mensyaratkan pemenuhan standar karantina dan *quality control by species, by size, by quality*. Dengan demikian, produk perikanan KTI memiliki daya saing dan akses pasar yang lebih luas. Keberhasilan seluruh rangkaian ini sangat ditentukan oleh prinsip kolaborasi hulu-hilir. Diperlukan sinergi antara kelompok nelayan, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, swasta, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan. Penguatan kelembagaan kelompok menjadi fondasi agar nelayan tidak hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai pemilik usaha. Dari sisi kebijakan, Pemerintah Daerah perlu menyediakan insentif, infrastruktur, dan regulasi yang berpihak. Dengan kerangka implementasi ini, diharapkan akan tercapai empat hasil utama. *Pertama*, nilai tambah meningkat melalui hilirisasi dan pengurangan losses. *Kedua*, mutu terjaga sepanjang rantai melalui rantai dingin dan penanganan yang baik. *Ketiga*, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penangkapan berbasis ekosistem. *Keempat*, efisiensi dan daya saing meningkat melalui efisiensi biaya dan akses pasar. Pada akhirnya, model ini akan mewujudkan usaha nelayan tangkap di KTI yang berdaya, berkeadilan, dan menjadi basis pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

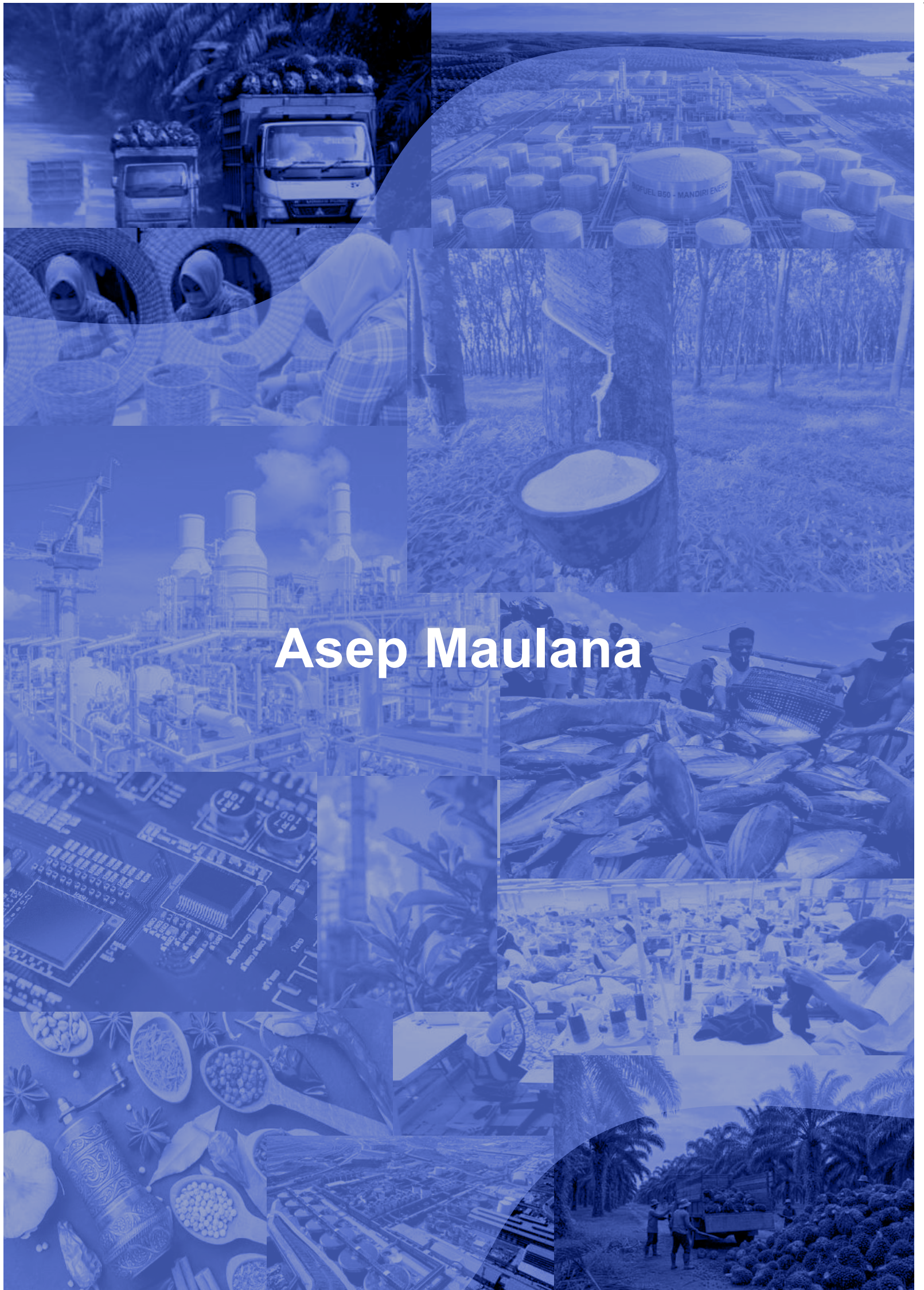
V. PENUTUP: MENYATUKAN KEMBALI DENGAN KERANGKA SUMITRONOMICS

Seluruh temuan dan rekomendasi ini pada akhirnya kembali pada kerangka besar SUMITRONOMICS yang menjadi landasan kajian. Pada pilar hilirisasi SDA, dibutuhkan inovasi teknologi usaha perikanan kelautan dari hulu ke hilir. Pada pilar ekonomi kerakyatan, nelayan lokal harus menjadi aktor utama, dan daerah harus menjadi basis utama ekonomi nasional — bukan sekadar penyuplai bahan mentah bagi kawasan lain. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi 8% yang berkelanjutan, tiga hal harus terwujud sekaligus: efisiensi dan daya saing, nilai tambah dan mutu yang terjaga sepanjang rantai, serta sistem produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan — mengingat kondisi mangrove dan terumbu karang yang telah dipaparkan sebelumnya. Semua ini memerlukan dukungan infrastruktur ekosistem usaha hulu-hilir yang didanai APBN, APBD, dan investasi: mulai dari penangkapan dan budidaya, pelabuhan perikanan dengan cold storage berskala di hub produksi, mobilisasi dan transportasi dengan karantina kendali mutu, hingga penguatan perusahaan industri perikanan di kawasan timur itu sendiri. Dengan demikian, hilirisasi kelautan, perikanan, dan agro-maritim di KTI bukan sekadar

wacana, melainkan agenda strategis yang terukur, berbasis data, dan selaras dengan cita-cita besar Indonesia Maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburto-Oropeza, O., Ezcurra, E., Danemann, G., Valdez, V., Murray, J., & Sala, E. (2008). Mangroves in the Gulf of California increase fishery yields. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105(30), 10456–10459. <https://doi.org/10.1073/pnas.0804601105>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). *Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan menurut Lapangan Usaha (Kategori A: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan—Subsektor Perikanan)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2022). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2022: Towards Blue Transformation*. Rome: FAO. <https://doi.org/10.4060/cc0461en>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2024). *Kelautan dan Perikanan dalam Angka / Satu Data Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2021). *Peta Mangrove Nasional Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Langford, A., Zhang, J., Waldron, S., Julianto, B., Siradjuddin, I., Neish, I., & Nuryartono, N. (2022). Price analysis of the Indonesian carrageenan seaweed industry. *Aquaculture*, 550, 737828. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2021.737828>
- Langford, A., Turupadang, W., & Waldron, S. (2023). Interventionist industry policy to support local value-adding: Evidence from the Eastern Indonesian seaweed industry. *Marine Policy*, 151, 105561. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105561>



Asep Maulana

Transformasi agroindustri Jawa Barat: Dari Petani dan UMKM Pangan menuju Ekonomi Rakyat yang Produktif dan Berdaya Saing

Latar Belakang

Jawa Barat sebagai salah satu lumbung pangan nasional

Dominasi petani kecil & UMKM pangan

Kontribusi besar terhadap ekonomi daerah

Tantangan Utama

Skala usaha kecil & tradisional Akses teknologi terbatas

Rantai distribusi panjang

Daya saing produk rendah

Akses pembiayaan terbatas

Produktivitas yang relatif rendah.

Ketergantungan pada penjualan bahan mentah.

Akses pasar yang terbatas.

Keterbatasan teknologi dan inovasi.

Rendahnya nilai tambah produk.



Pilar Transformasi Agroindustri Jawa Barat

1. Modernisasi Produksi Pertanian
2. Hilirisasi
3. Penguatan UMKM Pangan
4. Agroindustri berbasis Kawasan
5. Digitalisasi
6. Agroindustri Hijau
7. Pendekatan Ekonomi Rakyat



1. Modernisasi Pertanian

Transformasi dimulai dari peningkatan produktivitas di tingkat petani melalui:

- Mekanisasi pertanian.
 - Pertanian presisi berbasis digital.
 - Smart farming dan Internet of Things (IoT).
 - Penggunaan benih unggul.
 - Pengelolaan lahan berkelanjutan.
-



2. Hilirisasi Produk Unggulan

Komoditas	Produk Primer	Produk Hilir
Singkong	Umbi segar	Mocaf, tapioka premium, snack
Kopi	Biji kopi	Specialty coffee
Susu	Susu segar	Yogurt, keju, es krim
Mangga	Buah segar	Puree, jus, selai
Jagung	Jagung pipilan	Pakan ternak, tepung

3. Penguatan UMKM Pangan

- **Sertifikasi & Legalitas:** Fasilitasi pengurusan sertifikasi Halal, BPOM, PIRT, HACCP, hingga ISO 22000.
- **Program Pendukung:** Pembentukan Rumah Kemasan (untuk memperbaiki *branding*), Inkubator Bisnis Agro, Digital Marketing Center, serta *Export Coaching Program* (pendampingan ekspor).

4. Agroindustri Berbasis Kawasan

- **Kawasan Bandung Raya:** Difokuskan pada industri produk olahan pangan, kemasan (*packaging*), dan sistem rantai dingin (*cold chain*).
- **Priangan Timur:** Difokuskan pada pusat perkebunan kopi, teh, susu, dan hortikultura.
- **Pantura (Pantai Utara):** Menjadi pusat industrialisasi beras premium, jagung, dan sektor perikanan.
- **Cirebon-Indramayu:** Sentra pengolahan mangga, garam, dan udang.
- **Sukabumi-Cianjur:** Fokus pada produksi teh, sayuran, dan susu.

5. Digitalisasi

- **Implementasi di Hulu:** Penerapan *smart farming* berbasis Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI) untuk memprediksi masa panen.
- **Implementasi di Hilir:** Integrasi platform digital yang menghubungkan langsung:
Petani → Marketplace/Agregator → Logistik Terintegrasi → Konsumen
- **Transparansi:** Penggunaan teknologi *blockchain* untuk memastikan ketertelusuran produk (*traceability*).

6. Agroindustri Hijau



Prinsip Utama: Penerapan *circular economy* dan industri *zero waste* (memanfaatkan limbah agroindustri menjadi kompos atau bioenergi).



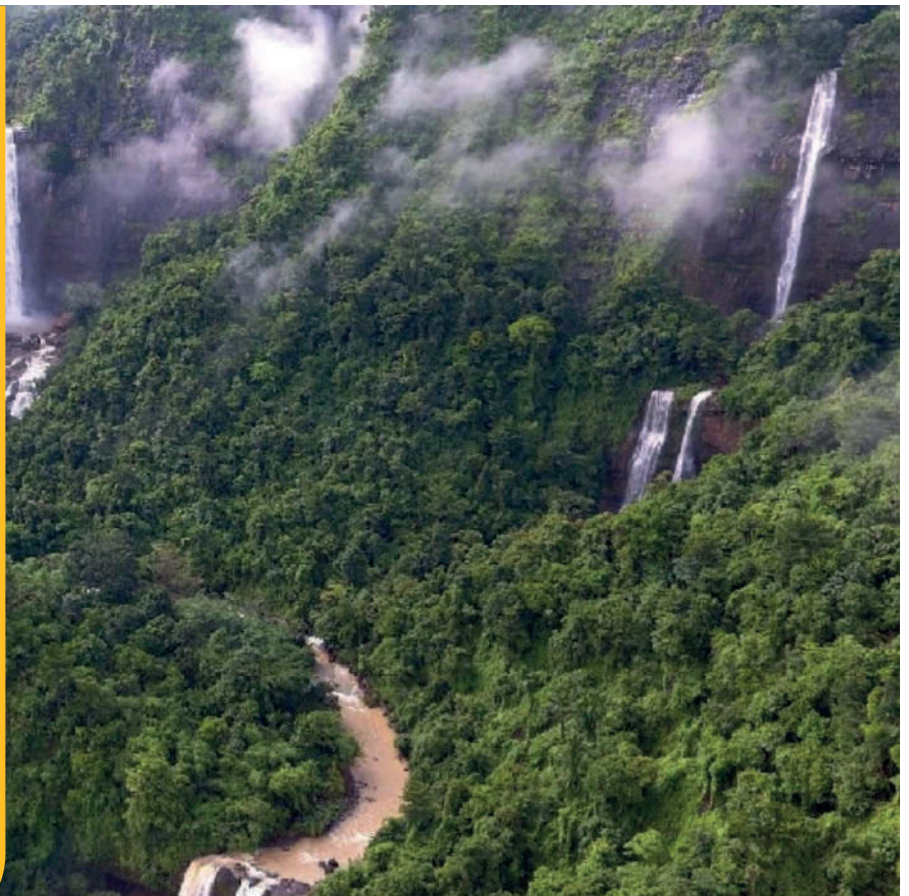
Energi & Emisi: Penggunaan energi bersih (seperti panel surya) di fasilitas pengolahan, serta penerapan metode *carbon farming* untuk menekan emisi karbon sektor pertanian.

7. Pendekatan Ekonomi Rakyat

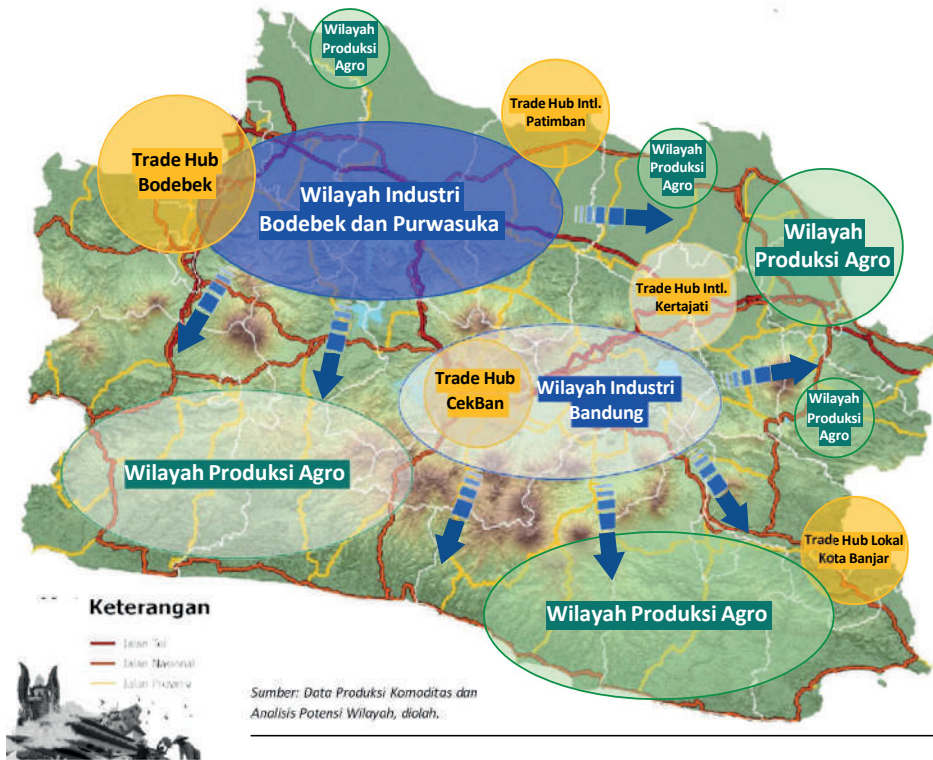
Aktor Utama: Petani, nelayan, peternak, kelompok perempuan, pemuda/agropreneur muda, Koperasi, dan BUMDes.

Pendekatan: Menggunakan *Inclusive Business Model* (Model Bisnis Inklusif), di mana Koperasi Modern dan BUMDes bertindak sebagai agregator (pengepul dan pengelola) hasil produksi rakyat guna meningkatkan daya tawar pasar.

DATA EMPIRIK
PENGEMBANGAN
AGROINDUSTRI
JABAR
Menurut BAPPEDA
JABAR



PEMBAGIAN PERAN ANTAR WILAYAH DALAM PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI



Fokus Komoditas Agro



Sumber: RPJMD Jawa Barat 2025-2029 dan FGD Hilirisasi Jawa Barat 2026, diolah.

- Terdapat 3 peran utama, yaitu wilayah industri eksisting, wilayah produksi agri, dan *trade-hub*.
- Wilayah industri eksisting** menjadi sumber utama dalam memacu pertumbuhan Agroindustri di wilayah produksi agro, melalui:
 - Permintaan atas komoditi agro (*link and match*)
 - Transfer teknologi, dan
 - Spillover effect* dari pertumbuhan dan ekspansi wilayah industri
- Wilayah produksi agro** berperan sebagai penyedia komoditas agro unggulan, sekaligus berusaha untuk mengembangkan agroindustri di dalamnya.
- Trade Hub** berperan sebagai channel utama pemasaran komoditas Agroindustri ke pasar dalam dan luar negeri yang juga memastikan kemudahan distribusi antar daerah.

SKEMA PENGEMBANGAN AGRO INDUSTRI PERIKANAN DAN KELAUTAN

Lokasi Prioritas



Total Produksi Garam Jabar → 211 Ribu Ton	
Kab. Cirebon	: 34,83 Ribu ton
Kab. Indramayu	: 169,15 Ribu ton
Kab. Karawang	: 6,88 Ribu ton

Total Produksi Tilapia Jabar → 5,5 Ribu Ton	
Kab. Purwakarta	: 0,92 Ribu Ton
Kab. Indramayu	: 2,75 Ribu Ton
Kab. Sumedang	: 0,80 Ribu Ton

Total Produksi Rajungan Jabar → 9,99 Ribu Ton	
Kab. Cirebon	: 5,80 Ribu Ton
Kab. Karawang	: 2,96 Ribu Ton
Kab. Indramayu	: 0,93 Ribu Ton

Sumber: DPK Jabar (2024)

Keterangan

- Garam
- Rajungan
- Tilapia
- Bahan Baku
- Industri Pengolahan
- Hub Perdagangan

Fokus Produk Turunan

Rerata Harga Bahan Baku	Produk Turunan	Potensi Nilai Tambah	Potensi Negara Tujuan Ekspor
Rp500-2.500/kg	Garam Konsumsi, Garam Industri, Garam Penyamakan Kulit, Garam Water Treatment, Garam Pengasinan Ikan, Garam Pertanian, Garam Kimia, Garam Kosmetik, Garam Farmasi	Rp6.000-11.000/kg (naik 8,5 - 42 kali lipat)	Thailand, Malaysia, Singapura
Rp28.000/kg	Fish Patties, Frozen Food, Makanan Siap Saji, Abon Ikan Nila, Keripik kulit	Rp50.000-150.000/kg (naik 1,7 - 5,4 kali lipat)	Amerika Serikat, Italia, Spanyol
Rp75.000/kg	Rajungan Rebus Dingin, Rajungan Pasteurisasi Kaleng, Khitosan, Tepung Cangkang Rajungan	Rp75.000-205.000/kg (naik 1 - 2,7 kali lipat)	Amerika Serikat, Jepang, Belanda

Sumber: Matriks Data Dinas Hulu dan Dinas Hilir Provinsi Jawa Barat, diolah (2026).



UPSTREAM

- Pemutakhiran data jumlah nelayan dan petambak
- Pemutakhiran data jumlah produksi garam, tilapia, dan rajungan
- Penerapan teknologi untuk meningkatkan produksi dan kualitas
- Bimbingan teknis produksi garam, tilapia, dan rajungan
- Pemberian asuransi usaha petambak dan nelayan



MIDSTREAM

- Pemutakhiran data jumlah IKM dan Koperasi serta jumlah kebutuhan garam, tilapia, dan rajungan standar industri
- Fasilitasi kemitraan produsen dengan industri pengolahan garam, rajungan, tilapia, dan garam
- Pembangunan/revitalisasi gudang penyimpanan hasil produksi
- Optimalisasi logistik dan distribusi dengan *cold storage & cold chain*
- Penerapan teknologi pengolahan
- Bimbingan teknis pengolahan
- Fasilitasi sertifikasi standarisasi industri (Halal, SNI, BPOM, HACCP) dan fasilitasi kemasan
- Penguatan manajerial dan kelembagaan



DOWNSTREAM

- Penjualan hasil produksi ke industri pengguna (B2B) melalui program kemitraan dan pembukaan akses pasar dalam dan luar negeri
- Pameran hasil produksi
- Rencana investasi



Kabupaten Cirebon

Kabupaten Indramayu

Kabupaten Karawang

Kabupaten Sumedang

Kabupaten Purwakarta



Kabupaten Bekasi

Kota Cirebon

Kabupaten Bogor



Kabupaten Bandung

Kabupaten Indramayu

Kabupaten Karawang



Kota Cirebon

Kabupaten Sumedang

Kota Bekasi

Kota Depok

Sumber: Hasil FGD Hilirisasi dan Data Produksi Komoditas, diolah (2026).

SKEMA PENGEMBANGAN AGRO INDUSTRI SEKTOR PERTANIAN

Lokasi Prioritas



Fokus Produk Turunan

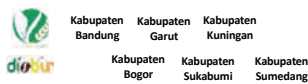
Rerata Harga Bahan Baku	Produk Turunan	Potensi Nilai Tambah	Potensi Negara Tujuan Ekspor
Rp24.000/kg	Kapulaga Kering (Simplicia Lokal/Jawa), Bubuk Kapulaga (Cardamom Powder), Minyak Atsiri Kapulaga (Essential Oil)	Rp60.000-400.000/kg (naik 3 - 18 kali lipat)	Saudi Arabia, Nigeria, Filipina
Rp2.500-20.000/kg	Jahe bubuk, Simplicia jahe kering, Minyak atsiri jahe	Rp60.000-1.000.000/kg (naik 24 - 50 kali lipat)	Korea Selatan, Taiwan, Filipina
Rp16.400/kg	Lengkuas Kering (Simplicia Iris), Lengkuas Bubuk (Galangal Ground), Bumbu Ayam Goreng Lengkuas (Instan), Minyak Atsiri Lengkuas (Galangal Oil)	Rp25.000-214.000/kg (naik 2 - 13 kali lipat)	Saudi Arabia, Nigeria, Filipina
Rp2.145/kg	Onggok - asam sitrat, Gaplek - pellet (manioc), Tepung ubi kayu - bahan makanan, Tapioka - maltosa - senyawa kimia (glukosa, fruktosa, asam organik, sorbitol), Makanan ringan (snack), Mocaf	Rp2.000-40.000/kg (naik 18 kali lipat)	Malaysia, Jepang, Timor Leste
Rp25.000/kg	Tepung / Pati Ubi Jalar (Putih/Ungu), Bubuk Minuman Instan Premium (Ube / Taro)	Rp40.000-340.000/kg (naik 1,5 - 14 kali lipat)	Singapura, Filipina, Malaysia

Sumber: Matriks Data Dinas Hulu dan Dinas Hilir Provinsi Jawa Barat, diolah (2026).



UPSTREAM

- Pemutakhiran data jumlah petani
- Pemutakhiran data jumlah produksi Kapulaga, Jahe, Laos, Singkong, dan Ubi Jalar
- Penerapan teknologi untuk meningkatkan produksi dan kualitas
- Bimbingan teknis produksi Kapulaga, Jahe, Laos, Singkong, dan Ubi Jalar
- Pemberian asuransi usaha tani

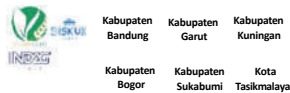


Sumber: Hasil FGD Hilirisasi dan Data Produksi Komoditas, diolah (2026).



MIDSTREAM

- Pemutakhiran data jumlah IKM dan Koperasi serta jumlah kebutuhan Kapulaga, Jahe, Laos, Singkong, dan Ubi Jalar standar industri
- Fasilitasi kemitraan produsen dengan industri pengolahan kapulaga, Jahe, Laos, Singkong, dan Ubi Jalar
- Pembangunan/revitalisasi gudang penyimpanan hasil produksi
- Optimalisasi logistik dan distribusi
- Penerapan teknologi pengolahan
- Bimbingan teknis
- Fasilitasi sertifikasi standarisasi industri (Halal, SNI, BPOM, HACCP) dan fasilitasi kemasan
- Penguatan manajerial dan kelembagaan



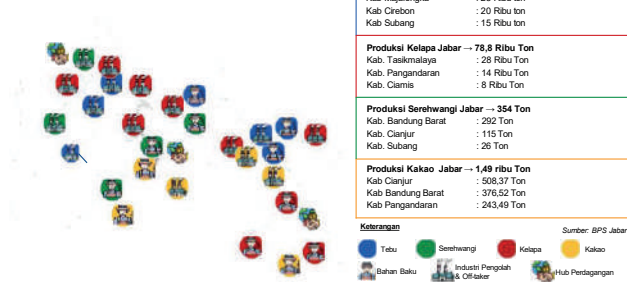
DOWNSTREAM

- Penjualan hasil produksi ke industri pengguna (B2B) melalui program kemitraan dan pembukaan akses pasar dalam dan luar negeri
- Pameran hasil produksi
- Pengembangan trade hub lokal



SKEMA PENGEMBANGAN AGRO INDUSTRI SEKTOR PERKEBUNAN

Lokasi Prioritas



Fokus Produk Turunan

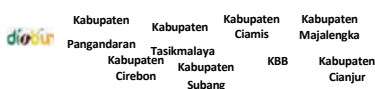
Rerata Harga Bahan Baku	Produk Turunan	Potensi Nilai Tambah	Potensi Negara Tujuan Ekspor
Rp5.000/kg	Pakan Ternak, Gula Kristal Putih (GKP), Pupuk, Gula Cair, Gula Padat, Bioetanol, Bahan Bakar, Pulp Selulosa.	Rp12.000-16.000/kg (naik 2 - 3 kali lipat)	Vietnam, Thailand, Filipina
Rp5.176/kg	Virgin Coconut Oil, Santan, Tepung Kelapa, Minyak Kelapa (dari Kopra), Nata de coco, Karbon Aktif, Coconut Water Based Drink, Coco Peat, Arang Tempurung, Dessicated coconut, Gula Semut	Rp16.000-170.000/kg (naik 3 - 35 kali lipat)	China, Sri Lanka, Rusia
Rp25.000/kg	Minyak Atsiri Sereh Wangi (Citronella Oil), Sabun Batang Sereh, Karbol Sereh (Pembersih Lantai), Lilin Aromaterapi / Disinfektan	Rp70.000-380.000/kg (naik 3 - 15 kali lipat)	Amerika Serikat, Malaysia, UEA
Rp70.765/kg	Cokelat batang, Bubuk kakao, Minuman cokelat instan, Selai cokelat, Snack Cokelat	Rp100.000-240.000/kg (naik 1,5 - 3,4 kali lipat)	India, China, Russia

Sumber: Matriks Data Dinas Hulu dan Dinas Hilir Provinsi Jawa Barat, diolah (2026).



UPSTREAM

- Pemutakhiran data jumlah pekebun
- Pemutakhiran data jumlah produksi
- Penerapan teknologi untuk meningkatkan produksi dan kualitas
- Bimbingan teknis produksi
- Pemberian asuransi usaha tani



Sumber: Hasil FGD Hilirisasi dan Data Produksi Komoditas, diolah (2026).



MIDSTREAM

- Pemutakhiran data jumlah IKM dan Koperasi serta jumlah kebutuhan standar industri
- Fasilitasi kemitraan produsen dengan industri pengolahan
- Pembangunan/revitalisasi gudang penyimpanan hasil produksi
- Optimalisasi logistik dan distribusi
- Penerapan teknologi pengolahan
- Bimbingan teknis
- Fasilitasi sertifikasi standarisasi industri (Halal, SNI, BPOM, HACCP) dan fasilitasi kemasan
- Penguatan manajerial dan kelembagaan



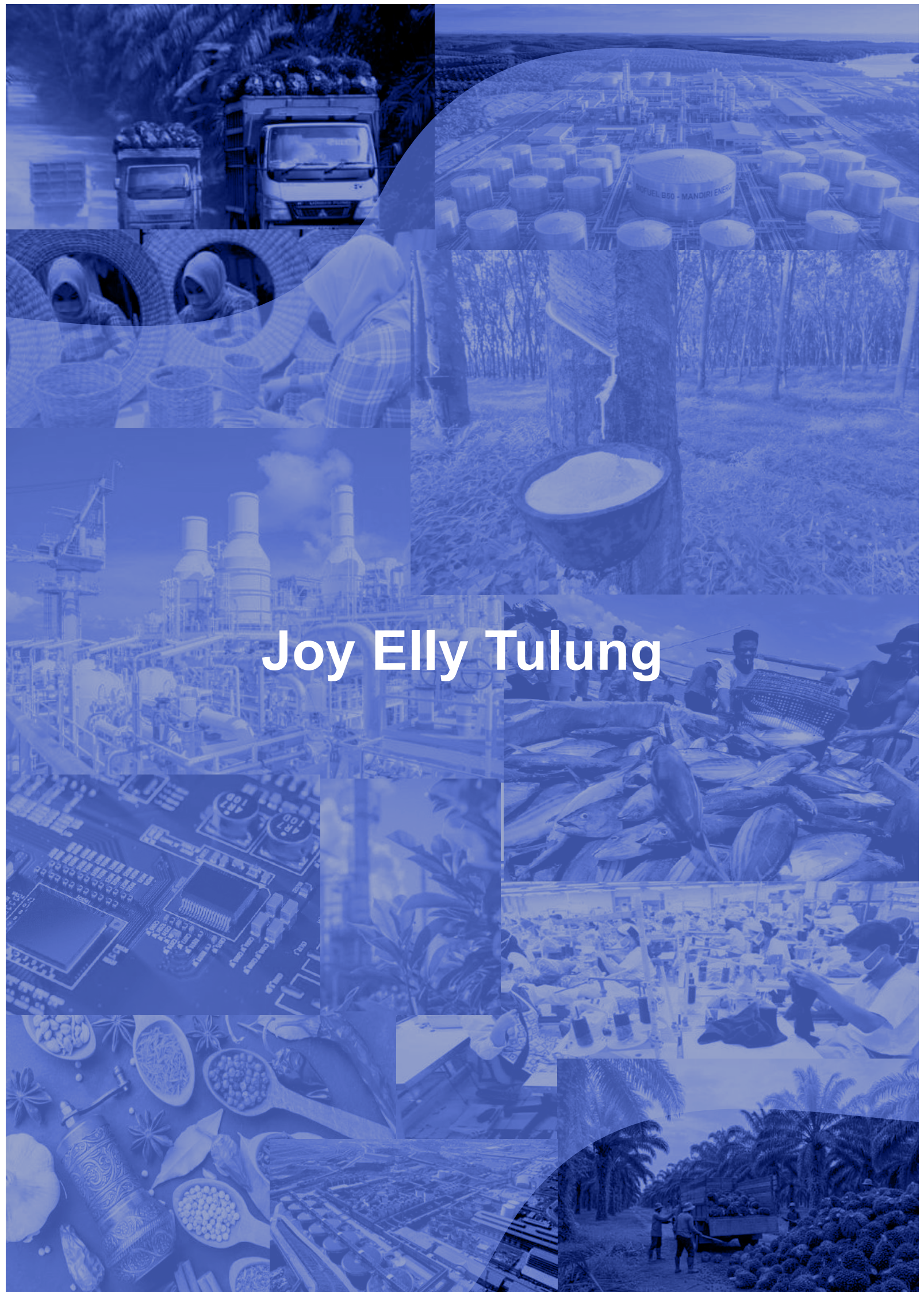
DOWNSTREAM

- Penjualan hasil produksi ke industri pengguna (B2B) melalui program kemitraan dan pembukaan akses pasar dalam dan luar negeri
- Pameran hasil produksi
- Pengembangan trade hub lokal





Hatur Nuhun
asep.mulyana@unpad.ac.id



Joy Elly Tulung

Pertumbuhan Inklusif

Arsitektur Ekonomi Sulawesi Utara di Era Fragmentasi Global

Refleksi Kebijakan Ekonomi dari Beranda Pasifik Indonesia

Sebuah perspektif makro, struktural, dan rakyat-sentris untuk menjawab tantangan zaman.

Joy Elly Tulung

Guru Besar dalam ilmu Manajemen Keuangan Tata Kelola Perusahaan, Perbankan dan Lembaga Keuangan



Pekerjaan dan Jabatan

- Dosen Tetap Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Sam Ratulangi (2003 – Sekarang)
- Profesor/Guru Besar dalam ranting ilmu/kepakaran Manajemen Keuangan Tata Kelola Perusahaan, Perbankan dan Lembaga Keuangan
- Asisten Kepala Laboratorium Magister Manajemen (2009-2011)
- Kepala Laboratorium Jurusan Manajemen (2016 – 2020)
- Anggota Senat FEB UNSRAT (2017 – 2021) & (2025-2030)
- Koordinator Prodi Internasional Business Administration (IBA) FEB UNSRAT (2019 – 2020)
- Asisten Koordinator/Sekretaris Program Studi Ilmu Doktor Manajemen (2020 – 2022)
- Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (2025 (Januari) – 2025 (Juni))
- Koordinator Prodi Magister Manajemen Program Pascasarjana UNSRAT (2025 (Juni) – sekarang)

Pendidikan

1. Sarjana Ekonomi, 1997 – 2003, Fekon UNSRAT
2. MSc in International Business and Management, 2007 – 2008, FEB University of Groningen (The Netherland)
3. PhD in Strategy, Project and Program Management, 2011 – 2016, SKEIMA Business School (France)

Organisasi

1. Ketua ISEI Cabang Manado Sulawesi Utara 2022 – 2025, 2025 - 2028
2. Ketua FMI Wilayah Sulawesi Utara 2022 – 2026 & 2026 - 2030
3. Bendahara Umum PP IAPI (Ikatan Alumni Prancis Indonesia) 2022 -2026
4. Koordinator Forum Kajian Pembangunan (2024-sekarang)
5. Indonesian Regional Science Association (IRSA) – Perwakilan UNSRAT (2016 – sekarang)
6. Indonesian Finance Association (2016-sekarang)
7. Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA)
8. Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi)

Prestasi

1. Top 100 Indonesian Economist 2023 - 2025 Versi IDEAS
2. Sarasehan 100 Ekonom INDEF 2023 dan 2025
3. Top 100 Ekonom AD Scientific 2023 - 2025
4. Dosen Berprestasi 1 UNSRAT 2019
5. Dosen Berprestasi 3 UNSRAT 2017
6. Reviewer LPS Call for Research 2021 dan 2023, 2024, 2025
7. Reviewer Karisma OJKi 2023, 2024



Tidak Ada Makan Siang Gratis dalam Kebijakan Ekonomi

Sebagai ekonom, kita memahami bahwa setiap kebijakan adalah soal *trade-offs*. Pertanyaan yang lebih penting bukanlah "seberapa tinggi angka pertumbuhan kita?" melainkan **siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya?**

Nelayan di Likupang, pelaku UMKM di Manado, dan buruh pelabuhan di Bitung adalah tolok ukur sejati dari keberhasilan sebuah kebijakan ekonomi. Itulah esensi dari **Pertumbuhan Inklusif** — pertumbuhan yang tidak hanya memperbesar kue nasional, tetapi memastikan irisan kue itu sampai ke tangan yang selama ini terabaikan.

"Economic policy is a matter of trade-offs. Desain arsitektur ekonomi yang baik adalah yang memastikan setiap kelompok masyarakat dapat naik kelas bersama."



Agenda Diskusi Hari Ini

01

Situasi Ekonomi Global & Nasional

Era Fragmentasi Besar dan implikasinya bagi Solut

02

Relevansi Sumitronomics

Pilar pemikiran strukturalis untuk konteks kekinian

03

Strategi Hilirisasi Berbasis Rakyat

Blue & Green Downstreaming untuk Sulawesi Utara

04

Rekomendasi Kebijakan Konkrit

Empat langkah menuju pertumbuhan 8% inklusif

MOMENTUM EKONOMI SULAWESI UTARA



5,66%

Pertumbuhan 2025

Ekonomi Sulawesi Utara tumbuh solid sepanjang tahun 2025



9,97%

Industri Pengolahan

Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi di 2025



28,42%

Ekspor Luar Negeri

Pertumbuhan ekspor yang sangat signifikan di 2025



20,85%

Akomodasi & Kuliner

Sektor tumbuh tertinggi pada triwulan I-2026



Sulawesi Utara memiliki potensi besar pada industri pengolahan, UMKM, pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif.

Saatnya bergerak bersama untuk pertumbuhan yang inklusif & berkelanjutan!



PERBANKAN

MITRA STRATEGIS UNTUK PERTUMBUHAN STARTUP & UMKM SULAWESI UTARA



PEMBIAYAAN



PENDAMPINGAN



DIGITALISASI



KOLABORASI

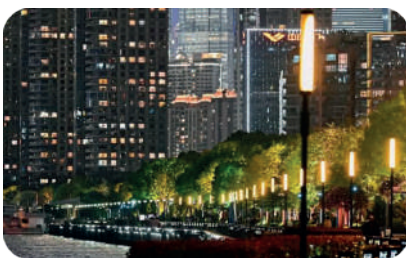
Navigasi di Tengah Badai: Era Fragmentasi Besar

Lanskap ekonomi global telah bergeser fundamental. Era globalisasi penuh telah digantikan oleh **The Era of Great Fragmentation** — di mana perdagangan semakin bergerak ke arah *friend-shoring* dan *near-shoring*. Di tengah fragmentasi ini, posisi Sulawesi Utara justru menjadi semakin strategis.



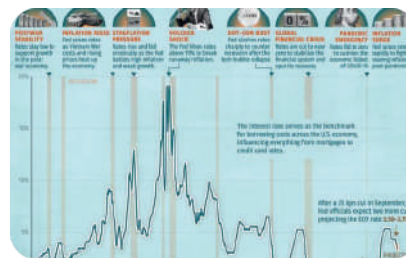
DINAMIKA GLOBAL

Dua Kekuatan Besar yang Membentuk Ulang Ekonomi Dunia



Tiongkok yang Bergeser

Motor pertumbuhan dunia tidak lagi tumbuh di angka dua digit. Tiongkok sedang bertransisi dari ekonomi berbasis **investasi dan ekspor** menuju ekonomi berbasis **konsumsi domestik**. Bagi Indonesia, ini berarti satu hal yang pasti: *commodity boom* super-siklus telah usai. Ketergantungan pada lonjakan harga komoditas sebagai mesin pendapatan negara tidak lagi dapat diandalkan sebagai strategi jangka panjang.



Suku Bunga Global & Volatilitas Modal

Setelah periode pengetatan moneter panjang di negara-negara Barat untuk melawan inflasi, lanskap moneter global kini memasuki fase **normalisasi baru**. Namun, ketidakpastian geopolitik tetap membuat arus modal ke *emerging markets* sangat volatil. Indonesia harus mampu membangun fondasi ekonomi yang tidak mudah terguncang oleh pergerakan kapital spekulatif jangka pendek.



Sulawesi Utara: Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik

Tantangan Nasional: Jebakan Pendapatan Menengah

Secara domestik, Indonesia berada pada titik krusial — ingin keluar dari *Middle-Income Trap*. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama GDP, namun untuk meloncat menjadi negara maju, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar aktivitas belanja. Dibutuhkan **investasi yang meningkatkan produktivitas** secara struktural dan berkelanjutan.

Konsumsi Domestik

Penopang utama GDP saat ini, namun tidak cukup sebagai mesin lompatan kelas

Investasi Produktif

Kunci transformasi struktural menuju ekonomi bernilai tambah tinggi

Keunggulan Strategis Sulawesi Utara

Ketika jalur perdagangan Barat mengalami ketegangan geopolitik, posisi Sulut sebagai **pintu gerbang Indonesia ke Asia Timur dan Pasifik (IPAC)** menjadi sangat strategis. Pertanyaan kritisnya:

Apakah infrastruktur kita siap?

Konektivitas multimoda dari sentra produksi ke pelabuhan

Apakah struktur ekonomi kita siap?

Kapasitas UMKM & SDM untuk menangkap peluang ekspor



Merevitalisasi Sumitronomics: Relevansi Pemikiran Prof. Sumitro di Era Kekinian

Indonesia beruntung memiliki salah satu arsitek ekonomi terbaik bangsa dalam sejarahnya. Pemikiran **Prof. Sumitro Djojohadikusumo** yang dikenal sebagai **Sumitronomics**, memiliki relevansi yang luar biasa tajam untuk menjawab tantangan Indonesia hari ini, khususnya di konteks Sulawesi Utara.



Sumitronomics sebagai sebuah gagasan pembangunan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 – Dasar Pemikiran Ekonomi Pancasila

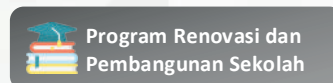
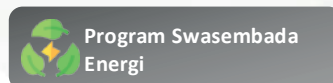
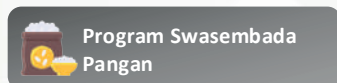
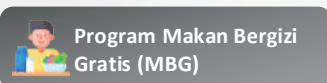
Kerangka pemikiran yang ditawarkan Sumitro Djojohadikusumo memadukan **ke-Indonesiaan, sosialisme, dan pragmatisme** — triase yang kemudian dikenal sebagai **Sumitronomics**



Esensi terbaik dari ekonomi kapitalisme dan sosialisme dimana...

- 1 Ekonomi yang membuka **kesempatan inovasi** melalui kebebasan pasar
- 2 Ekonomi yang menyediakan **social safety net** bagi kelompok rentan
- 3 Pemerintah **intervensi langsung** untuk mengurangi kemiskinan ekstrim dan mencerdaskan bangsa

Sumitro meyakini bahwa negara harus memperkuat intervensinya di bidang **pangan, energi, kesehatan dan pendidikan**. Hal ini juga tertuang didalam beberapa program prioritas Presiden, antara lain:



DUA PILAR SUMITRONOMICS

Dari Strukturalisme Pragmatis Menuju Ekonomi Kerakyatan



1 Pilar I: Strukturalisme Pragmatis

Intervensi negara yang terarah untuk mengubah struktur ekonomi warisan kolonial, mendorong industrialisasi, dan membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat.

2 Pilar II: Keberpihakan pada yang Lemah

Intervensi modal dan akses kredit harus diarahkan untuk memperkuat inklusivitas kelompok ekonomi bawah agar UMKM dan masyarakat bawah tumbuh dan maju.

Intervensi Negara
Infrastruktur dan regulasi terarah

Penguatan Kapasitas
UMKM dan masyarakat diberdayakan

Struktur Ekonomi
Berkelanjutan dan inklusif

Dalam konteks Sulawesi Utara, Sumitronomics menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berpusat pada investasi besar, tetapi harus terhubung langsung dengan **ekonomi rakyat, UMKM, dan wilayah pesisir**.

Hilirisasi Berbasis Rakyat

Blue & Green Downstreaming untuk Sulut

Diskursus hilirisasi selama ini didominasi oleh nikel, bauksit, dan tembaga dalam smelter-smelter besar. Itu baik untuk neraca dagang makro. Namun, seberapa besar serapan tenaga kerja lokal yang sesungguhnya? Untuk Sulawesi Utara, paradigma harus bergeser menuju hilirisasi sektor berbasis rakyat.



Sulawesi Utara

Arah Baru Sulut

Nilai tambah lokal, kerja, UMKM, dan keberlanjutan

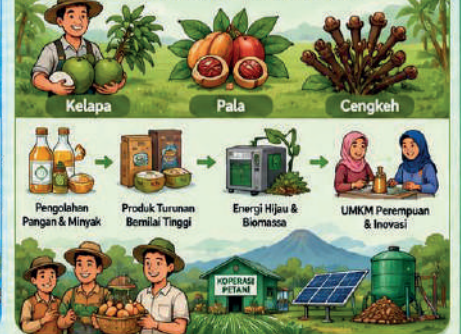
Blue Downstreaming

Dari laut, untuk rakyat



Green Downstreaming

Dari kebun, untuk masa depan



Paradigma Bergeser

Lapangan Kerja Lokal

UMKM Naik Kelas

Nilai Tambah Daerah

Berkelanjutan

Hilirisasi untuk Sulut bukan hanya soal ekspor besar, tetapi bagaimana **laut, kebun, dan rakyat** menjadi pusat penciptaan **nilai tambah**.

Perbandingan Dua Paradigma Hilirisasi

Dimensi	Hilirisasi Konvensional (Heavy Industry)	Hilirisasi Rakyat (Maritim & Pariwisata Sulut)
Karakteristik	Padat Modal (<i>Capital-Intensive</i>), teknologi impor	Padat Karya (<i>Labor-Intensive</i>), berbasis komunitas lokal
Fokus Komoditas	Mineral dan tambang mentah (nikel, bauksit)	Perikanan (Tuna, Rumput Laut), Pertanian (Kelapa, Pala)
Dampak Ekonomi	Pertumbuhan GDP tinggi, namun berisiko ketimpangan (<i>output-driven</i>)	Pendapatan langsung ke masyarakat bawah (<i>income-driven</i>)
Aktor Utama	Korporasi besar / perusahaan multinasional	UMKM, Koperasi Nelayan, Ekosistem Pariwisata Lokal

- Pilihan paradigma hilirisasi bukan soal menolak investasi besar, melainkan memastikan investasi tersebut memiliki **akar pada ekonomi rakyat** dan menciptakan *multiplier effect* yang nyata di tingkat lokal.

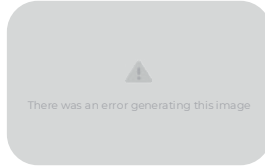


Strategi Hilirisasi Rakyat: Tiga Pilar Konkrit Sulawesi Utara



Hilirisasi Maritim (Perikanan Berkelanjutan)

Jangan lagi menjual tuna mentah langsung keluar. Bangun industri pengolahan dingin (*cold chain system*), pengalengan, hingga produk turunan bioteknologi laut di sekitar Bitung. Koperasi nelayan harus difasilitasi untuk memiliki alat tangkap modern dan **sertifikasi internasional** demi akses pasar Jepang dan Korea.



Hilirisasi Pariwisata (Likupang sebagai DSP)

Pariwisata adalah industri jasa. Hilirisasi di sini artinya membangun *value chain* di sekitar destinasi. Hotel bintang lima di Likupang **tidak boleh mengimpor bahan makanan dari luar daerah**. Sayur, ikan, buah, hingga kerajinan tangan harus dipasok oleh UMKM pesisir Sulut yang telah dikurasi standar kualitasnya.



Digitalisasi UMKM Pesisir

Menghubungkan produk olahan kelapa (*virgin coconut oil*) dan turunan pala langsung ke pasar digital internasional melalui pemanfaatan **Pelabuhan Hub Internasional Bitung** dan Bandara Sam Ratulangi sebagai gerbang ekspor terintegrasi.



Rekomendasi Kebijakan Menuju Pertumbuhan 8% yang Inklusif

Target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden bukan sekadar angka ambisi — ini adalah ambang batas lompatan produktivitas yang dibutuhkan Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Formula *business as usual* tidak akan cukup. Dibutuhkan empat langkah strategis yang terkoordinasi untuk Sulawesi Utara.

1. Hilirisasi Berbasis Rakyat

Nilai tambah dari laut, kebun, dan UMKM lokal



3. SDM Produktif & UMKM Naik Kelas

Pelatihan, pembiayaan, koperasi, dan kewirausahaan



2. Konektivitas & Logistik Kompetitif

Pelabuhan, jalan, cold chain, dan digitalisasi



4. Investasi Inklusif & Ekonomi Hijau

Regulasi pasti, energi bersih, dan pertumbuhan berkelanjutan



Pertumbuhan 8% yang inklusif berarti lebih banyak **kerja**, lebih banyak **nilai tambah lokal**, dan **kesejahteraan** yang dirasakan hingga desa, pesisir, dan UMKM Sulawesi Utara.

Lapangan Kerja
Lebih banyak pekerjaan berkualitas untuk semua.

Produktivitas
Produktivitas naik, daya saing meningkat, ekonomi tumbuh kuat.

Pemerataan
Manfaat pertumbuhan dirasakan hingga desa dan pesisir.

Keberlanjutan
Ekonomi hijau untuk masa depan Sulawesi Utara yang lestari.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Empat Langkah Strategis Menuju Pertumbuhan Inklusif

1

Revitalisasi Konektivitas Multimoda Berorientasi Ekspor



Aktifkan penuh fungsi Bitung sebagai *International Hub Port*. Fokuskan anggaran infrastruktur pada *last-mile connectivity* – menghubungkan sentra nelayan pesisir dan UMKM ke pelabuhan dan bandara. Pemangkasan biaya logistik domestik sebesar **15–20%** akan membuat produk maritim Sulut sangat kompetitif di pasar Asia Timur.

2

Afirmasi Kredit Keuangan Maritim dan UMKM



Dorong Bank SulutGo dan bank-bank BUMN untuk menciptakan skema pembiayaan khusus maritim dengan agunan non-tanah (*receivable financing* berbasis kontrak pembelian ikan). Integrasikan *FinTech lending* terregulasi untuk menjangkau masyarakat pesisir yang selama ini *unbankable*.

3

Peningkatan Kapasitas Manusia (Human Capital Upgrade)



Dirikan pusat-pusat pelatihan vokasi maritim dan pariwisata modern. Masyarakat pesisir harus dilatih menjadi pemandu wisata bersertifikat, pengelola *homestay* standar global, teknik kapal, dan ahli budidaya laut – bukan sekadar penonton pembangunan di tanah mereka sendiri.

4

Reformasi Regulasi Lokal (Local Institutional Reform)



Investor tidak hanya melihat insentif pajak – mereka menilai kepastian hukum dan kecepatan birokrasi. Pangkas tumpang tindih izin pemanfaatan ruang laut dan wilayah pesisir. *Rule of law* di tingkat lokal adalah kunci utama menarik investasi pariwisata berkelanjutan yang bertahan jangka panjang.

KONEKTIVITAS KUAT • KEUANGAN INKLUSIF • SDM UNGGUL • REGULASI PASTI

Sulawesi Utara Maju, Pesisir Sejahtera, Indonesia Kuat!

Sulawesi Utara: Jangkar Masa Depan Ekonomi Inklusif Indonesia

Pertumbuhan ekonomi 8% bukan sekadar persoalan angka di atas kertas statistik. Ini adalah tentang memberikan kepastian bahwa **anak-anak dari nelayan di pesisir Sulawesi Utara** bisa mendapatkan pendidikan yang layak, gizi yang baik, dan pekerjaan yang membanggakan di tanah kelahiran mereka sendiri.

Analisis Makro yang Tajam

Membaca arah ekonomi global dan nasional secara cermat untuk mengidentifikasi peluang strategis Sulut

Pragmatisme Sumitronomics

Intervensi negara yang terarah, berpihak pada rakyat, dan membangun struktur ekonomi yang berkelanjutan

Hilirisasi Maritim & Pariwisata

Berpusat pada UMKM, koperasi nelayan, dan ekosistem lokal sebagai aktor utama pertumbuhan

Sulawesi Utara bukan lagi sekadar wilayah pinggiran Indonesia. Sulawesi Utara adalah jangkar masa depan ekonomi inklusif Indonesia di kancah global.



TERIMA KASIH



Arsitektur Ekonomi Sulawesi Utara di Era Fragmentasi Global: Kerangka Hilirisasi Berbasis Rakyat untuk Pertumbuhan Inklusif

Joy Elly Tulung
Guru Besar FEB UNSRAT

ABSTRAK

Perubahan lanskap ekonomi global yang ditandai oleh fragmentasi perdagangan, restrukturisasi rantai pasok, meningkatnya ketidakpastian geopolitik, serta pergeseran pusat pertumbuhan dunia ke kawasan Asia-Pasifik menciptakan tantangan sekaligus peluang baru bagi perekonomian daerah di Indonesia. Sulawesi Utara memiliki posisi geografis strategis sebagai salah satu wilayah Indonesia yang berhadapan langsung dengan kawasan Asia Timur dan Pasifik. Namun, keunggulan geografis tersebut belum secara otomatis menghasilkan keunggulan ekonomi apabila tidak didukung oleh struktur produksi yang produktif, konektivitas yang efisien, sumber daya manusia yang berkualitas, serta keterkaitan yang kuat antara investasi dan perekonomian lokal. Artikel ini bertujuan merumuskan kerangka konseptual arsitektur ekonomi Sulawesi Utara yang mengintegrasikan transformasi struktural, hilirisasi berbasis rakyat, penguatan ekonomi maritim dan pertanian, pengembangan pariwisata berbasis rantai nilai lokal, digitalisasi UMKM, serta peningkatan kualitas institusi dan pembiayaan. Pendekatan yang digunakan adalah analisis konseptual-deskriptif berbasis sintesis kebijakan dan data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa Sulawesi Utara membutuhkan model hilirisasi yang berbeda dari hilirisasi berbasis industri berat. Hilirisasi perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah komoditas lokal, terutama tuna-cakalang-tongkol, kelapa, pala, serta jasa pariwisata, dengan UMKM, koperasi, nelayan, petani dan komunitas lokal sebagai bagian integral dari rantai nilai. Artikel ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan berkelanjutan apabila ditopang oleh peningkatan produktivitas, keterkaitan hulu-hilir, konektivitas multimoda, pembiayaan berbasis rantai nilai, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kepastian regulasi, serta keberlanjutan ekologis.

Kata kunci: fragmentasi global, transformasi struktural, hilirisasi berbasis rakyat, pertumbuhan inklusif, Sulawesi Utara, ekonomi maritim.

I. PENDAHULUAN

Perekonomian global sedang mengalami perubahan struktural yang cukup mendasar. Globalisasi yang selama beberapa dekade terakhir ditopang oleh liberalisasi perdagangan, efisiensi produksi, dan integrasi rantai pasok internasional kini menghadapi tekanan baru akibat meningkatnya ketidakpastian geopolitik, gangguan pada rantai pasok, serta munculnya kecenderungan *friend-shoring*, *near-shoring*, dan pengurangan risiko ketergantungan ekonomi lintas negara. Perubahan tersebut tidak berarti berakhirnya globalisasi, melainkan transformasi menuju pola globalisasi yang lebih terfragmentasi dan lebih mempertimbangkan dimensi keamanan ekonomi.

Materi yang menjadi dasar artikel ini mendefinisikan kecenderungan tersebut sebagai *The Era of Great Fragmentation*, yaitu suatu kondisi ketika perdagangan dan investasi semakin mempertimbangkan kedekatan geopolitik dan geografis, tidak semata-mata efisiensi biaya. Fragmentasi tersebut memberikan implikasi yang berbeda antarwilayah. Bagi daerah yang sangat bergantung pada rantai perdagangan tradisional, perubahan tersebut dapat meningkatkan risiko. Sebaliknya, bagi wilayah yang secara geografis dekat dengan pusat pertumbuhan baru, fragmentasi dapat menciptakan peluang reposisi ekonomi.

Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik tersebut. Secara geografis, Sulawesi Utara berada di bagian paling utara Indonesia dan relatif dekat dengan Filipina serta jalur ekonomi Asia Timur dan Pasifik. Dengan perspektif pembangunan yang berbeda, posisi geografis tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai lokasi yang jauh dari pusat ekonomi nasional, melainkan sebagai salah satu pintu masuk Indonesia ke kawasan Asia-Pasifik. Pemanfaatan posisi strategis ini menuntut penguatan peran infrastruktur pelabuhan sebagai episentrum konektivitas logistik yang tidak hanya melayani arus barang domestik, tetapi juga mampu memfasilitasi integrasi ke dalam jaringan perdagangan transnasional yang krusial (Verschuur et al., 2022).

Keunggulan geografis tersebut harus dibaca bersama momentum ekonomi daerah. Materi ekonomi Sulawesi Utara menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,66 persen pada 2025, pertumbuhan industri pengolahan sebesar 9,97 persen, peningkatan ekspor luar negeri sebesar 28,42 persen, serta pertumbuhan sektor akomodasi dan kuliner sebesar 20,85 persen. Kinerja tersebut menunjukkan adanya potensi penguatan pada tiga sumber pertumbuhan utama, yaitu industri pengolahan, perdagangan internasional, dan pariwisata. Lebih lanjut, integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan inovasi teknologi terbukti krusial dalam mengakselerasi produktivitas sektor-sektor ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara sistemik (Surya et al., 2021).

Namun, pertumbuhan ekonomi secara agregat tidak identik dengan transformasi ekonomi. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto dapat terjadi tanpa peningkatan produktivitas yang memadai, perubahan struktur produksi, atau distribusi manfaat ekonomi yang merata. Dalam kondisi tersebut, suatu daerah dapat mengalami peningkatan output sekaligus mempertahankan ketergantungan pada komoditas yang berpengolahan rendah, kegiatan informal, dan usaha berskala kecil dengan produktivitas rendah. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma pembangunan yang tidak sekadar mengejar angka pertumbuhan, melainkan berfokus pada penguatan kapasitas inovasi dan modernisasi rantai pasok lokal agar mampu beradaptasi

dengan standar pasar internasional yang semakin kompetitif. Transformasi ini menuntut adopsi inovasi material dan proses produksi yang canggih untuk meningkatkan daya saing sektor manufaktur modern (Ehiobu et al., 2023). Namun, upaya peningkatan inovasi ini harus dilakukan dengan ketelitian empiris yang tinggi guna menghindari bias metodologis dalam pengukuran produktivitas, sebagaimana sering ditemukan dalam evaluasi dampak kompetisi pasar terhadap kapabilitas teknologi perusahaan (Campbell & Mau, 2021).

Oleh karena itu, persoalan utama pembangunan Sulawesi Utara bukan hanya bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana mentransformasikan pertumbuhan tersebut menjadi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan yang lebih luas. Transformasi ini mensyaratkan perbaikan konektivitas infrastruktur yang terukur guna menurunkan biaya logistik dan memfasilitasi akses pasar yang lebih efisien bagi unit-unit ekonomi lokal (Balboni, 2024).

Artikel ini mengajukan argumentasi bahwa arsitektur ekonomi Sulawesi Utara perlu dibangun melalui lima elemen utama. Pertama, penguatan transformasi struktural berbasis investasi produktif. Kedua, pengembangan hilirisasi berbasis rakyat yang menghubungkan sektor hulu dengan industri pengolahan. Ketiga, pemanfaatan posisi Sulawesi Utara sebagai gerbang ekonomi Asia-Pasifik melalui konektivitas multimoda. Keempat, integrasi UMKM dan komunitas lokal ke dalam rantai nilai industri dan pariwisata. Kelima, penguatan modal manusia, pembiayaan, institusi, dan keberlanjutan lingkungan sebagai fondasi jangka panjang. Implementasi strategi ini mengharuskan adopsi teknologi maju dan material baru yang mampu menciptakan lapangan kerja bernilai tambah tinggi sekaligus memperkuat ketahanan organisasi dalam menghadapi dinamika pasar global (Aderibigbe et al., 2023; Gidiagba et al., 2023). Sinergi ini semakin krusial mengingat transformasi digital di sepanjang rantai pasok, baik pada level pemasok maupun konsumen, terbukti mampu memberikan efek limpahan (spillover) yang signifikan terhadap kinerja inovasi perusahaan di sektor antara (Wei et al., 2024).

Kerangka ini penting karena target pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada akhirnya bukan hanya persoalan peningkatan output. Pertumbuhan yang berkelanjutan membutuhkan peningkatan produktivitas, sementara pertumbuhan yang inklusif mensyaratkan agar peningkatan produktivitas tersebut juga meningkatkan pendapatan bagi kelompok masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, adopsi teknologi Industri 4.0 harus diposisikan sebagai instrumen strategis untuk menjembatani kesenjangan kapabilitas antarperusahaan, mengingat efektivitas inovasi sangat bergantung pada sinergi antara literasi digital tenaga kerja dan kesiapan infrastruktur siber, (Farayola et al., 2023). Terutama melalui integrasi teknologi yang memfasilitasi efisiensi operasional dan standar keberlanjutan material (Okogwu et al., 2023).

II. KERANGKA KONSEPTUAL

Fragmentasi Global dan Reposisi Ekonomi Daerah

Globalisasi pada periode sebelumnya terutama digerakkan oleh pencarian efisiensi produksi. Perusahaan internasional membangun rantai pasok lintas negara dengan mempertimbangkan biaya tenaga kerja, biaya produksi, dan skala ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir,

pertimbangan tersebut mulai berubah. Keamanan rantai pasok, stabilitas politik, ketahanan energi, kedekatan pasar, dan hubungan geopolitik menjadi faktor yang semakin penting dalam pengambilan keputusan lokasi investasi. Karena itu, konsep efisiensi mulai berjalan beriringan dengan konsep resiliensi. Fenomena ini menuntut pergeseran strategi pembangunan daerah yang tidak lagi semata-mata bergantung pada model pertumbuhan berbasis volume, melainkan pada penguatan kapabilitas struktural dan inovasi teknologi untuk menjaga daya saing di tengah ketidakpastian pasar global (Acheampong et al., 2022). Pendekatan ini sejalan dengan literatur ekonomi kontemporer yang menekankan bahwa kebijakan industri kini tidak sekadar pemberian subsidi, melainkan berfokus pada penguatan kapasitas struktural dan tata kelola yang adaptif (Juhász et al., 2024). Selanjutnya, transisi menuju model ekonomi yang tangguh mengharuskan pergeseran dari ketergantungan pada pertumbuhan kuantitatif yang tidak terkendali ke strategi yang memprioritaskan efisiensi sumber daya dan keberlanjutan ekologis (Hickel et al., 2022).

Bagi Sulawesi Utara, perubahan ini relevan karena posisi geografisnya memungkinkan daerah tersebut memainkan peran yang lebih besar dalam hubungan ekonomi dengan Asia Timur dan Pasifik. Materi dasar artikel ini menempatkan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia menuju kawasan tersebut dan menekankan dua prasyarat utama: kesiapan konektivitas multimoda dari pusat produksi ke pelabuhan, serta kesiapan struktur ekonomi lokal, terutama UMKM dan sumber daya manusia, untuk memanfaatkan peluang ekspor. Selain itu, integrasi ke dalam rantai pasok global menuntut pemahaman mendalam mengenai pola transmisi guncangan mikro yang dapat memicu fluktuasi makro, sehingga diversifikasi pemasok dan pembeli menjadi strategi krusial untuk memitigasi kerentanan sektor terhadap volatilitas pasar internasional (Baldwin & Freeman, 2022). Dalam konteks ini, adopsi teknologi informasi mutakhir dan pemetaan rantai pasok yang komprehensif menjadi imperatif strategis untuk memitigasi ketidakpastian serta memelihara keberlangsungan operasional di tengah disrupsi global (Atadoga et al., 2024; Mubarik et al., 2021).

Posisi geografis, dengan demikian, hanya merupakan *potential comparative advantage*. Agar menjadi *realized competitive advantage*, keunggulan lokasi harus dilengkapi dengan efisiensi logistik, kualitas institusi, kemampuan produksi, keterampilan tenaga kerja, serta jaringan perdagangan. Pencapaian transformasi ini menuntut sinergi lintas sektor yang memadukan kebijakan fiskal yang adaptif dengan investasi berkelanjutan pada material inovatif serta infrastruktur pendukung yang mampu merespons dinamika pasar global. Sinergi ini harus dioperasionalkan melalui peta jalan pembangunan yang berorientasi pada nilai tambah tinggi, guna memitigasi jebakan ketergantungan pada sektor ekstraktif yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, adopsi inovasi terbuka dan integrasi layanan digital seperti *e-payment* serta *e-commerce* menjadi determinan krusial dalam mengakselerasi produktivitas UMKM lokal agar lebih mampu merespons permintaan pasar internasional secara kompetitif (Kilay et al., 2022; Surya et al., 2021).

Konsekuensinya, pembangunan konektivitas Sulawesi Utara tidak cukup diarahkan pada pembangunan infrastruktur dalam pengertian fisik. Konektivitas harus dipandang sebagai bagian dari strategi industrialisasi dan perdagangan.

Transformasi Struktural dan Produktivitas

Transformasi struktural merujuk pada perubahan komposisi ekonomi dari aktivitas berproduktivitas rendah menuju aktivitas yang menghasilkan nilai tambah dan produktivitas yang lebih tinggi. Dalam proses pembangunan, tenaga kerja secara bertahap berpindah dari sektor primer berproduktivitas rendah ke sektor industri dan jasa modern.

Tantangan ini relevan bagi Sulawesi Utara. Dominasi kegiatan ekonomi berskala mikro dan informal dapat menyerap tenaga kerja, tetapi belum tentu menghasilkan peningkatan produktivitas yang cukup untuk mendorong akselerasi pendapatan. Oleh karena itu, digitalisasi UMKM melalui adopsi layanan e-payment dan e-commerce menjadi krusial, mengingat integrasi digital tersebut terbukti secara empiris mampu meningkatkan kinerja rantai pasok secara signifikan (Kilay et al., 2022). Lebih lanjut, transformasi digital di seluruh lini rantai pasok menciptakan efek transmisi yang memungkinkan perusahaan di tingkat menengah meningkatkan kinerja inovasi melalui limpahan pengetahuan dari mitra hulu dan hilir. Implementasi platform logistik digital yang terintegrasi dapat menjadi katalisator dalam proses ini, di mana pertukaran data secara real-time antar pelaku usaha mampu mengurangi biaya transaksi serta mempercepat siklus layanan secara konsisten (Щербakov & Silkina, 2021). Selain itu, penguatan kolaborasi dalam ekosistem rantai pasok global menuntut keselarasan standar operasional digital yang saat ini masih menjadi hambatan utama dalam adopsi teknologi di sektor logistik dan transportasi (Tijan et al., 2021).

Dalam konteks ini, konsumsi domestik tetap penting sebagai penopang permintaan, tetapi tidak cukup untuk mendorong lompatan struktural. Investasi produktif yang meningkatkan kapasitas produksi, teknologi, produktivitas tenaga kerja, dan nilai tambah harus menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan. Materi presentasi secara eksplisit membedakan konsumsi sebagai penopang ekonomi dengan investasi produktif sebagai instrumen transformasi struktural menuju ekonomi bernilai tambah tinggi. Oleh karena itu, kebijakan daerah perlu diarahkan pada insentif investasi yang tidak hanya menyasar peningkatan volume output, tetapi juga pada penguatan ekosistem riset dan pengembangan yang mampu menyerap serta mengadaptasi teknologi maju ke dalam proses produksi lokal. Langkah ini perlu didukung oleh strategi pemasaran digital yang inovatif, seperti optimalisasi mesin pencari dan analitik berbasis data, guna memperkuat visibilitas UMKM di pasar global sekaligus memacu keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Ijomah et al., 2024). Implementasi strategi tersebut harus dibarengi dengan komitmen pemerintah dalam penyediaan infrastruktur digital yang resilien guna menjamin inklusivitas akses bagi seluruh pelaku usaha, terlepas dari skala operasionalnya (Raji et al., 2024).

Dengan demikian, kualitas investasi menjadi sama pentingnya dengan jumlah investasi. Investasi yang tidak memiliki keterkaitan dengan pemasok, tenaga kerja, dan kegiatan ekonomi lokal akan menghasilkan dampak pengganda yang lebih kecil dibandingkan dengan investasi yang memiliki *backward linkage* dan *forward linkage* yang kuat. Pemanfaatan teknologi digital dalam mempererat keterkaitan antarsektor ini menjadi krusial, mengingat adopsi inovasi digital terbukti mampu memicu pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi produktivitas yang substansial (Elfaki & Ahmed, 2024). Lebih lanjut, sektor-sektor yang berperan sebagai pusat investasi atau *investment hubs* perlu mendapat perhatian khusus karena guncangan spesifik pada sektor tersebut dapat berdampak sistemik terhadap fluktuasi produktivitas tenaga kerja secara agregat (Lehn & Winberry, 2021).

Strukturalisme Pragmatis dan Peran Negara

Dalam kerangka pembangunan, hubungan antara pasar dan negara sering diposisikan secara dikotomis. Pendekatan yang lebih produktif adalah menempatkan keduanya sebagai institusi yang memiliki fungsi berbeda tetapi saling melengkapi. Pemikiran Sumitro Djojohadikusumo yang digunakan sebagai salah satu landasan konseptual dalam materi dasar artikel ini menggabungkan unsur ke-Indonesiaan, sosialisme, dan pragmatisme. Kerangka tersebut menempatkan mekanisme pasar sebagai sumber inovasi, tetapi pada saat yang sama menegaskan fungsi perlindungan sosial dan intervensi negara dalam mengurangi kemiskinan serta memperkuat sektor strategis seperti pangan, energi, kesehatan, dan pendidikan.

Dalam artikel ini, perspektif tersebut diterjemahkan sebagai strukturalisme pragmatis. Negara tidak menggantikan pasar, tetapi membangun kondisi yang memungkinkan mekanisme pasar berfungsi lebih produktif dan inklusif. Dalam konteks Sulawesi Utara, intervensi tersebut dapat mencakup pembangunan infrastruktur logistik, penguatan sistem pendidikan dan pelatihan, penyediaan standar dan sertifikasi produk, kepastian regulasi, penguatan ekosistem inovasi, akses pembiayaan, serta pembangunan kelembagaan ekonomi masyarakat. Pengembangan infrastruktur transportasi yang efisien menjadi esensial dalam upaya ini, karena mampu mempercepat transfer inovasi teknologi serta memobilisasi sumber daya secara produktif melalui penciptaan aglomerasi perkotaan yang kompetitif (Acheampong et al., 2022). Agregasi ini memungkinkan pemanfaatan jaringan pekerjaan yang lebih terkoneksi, di mana peningkatan konektivitas antarsektor terbukti secara empiris mampu meredam volatilitas pasar tenaga kerja dan memperkuat daya tahan ekonomi kota terhadap guncangan eksternal. Tujuan intervensi bukan mempertahankan kelompok ekonomi produktif dalam ketergantungan pada bantuan pemerintah, melainkan meningkatkan kapasitas agar mereka mampu berpartisipasi dalam mekanisme pasar dengan posisi yang lebih kuat.

III. METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan konseptual-deskriptif dengan metode sintesis kebijakan. Analisis dilakukan melalui integrasi dua sumber utama, yaitu materi mengenai arsitektur ekonomi Sulawesi Utara dan naskah pembangunan industri agromaritim di Indonesia. Selain itu, kerangka analisis ini diperkaya dengan tinjauan terhadap efektivitas instrumen kebijakan fiskal dalam mendorong permintaan agregat dan produktivitas sektor riil melalui mekanisme belanja pemerintah serta skema transfer yang ditargetkan (Guerrieri et al., 2022).

Sumber pertama memberikan kerangka mengenai fragmentasi global, posisi strategis Sulawesi Utara, konsep pertumbuhan inklusif, pendekatan Sumitronomics, hilirisasi berbasis rakyat, serta rekomendasi kebijakan daerah. Sumber kedua digunakan untuk memperkuat analisis mengenai transformasi struktural, pembangunan industri agromaritim, keterkaitan hulu-hilir, pengembangan kelapa, serta pengembangan Tuna-Cakalang-Tongkol. Secara empiris, penguatan konektivitas dalam jaringan kerja ini berfungsi sebagai determinan universal bagi resiliensi ekonomi kota, di mana diversifikasi keterampilan yang terintegrasi terbukti mampu menekan angka pengangguran selama periode kontraksi ekonomi (Moro et al., 2021).

Analisis dilakukan dalam empat tahap. Pertama, identifikasi perubahan lingkungan eksternal yang memengaruhi Sulawesi Utara. Kedua, mengidentifikasi potensi dan kendala struktural perekonomian daerah. Ketiga, merumuskan hubungan antara hilirisasi, konektivitas, pembiayaan, modal manusia, dan ekonomi lokal. Keempat, menyusun kerangka kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Proses sintesis ini diharapkan mampu mengidentifikasi titik temu antara urgensi hilirisasi agromaritim dan kapasitas fiskal daerah, guna memformulasikan strategi pembangunan yang adaptif terhadap volatilitas pasar global. Selanjutnya, evaluasi terhadap keberlanjutan fiskal dilakukan dengan memetakan kesenjangan antara kebutuhan investasi sektor prioritas dan optimalisasi pendapatan asli daerah sebagai fondasi pembangunan otonomi. Pendekatan ini mengintegrasikan analisis fiskal dengan dinamika sektoral, memastikan bahwa alokasi anggaran tidak sekadar bersifat konsumtif, melainkan berorientasi pada penciptaan eksternalitas positif bagi daya saing daerah di pasar global. Integrasi ini sekaligus menjadi instrumen mitigasi terhadap risiko disparitas ekonomi antarwilayah yang sering kali dipicu oleh ketimpangan akses terhadap modal dan teknologi. Dengan memosisikan kebijakan fiskal sebagai katalisator, daerah dapat memitigasi jebakan ketergantungan pada komoditas mentah dan beralih ke hilirisasi bernilai tambah tinggi. Pada akhirnya, kerangka strategis ini mengasumsikan bahwa sinergi antara kebijakan makroekonomi dan inisiatif sektor mikro akan menciptakan landasan ekonomi yang tangguh, mampu menghadapi guncangan eksternal sembari mengakselerasi kesejahteraan masyarakat lokal.

Sebagai artikel konseptual, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hubungan kausal secara ekonometrik. Kontribusi utamanya adalah penyusunan kerangka analitis yang dapat menjadi dasar pengembangan agenda penelitian empiris dan kebijakan daerah pada tahap selanjutnya. Mengingat pentingnya infrastruktur dasar sebagai fondasi operasional bagi efisiensi ekonomi dan keberlanjutan sumber daya, penelitian ini menekankan perlunya mempertimbangkan variabel makroekonomi serta tingkat inovasi daerah dalam model pengembangan agromaritim yang komprehensif (Naeem et al., 2022).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari Keunggulan Geografis menuju Keunggulan Ekonomi

Sulawesi Utara mempunyai posisi strategis terhadap Asia Timur dan Pasifik. Namun, keunggulan tersebut tidak secara otomatis memberikan manfaat ekonomi. Secara konseptual, terdapat perbedaan antara *geographical advantage* dan *economic advantage*. Keunggulan geografis merupakan kondisi eksogen, sementara keunggulan ekonomi merupakan hasil pembangunan institusi, infrastruktur, teknologi, dan kapasitas produksi.

Hal ini berarti pengembangan Pelabuhan Bitung dan Bandara Sam Ratulangi perlu ditempatkan dalam strategi ekonomi yang lebih luas. Keduanya bukan hanya simpul transportasi, tetapi juga dapat berfungsi sebagai komponen dalam sistem produksi dan perdagangan internasional.

Konektivitas yang efektif setidaknya harus mengintegrasikan:



Kelemahan pada salah satu mata rantai akan meningkatkan biaya transaksi dan mengurangi daya saing secara keseluruhan. Oleh karena itu, indikator keberhasilan pembangunan konektivitas seharusnya tidak hanya mencakup jumlah infrastruktur yang dibangun, tetapi juga penurunan biaya logistik, waktu pengiriman, kepastian jadwal transportasi, serta peningkatan volume produk lokal yang dapat mengakses pasar eksternal. Dalam perspektif ini, kebijakan infrastruktur menjadi bagian dari kebijakan produktivitas.

Hilirisasi Berbasis Rakyat sebagai Alternatif Transformasi

Hilirisasi di Indonesia selama ini banyak diasosiasikan dengan industri mineral dan kegiatan yang padat modal. Model tersebut memiliki peran penting dalam industrialisasi nasional, tetapi tidak harus menjadi satu-satunya model pembangunan. Karakteristik sumber daya Sulawesi Utara membuka peluang untuk mengembangkan hilirisasi berbasis masyarakat. Materi dasar artikel membedakan hilirisasi konvensional yang padat modal dengan hilirisasi rakyat yang lebih padat karya, berbasis komunitas lokal, dan bertumpu pada perikanan, pertanian, UMKM, koperasi nelayan serta ekosistem pariwisata. Implementasi model ini membutuhkan sinergi infrastruktur inovatif yang mampu meningkatkan produktivitas hijau, di mana konektivitas yang efisien tidak hanya menekan redundansi input produksi tetapi juga menarik tenaga kerja terampil serta modal intelektual ke wilayah tersebut (Sun et al., 2022).

Perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menempatkan investasi besar dan ekonomi rakyat sebagai dua pilihan yang saling meniadakan. Substansi strategi hilirisasi rakyat adalah membangun keterkaitan antara investasi berskala besar dan kegiatan ekonomi lokal. Integrasi ini berfungsi menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) melalui penciptaan kluster industri yang memungkinkan pelaku usaha kecil menyuplai rantai pasok industri skala besar secara berkelanjutan. Dengan kata lain, investasi harus didasarkan pada struktur ekonomi lokal. Industri pengolahan dan industri berbasis kelapa harus memiliki hubungan yang baik dengan para nelayan. Perusahaan logistik harus terintegrasi dengan eksportir dan UMKM, dan hotel serta resor harus menjalin hubungan dengan pemasok lokal. Rantai produksi memerlukan biaya yang dapat dibiayai oleh pihak perbankan. Karena sebagian nilai tambah dan pendapatan berputar di dalam perekonomian lokal, investasi dalam hubungan ini akan memiliki efek pengganda yang lebih besar.

Ekonomi Maritim: Dari Produksi Komoditas menuju Penciptaan Nilai

Salah satu peluang utama Sulawesi Utara adalah pengembangan ekonomi maritim, khususnya Tuna-Cakalang-Tongkol. Persoalan utama kegiatan berbasis sumber daya alam adalah besarnya perbedaan antara nilai sumber daya pada tahap produksi primer dan nilai akhir setelah mengalami pengolahan, standardisasi, pengemasan, distribusi, dan pemasaran. Karena itu, orientasi pembangunan perikanan perlu bergeser dari sekadar peningkatan volume tangkapan menuju peningkatan nilai tambah per unit sumber daya. Arah pengembangannya mencakup produk olahan dan pengalengan, verifikasi dan ketelusuran bahan baku, penguatan daya saing, serta kemungkinan pengembangan minyak ikan, tepung ikan, gelatin, dan kolagen. Pengembangan TCT di Sulawesi Utara dan wilayah Indonesia Timur juga diarahkan pada investasi rantai dingin, pengalengan ikan dan pengolahan lanjutan untuk meningkatkan daya saing global.

Kerangka tersebut konsisten dengan strategi hilirisasi maritim Sulawesi Utara yang menekankan pembangunan *cold chain system*, industri pengolahan dan pengembangan produk turunan bioteknologi laut. Koperasi nelayan juga perlu memperoleh dukungan teknologi, akses pembiayaan dan sertifikasi untuk memperluas pasar.

Namun, hilirisasi perikanan harus menghindari pembentukan struktur ekonomi yang hanya memindahkan pusat keuntungan dari pedagang komoditas ke korporasi pengolahan tanpa meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Karena itu, peningkatan nilai tambah harus diikuti oleh peningkatan *bargaining power* nelayan melalui koperasi, kepastian akses pasar, peningkatan kualitas hasil tangkap, informasi harga, teknologi, serta pembiayaan. Ukuran keberhasilan hilirisasi seharusnya tidak hanya berupa peningkatan output industri, tetapi juga peningkatan proporsi nilai ekonomi yang diterima produsen primer.

Green Downstreaming dan Transformasi Ekonomi Kelapa

Selain perikanan, kelapa juga memiliki potensi strategis bagi pembangunan berbasis sumber daya lokal di Sulawesi Utara. Tantangan utama ekonomi kelapa adalah kecenderungan untuk menjual produk dengan tingkat pengolahan yang relatif rendah. Padahal kelapa dapat menjadi bahan baku berbagai produk bernilai tambah tinggi, seperti *virgin coconut oil*, tepung kelapa, pangan fungsional, dan *medium-chain triglyceride*.

Kajian pembangunan agromaritim menempatkan Sulawesi Utara bersama Jawa Timur sebagai lokus prioritas kelapa dalam. Produk hilir yang diarahkan adalah pangan fungsional, termasuk *medium-chain triglyceride* dan tepung kelapa, dengan KEK Bitung sebagai salah satu lokasi dalam peta pengembangan. Namun, pembangunan industri hilir tidak akan berkelanjutan jika produktivitas sektor hulu stagnan. Kajian yang sama menunjukkan bahwa kelapa sebagian besar dikelola oleh pekebun kecil, sedangkan produktivitas, usia tanaman, peremajaan, legalitas lahan, dan pemanfaatan teknologi pascapanen masih menjadi kendala. Dengan demikian, strategi hilirisasi kelapa harus menggunakan pendekatan hulu-hilir yang terintegrasi. Di sektor hulu diperlukan program peningkatan produktivitas, regenerasi tanaman, perbaikan bibit, dukungan teknologi, kelembagaan petani dan akses pembiayaan.

Pada sektor menengah diperlukan fasilitas untuk pengumpulan, penyimpanan, standardisasi, dan pengolahan. Pada sektor hilir diperlukan investasi industri, inovasi produk, *branding*, sertifikasi dan akses pasar internasional. Hubungan tersebut menciptakan rantai nilai yang lebih panjang dan meningkatkan peluang agar nilai tambah tetap tercipta di daerah.

Pariwisata sebagai Rantai Nilai Lokal

Pendekatan hilirisasi juga dapat diterapkan pada sektor jasa, khususnya pariwisata. Dalam sektor pariwisata, persoalan penting bukan hanya jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga tingkat keterkaitan antara kegiatan pariwisata dan ekonomi lokal. Peningkatan jumlah hotel dan wisatawan dapat menghasilkan dampak terbatas apabila sebagian besar kebutuhan hotel, restoran dan kegiatan wisata diperoleh dari luar daerah. Kondisi tersebut menimbulkan *economic leakage*, yaitu keluarnya kembali sebagian pendapatan pariwisata dari perekonomian lokal.

Karena itu, strategi pembangunan destinasi seperti Likupang perlu diarahkan pada pembentukan rantai nilai lokal. Materi dasar artikel menyebutkan bahwa hilirisasi pariwisata berarti menghubungkan hotel dengan pemasok sayur, ikan, buah dan kerajinan lokal yang telah memenuhi standar kualitas. Secara konseptual, pembangunan pariwisata inklusif memerlukan hubungan antara:

Rantai Dampak Ekonomi Pariwisata

Pariwisata menggerakkan berbagai sektor secara berantai dan berkelanjutan, menciptakan **nilai ekonomi dan kesejahteraan** bagi masyarakat lokal.



Sumber: generated by Chat GPT, 2026

Semakin tinggi proporsi input lokal dalam kegiatan pariwisata, semakin besar *multiplier effect* yang dapat diterima masyarakat. Karena itu, keberhasilan pariwisata seharusnya tidak hanya diukur dari tingkat kunjungan atau okupansi, tetapi juga lama tinggal, pengeluaran per wisatawan, tingkat penggunaan input lokal, dan penciptaan pekerjaan dengan produktivitas dan upah yang lebih baik.

UMKM, Digitalisasi dan Persoalan Naik Kelas

UMKM memainkan peran penting dalam struktur ekonomi daerah. Namun, tujuan akhir kebijakan UMKM tidak seharusnya hanya untuk mempertahankan keberlangsungan usaha berskala mikro. Transformasi ekonomi mensyaratkan munculnya perusahaan lokal yang mampu bergerak dari mikro menuju kecil, dari kecil menuju menengah, dan sebagian berkembang menjadi perusahaan berskala lebih besar.

Dalam konteks tersebut, kebijakan UMKM harus bergerak dari kebijakan survival-oriented menuju kebijakan scaling-up. Hambatan utama dalam proses naik kelas biasanya berkaitan dengan akses pasar, manajemen, standarisasi, pembiayaan, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia.

Digitalisasi dapat membantu mengurangi sebagian hambatan tersebut. Materi dasar artikel ini mengarahkan produk kelapa dan pala Sulawesi Utara menuju pasar digital internasional melalui integrasi dengan Pelabuhan Bitung dan Bandara Sam Ratulangi.

Namun, digitalisasi tidak hanya berarti menjual melalui platform online; itu juga berpotensi meningkatkan produktivitas dengan memperkuat rekam jejak transaksi, meningkatkan rating kredit, meningkatkan manajemen inventaris, meningkatkan keterlacakan produk, serta menghubungkan produsen dengan pasar yang lebih luas.

Pembiayaan Berbasis Rantai Nilai

Akses ke pembiayaan merupakan kendala utama bagi UMKM, petani, dan nelayan. Namun, meningkatkan target kredit bukanlah solusi atas masalah ini. Manajemen risiko merupakan dasar bisnis perbankan. Biaya pembiayaan lebih tinggi karena banyak usaha kecil tidak memiliki agunan, laporan keuangan, dan informasi bisnis yang memadai. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko kredit, skema pembiayaan berbasis rantai nilai—juga dikenal sebagai pembiayaan rantai nilai—harus diterapkan. Skema ini menggunakan penjaminan tidak langsung melalui kontrak yang dibuat oleh mitra industri yang lebih besar dan bisnis kecil. Selain itu, inovasi teknologi finansial (Fintech), yang memanfaatkan pemodelan kredit scoring yang didasarkan pada rekam jejak aktivitas digital, dapat digunakan sebagai pengganti agunan konvensional untuk bisnis yang tidak memiliki cukup uang (Nugraha et al., 2022).

Mengurangi risiko tersebut dengan memasukkan pelaku usaha ke dalam rantai nilai merupakan pendekatan yang lebih tepat. Kontrak dengan perusahaan pengolahan membantu koperasi nelayan memprediksi arus kas di masa depan. Data transaksi dapat menjadi dasar analisis pembiayaan apabila UMKM menjadi pemasok bagi hotel. Ketidakpastian pasar dapat dikurangi jika petani berhubungan dengan off-taker. Bank dapat secara bertahap beralih dari lending berbasis collateral ke lending berbasis cash-flow dan financing value-chain dalam kondisi tersebut. Perbankan lokal mungkin memiliki posisi strategis karena memiliki informasi yang lebih dekat dengan karakteristik ekonomi setempat. Namun, fungsi tersebut harus dibangun dengan manajemen risiko dan tata kelola yang kuat. Afirmasi pembiayaan tidak boleh diinterpretasikan sebagai pelanggaran prinsip kehati-hatian. Justru pembiayaan inklusif yang berkelanjutan mensyaratkan integrasi antara keberpihakan dan disiplin risiko.

Modal Manusia dan Ekosistem Pengetahuan

Produksi manusia pada akhirnya menentukan transformasi struktural. Pembangunan industri perikanan membutuhkan keterampilan dalam teknologi pangan, pengelolaan rantai dingin, sertifikasi, logistik, serta pemasaran internasional. Hilirisasi kelapa juga membutuhkan keterampilan dalam teknologi pangan, kimia, desain produk, dan perdagangan. Hospitality, bahasa asing, manajemen destinasi, dan pemasaran digital sangat penting bagi pengembangan pariwisata.

Oleh karena itu, pendidikan vokasi dan perguruan tinggi harus menjadi bagian dari strategi transformasi ekonomi. Perguruan tinggi dapat berfungsi sebagai penyedia teknologi, penghasil pengetahuan, laboratorium sertifikasi, pusat inkubasi bisnis, dan mitra inovasi industri, serta

UMKM. Hubungan antara pendidikan dan dunia usaha harus berubah dari kerja sama administratif menjadi produksi pengetahuan.

Keberhasilan pendidikan dalam kerangka tersebut tidak cukup diukur dari jumlah lulusan, tetapi dari sejauh mana kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan struktur ekonomi yang sedang berkembang dan mampu meningkatkan produktivitas.

Implikasi Kebijakan: Kerangka Arsitektur Ekonomi Sulawesi Utara

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Sulawesi Utara memerlukan arsitektur pembangunan yang lebih terintegrasi. Kerangka kebijakan tersebut setidaknya terdiri atas 6 agenda utama.

Pertama, revitalisasi konektivitas multimoda yang berorientasi pada ekspor.

Pembangunan Pelabuhan Bitung, Bandara Sam Ratulangi dan jaringan transportasi harus diintegrasikan dengan sentra produksi. Indikator keberhasilan harus mencakup penurunan biaya logistik, waktu pengiriman, kepastian distribusi, serta peningkatan ekspor produk bernilai tambah.

Kedua, transformasi hilirisasi dari pendekatan komoditas menuju pendekatan rantai nilai.

Hilirisasi tidak boleh hanya diukur dari jumlah fasilitas industri yang dibangun. Keberhasilan harus mencakup tingkat pengolahan, keterkaitan dengan produsen lokal, penggunaan tenaga kerja lokal, peningkatan pendapatan produsen primer, serta kemampuan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.

Ketiga, pembangunan klaster *blue-green downstreaming*.

Klaster ekonomi maritim dapat diarahkan pada Tuna-Cakalang-Tongkol dan berbagai industri turunannya. Klaster ekonomi hijau dapat dikembangkan melalui kelapa, pala dan komoditas unggulan lainnya. Pendekatan klaster memungkinkan keterhubungan antara produsen, pengolah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, logistik, pemerintah dan pasar.

Keempat, transformasi kebijakan UMKM menuju *scaling-up*.

Program UMKM perlu diarahkan tidak hanya untuk mempertahankan keberadaan usaha, tetapi juga untuk mendorong peningkatan produktivitas, standardisasi, teknologi, akses pasar, kualitas manajemen dan skala usaha.

Kelima, pembangunan modal manusia berbasis kebutuhan transformasi ekonomi.

Pelatihan dan pendidikan harus dikembangkan dengan orientasi sektoral yang jelas, terutama pada sektor perikanan, agroindustri, pariwisata, logistik, ekonomi digital, dan perdagangan internasional.

Keenam, reformasi institusi dan regulasi.

Kepastian tata ruang, perizinan, standardisasi, keamanan investasi dan konsistensi kebijakan merupakan prasyarat investasi produktif.

Kajian industri agromaritim juga menegaskan bahwa hilirisasi yang efektif membutuhkan keterpaduan hulu-hilir, logistik yang efisien, penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja, kepastian

hukum, keseimbangan ekologis, teknologi digital, akses pembiayaan, serta dukungan pemerintah daerah.

Seluruh agenda tersebut perlu diletakkan pada prinsip keberlanjutan.

Ekspansi industri perikanan tidak boleh mengurangi keberlanjutan stok ikan. Pengembangan pariwisata tidak boleh menurunkan kualitas lingkungan destinasi. Pengembangan pertanian harus mempertimbangkan produktivitas jangka panjang lahan. Pertumbuhan ekonomi yang mengurangi stok modal alam tanpa regenerasi tidak dapat dikategorikan sebagai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Model Konseptual Arsitektur Ekonomi Sulawesi Utara

Berdasarkan pembahasan, model konseptual pembangunan Sulawesi Utara dapat dirumuskan dalam hubungan berikut:



Sumber: generated by Gemini, 2026

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan variabel yang berdiri sendiri. Pertumbuhan merupakan hasil akhir dari suatu sistem yang terdiri atas produktivitas, investasi, konektivitas, modal manusia, pembiayaan dan kualitas institusi. Dalam kerangka tersebut, target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi harus dipandang sebagai target transformasi produktivitas, bukan sekadar target ekspansi output.

V. KESIMPULAN

Perubahan ekonomi global telah menciptakan lanskap pembangunan baru bagi daerah. Fragmentasi rantai pasok, meningkatnya pentingnya keamanan ekonomi, serta pergeseran pusat pertumbuhan ke Asia-Pasifik menciptakan peluang bagi Sulawesi Utara untuk mereposisi diri dalam struktur ekonomi nasional dan regional. Namun, posisi geografis yang strategis tidak secara otomatis menghasilkan kesejahteraan. Keunggulan geografis hanya dapat dikonversi menjadi keunggulan ekonomi melalui pembangunan konektivitas, investasi produktif, peningkatan kapasitas produksi, serta penguatan sumber daya manusia dan institusi yang berkualitas.

Artikel ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan Sulawesi Utara perlu beralih dari pendekatan pertumbuhan berbasis sumber daya menuju transformasi ekonomi berbasis nilai tambah. Hal ini memerlukan simulasi kebijakan yang komprehensif guna memastikan bahwa investasi di sektor hulu dan hilir mampu memberikan dampak sistemik terhadap kesejahteraan lokal serta kelestarian ekologis dalam jangka panjang (Wang et al., 2022).

Hilirisasi berbasis rakyat menjadi salah satu instrumen penting dalam transformasi tersebut. Berbeda dengan pendekatan hilirisasi yang semata-mata bertumpu pada industri padat modal, hilirisasi berbasis rakyat menghubungkan industri dengan nelayan, petani, UMKM, koperasi dan komunitas lokal. Strategi ini sejalan dengan prinsip *inclusive green growth*, yang menekankan harmonisasi antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan keberlangsungan aset alam sebagai fondasi kesejahteraan jangka panjang (Ofori et al., 2022). Strategi ini selaras dengan temuan empiris bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus didukung oleh kebijakan fiskal hijau, diversifikasi energi terbarukan, serta optimalisasi sewa sumber daya alam guna menyeimbangkan tuntutan pembangunan dengan kelestarian ekologis (Adanma & Ogunbiyi, 2024).

Pada sektor maritim, pengembangan Tuna-Cakalang-Tongkol harus bergerak menuju rantai dingin, pengalengan dan produk turunan bernilai tambah. Integrasi sistematis ini memerlukan perspektif teritorial yang lebih luas dalam memetakan keterkaitan antarwilayah, mencakup infrastruktur transportasi serta utilitas pendukung untuk menjaga efisiensi logistik (Svobodová et al., 2022). Selanjutnya, penguatan daya saing daerah menuntut sinergi antara kebijakan makroekonomi dan implementasi strategis di tingkat lokal, khususnya dalam memitigasi dampak volatilitas pasar global terhadap stabilitas pendapatan sektor primer. Oleh karena itu, penguatan resiliensi ekonomi daerah memerlukan instrumen mitigasi risiko, seperti skema asuransi berbasis indeks cuaca bagi pelaku usaha pertanian dan perikanan, serta optimalisasi cadangan pangan sebagai bantalan terhadap guncangan eksternal. Lebih jauh, penerapan prinsip bioekonomi sirkular perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah untuk memaksimalkan pemanfaatan residu biomassa, yang tidak hanya mendukung pengelolaan sumber daya berkelanjutan tetapi juga mendorong penciptaan nilai ekonomi baru (Mesa et al., 2024).

Pada sektor pertanian, pengembangan kelapa harus diintegrasikan dari revitalisasi hulu hingga produksi pangan fungsional dan produk bernilai tinggi. Pada sektor pariwisata, pembangunan destinasi harus memperkuat keterkaitan antara hotel, petani, nelayan, UMKM dan ekonomi kreatif lokal. Keseluruhan strategi tersebut memerlukan dukungan konektivitas multimoda, digitalisasi, pembiayaan berbasis rantai nilai, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta reformasi regulasi dan tata kelola yang kuat.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan pembangunan Sulawesi Utara tidak cukup hanya berupa peningkatan Produk Domestik Regional Bruto atau nilai investasi. Keberhasilan perlu dinilai dari sejauh mana transformasi ekonomi mampu meningkatkan produktivitas, menciptakan pekerjaan berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kapasitas UMKM untuk naik kelas, serta mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam.

Materi dasar artikel ini menegaskan bahwa pertumbuhan yang tinggi pada akhirnya harus memberikan kesempatan pendidikan, gizi yang baik, dan pekerjaan yang layak bagi masyarakat, termasuk keluarga nelayan di wilayah pesisir, dengan UMKM, koperasi nelayan, dan ekosistem lokal ditempatkan sebagai aktor utama pertumbuhan.

Dalam perspektif tersebut, Sulawesi Utara tidak semestinya terus dilihat sebagai wilayah perifer di ujung utara Indonesia. Pergeseran gravitasi ekonomi menuju Asia-Pasifik memungkinkan Sulawesi Utara diposisikan sebagai salah satu simpul strategis baru bagi perekonomian nasional. Pemanfaatan posisi tersebut menuntut kerangka kebijakan yang melampaui pendekatan sektoral konvensional menuju tata kelola berbasis ekosistem, di mana kolaborasi multi-pihak menjadi prasyarat mutlak untuk mengoordinasikan rencana aksi pembangunan yang holistik. Implementasi kerangka ini harus didukung oleh pemodelan kebijakan yang komprehensif untuk memetakan intervensi terhadap faktor penentu, seperti inovasi teknologi, keberlanjutan rantai pasok biomassa, dan dinamika perilaku pasar. Dengan memadukan pendekatan kuantitatif dalam simulasi kebijakan dan deliberasi partisipatif, pemerintah daerah dapat memitigasi ketidakpastian pasar sekaligus memastikan bahwa transisi ekonomi ini tetap berada dalam koridor inklusivitas sosial yang kuat. Namun, implementasi model ini menuntut pengatasi hambatan sistemik, terutama keterbatasan modal dan tantangan daya saing harga terhadap produk konvensional, yang sering kali menjadi kendala utama dalam transisi menuju sistem ekonomi sirkular (Salvador et al., 2022).

Tantangan utama kebijakan bukan lagi sekadar bagaimana mengeksplorasi keunggulan sumber daya, tetapi bagaimana mengubah keunggulan geografis menjadi konektivitas, sumber daya menjadi nilai tambah, investasi menjadi produktivitas, dan pertumbuhan menjadi kesejahteraan yang inklusif. Transformasi ini memerlukan adopsi narasi sosio-teknologis yang terkoordinasi secara lintas sektoral, di mana kolaborasi multipihak menjadi landasan utama dalam merancang kerangka kerja kebijakan yang holistik (Duluins & Baret, 2024). Dengan arsitektur ekonomi yang terintegrasi, Sulawesi Utara berpotensi berkembang bukan hanya sebagai wilayah yang berhadapan dengan Samudra Pasifik, tetapi juga sebagai gerbang ekonomi Indonesia menuju kawasan Asia-Pasifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Acheampong, A. O., Dzator, J., Dzator, M., & Salim, R. (2022). Unveiling the effect of transport infrastructure and technological innovation on economic growth, energy consumption and CO2 emissions. *Technological Forecasting and Social Change*, 182, 121843. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121843>
- Adanma, U. M., & Ogunbiyi, E. O. (2024). A comparative review of global environmental policies for promoting sustainable development and economic growth. *International Journal of Applied Research in Social Sciences*, 6(5), 954–977. <https://doi.org/10.51594/ijarss.v6i5.1147>

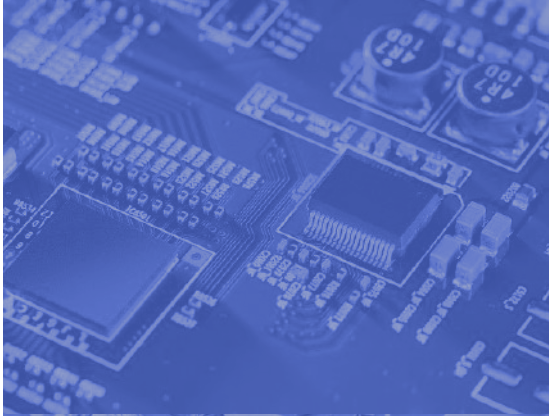
- Aderibigbe, A. O., Ohenhen, P. E., Nwaobia, N. K., Gidiagba, J. O., & Ani, E. C. (2023). Artificial intelligence in developing countries: Bridging the gap between potential and implementation. *Computer Science & IT Research Journal*, 4(3), 185–199. <https://doi.org/10.51594/csitrj.v4i3.629>
- Atadoga, A., Osasona, F., Amoo, O. O., Farayola, O. A., Ayinla, B. S., & Abrahams, T. O. (2024). The role of IT in enhancing supply chain resilience: A global review. *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*, 6(2), 336–351. <https://doi.org/10.51594/ijmer.v6i2.774>
- Balboni, C. (2024). In harm's way? Infrastructure investments and the persistence of coastal cities. *American Economic Review*, 115(1), 77–116. <https://doi.org/10.1257/aer.20191943>
- Baldwin, R., & Freeman, R. (2022). Risks and global supply chains: What we know and what we need to know. *Annual Review of Economics*, 14(1), 153–180. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-051420-113737>
- Campbell, D. L., & Mau, K. (2021). On "Trade induced technical change: The impact of Chinese imports on innovation, IT, and productivity." *The Review of Economic Studies*, 88(5), 2555–2559. <https://doi.org/10.1093/restud/rdab037>
- Duluins, O., & Baret, P. V. (2024). A systematic review of the definitions, narratives and paths forwards for a protein transition in high-income countries. *Nature Food*, 5(1), 28–36. <https://doi.org/10.1038/s43016-023-00906-7>
- Ehiobu, N. N., Tula, O. A., Daraojimba, C., Ofonagoro, K. A., Ogunjobi, O. A., Gidiagba, J. O., Egbokhaebho, B. A., & Bansa, A. A. (2023). Exploring innovative material integration in modern manufacturing for advancing U.S. competitiveness in sustainable global economy. *Engineering Science & Technology Journal*, 4(3), 140–168. <https://doi.org/10.51594/estj.v4i3.558>
- Elfaki, K. E., & Ahmed, E. M. (2024). Digital technology adoption and globalization innovation implications on Asian Pacific green sustainable economic growth. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10(1), 100221. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100221>
- Farayola, O. A., Abdul, A. A., Irabor, B. O., & Okeleke, E. C. (2023). Innovative business models driven by AI technologies: A review. *Computer Science & IT Research Journal*, 4(2), 85–110. <https://doi.org/10.51594/csitrj.v4i2.608>
- Gidiagba, J. O., Daraojimba, C., Ofonagoro, K. A., Eyo-Udo, N. L., Egbokhaebho, B. A., Ogunjobi, O. A., & Bansa, A. A. (2023). Economic impacts and innovations in materials science: A holistic exploration of nanotechnology and advanced materials. *Engineering Science & Technology Journal*, 4(3), 84–100. <https://doi.org/10.51594/estj.v4i3.553>
- Guerrieri, V., Lorenzoni, G., Straub, L., & Werning, I. (2022). Macroeconomic implications of COVID-19: Can negative supply shocks cause demand shortages? *American Economic Review*, 112(5), 1437–1474. <https://doi.org/10.1257/aer.20201063>
- Hickel, J., Kallis, G., Jackson, T., O'Neill, D. W., Schor, J. B., Steinberger, J., Victor, P. A., & Ürge-Vorsatz, D. (2022). Degrowth can work—Here's how science can help. *Nature*, 612(7940), 400–403. <https://doi.org/10.1038/d41586-022-04412-x>

- Ijomah, T. I., Idemudia, C., Eyo-Udo, N. L., & Anjorin, K. F. (2024). Innovative digital marketing strategies for SMEs: Driving competitive advantage and sustainable growth. *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*, 6(7), 2173–2188. <https://doi.org/10.51594/ijmer.v6i7.1265>
- Juhász, R., Lane, N., & Rodrik, D. (2024). The new economics of industrial policy. *Annual Review of Economics*, 16(1), 213–242. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-081023-024638>
- Kilay, A. L., Simamora, B. H., & Putra, D. P. (2022). The influence of e-payment and e-commerce services on supply chain performance: Implications of open innovation and solutions for the digitalization of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(3), 119. <https://doi.org/10.3390/joitmc8030119>
- Lehn, C. vom, & Winberry, T. (2021). The investment network, sectoral comovement, and the changing U.S. business cycle. *The Quarterly Journal of Economics*, 137(1), 387–433. <https://doi.org/10.1093/qje/qjab020>
- Mesa, J. A., Sierra-Fontalvo, L., Ortegon, K., & González-Quiroga, A. (2024). Advancing circular bioeconomy: A critical review and assessment of indicators. *Sustainable Production and Consumption*, 46, 324–342. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2024.03.006>
- Moro, E., Frank, M. R., Pentland, A., Rutherford, A., Cebrián, M., & Rahwan, I. (2021). Universal resilience patterns in labor markets. *Nature Communications*, 12(1), 1972. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-22086-3>
- Mubarik, M. S., Naghavi, N., Mubarik, M., Kusi-Sarpong, S., Khan, S. A., Zaman, S. I., & Alam, S. H. (2021). Resilience and cleaner production in industry 4.0: Role of supply chain mapping and visibility. *Journal of Cleaner Production*, 292, 126058. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126058>
- Naeem, M. A., Appiah, M., Karim, S., & Yarovaya, L. (2022). What abates environmental efficiency in African economies? Exploring the influence of infrastructure, industrialization, and innovation. *Technological Forecasting and Social Change*, 186, 122172. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122172>
- Nugraha, D. P., Setiawan, B., Nathan, R. J., & Fekete-Farkas, M. (2022). Fintech adoption drivers for innovation for SMEs in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(4), 208. <https://doi.org/10.3390/joitmc8040208>
- Ofori, I. K., Gbolonyo, E. Y., & Ojüng, N. (2022). Towards inclusive green growth in Africa: Critical energy efficiency synergies and governance thresholds. *Journal of Cleaner Production*, 369, 132917. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132917>
- Okogwu, C., Odochi-Agho, M., Adeyinka, M. A., Odulaja, B. A., Eyo-Udo, N. L., Daraojimba, C., & Banso, A. A. (2023). Exploring the integration of sustainable materials in supply chain management for environmental impact. *Engineering Science & Technology Journal*, 4(3), 49–65. <https://doi.org/10.51594/estj.v4i3.546>
- Raji, M. A., Olodo, H. B., Oke, T. T., Addy, W. A., Ofodile, O. C., & Oyewole, A. T. (2024). The digital transformation of SMEs: A comparative review between the USA and Africa. *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*, 6(3), 737–751. <https://doi.org/10.51594/ijmer.v6i3.884>

- Salvador, R., Barros, M. V., Donner, M., Brito, P., Halog, A., & de Francisco, A. C. (2022). How to advance regional circular bioeconomy systems? Identifying barriers, challenges, drivers, and opportunities. *Sustainable Production and Consumption*, 32, 248–269. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2022.04.025>
- Sun, Y., Razzaq, A., Kizys, R., & Bao, Q. (2022). High-speed rail and urban green productivity: The mediating role of climatic conditions in China. *Technological Forecasting and Social Change*, 185, 122055. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122055>
- Surya, B., Menne, F., Sabhan, H., Suriani, S., Abubakar, H., & Idris, M. (2021). Economic growth, increasing productivity of SMEs, and open innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(1), 20. <https://doi.org/10.3390/joitmc7010020>
- Svobodová, K., Owen, J. R., Kemp, D., Moudrý, V., Lèbre, É., Stringer, M., & Sovacool, B. K. (2022). Decarbonization, population disruption and resource inventories in the global energy transition. *Nature Communications*, 13(1), 7674. <https://doi.org/10.1038/s41467-022-35391-2>
- Tijan, E., Jović, M., Aksentijević, S., & Pucihar, A. (2021). Digital transformation in the maritime transport sector. *Technological Forecasting and Social Change*, 170, 120879. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120879>
- Verschuur, J., Koks, E., & Hall, J. W. (2022). Ports' criticality in international trade and global supply-chains. *Nature Communications*, 13(1), 4351. <https://doi.org/10.1038/s41467-022-32070-0>
- Wang, W., Li, K., Liu, Y., Lian, J., & Hong, S. (2022). A system dynamics model analysis for policy impacts on green agriculture development: A case of the Sichuan Tibetan Area. *Journal of Cleaner Production*, 371, 133562. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133562>
- Wei, J., Zhang, X., & Tamamine, T. (2024). Digital transformation in supply chains: Assessing the spillover effects on midstream firm innovation. *Journal of Innovation & Knowledge*, 9(2), 100483. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2024.100483>
- Щербakov, B. B., & Silkina, G. (2021). Supply chain management open innovation: Virtual integration in the network logistics system. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(1), 54. <https://doi.org/10.3390/joitmc7010054>



Paidi





HILIRISASI PERKEBUNAN, ENERGI, DAN PENGURANGAN KEMISKINAN REGIONAL DI SUMATERA UTARA

Dr. Paidi, S.E., M.Si.

Ketua ISEI Cabang Medan Koordinator Sumatera Utara

PENDAHULUAN



Sumatera Utara memiliki luas perkebunan kelapa sawit sekitar 1.357 Juta Ha dengan produksi mencapai 8.247 juta ton pada tahun 2024, menjadikannya provinsi penghasil kelapa sawit terbesar keempat di Indonesia setelah Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Provinsi ini juga dilengkapi dengan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, kawasan industri, dan sungai yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA), serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang berfokus pada industri hilir minyak sawit dan karet

MENGAPA HILIRISASI MENJADI AGENDA STRATEGIS SUMATERA UTARA?



01

Salah satu produsen utama sawit, kopi, karet, dan kakao nasional.

02

Potensi panas bumi terbesar di Indonesia.

03

Namun kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah masih terjadi.

Kekayaan sumber daya belum sepenuhnya menjadi kesejahteraan masyarakat.

3

RPJMD SUMATERA UTARA TAHUN 2025-2029

Transformasi Ekonomi Berbasis Hilirisasi

Menjaga stabilitas makro ekonomi daerah melalui



HILIRISASI



EKONOMI HIJAU



INOVASI



TRANSFORMASI DIGITAL



PENGEMBANGAN BIOINDUSTRI

4

HILIRISASI

Jalan Menuju Pusat Bioindustri Nasional

RPJM Nasional menempatkan Sumatera Utara sebagai
PUSAT INDUSTRI INDONESIA didukung oleh:



KEK Sei Mangkei



Kuala Tanjung



Klaster Agroindustri



Sentra Inovasi dan Teknologi Industri

Transformasi ekonomi harus bergeser dari



Commodity Exporter



Value added-Industrial Economy

INTEGRASI PERKEBUNAN DAN ENERGI



Cangkang Kelapa Sawit



BIOMASSA

Cangkang sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar biomassa untuk pembangkit listrik dan industri sehingga meningkatkan nilai ekonomi limbah perkebunan.



Tandan Kosong Kelapa Sawit



BIOENERGY

Tandan kosong sawit dapat diolah menjadi biopelet, kompos, atau bahan baku energi terbarukan yang mendukung ekonomi sirkular.

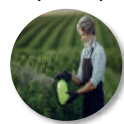


Air Limbah Palm Oil Mill Effluent (POME)



BIOGAS

Limbah cair pabrik kelapa sawit dapat dikonversi menjadi biogas untuk menghasilkan listrik sekaligus mengurangi emisi gas metana.



Residu Pertanian



BIOFUEL

Sisa hasil pertanian seperti batang, daun, dan serbuk kayu dapat diolah menjadi biofuel sebagai alternatif pengganti energi fosil.

MANFAAT



Pendapatan Tambahan Petani



Penurunan Emisi Karbon



Efisiensi Industri



Lapangan Kerja Baru

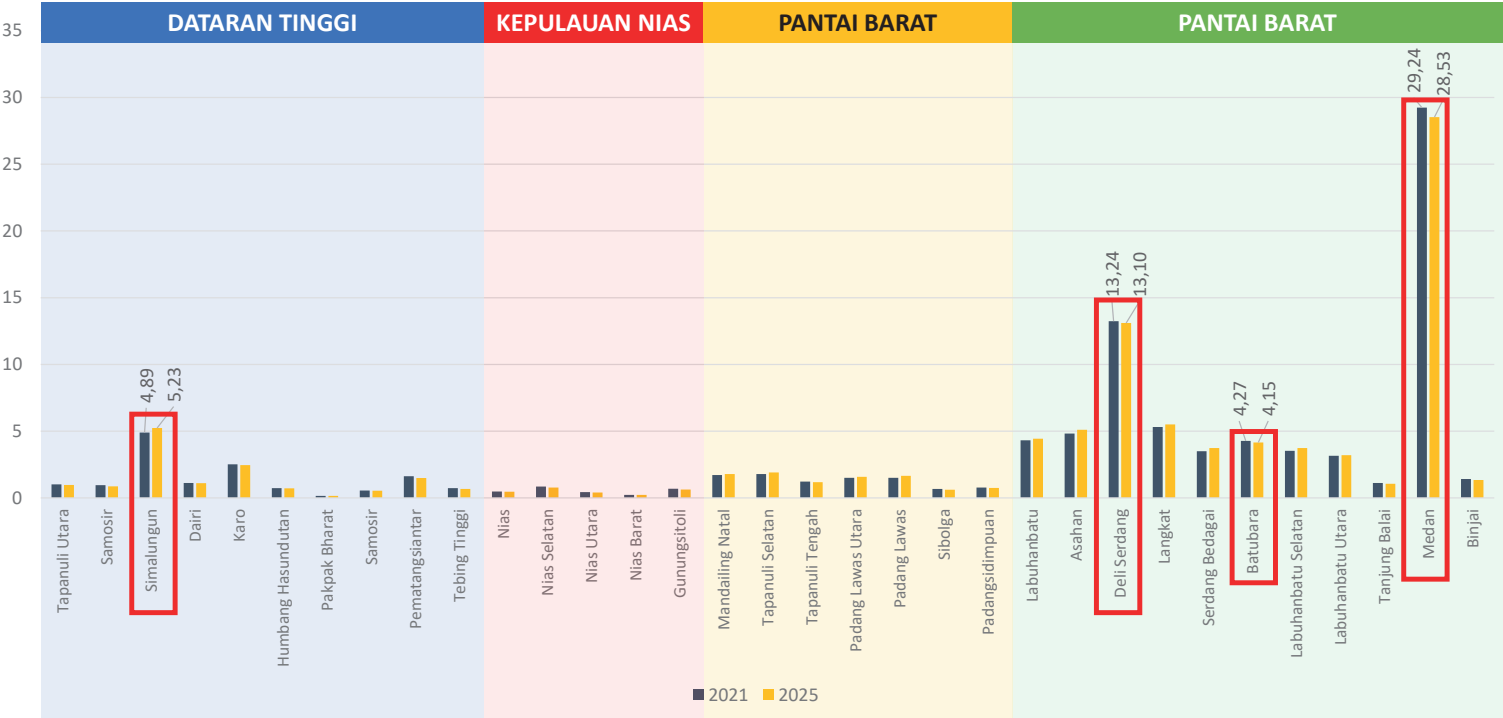
PRODUKSI PERKEBUNAN KABUPATEN/KOTA

Zona	Kabupaten/kota	Kelapa Sawit			Karet		
		2024	2025	%	2024	2025	%
Dataran Tinggi	Tapanuli Utara	386,36	390,91	1,18	6.613,00	6.613,00	0
	Toba	38.984,78	39.036,36	0,13	105	105	0
	Simalungun	725.159,09	725.454,55	0,04	4.866,00	4.866,00	0
	Dairi	6.581,82	6.645,45	0,97	159	159	0
	Karo	31.590,91	29.781,82	-5,73	73	73	0
	Humbang Hasundutan	4.681,82	4.681,82	0	4.023,00	4.023,00	0
	Pakpak Bharat	3.590,91	3.613,64	0,63	800	800	0
Kep. Nias	Nias Selatan	677,27	740,91	9,4	9.999,00	9.999,00	0
	Gunungsitoli	-	-	-	1.349,00	1.349,00	0
Pantai Barat	Mandailing Natal	307.940,91	308.127,27	0,06	52.514,00	52.514,00	0
	Tapanuli Selatan	88.227,27	88.622,73	0,45	14.067,00	14.067,00	0
	Tapanuli Tengah	142.322,73	142.695,45	0,26	23.802,00	23.802,00	0
	Padang Lawas Utara	496.428,41	497.245,45	0,16	30.311,00	30.341,00	0,1
	Padang Lawas	604.645,45	606.100,00	0,24	18.215,00	18.215,00	0
	Padangsidempuan	1.004,55	1.100,00	9,5	1.198,00	1.198,00	0
Pantai Timur	Labuhanbatu	563.500,00	564.472,73	0,17	22.388,00	22.388,00	0
	Asahan	1.656.577,27	1.650.018,18	-0,4	5.566,00	3.255,00	-41,52
	Deli Serdang	236.171,41	236.481,82	0,13	4.598,00	4.598,00	0
	Langkat	781.506,30	782.359,09	0,11	40.497,00	40.537,00	0,1
	Serdang Bedagai	242.022,73	242.550,00	0,22	12.633,00	12.633,00	0
	Batubara	163.163,64	165.081,82	1,18	573	573	0
	Labuhanbatu Selatan	771.290,91	772.059,09	0,1	29.924,00	29.924,00	0
	Labuhanbatu Utara	1.381.327,27	1.382.963,64	0,12	11.804,00	11.804,00	0
Sumatera Utara		8.247.781,80	8.250.554,55	0,03	311.295,00	309.054,00	-0,72

Sumber: Badan Pusat Statistik

7

KONTRIBUSI KABUPATEN/KOTA TERHADAP PDRB SUMATERA UTARA



Sumber: Badan Pusat Statistik

8

PENDUDUK BEKERJA DI SUMATERA UTARA MENURUT KELOMPOK LAPANGAN USAHA

Medan			
Lapangan Usaha	2020	2025	Δ _{2020–2025}
Pertanian	37.411	71.184	33.773
Industri Pengolahan	150.415	112.012	-38.403

Deli Serdang			
Lapangan Usaha	2020	2025	Δ _{2020–2025}
Pertanian	144.425	169.861	25.436
Industri Pengolahan	142.284	145.645	3.361

Simalungun			
Lapangan Usaha	2020	2025	Δ _{2020–2025}
Pertanian	204.499	239.545	35.046
Industri Pengolahan	45.644	46.957	1.313

Sumatera Utara			
Lapangan Usaha	2020	2025	Δ _{2020–2025}
Pertanian	2.424.046	2.594.523	170.477
Industri Pengolahan	655.552	720.974	65.422

9

PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI KEK SEI MANGKEI



No	Perusahaan	Produk	Tujuan Ekspor	JumlahTenaga Kerja	
				2020	2025
1	PT Unilever Oleochemical Indonesia	Oleochemical (Fatty Acid, Surfactant, Glycerin, Soap Noddle)	1.Afrika : Afrika Selatan, Ghana, Maroko, Nigeria 2.Amerika : Amerika Serikat, Kanada, Kolumbia, Argentina,Meksiko, Brazil, Karibia, Trinidad & Tobago 3.Asia Pacific: Australia & Selandia Baru,Bangladesh,Hongkong,Taiwan, Filipina, India, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Nepal, Pakistan, Singapura, Srilanka, Thailand, Turki, Vietnam 4.Eropa: Austria, Belanda, Belgia, Denmark Finlandia, Hungaria, Inggris dan Irlandia, Italia, Jerman, Norway, Perancis, Polandia, Portugal, Republik Ceko, Republik Slovakia, Rumania, Spanyol, Swedia, Swiss, Ukraina, Yunani 5.Timur Tengah: Arab, Israel. 1.Domestik 2. Asia Selatan : India, Pakistan, Bangladesh 3. Asia Timur: Republik Rakyat Tiongkok dan Korea Selatan	1202	1751
2	PT Industri Nabati Lestari	Refinery (Cooking Oil, Purified Fatty Acid (PFAD), Stearin)		360	534
3	PT Basic International Sumatera	Rubber Gloves (Medical Gloves)	Amerika Serikat	0	1465
4	PT Perkebunan Nusantara IV (Palm Co)	Crude Palm Oil (CPO)	Domestik	202	202
5	PT All Cosmos Biotek	Bio-Fertilizer	Domestik	0	230
6	PT Air Products Indonesia	Nitrogen, Hidrogen	Domestik	0	114
7	PT Perkebunan Nusantara IV (Palm Co)	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	Domestik	96	96
8	PT Aice Sumatra Industry	Ice Cream	Domestik	85	1308
9	PT Alliance Consumers Product Indonesia	Soap, Packaging	India	0	696
10	PT Sheel Oil Indonesia	Oleochemicals	India	0	443
11	PT Evyap Sabun Indonesia	Oleochemicals	Turki	0	309

10

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG MASIH DALAM KONSTRUKSI DI KEK SEI MANGKEI



No	Perusahaan	Produk	JumlahTenaga Kerja	
			2020	2025
1	PT Guthrie International Sei Mangkei Refinery	Refinery	0	126
2	PT Eco Oils Jaya Indonesia	Spent Bleaching Earth	0	33
3	PT Tanimas Resources International	Refinery	0	100
4	PT Emery Oleochemical Indonesia	Oleochemicals	0	0
5	PT PTEC Research & Development	EFB Pellet & Green Energy	0	39
6	PT Excel Life Care	Rubber Gloves (Medical Gloves)	0	5
7	PT Surya Alpine Renewables	Refined Pome	0	2
8	PT Green Environment Management Service	WWTP	0	0
9	PT Kim Yee Energy	Biodiesel	0	0
10	PT SGF Oleo Asia	Oleochemical	0	46
11	PT Wanan Bioenergy Indonesia	Biodiesel	0	0
12	PT Alldira Tetap Agung	BTS Tower	0	0
13	PT Mery Linds Sukses	Perhotelan	0	0
14	PT Moehringer Technology Indonesia	Oil Palm Trunk	0	0
15	PT Evyap Sabun Indonesia	Oleochemicals	0	309
16	PT Pertamina Power Indonesia	Pembangkit Listrik Tenaga Biogas	0	0
17	Industri dan mitra lainnya		312	1592

11

HILIRISASI di Kabupaten Deli Serdang



CRUDE PALM OIL



MINYAK MERAH

Di Kabupaten Deli Serdang, pengelolaan hilirisasi sawit oleh koperasi, yakni pabrik minyak makan merah sebagai langkah positif dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat posisi petani dalam industri sawit.

Kapasitas olah pabrik mencapai 10 ton CPO per hari dan targetnya, dalam satu hari menghasilkan 7 ton minyak makan merah.

Keberadaan pabrik minyak makan merah memberikan solusi bagi Petani Rakyat, di mana mereka juga mendapatkan nilai tambah yang jauh lebih besar dibandingkan hanya menjual Tandan Buah Segar (TBS).

12

HILIRISASI di Kabupaten Labuhanbatu Selatan



CRUDE PALM OIL



BIOCNG

Di Kabuapten Labuhanbatu Selatan telah beroperasi pabrik bioCNG (Compressed Natural Gas)/bio gas metana yang ramah lingkungan, yakni mengolah limbah cair kelapa sawit menjadi energi bersih yang dapat menggantikan penggunaan gas alam dan menjadi alternatif untuk bahan bakar kendaraan.

Pabrik ini menghasilkan sebanyak 182.000 Million British Thermal Units (MMBtu) per tahun, dengan menangkap gas rumah kaca metana yang dihasilkan dari limbah cair pabrik kelapa sawit.

BioCNG menjadi peluang energi hijau yang memperkuat ketahanan energi daerah dan memberikan manfaat ekonomi bagi Masyarakat.



13

RENCANA KEBIJAKAN HILIRISASI SAWIT

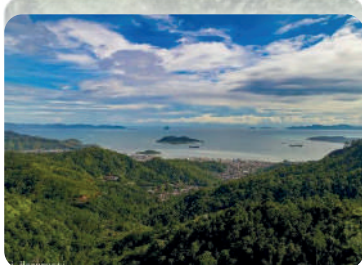


- Percepatan program peremajaan sawit rakyat untuk menjaga kualitas dan kontinuitas bahan baku serta mendorong semua kebun kelapa sawit memiliki sertifikasi ISPO.
- Penetapan KEK Sei Mangkei dan Kawasan Industri (KI) Kuala Tanjung menjadi klaster pengembangan industri hilirisasi kelapa sawit biodiesel B50.
- Pembentukan Peraturan Daerah energi bersih berbasis sawit sebagai payung hukum energi terbarukan dari sawit.
- Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (sedang menyusun)
- Penguatan infrastruktur transportasi terutama Kereta Api dan Pelabuhan Belawan dan Kuala Tanjung.
- Pemberian izin investasi dan insentif terkait hilirisasi kelapa sawit.

Perda Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Integrasi Budidaya Ternak dengan Perkebunan yang bertujuan “Pengurangan Limbah dan mendukung Ekonomi Sirkular serta mendukung Program Ketahanan Pangan dan Energi”

14

PERUSAHAAN ENERGI BARU TERBARUKAN DI SUMATERA UTARA



PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR/MINIHIDRO (PLTA/M)

- › **PT Kencana Energi Lestari, Tbk:** Perusahaan EBT ini memiliki dan mengembangkan sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air di Sumatera Utara, termasuk wilayah Humbang Hasundutan (PLTA Pakkat).
- › **PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE):** Berfokus pada pembangunan PLTA Batang Toru bertipe *run-of-river* yang ramah lingkungan.
- › **PT Aek Sibundong Energi:** Mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di kawasan Dolok Sanggul
- › **PT Bajradewa Utama:** Mengelola PLTA Wampu di Tanah Karo yang memanfaatkan kekuatan aliran air sungai untuk menyuplai energi bersih
- › **PLTA Asahan I & II:** Pembangkit listrik tenaga air legendaris yang memanfaatkan aliran sungai Asahan untuk menghasilkan listrik beremisi rendah.
- › **PT Inalum:** Turut menghadirkan energi bersih di sekitar wilayah operasinya melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
- › **PT Sion & PT Citra Multi Energi (CME):** Perusahaan yang masing-masing mengembangkan dan mengelola PLTM di wilayah Sumut guna mendukung bauran energi hijau

15

PERUSAHAAN ENERGI BARU TERBARUKAN DI SUMATERA UTARA



PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)

- › **PT Sarulla Operations Ltd (SOL) (Tapanuli Utara):** Memegang rekor sebagai salah satu proyek panas bumi dalam satu kontrak tunggal terbesar di dunia. Menggunakan teknologi Geothermal Combined Cycle Units ramah lingkungan yang menginjeksikan kembali 100% sisa air dan uap ke dalam perut bumi (*zero waste water*).
- › **PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) (Mandailing Natal):** Menjadi pilar penting kelistrikan Sumatera Bagian Utara karena harga jual listriknya yang sangat kompetitif bagi PLN. Kompleks PLTP ini memanfaatkan potensi panas bumi di sekitar lereng Gunung Sorik Marapi.
- › **PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) (Sibayak):** Merupakan salah satu PLTP pionir skala kecil yang beroperasi di Wilayah Kerja Produksi (WKP) Gunung Sibayak-Gunung Sinabung.

16

STRATEGI ENERGI DAERAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022-2050



ARAH KEBIJAKAN 1

PENYEDIAAN ENERGI UNTUK KEBUTUHAN DAERAH

1. Meningkatkan eksplorasi sumberdaya, potensi, dan/atau cadangan terbukti energi dari energi baru terbarukan
2. Penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi untuk rumah tangga, transportasi, industry dan pertanian
3. Meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi

ARAH KEBIJAKAN 2

PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN

1. Pemanfaatan sumber EBT diarahkan untuk ketenagalistrikan
2. Pemanfaatan Sumber EBT diarahkan untuk sektor produktif

17

STRATEGI ENERGI DAERAH

ARAH KEBIJAKAN 3

KONSERVASI DAN DIVERSIFIKASI ENERGI

1. Konservasi energi Perumusan kebijakan konservasi energi
 - a. Penerapan system manajemen energi
 - b. Standardisasi dan labelisasi peralatan pengguna energi
 - c. Pengalihan ke moda transportasi massal
 - d. Membangun budaya hemat energi
 - e. Pengurangan kontribusi PLTD untuk pembangkitan listrik
2. Diversifikasi energi (Program Zero Kerosene, Penggunaan Kendaraan listrik, Perwujudan Green Industry)

ARAH KEBIJAKAN 5

HARGA, SUBSIDI, DAN INSENTIF ENERGI

1. Harga energi yang berkeadilan
2. Insentif penggunaan energi baru terbarukan
3. Insentif penggunaan transportasi massal

ARAH KEBIJAKAN 4

LINGKUNGAN HIDUP

1. Pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan dari Sektor Energi
2. Penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan

ARAH KEBIJAKAN 6

KEMAMPUAN PENGELOLAAN ENERGI

1. Pengembangan kemampuan pengelolaan energi
2. Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah melakukan penguatan kelembagaan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi
3. Pengembangan energi dan sumber daya energi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri

18

BAGAIMANA HILIRISASI BISA MENGURANGI KEMISKINAN?



RPJMD Sumatera Utara menekankan *Pertumbuhan ekonomi harus inklusif dan berbasis desa.*

THANK YOU

Hilirisasi Perkebunan, Energi, dan Pengurangan Kemiskinan Regional di Sumatera Utara

"Hilirisasi menjadi bermakna ketika sumber daya alam tidak lagi berhenti sebagai komoditas, tetapi menjadi sumber kesejahteraan masyarakat"

— Paidi

I. PENDAHULUAN

Indonesia tengah memasuki fase penting dalam perjalanan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai visi tersebut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak lagi memadai. Transformasi ekonomi menjadi kebutuhan utama agar pembangunan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat daya saing nasional di tengah dinamika ekonomi global. Dalam hal ini, hilirisasi menjadi salah satu strategi pembangunan yang memperoleh perhatian besar karena mampu mengubah pola pemanfaatan sumber daya alam dari sekadar penghasil bahan mentah menjadi penggerak industri yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.

Selama beberapa dekade, perekonomian Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor komoditas primer, seperti hasil perkebunan, pertanian, pertambangan, dan perikanan. Pola pembangunan tersebut menyebabkan sebagian besar nilai tambah justru dinikmati oleh negara atau daerah lain yang memiliki industri pengolahan. Akibatnya, daerah penghasil komoditas belum memperoleh manfaat ekonomi yang optimal meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlimpahan sumber daya alam tidak secara otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila tidak diikuti dengan pengembangan industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah di dalam daerah.

Hilirisasi adalah pendekatan yang bertujuan memperkuat keterkaitan antara sektor hulu dan sektor hilir melalui pembangunan rantai nilai yang terintegrasi. Melalui proses ini, komoditas tidak hanya diproduksi sebagai bahan baku, tetapi diolah menjadi produk antara maupun produk akhir yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Dampaknya tidak hanya tercermin pada peningkatan output industri, tetapi juga pada tumbuhnya investasi, berkembangnya inovasi, meningkatnya permintaan tenaga kerja, serta munculnya berbagai aktivitas ekonomi baru yang memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian daerah. Hilirisasi tidak hanya dipandang sebagai kebijakan industrialisasi, tetapi juga sebagai strategi pembangunan ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda hilirisasi nasional. Provinsi ini memiliki keunggulan komparatif berupa sumber daya alam yang melimpah, terutama pada sektor perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, kopi, kakao, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Selain itu, keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kawasan Industri Kuala Tanjung, jaringan pelabuhan, serta infrastruktur transportasi memberikan fondasi yang kuat bagi pengembangan industri berbasis sumber daya daerah. Kombinasi antara ketersediaan bahan baku, infrastruktur, dan dukungan kebijakan tersebut menjadikan Sumatera Utara memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai salah satu pusat bioindustri nasional yang mampu meningkatkan daya saing ekonomi.

Hilirisasi di Sumatera Utara tidak hanya berkaitan dengan pengembangan industri pengolahan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan energi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan limbah perkebunan sebagai biomassa, biogas, dan biofuel menunjukkan bahwa sumber daya yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal dapat diolah menjadi energi terbarukan yang bernilai ekonomi. Pendekatan tersebut tidak hanya mendukung efisiensi produksi dan pengurangan emisi karbon, tetapi juga membuka peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan energi

daerah. Hilirisasi menjadi bagian dari upaya mewujudkan ekonomi sirkular yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan pembangunan sosial. Yaqin & Mu'min (2026) menyatakan bahwa hilirisasi di Indonesia berkaitan positif dengan penguatan ketahanan energi, terutama melalui peningkatan kapasitas dan akses energi.

Keberhasilan hilirisasi tidak hanya diukur dari meningkatnya kapasitas industri atau nilai ekspor, tetapi juga dari kemampuannya dalam menciptakan pembangunan yang lebih inklusif. Industri hilir yang berkembang diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan nilai jual komoditas, memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah sentra produksi. Oleh karena itu, hilirisasi memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan regional dan mempersempit kesenjangan pembangunan antarwilayah melalui penciptaan aktivitas ekonomi yang lebih merata.

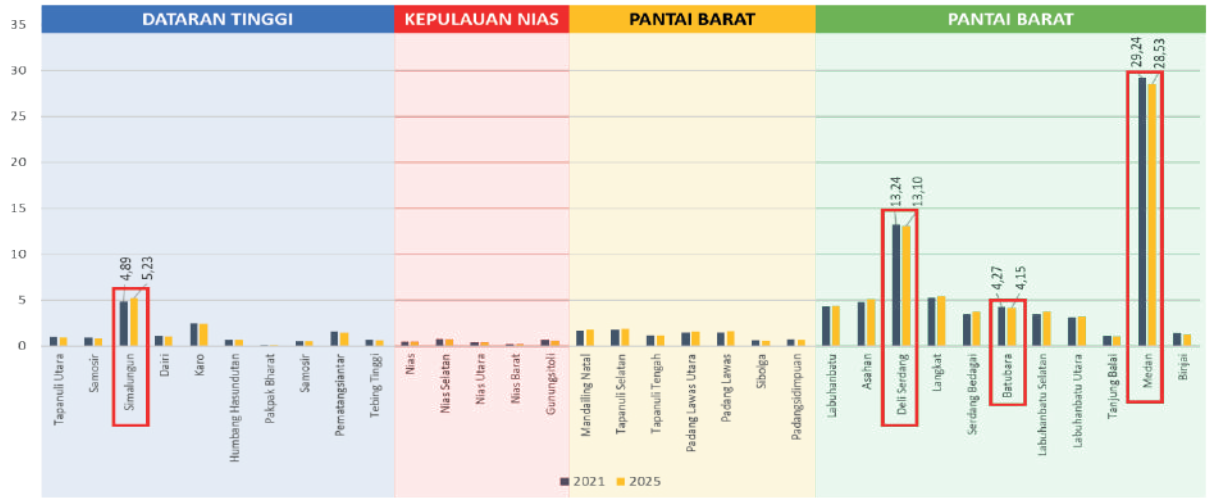
II. HILIRISASI PERKEBUNAN DI SUMATERA UTARA

Perekonomian Sumatera Utara memiliki basis yang kuat pada sektor-sektor berbasis sumber daya alam, khususnya perkebunan, pertanian, dan perikanan. Sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penyerapan tenaga kerja. Namun, sebagian aktivitas ekonomi masih berorientasi pada produksi dan perdagangan komoditas primer, sehingga nilai tambah yang dihasilkan di tingkat daerah belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal sebagai upaya untuk memperpanjang rantai nilai, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih produktif. Dalam konteks tersebut, hilirisasi perkebunan menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan sekaligus memperkuat transformasi struktur ekonomi Sumatera Utara. Oleh karena itu, transformasi ekonomi diarahkan pada penguatan sektor industri berbasis sumber daya lokal melalui strategi hilirisasi (Sulistiawati & Lestari, 2022).

Hilirisasi merupakan proses peningkatan nilai tambah melalui pengolahan komoditas menjadi produk antara maupun produk akhir yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Hilirisasi juga dapat menjadi instrumen transformasi ekonomi regional karena pengembangan industri pengolahan berpotensi memperkuat perubahan struktur ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan *multiplier effect* terhadap sektor-sektor lain apabila didukung oleh investasi, infrastruktur, dan keterkaitan industri domestik (Muhyiddin et al., 2026). Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan daya saing industri, tetapi juga memperkuat keterkaitan antara sektor hulu dan sektor hilir dalam suatu rantai nilai (*value chain*) yang terintegrasi. Dengan berkembangnya industri pengolahan, aktivitas ekonomi tidak lagi hanya bertumpu pada produksi bahan mentah, tetapi berkembang menuju kegiatan manufaktur, logistik, perdagangan, penelitian, dan inovasi. Transformasi tersebut diharapkan mampu menciptakan *multiplier effect* yang mendorong pertumbuhan investasi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Pada Sumatera Utara, pengembangan hilirisasi memiliki fundamental yang kuat karena ketersediaan sumber daya alam, infrastruktur, dan kawasan industri yang strategis. Sumatera Utara merupakan salah satu sentra produksi kelapa sawit, karet, kopi, kakao, dan berbagai komoditas perkebunan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah tinggi. Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei

Mangkei, Kawasan Industri Kuala Tanjung, Pelabuhan Kuala Tanjung, serta jaringan transportasi yang semakin berkembang menjadi modal penting dalam membangun ekosistem industri yang terintegrasi. Sumatera Utara memiliki peluang untuk bertransformasi dari daerah penghasil komoditas primer menjadi pusat bioindustri yang mampu menghasilkan berbagai produk hilir yang kompetitif di pasar nasional dan internasional.

Gambar 1. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan gambar 1 di atas, wilayah yang memiliki kawasan industri, seperti Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Simalungun, dan Batu Bara memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan daerah lainnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya memperkuat ekonomi antarwilayah melalui pengembangan kawasan industri berbasis potensi daerah dalam rangka mendukung proses hilirisasi. Hilirisasi menjadi strategi yang relevan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan di berbagai daerah, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan inklusif.

Konsep bioindustri yang dikembangkan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas industri pengolahan, tetapi juga pada pemanfaatan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Pengembangan industri berbasis biomassa, bioenergi, dan produk turunan perkebunan menjadi bagian dari strategi untuk menciptakan ekonomi sirkular yang meminimalkan limbah sekaligus meningkatkan efisiensi produksi. Hilirisasi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan nilai tambah, tetapi juga mendukung pencapaian pembangunan hijau (*green economy*) yang semakin penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan tuntutan pasar global terhadap produk yang berkelanjutan.

Pengembangan produk bernilai tambah melalui hilirisasi merupakan salah satu bentuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. Namun demikian, keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan produk akhir, tetapi juga oleh efisiensi dalam memanfaatkan seluruh sisa hasil produksi dan limbah yang dihasilkan selama proses produksi. Oleh karena itu, pendekatan *circular economy* menjadi semakin penting karena mendorong

pemanfaatan kembali sumber daya sehingga limbah tidak lagi dipandang sebagai sisa produksi, melainkan sebagai bahan baku bagi proses produksi berikutnya (Firdaus & Alifiyah, 2025). Pemanfaatan limbah dan sisa hasil produksi dapat menjadi bagian dari strategi penciptaan nilai baru sekaligus mengurangi limbah dan emisi melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular (Maria Coelho Vianna et al., 2024; Siagian et al., 2024).

Gambar 2. Model Circular Economy



Berdasarkan Gambar 2, penerapan circular economy dalam industri kelapa sawit dilakukan melalui pemanfaatan berbagai sisa hasil produksi menjadi produk baru yang memiliki nilai tambah. Cangkang kelapa sawit dimanfaatkan sebagai biomassa (*biomass*) untuk menghasilkan energi panas maupun listrik yang dapat digunakan kembali dalam proses industri. Pemanfaatan biomassa tersebut mampu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus meningkatkan efisiensi biaya produksi (Sodri & Septiana, 2022).

Selain itu, tandan kosong kelapa sawit diolah menjadi berbagai produk seperti kompos, biopellet, maupun bahan baku bioenergi. Pengolahan ini tidak hanya mengurangi volume limbah padat yang dihasilkan pabrik kelapa sawit, tetapi juga meningkatkan produktivitas sektor perkebunan melalui pemanfaatan kembali unsur hara dalam bentuk pupuk organik. Di sisi lain, limbah cair pabrik kelapa sawit (*Palm Oil Mill Effluent* atau POME) dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi biogas yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik sekaligus menurunkan emisi gas metana yang berpotensi memperburuk perubahan iklim. Pemanfaatan limbah agroindustri untuk menghasilkan energi bersih merupakan salah satu bentuk penerapan circular economy, meskipun keberhasilannya membutuhkan dukungan teknologi, pengelolaan rantai pasok, dan kapasitas pengelolaan energi yang memadai (Agustina et al., 2025; Fernando et al., 2022; Setiawan et al., 2025).

Penerapan *circular economy* juga mencakup pemanfaatan berbagai residu pertanian, seperti batang, pelepah, daun, dan serbuk kayu yang dapat diolah menjadi biofuel sebagai sumber energi alternatif. Diversifikasi pemanfaatan sisa hasil produksi tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh komponen dalam rantai produksi kelapa sawit dapat dimanfaatkan kembali sehingga limbah yang dibuang ke lingkungan menjadi semakin kecil. Dengan begitu, industri tidak hanya mem-

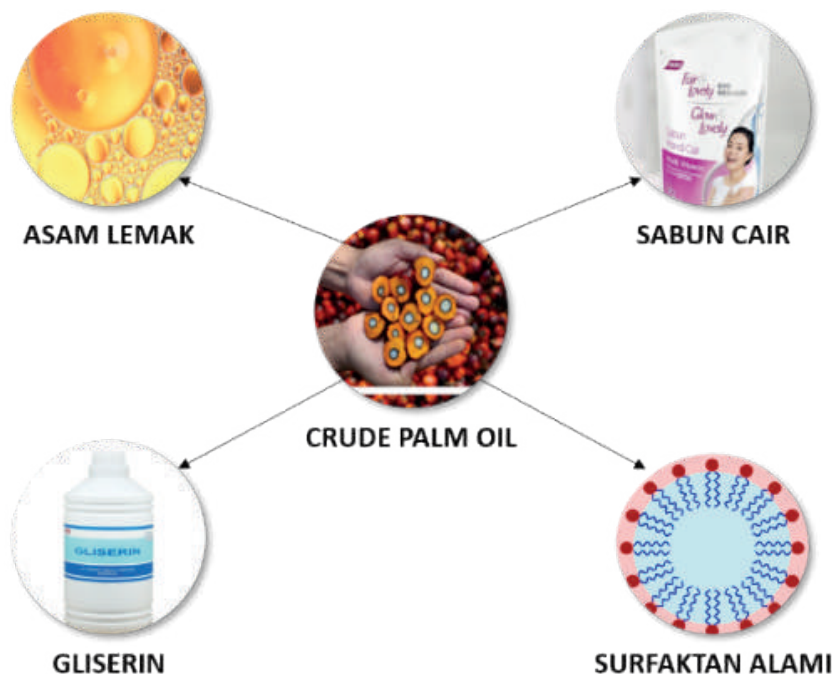
peroleh manfaat ekonomi melalui penciptaan produk baru, tetapi juga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan memperkuat keberlanjutan sistem produksi.

Implementasi *circular economy* memberikan berbagai manfaat bagi pembangunan daerah. Dari sisi ekonomi, pemanfaatan sisa hasil produksi industri mampu menciptakan sumber pendapatan baru bagi petani dan pelaku usaha serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dari sisi lingkungan, penggunaan biomassa, biogas, dan biofuel berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon serta pengurangan limbah industri. Sementara itu, dari sisi sosial, berkembangnya industri pengolahan membuka peluang investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, penerapan *circular economy* menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung hilirisasi perkebunan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi Sumatera Utara sebagai pusat bioindustri nasional.

III. IMPLEMENTASI HILIRISASI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Hilirisasi pada sektor perkebunan tidak berhenti pada proses pengolahan bahan baku menjadi produk setengah jadi, tetapi berkembang hingga menghasilkan berbagai produk akhir yang memiliki nilai tambah tinggi dan digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit, dapat menjadi bahan baku bagi beragam industri, mulai dari industri pangan, kosmetik, farmasi, produk rumah tangga, hingga energi terbarukan. Semakin panjang rantai pengolahan yang dilakukan di dalam negeri, semakin besar pula nilai ekonomi, kesempatan kerja, dan investasi yang dapat diciptakan.

Gambar 3. Produk Hilirisasi di Provinsi Sumatera Utara



**PT Unilever
Oleochemical
Indonesia**

Unilever Oleochemical Indonesia telah berhasil mengurangi separuh jejak karbonnya dan menghasilkan produk ultra-murni dengan merek Unioleo.



PT Industri Nabati Lestari

Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari holding PTPN III.
Perusahaan ini mengolah *Crude Palm Oil* menjadi produk turunan

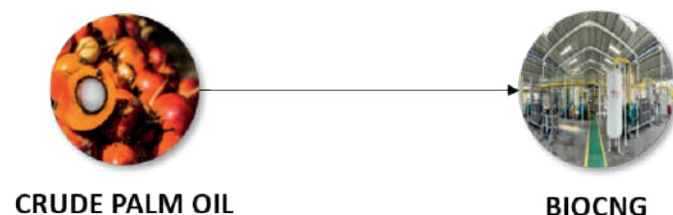
Pabrik Minyak Makan Merah

Di Sumatera Utara, pengelolaan hilirisasi sawit oleh koperasi, yakni pabrik minyak makan merah di Kabupaten Deli Serdang dianggap sebagai langkah positif dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat posisi mereka dalam industri sawit. Kapasitas olah pabrik ini adalah 10 ton CPO per hari dan targetnya, dalam satu hari menghasilkan 7 ton minyak makan merah. Keberadaan pabrik minyak makan merah memberikan solusi bagi Petani Rakyat, di mana mereka juga mendapatkan nilai tambah yang jauh lebih besar dibandingkan hanya menjual Tandan Buah Segar (TBS).



Pabrik BioCNG

Pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah beroperasi pabrik bioCNG (Compressed Natural Gas)/biogas metana yang ramah lingkungan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mengolah limbah cair kelapa sawit menjadi energi bersih yang dapat menggantikan penggunaan gas alam dan menjadi alternatif untuk bahan bakar kendaraan. Pabrik ini menghasilkan sebanyak 182.000 Million British Thermal Units (MMBtu) per tahun, dengan menangkap gas rumah kaca metana yang dihasilkan dari limbah cair pabrik kelapa sawit. BioCNG

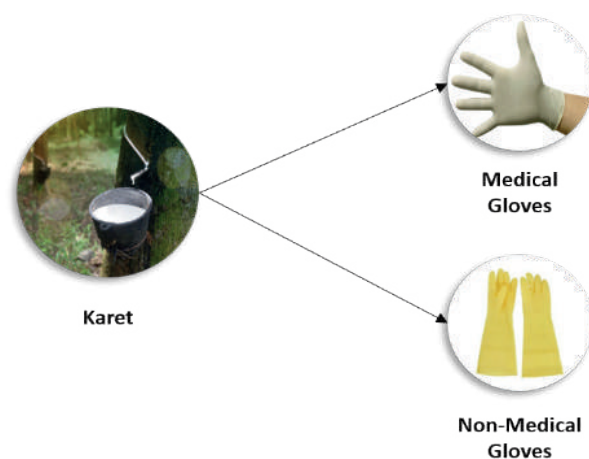


menjadi peluang energi hijau yang memperkuat ketahanan energi daerah dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat

Selain kelapa sawit, karet merupakan komoditas perkebunan yang memiliki peluang untuk dikembangkan melalui hilirisasi di Sumatera Utara. Hilirisasi karet dapat diarahkan tidak hanya pada pengolahan bahan baku menjadi produk antara, tetapi juga pada pengembangan produk olahan dan barang jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Pengembangan tersebut dapat memperkuat keterkaitan antara perkebunan rakyat, industri pengolahan, dan pasar sehingga manfaat ekonomi dari komoditas karet dapat lebih banyak dinikmati di daerah penghasil. Diversifikasi hilirisasi pada komoditas karet penting untuk memperluas basis industri perkebunan dan mengurangi ketergantungan terhadap satu komoditas utama.

PT Basic International Sumatera

Pada KEK Sei Mangkei telah berdiri perusahaan manufaktur teknologi tinggi dan bagian dari jaringan global spesialis produk pelindung sekali pakai dan alat kesehatan. Perusahaan ini mengolah karet menjadi sarung tangan medis, non-medis, dan produk perawatan fisioterapi.



Sementara itu, untuk penerapan hilirisasi perkebunan di Sumatera Utara didukung oleh regulasi pemerintah daerah melalui Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Integrasi Budidaya Ternak dengan Perkebunan yang bertujuan untuk Pengurangan Limbah dan Mendukung Ekonomi Sirkular serta Mendukung Program Ketahanan Pangan dan Energi. Selain itu, adanya dukungan kebijakan terkait hilirisasi perkebunan di Sumatera Utara, antara lain percepatan program peremajaan sawit rakyat untuk menjaga kualitas dan kontinuitas bahan baku serta mendorong semua kebun kelapa sawit memiliki sertifikasi ISPO; penetapan KEK Sei Mangkei dan Kawasan Industri Kuala Tanjung menjadi klaster pengembangan industri hilirisasi kelapa sawit biodiesel B50; pembentukan Peraturan Daerah energi bersih berbasis sawit sebagai payung hukum energi terbarukan dari sawit; penguatan infrastruktur transportasi terutama kereta api dari Pelabuhan Belawan dan Kuala Tanjung; serta kemudahan pemberian izin investasi dan insentif terkait hilirisasi kelapa sawit.

IV. HILIRSASI UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Keberhasilan hilirisasi tidak hanya diukur dari kemampuan menghasilkan produk bernilai tambah, tetapi juga dari kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan industri hilir menciptakan rantai nilai yang lebih panjang sehingga manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pelaku industri, tetapi juga mengalir kepada petani, pekerja, pelaku usaha mikro, penyedia jasa logistik, hingga masyarakat di sekitar kawasan industri (Amalia, 2023). Dengan begitu, hilirisasi berperan sebagai instrumen pembangunan yang mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong pembangunan yang lebih inklusif.

Gambar 4. Hilirisasi dalam Mendukung Pengurangan Kemiskinan



Gambar 4 menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan melalui hilirisasi merupakan proses yang berlangsung secara bertahap dan saling berkaitan. Tahap pertama diawali dengan pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pembangunan ekonomi daerah. Komoditas perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao menjadi bahan baku utama yang mendorong tumbuhnya aktivitas industri pengolahan. Ketersediaan bahan baku yang melimpah memberikan daya tarik bagi investasi sekaligus memperkuat basis pengembangan industri hilir di Sumatera Utara.

Tahap berikutnya adalah proses hilirisasi yang mengubah komoditas primer menjadi berbagai produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Proses ini memperluas rantai nilai (*value chain*) sehingga aktivitas ekonomi tidak berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi berkembang ke sektor pengolahan, distribusi, pemasaran, dan berbagai layanan pendukung lainnya. Berkembangnya industri hilir juga mendorong inovasi teknologi, peningkatan produktivitas, serta memperbesar kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian daerah.

Perluasan kegiatan industri selanjutnya meningkatkan kebutuhan tenaga kerja pada berbagai tingkat keterampilan, mulai dari tenaga produksi, logistik, teknik, hingga jasa pendukung. Bertambahnya kesempatan kerja memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang selama ini bergantung pada sektor primer. Peningkatan penyerapan tenaga kerja tersebut diikuti oleh kenaikan pendapatan rumah tangga, baik melalui upah pekerja maupun meningkatnya nilai jual komoditas yang diproduksi petani sebagai pemasok bahan baku industri. Peningkatan pendapatan rumah tangga pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan pengurangan kesenjangan regional. Masyarakat memperoleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan dasar, sementara aktivitas ekonomi yang semakin berkembang menciptakan *multiplier effect* bagi sektor-sektor lainnya. Hilirisasi tidak hanya menjadi strategi peningkatan nilai tambah komoditas, tetapi juga merupakan instrumen pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

V. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut, penguatan hilirisasi perkebunan di Sumatera Utara memerlukan ekosistem kebijakan yang terintegrasi, mulai dari pengembangan kawasan industri, penguatan rantai nilai berbasis wilayah, integrasi perkebunan dengan energi, serta peningkatan kapasitas petani, UMKM, dan sumber daya manusia. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat ditempuh disajikan pada Tabel berikut:

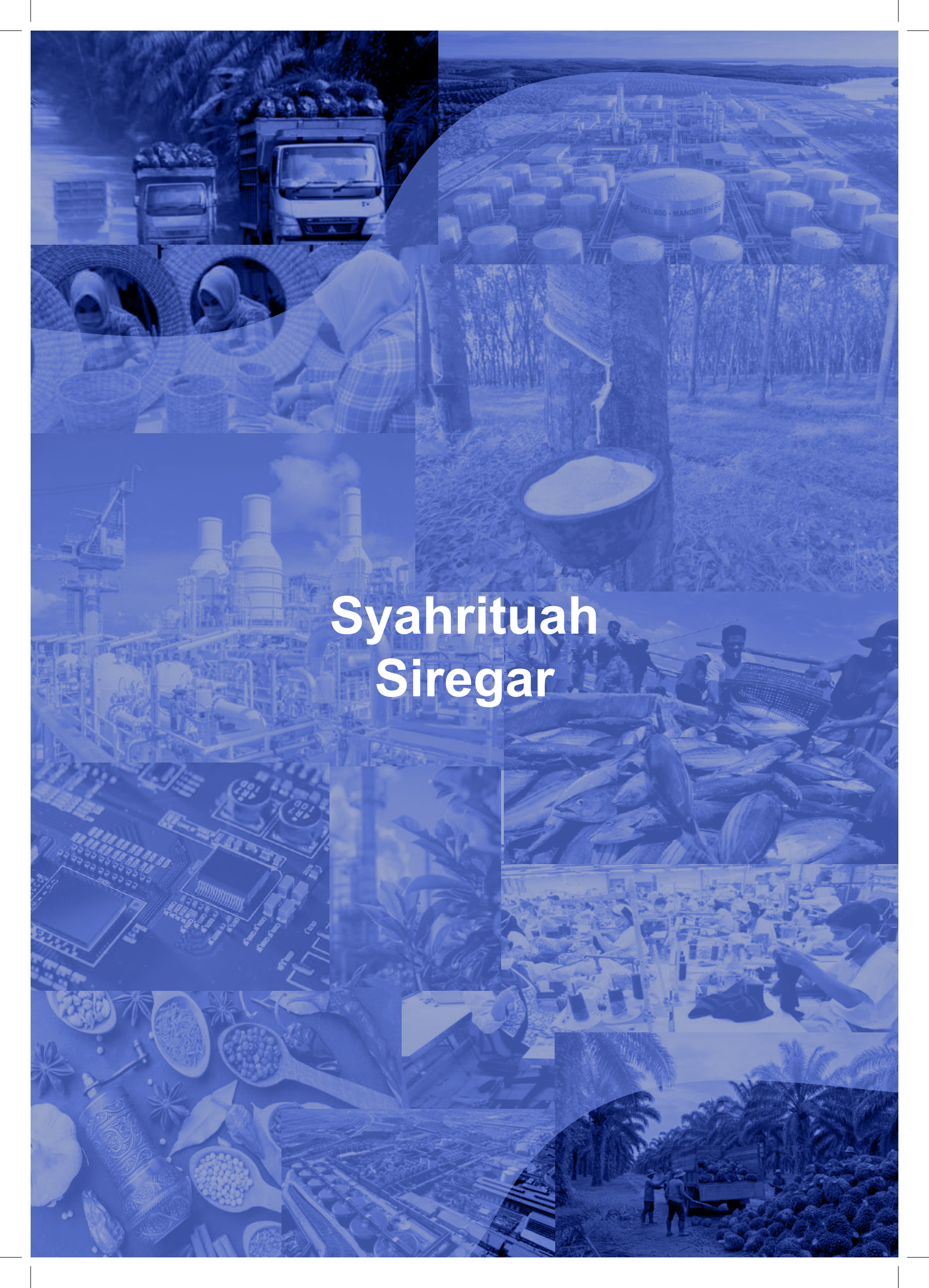
Tabel 1. Rekomendasi Kebijakan Hilirisasi

No.	Agenda Strategis	Rekomendasi Kebijakan
1	Kawasan industri hilirisasi	Memperkuat dan mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan sentra perkebunan, khususnya melalui optimalisasi KEK Sei Mangkei dan KI Kuala Tanjung.
2	Konektivitas dan logistik	Meningkatkan konektivitas sentra produksi, kawasan industri, pusat perdagangan, dan pelabuhan untuk membentuk rantai nilai antardaerah.
3	Klaster hilirisasi berbasis wilayah	Membentuk klaster hilirisasi berdasarkan komoditas unggulan dan karakteristik wilayah, seperti sawit, karet, kopi, dan kakao.
4	Integrasi perkebunan & energi	Mengembangkan pemanfaatan sisa hasil produksi dan limbah perkebunan menjadi biomassa, biogas, BioCNG, dan sumber energi terbarukan lainnya.
5	Keterlibatan Petani dan UMKM	Memperkuat kemitraan petani, koperasi, UMKM, dan industri melalui akses pembiayaan, teknologi, pasar, serta integrasi dalam rantai pasok hilirisasi.
6	Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia	Mengembangkan pendidikan vokasi, pelatihan, dan sertifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri hilir dan energi.
7	Riset dan inovasi	Memperkuat kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha dalam riset terapan, inovasi teknologi, dan pengembangan produk hilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, L., Suprihatin, S., Indrasti, N. S., & Prasetya, H. (2025). Implementing Biogas Technology as a Liquid Waste Management Strategy in Palm Oil Mills to Promote A Circular Economy. *Jurnal Teknologi & Industri Hasil Pertanian*, 30(2), 167–177. <https://doi.org/10.23960/jtihip.v30i2.167-177>
- Amalia, D. N. (2023). Dampak Kebijakan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa Sawit Swadaya. *Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis*, 26(02), 15–26. <https://doi.org/10.22437/jiseb.v26i02.27004>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2026). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha 2021–2025*. <https://sumut.bps.go.id/id/publication/2026/04/06/c50a4ae09c8476aaf379e864/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-sumatera-utara-menurut-lapangan-usaha-2021-2025.html>

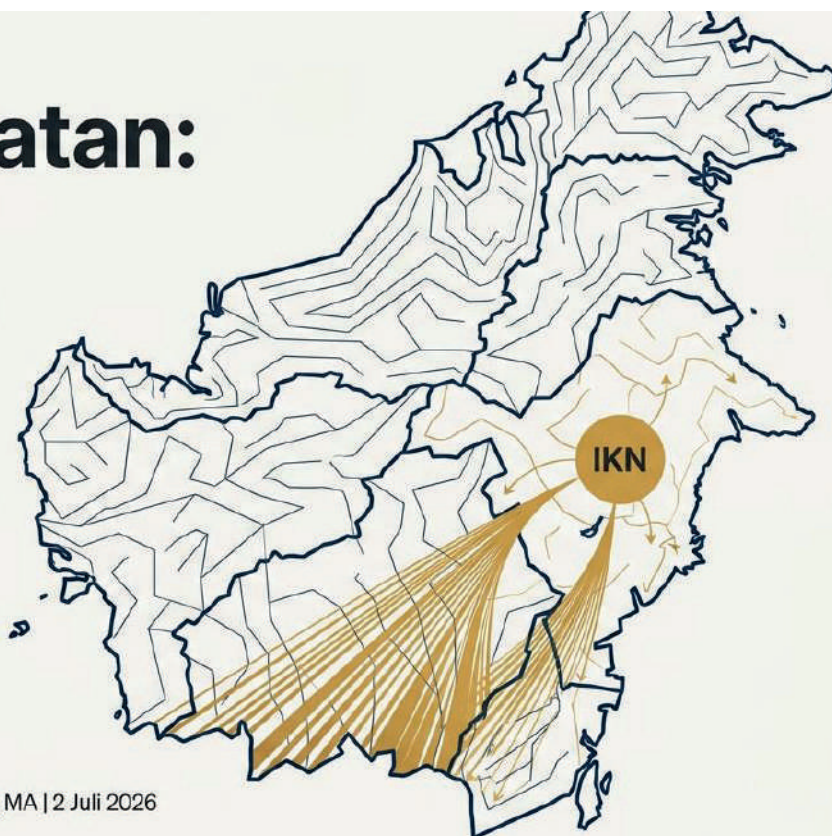
- Fernando, Y., Tseng, M.-L., Aziz, N., Ikhsan, R. B., & Wahyuni-TD, I. S. (2022). Waste-to-energy supply chain management on circular economy capability: An empirical study. *Sustainable Production and Consumption*, 31, 26–38. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2022.01.032>
- Firdaus, T., & Alifiyah, F. L. N. (2025). Circular Economy In The Palm Oil Industry: Global Trends, Potentials, and Opportunities for Green Economy In Indonesia. *International Journal of Oil Palm*, 8(2), 1–16. <https://doi.org/10.35876/ijop.v8i2.125>
- Maria Coelho Vianna, L., de Oliveira, L., & Durante Mühl, D. (2024). Waste Valorization in Agribusiness Value Chains. *Waste Management Bulletin*, 1(4), 195–204. <https://doi.org/10.1016/j.wmb.2023.10.009>
- Muhyiddin, M., Mendatu, A., Amrizal, M. D. R., & Wahyuningrat, J. (2026). Dapatkah Hilirisasi Mineral Mendorong Transformasi Ekonomi Daerah? Bukti dari Indonesia Morowali Industrial Park. *Bappenas Working Papers*, 9(2), 256–273. <https://doi.org/10.47266/bwp.v9i2.559>
- Setiawan, A. F., Haryanto, A., Hasanudin, U., Triyono, S., & Iryani, D. A. (2025). Biogas Production from Palm Oil Mill Effluent and the Prospect of Co-digestion with Empty Fruit Bunches – A Comprehensive Review. *Jurnal Teknik Pertanian Lampung (Journal of Agricultural Engineering)*, 14(5), 1976–2005. <https://doi.org/10.23960/jtepl.v14i5.1976-2005>
- Siagian, U. W. R., Wenten, I. G., & Khoiruddin, K. (2024). Circular Economy Approaches in the Palm Oil Industry: Enhancing Profitability through Waste Reduction and Product Diversification. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 56(1), 25–49. <https://doi.org/10.5614/j.eng.technol.sci.2024.56.1.3>
- Sodri, A., & Septriana, F. E. (2022). Biogas Power Generation from Palm Oil Mill Effluent (POME): Techno-Economic and Environmental Impact Evaluation. *Energies*, 15(19), 7265. <https://doi.org/10.3390/en15197265>
- Sulistiawati, R., & Lestari, N. (2022). Structure Transformation in Indonesia: Perspectives from The Economics and Labor in The Industry Revolution 4.0. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan (JEBIK) 2022*, 11(1), 15–28. <https://doi.org/10.26418/jebik.v11i1.49374>
- Yaqin, M., & Mu'min, M. S. (2026). Downstream Policy in Indonesia: Does it Support Energy Security? *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 10(2), 266–281. <https://doi.org/10.36574/jpp.v10i2.798>



Syahrituah Siregar

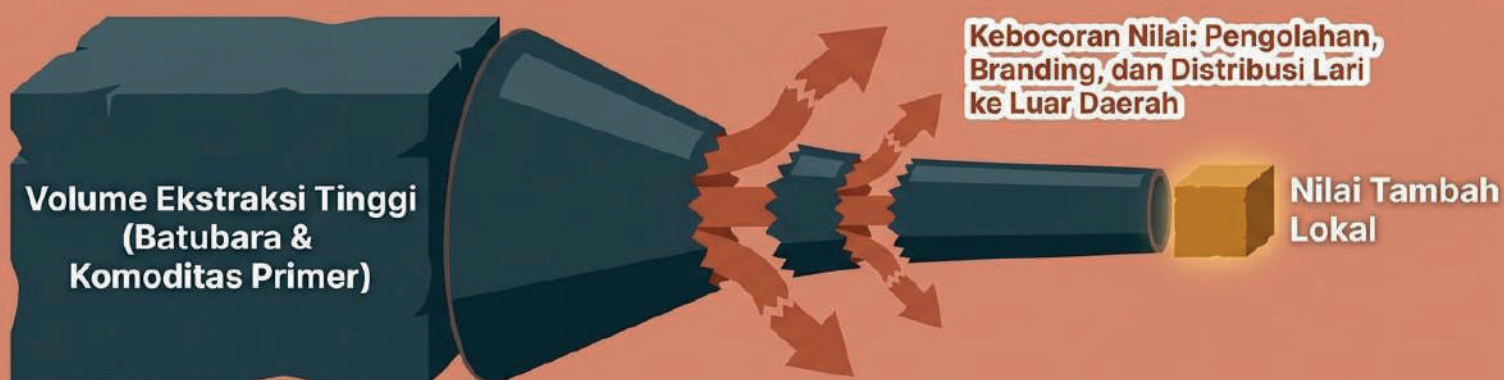
Kalimantan Selatan: Regional Value Capture Hub

Hilirisasi Selektif, Agroindustri Inklusif, dan Logistik Terpadu sebagai Pengungkit Transformasi IKN



Berdasarkan Gagasan Sumitronomics | Dr. Syahrutuah Siregar, SE, MA | 2 Juli 2026

Paradoks Struktural: Kaya Komoditas, Lemah Penangkapan Nilai



Ilusi Volume

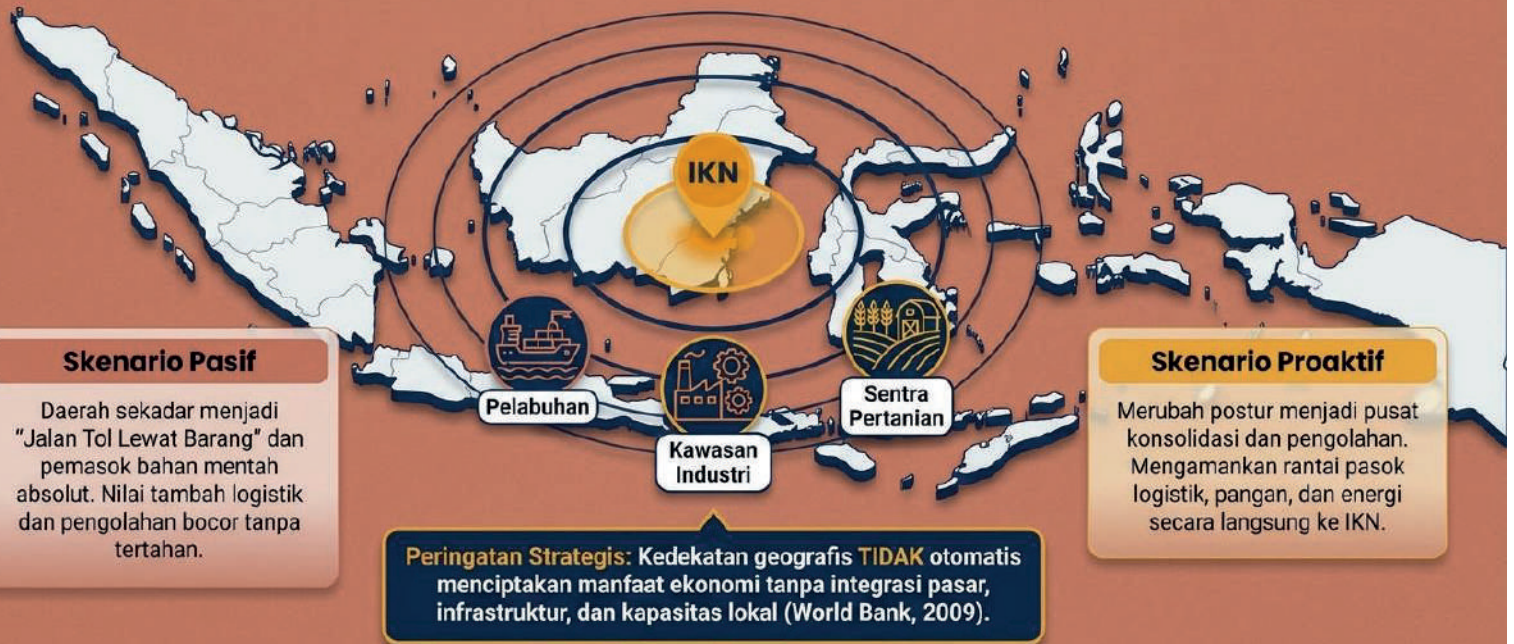
Ketergantungan pada ekstraksi komoditas memicu kerentanan struktural. Volume ekspor tinggi, namun penguasaan rantai nilai tertinggal jauh.

Bukti Kerentanan

Pertumbuhan Triwulan I 2025 melambat akibat pelemahan permintaan global. Sektor primer gagal menyerap tenaga kerja secara massal.

Kesimpulan: Produksi saja tidak cukup. Pembangunan sejati membutuhkan keterkaitan sektoral ke hulu dan ke hilir yang kuat (Hirschman, 1958).

Pengungkit Gravitasi IKN: Ancaman Transit atau Peluang Hub?

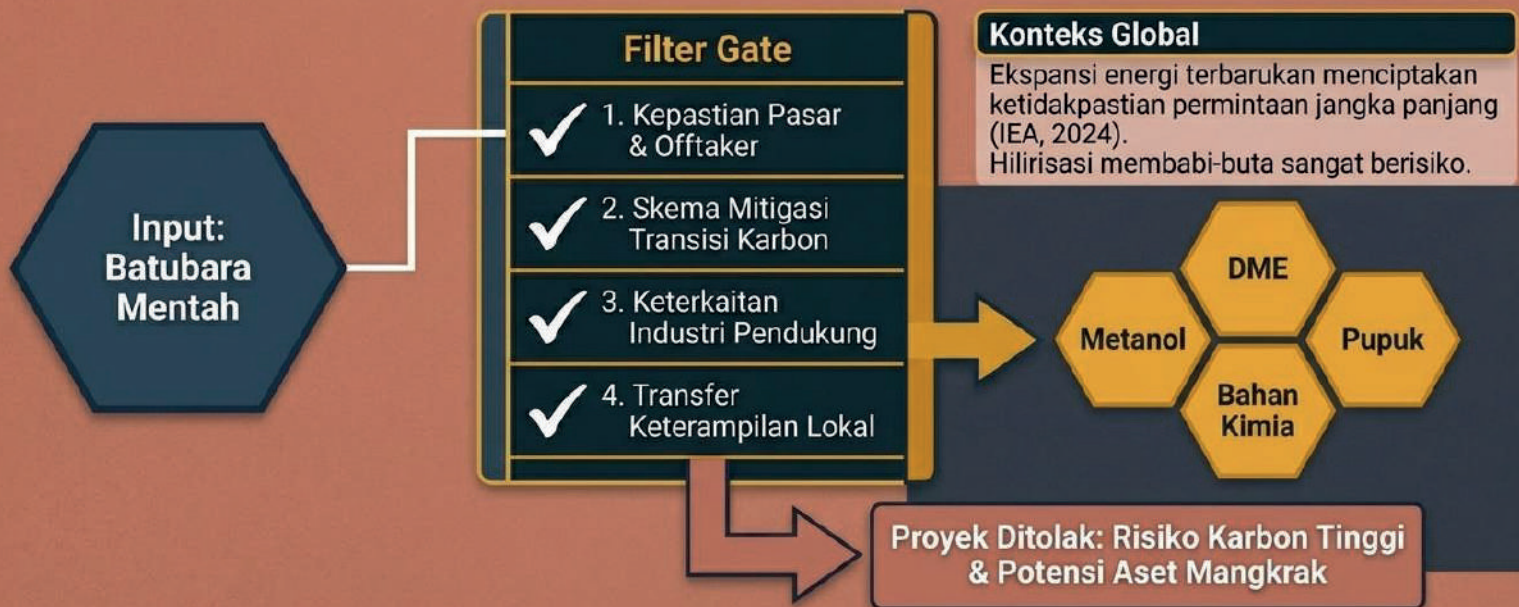


Visi Transformasi: Regional Value Capture Hub



Bergeser dari penyedia sumber daya ekstraktif menjadi pusat pengolahan, standarisasi, pembiayaan, dan distribusi terpadu.

Mesin 1: Hilirisasi Selektif sebagai Modal Transisi

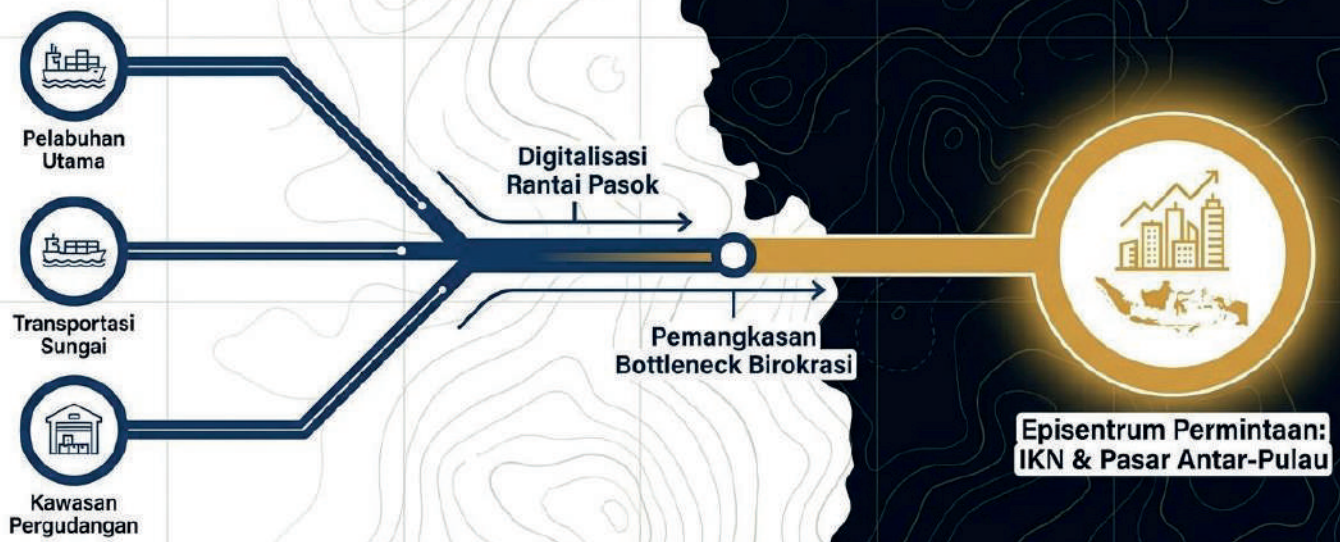


Prinsip Strategis: Pendapatan batubara saat ini adalah modal untuk membiayai diversifikasi, bukan zona nyaman permanen.

Mesin 2: Agroindustri Inklusif Penghubung Lahan dan Pasar



Mesin 3: Logistik Terpadu Penurun Jarak Ekonomi



Fungsi Pasok (Supply)

Menyediakan kebutuhan material konstruksi, pangan harian, dan energi IKN secara presisi dan *just-in-time*.

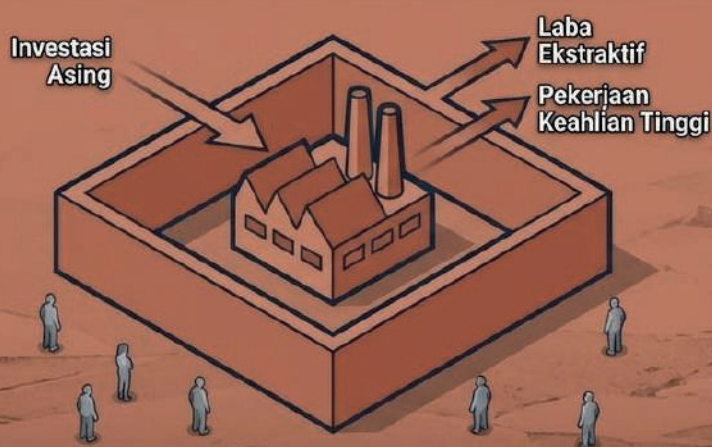


Fungsi Hub (Konektivitas)

Berperan sebagai titik kumpul (*consolidation point*) arus barang antar-provinsi di seluruh penjuru Kalimantan.

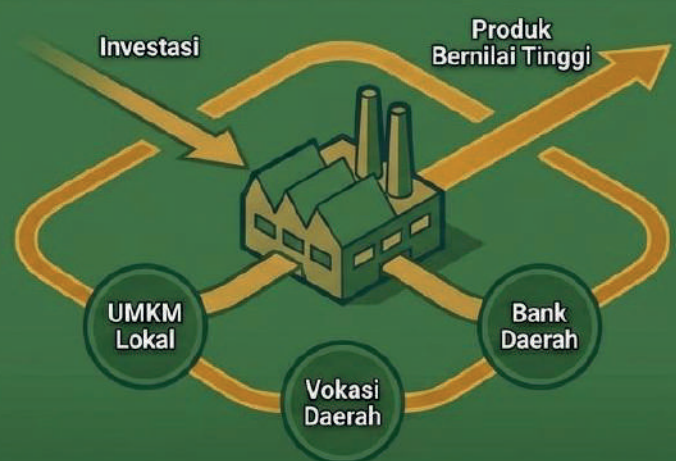
Menghindari Jebakan Pulau Industri

Jebakan Pulau Industri



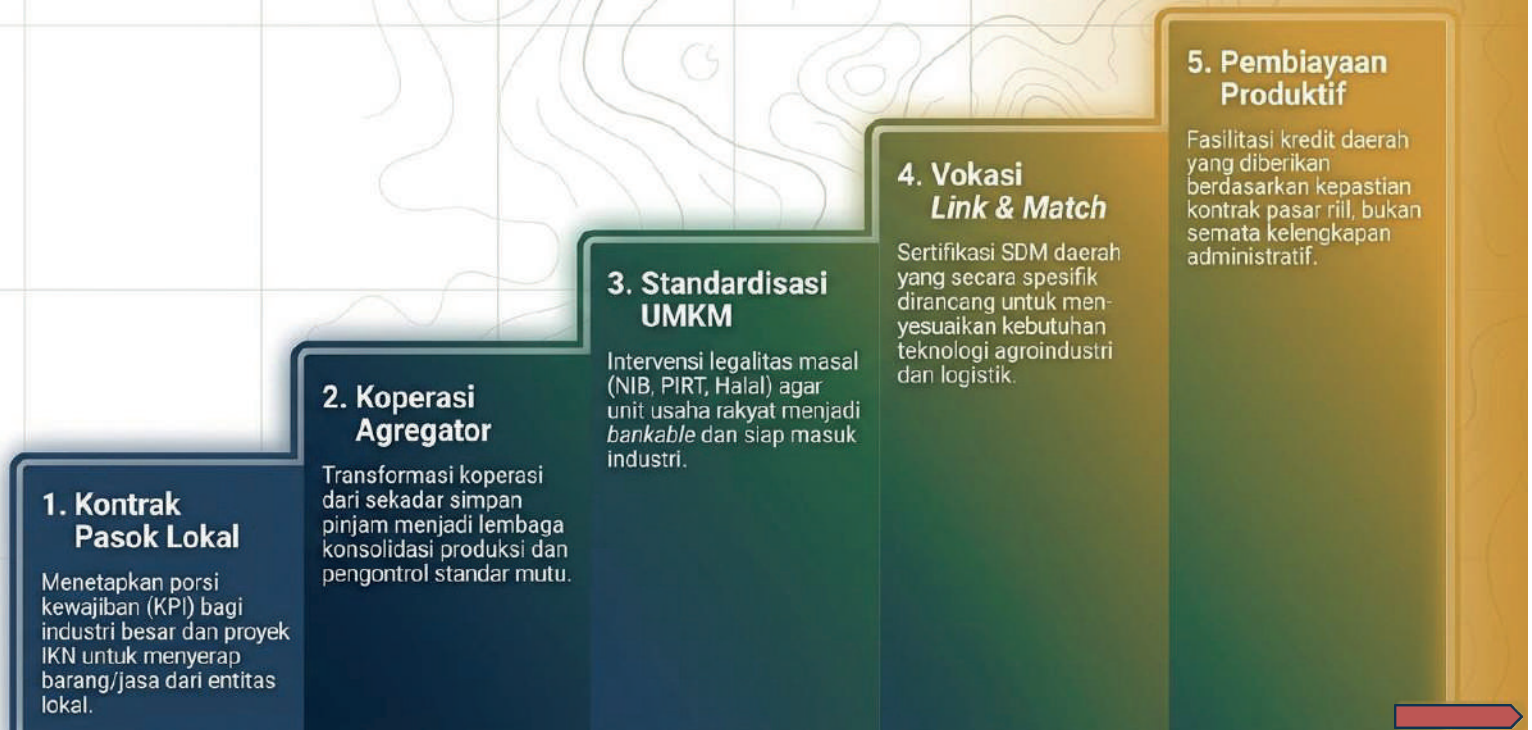
Pertumbuhan semu. Investasi raksasa masuk, namun aktor daerah hanya terisolasi sebagai penonton atau buruh kasar tingkat rendah.

Ekosistem Nilai Inklusif

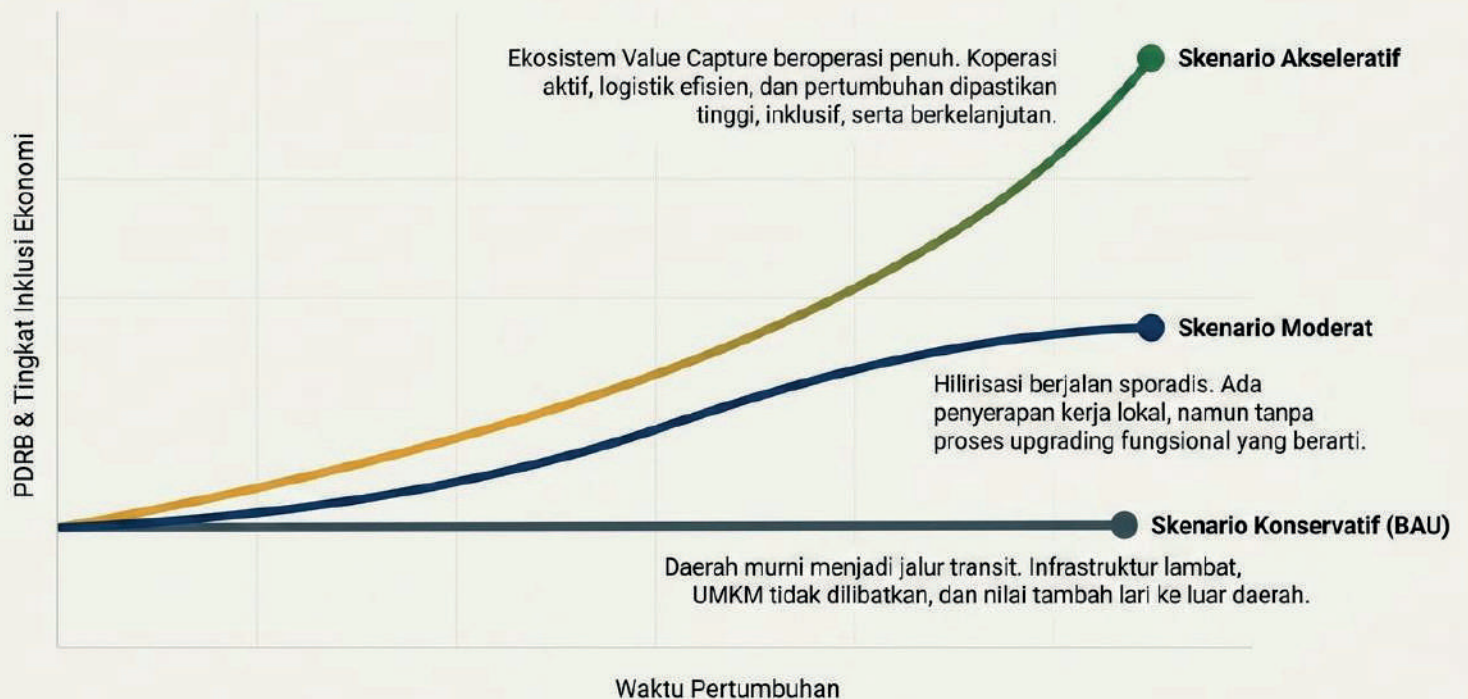


Pertumbuhan terintegrasi. Investasi memutar roda ekonomi lokal. Warga daerah naik kelas secara fungsional dalam rantai pasok global.

5 Instrumen Inklusi Ekonomi Produktif



Matriks Skenario Dampak Ekonomi Kalsel



Matriks Intervensi Eksekusi: Sektor Komoditas

Sektor Prioritas	Arah Transformasi	Prasyarat Kebijakan
Batubara	Menuju DME, Metanol, dan rantai pasok Energi Transisi.	Studi kelayakan ketat, jaminan <i>offtaker</i> , dan kewajiban transfer teknologi.
Sawit & Karet	Produk turunan bernilai tambah & ekspansi industri perkebunan.	Penguatan koperasi agregator & injeksi pembiayaan fasilitas pascapanen.
Pangan Lokal	Logistik pangan tersertifikasi (<i>Cold Chain</i>) untuk suplai penuh IKN.	Infrastruktur pusat distribusi terpadu & integrasi data pasokan realtime.
Jasa Logistik	<i>Digital Supply Chain</i> & integrasi holistik sistem pelabuhan.	Simplifikasi perizinan birokrasi & alokasi investasi pergudangan modern.

Matriks Intervensi Eksekusi: Kelembagaan & SDM

Dimensi Kelembagaan	Intervensi Utama	Indikator Keberhasilan (KPI)
Koordinasi Lintas Sektor	Membentuk Forum Hilirisasi & Logistik Inklusif (Pemprov, BI, KADIN).	Kebijakan lintas sektor terpadu tanpa adanya tumpang tindih program.
Sertifikasi Massal	Pendampingan mutu terpadu untuk NIB, Halal, dan PIRT.	Lonjakan volume produk lokal yang sukses menembus E-Katalog modern.
Vokasi & SDM	Penyesuaian kurikulum <i>Link & Match</i> khusus untuk kebutuhan IKN/Industri.	Persentase serapan tenaga kerja lokal bersertifikat naik secara eksponensial.
Sistem Pembiayaan	Alokasi kredit produktif daerah berbasis kepastian kontrak agregator.	Volume dan pangsa kredit produktif yang disalurkan ke UMKM meningkat drastis.

Momentum Satu Abad: Penonton atau Aktor Utama?

Konklusi Strategis

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya bermakna jika nilai tambahnya tertahan secara lokal dan sukses mengangkat derajat hidup pelaku ekonomi daerah.



Pernyataan Penutup

IKN adalah momentum sejarah yang tidak akan terulang. Kalsel harus berevolusi dari produsen pasif menjadi episentrum Regional Value Capture Hub.

Eksekusi Matriks Terpadu. Sekarang.

**Kalimantan Selatan sebagai Regional Value Capture Hub
Kalimantan: Hilirisasi Selektif, Agroindustri Inklusif, dan Logistik
Terpadu untuk Mendukung IKN dan Pertumbuhan Berkualitas**

Makalah untuk FGD II Bidang IV Pengurus Pusat ISEI

Road to Pleno Bogor 2026

**Disusun oleh:
Dr. Syahrituah Siregar, SE, MA
Ketua ISEI Cabang Banjarmasin / Dosen Universitas Lambung
Mangkurat**

Tanggal: 2 Juli 2026

ABSTRAK

Kalimantan Selatan memiliki posisi strategis dalam peta transformasi ekonomi Kalimantan. Provinsi ini merupakan salah satu basis utama sumber daya alam, terutama batubara, pertanian, perkebunan, dan komoditas berbasis lahan. Di sisi lain, kedekatannya dengan Ibu Kota Nusantara membuka peluang baru sebagai simpul logistik, pusat pasok, dan penghubung rantai nilai antarwilayah Kalimantan. Namun, peluang tersebut tidak otomatis menghasilkan transformasi ekonomi daerah apabila Kalimantan Selatan hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah dan jalur distribusi. Masalah utama yang perlu dijawab bukan sekadar bagaimana meningkatkan produksi, tetapi bagaimana memastikan nilai tambah, lapangan kerja, kapasitas usaha lokal, dan manfaat fiskal tetap tertangkap di daerah.

Makalah ini mengajukan gagasan Kalimantan Selatan sebagai Regional Value Capture Hub Kalimantan. Konsep ini menempatkan Kalimantan Selatan bukan hanya sebagai gerbang logistik, melainkan sebagai pusat penangkap nilai tambah melalui hilirisasi selektif, penguatan agroindustri, integrasi logistik, dan inklusi ekonomi rakyat. Dengan menggunakan kerangka Sumitronomics yang menekankan stabilitas dinamis, hilirisasi sumber daya alam, dan ekonomi kerakyatan, makalah ini menyusun strategi transformasi ekonomi Kalimantan Selatan secara lebih operasional. Strategi tersebut mencakup hilirisasi batubara yang selektif dan memperhatikan risiko transisi energi, pengembangan agroindustri berbasis koperasi dan petani, serta pembentukan ekosistem

logistik yang menghubungkan kawasan produksi, pelabuhan, industri pengolahan, dan pasar IKN. Makalah ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi hanya akan bermakna apabila disertai perluasan partisipasi pelaku lokal dalam rantai nilai. Oleh karena itu, inklusi ekonomi tidak cukup dimaknai sebagai penerimaan manfaat secara pasif, tetapi harus diwujudkan melalui kontrak pasok lokal, koperasi agregator, peningkatan keterampilan tenaga kerja, sertifikasi UMKM, pembiayaan produktif, dan indikator kinerja keterlibatan ekonomi lokal. Dengan prasyarat kelembagaan, infrastruktur, pembiayaan, dan peningkatan kapasitas SDM yang tepat, Kalimantan Selatan berpotensi memperkuat basis pertumbuhan baru yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kalimantan Selatan, regional value capture hub, hilirisasi, logistik, agroindustri, IKN, ekonomi rakyat, Sumitronomics.

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kalimantan Selatan berada pada titik penting dalam transformasi ekonomi Kalimantan. Selama beberapa dekade, provinsi ini dikenal sebagai salah satu basis utama komoditas primer, terutama batubara, hasil pertanian, perkebunan, dan komoditas berbasis sumber daya alam. Struktur ini telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, menciptakan pendapatan regional, memperkuat penerimaan fiskal, dan membentuk jaringan usaha yang luas. Namun, struktur ekonomi yang terlalu bergantung pada komoditas primer juga menimbulkan kerentanan, terutama ketika harga komoditas global mengalami fluktuasi atau ketika permintaan terhadap energi fosil menghadapi tekanan transisi energi. Dalam konteks ini, ketergantungan terhadap komoditas mentah perlu dipahami sebagai persoalan transformasi struktural, bukan semata-mata persoalan produksi sektoral (Hirschman, 1958; Rodrik, 2004).

Data ekonomi regional menunjukkan bahwa perekonomian Kalimantan Selatan masih sangat dipengaruhi oleh dinamika sektor pertambangan, pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Bank Indonesia mencatat bahwa ekonomi Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2025 tetap tumbuh positif, tetapi mengalami perlambatan akibat kontraksi lapangan usaha pertambangan yang dipengaruhi oleh pelemahan permintaan batubara dari negara mitra dagang utama. Pada saat yang sama, pertumbuhan masih ditopang oleh pertanian dan perdagangan (Bank Indonesia, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kalimantan Selatan memiliki dua sisi sekaligus: memiliki basis sumber daya yang kuat, tetapi masih menghadapi risiko ketergantungan terhadap komoditas primer.

Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara, posisi Kalimantan Selatan menjadi semakin strategis. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menempatkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota dunia untuk semua, kota berkelanjutan, sekaligus penggerak ekonomi Indonesia pada masa depan (Republik Indonesia, 2022a). Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara juga memberikan arah bahwa pembangunan IKN memerlukan dukungan sistem kawasan, konektivitas, pasokan, dan

integrasi ekonomi lintas wilayah Kalimantan (Republik Indonesia, 2022b). Bagi Kalimantan Selatan, pembangunan IKN membuka peluang sebagai simpul pasok, simpul logistik, dan basis pengolahan komoditas untuk memenuhi kebutuhan regional.

Namun, peluang sebagai gerbang logistik tidak boleh dimaknai secara sempit. Jika Kalimantan Selatan hanya menjadi jalur lewat barang, pemasok bahan mentah, dan wilayah transit, maka pembangunan IKN berisiko menciptakan pertumbuhan yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh ekonomi lokal. Literatur ekonomi regional menegaskan bahwa kedekatan geografis terhadap pusat pertumbuhan belum otomatis menciptakan manfaat ekonomi bagi daerah sekitar apabila tidak disertai integrasi pasar, infrastruktur, kapasitas produksi lokal, dan kelembagaan yang mampu menangkap nilai tambah (World Bank, 2009). Oleh karena itu, pertanyaan strategisnya bukan hanya apakah Kalimantan Selatan dapat menjadi gerbang logistik, tetapi apakah Kalimantan Selatan mampu menangkap nilai tambah dari arus barang, investasi, tenaga kerja, pembiayaan, dan permintaan baru yang muncul dari pembangunan IKN.

Makalah ini menempatkan Kalimantan Selatan sebagai *Regional Value Capture Hub* Kalimantan. Konsep ini menegaskan bahwa daerah tidak cukup menjadi penyedia sumber daya dan jalur distribusi, tetapi harus menjadi pusat pengolahan, konsolidasi, standardisasi, pembiayaan, distribusi, dan penguatan kapasitas pelaku lokal. Dalam perspektif rantai nilai global, posisi suatu wilayah dalam sistem produksi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bahan baku, tetapi juga oleh tata kelola rantai nilai, kemampuan pemasok lokal, standardisasi transaksi, dan kemampuan melakukan peningkatan fungsi ekonomi atau *upgrading* (Gereffi et al., 2005; Humphrey & Schmitz, 2002). Dengan demikian, transformasi ekonomi Kalimantan Selatan harus diarahkan untuk menangkap nilai tambah sebanyak mungkin di dalam daerah melalui hilirisasi selektif, agroindustri inklusif, logistik terpadu, dan penguatan ekonomi rakyat.

Gagasan ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang menekankan hilirisasi, industrialisasi, dan penguatan ekonomi rakyat. Dalam kerangka kebijakan industri modern, peran pemerintah daerah tidak cukup hanya menyediakan infrastruktur dan insentif, tetapi juga perlu membangun kolaborasi strategis dengan dunia usaha, perguruan tinggi, koperasi, UMKM, dan lembaga pembiayaan untuk mengidentifikasi hambatan produktif serta merancang intervensi yang akuntabel (Rodrik, 2004; Aiginger & Rodrik, 2020). Bagi Kalimantan Selatan, pendekatan tersebut relevan karena tantangan utama daerah bukan hanya meningkatkan pertumbuhan, melainkan mengubah struktur ekonomi dari ketergantungan pada komoditas mentah menuju ekonomi berbasis nilai tambah, produktivitas, dan partisipasi lokal.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini disusun untuk menjawab empat pertanyaan utama. Pertama, mengapa Kalimantan Selatan perlu bergeser dari daerah penghasil komoditas menjadi pusat penangkap nilai tambah regional. Kedua, sektor dan komoditas apa yang paling strategis untuk didorong dalam agenda hilirisasi dan agroindustri. Ketiga, bagaimana pembangunan IKN dapat dimanfaatkan sebagai pengungkit permintaan, integrasi logistik, dan perluasan pasar bagi produk lokal Kalimantan Selatan. Keempat, prasyarat kelembagaan apa yang diperlukan agar petani, koperasi, UMKM, pekerja lokal, dan pelaku usaha daerah tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif, tetapi menjadi pelaku aktif dalam rantai nilai baru.

Rumusan masalah tersebut diletakkan dalam kerangka transformasi struktural. Transformasi ekonomi daerah tidak hanya diukur dari peningkatan PDRB, tetapi juga dari perubahan struktur produksi, peningkatan keterkaitan antarsektor, perluasan nilai tambah lokal, dan peningkatan kualitas kesempatan kerja. Dalam pandangan Hirschman (1958), pembangunan ekonomi membutuhkan penguatan keterkaitan ke belakang dan ke depan agar pertumbuhan suatu sektor dapat mendorong perkembangan sektor lain. Oleh karena itu, agenda hilirisasi Kalimantan Selatan perlu dinilai dari kemampuannya menciptakan keterkaitan dengan pertanian, UMKM, logistik, jasa keuangan, pendidikan vokasi, dan industri pendukung.

I.3 Tujuan

Makalah ini bertujuan merumuskan strategi transformasi ekonomi Kalimantan Selatan sebagai *Regional Value Capture Hub* Kalimantan. Secara khusus, makalah ini bertujuan mengidentifikasi paradoks ekonomi Kalimantan Selatan sebagai daerah kaya komoditas tetapi masih lemah dalam penangkapan nilai tambah lokal; menjelaskan peluang integrasi antara hilirisasi, agroindustri, dan logistik IKN; merumuskan model inklusi ekonomi produktif bagi pelaku lokal; serta menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

Pendekatan yang digunakan adalah konseptual-kebijakan berbasis teori rantai nilai, ekonomi regional, dan kebijakan industri. Pendekatan ini dipilih karena persoalan pembangunan Kalimantan Selatan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga dengan tata kelola rantai nilai, kapasitas kelembagaan lokal, koordinasi pemerintah-swasta, serta kemampuan daerah dalam meningkatkan posisi ekonomi pelaku lokal dalam sistem produksi yang lebih luas (Gereffi et al., 2005; Rodrik, 2004; World Bank, 2009).

II. PARADOKS EKONOMI KALIMANTAN SELATAN: KAYA KOMODITAS, LEMAH PENANGKAPAN NILAI TAMBAH

Kalimantan Selatan memiliki struktur ekonomi yang kuat dari sisi sumber daya alam. Pertambangan dan penggalan masih menjadi salah satu kontributor utama perekonomian daerah, terutama melalui batubara. Sektor pertanian dan perkebunan juga memiliki peran penting sebagai basis mata pencaharian masyarakat dan penyedia bahan baku industri. Namun, besarnya basis komoditas belum sepenuhnya tercermin dalam penguatan industri pengolahan dan peningkatan nilai tambah lokal. Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks ekonomi: daerah memiliki sumber daya besar, tetapi belum sepenuhnya menguasai rantai nilai yang lebih tinggi.

Dalam literatur pembangunan, kondisi tersebut sering dikaitkan dengan lemahnya transformasi struktural. Perekonomian daerah yang terlalu lama bergantung pada produksi komoditas primer cenderung menghadapi keterbatasan dalam menciptakan diversifikasi, produktivitas, dan pekerjaan berkualitas apabila tidak diikuti oleh penguatan sektor pengolahan dan jasa produktif (Rodrik, 2004; Aiginger & Rodrik, 2020). Karena itu, agenda pembangunan Kalimantan Selatan harus diarahkan pada perubahan fungsi ekonomi daerah: dari sekadar penghasil bahan mentah menuju pusat pengolahan, distribusi, inovasi, dan jasa pendukung.

Paradoks tersebut terlihat dari dominasi ekspor komoditas mentah dan relatif terbatasnya pengolahan lokal. Dalam kasus batubara, sebagian besar produksi masih diarahkan untuk pasar

luar daerah atau ekspor dalam bentuk bahan mentah. Dalam sektor pertanian dan perkebunan, banyak komoditas masih dipasarkan dalam bentuk primer atau setengah jadi dengan tingkat pengolahan yang terbatas. Sementara itu, sektor industri pengolahan belum tumbuh sebanding dengan potensi bahan baku yang tersedia. Akibatnya, daerah kehilangan peluang untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja industri, memperkuat basis pajak daerah, dan meningkatkan pendapatan pelaku ekonomi lokal.

Masalah utama dalam struktur ekonomi seperti ini adalah kebocoran nilai tambah. Bahan mentah diproduksi di daerah, tetapi proses pengolahan, standardisasi, pembentukan merek, distribusi bernilai tinggi, dan keuntungan akhir lebih banyak terjadi di luar daerah. Dalam perspektif rantai nilai, pelaku yang hanya berada pada fungsi produksi bahan mentah umumnya memiliki posisi tawar lebih lemah dibanding pelaku yang menguasai fungsi desain, teknologi, pengolahan, logistik, pemasaran, dan akses pasar (Gereffi et al., 2005). Oleh karena itu, strategi pembangunan Kalimantan Selatan perlu diarahkan untuk meningkatkan posisi daerah dalam rantai nilai, bukan hanya meningkatkan volume produksi.

Kondisi tersebut juga menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam sering tidak otomatis menurunkan kemiskinan secara signifikan. Sektor ekstraktif dapat memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, tetapi daya serap tenaga kerjanya relatif terbatas dibanding sektor padat karya produktif. Jika keterkaitan ke belakang dan ke depan dengan ekonomi lokal lemah, maka manfaat pertumbuhan cenderung terkonsentrasi pada pelaku tertentu. Hirschman (1958) menekankan bahwa pembangunan yang kuat membutuhkan keterkaitan sektoral agar aktivitas ekonomi utama mampu menarik kegiatan pendukung dan mendorong kegiatan lanjutan. Dalam konteks Kalimantan Selatan, hal ini berarti sektor pertambangan, pertanian, dan logistik harus dihubungkan dengan industri pengolahan, jasa keuangan, pendidikan vokasi, UMKM, koperasi, dan pasar regional.

Bank Indonesia (2025) menunjukkan bahwa perlambatan ekonomi Kalimantan Selatan pada awal 2025 berkaitan dengan kontraksi lapangan usaha pertambangan, sementara pertanian dan perdagangan masih menjadi penopang pertumbuhan. Informasi ini penting karena memperlihatkan bahwa diversifikasi sumber pertumbuhan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Ketika sektor pertambangan menghadapi tekanan permintaan dan risiko transisi energi, Kalimantan Selatan perlu memperkuat sektor lain yang memiliki basis lokal lebih luas, terutama agroindustri, pangan, logistik, dan jasa pendukung.

III. KERANGKA ANALITIS: KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI REGIONAL VALUE CAPTURE HUB

Konsep *Regional Value Capture Hub* digunakan untuk menjelaskan peran daerah sebagai simpul yang tidak hanya mengalirkan barang, tetapi juga menangkap nilai tambah dari aktivitas produksi, pengolahan, distribusi, jasa pendukung, pembiayaan, dan inovasi. Dalam konteks Kalimantan Selatan, konsep ini penting karena posisi geografis dan sumber daya alam daerah belum tentu menghasilkan manfaat ekonomi optimal apabila daerah hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah atau jalur transit. Nilai tambah baru akan tertangkap apabila daerah memiliki kapasitas untuk mengolah, mengonsolidasikan, menstandarkan, membiayai, dan memasarkan produk ke pasar yang lebih luas.

Kerangka rantai nilai global menjelaskan bahwa posisi suatu pelaku atau wilayah dalam rantai produksi sangat dipengaruhi oleh tata kelola rantai nilai, kompleksitas transaksi, kemampuan kodifikasi, dan kapasitas pemasok lokal (Gereffi et al., 2005). Dalam konteks daerah, hal ini berarti bahwa petani, koperasi, UMKM, dan perusahaan lokal hanya dapat naik kelas apabila mampu memenuhi standar pasar, menjaga kontinuitas pasokan, memperbaiki kualitas produk, dan memiliki akses terhadap informasi serta pembiayaan. Humphrey dan Schmitz (2002) juga menegaskan bahwa keterlibatan dalam rantai nilai dapat membuka peluang *upgrading*, tetapi dapat pula membatasi pelaku lokal apabila struktur tata kelola rantai nilai terlalu timpang. Karena itu, kebijakan daerah harus secara aktif memperkuat kapasitas pelaku lokal agar tidak hanya menjadi pemasok murah dalam sistem produksi yang dikendalikan pihak luar.

Dalam konteks Kalimantan Selatan, konsep *Regional Value Capture Hub* memiliki tiga dimensi utama. Pertama, dimensi hilirisasi selektif. Hilirisasi tidak boleh dipahami sebagai kewajiban mengolah semua komoditas secara seragam. Hilirisasi harus dipilih berdasarkan kelayakan ekonomi, ketersediaan bahan baku, kesiapan teknologi, akses pasar, risiko lingkungan, dan kemampuan menciptakan manfaat lokal. Untuk batubara, hilirisasi perlu diarahkan pada produk turunan yang memiliki kepastian permintaan, kelayakan investasi, dan dukungan kebijakan yang jelas. Untuk sektor pertanian dan perkebunan, hilirisasi harus difokuskan pada produk yang memiliki keterkaitan langsung dengan petani, koperasi, UMKM, dan pasar domestik maupun IKN.

Kedua, dimensi integrasi logistik. Posisi geografis Kalimantan Selatan akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar apabila jaringan logistik tidak hanya berfungsi sebagai jalur angkut, tetapi juga sebagai sistem konsolidasi, penyimpanan, pengolahan, standardisasi, dan distribusi. Dalam perspektif ekonomi regional, pengurangan jarak ekonomi melalui konektivitas dan integrasi pasar dapat meningkatkan daya saing wilayah serta memperluas peluang pertumbuhan (World Bank, 2009). Oleh karena itu, pelabuhan, jalan, sungai, kawasan industri, sentra pertanian, pergudangan, dan pusat distribusi perlu dirancang sebagai satu ekosistem.

Ketiga, dimensi inklusi ekonomi produktif. Inklusi ekonomi tidak boleh berhenti pada narasi bahwa rakyat harus menerima manfaat pembangunan. Inklusi harus diterjemahkan menjadi keterlibatan konkret dalam rantai nilai. Petani dapat berperan sebagai pemasok bahan baku yang terikat kontrak jangka menengah. Koperasi dapat menjadi agregator, pengelola gudang, dan penyedia layanan pascapanen. UMKM dapat menjadi pemasok barang dan jasa pendukung industri. Tenaga kerja lokal dapat masuk ke sektor hilir dan logistik melalui pelatihan tersertifikasi. Pemerintah daerah dapat memperkuat regulasi, pembiayaan, dan koordinasi kelembagaan.

Ketiga dimensi tersebut sejalan dengan pendekatan kebijakan industri modern. Rodrik (2004) menekankan bahwa kebijakan industri tidak semata-mata berupa pemberian subsidi atau proteksi, tetapi merupakan proses kolaborasi strategis antara pemerintah dan sektor swasta untuk menemukan hambatan produktif serta merancang solusi yang akuntabel. Aiginger dan Rodrik (2020) juga menegaskan bahwa kebijakan industri kembali relevan karena banyak negara dan daerah menghadapi kebutuhan untuk melakukan diversifikasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan pekerjaan berkualitas. Dengan demikian, Kalimantan Selatan membutuhkan kebijakan industri daerah yang tidak hanya berorientasi investasi, tetapi juga berorientasi *upgrading*, inklusi, dan penangkapan nilai tambah lokal.

IV. TIGA MESIN TRANSFORMASI EKONOMI KALIMANTAN SELATAN

IV.1 Hilirisasi Batubara yang Selektif dan Berorientasi Transisi

Batubara masih menjadi salah satu basis ekonomi utama Kalimantan Selatan. Karena itu, agenda transformasi ekonomi daerah tidak realistis apabila mengabaikan peran batubara. Namun, strategi ke depan tidak dapat lagi hanya bertumpu pada ekspor batubara mentah. Tekanan transisi energi, perubahan preferensi pembiayaan global, dan agenda dekarbonisasi mengharuskan Kalimantan Selatan menyiapkan strategi hilirisasi yang lebih selektif dan adaptif. International Energy Agency menunjukkan bahwa meskipun konsumsi batubara global masih tinggi, ekspansi energi terbarukan dan tekanan transisi energi menciptakan ketidakpastian terhadap arah permintaan batubara dalam jangka menengah dan panjang (IEA, 2024).

Hilirisasi batubara dapat diarahkan pada produk turunan seperti dimethyl ether, metanol, bahan baku kimia, pupuk, dan synthetic natural gas. Produk-produk tersebut berpotensi meningkatkan nilai tambah dibandingkan penjualan batubara mentah. Namun, setiap opsi hilirisasi harus diuji melalui analisis kelayakan yang ketat. Faktor yang perlu diperhatikan mencakup skala investasi, harga bahan baku, harga produk akhir, kepastian offtaker, dukungan fiskal, dampak lingkungan, teknologi yang digunakan, dan risiko perubahan kebijakan energi.

Dengan demikian, makalah ini tidak mendorong hilirisasi batubara secara generik, melainkan hilirisasi yang selektif. Proyek hilirisasi harus memenuhi setidaknya empat syarat. Pertama, memiliki kepastian pasar domestik atau regional. Kedua, menciptakan lapangan kerja dan transfer keterampilan bagi tenaga kerja lokal. Ketiga, memiliki keterkaitan dengan industri pendukung daerah. Keempat, memiliki skema transisi yang jelas agar tidak memperpanjang ketergantungan daerah pada ekonomi karbon tinggi tanpa persiapan diversifikasi.

Dalam jangka menengah, hilirisasi batubara dapat menjadi jembatan transformasi. Pendapatan, investasi, dan kapasitas industri dari sektor ini perlu digunakan untuk membiayai diversifikasi ekonomi, terutama agroindustri, energi terbarukan, jasa logistik, pendidikan vokasi, dan penguatan UMKM. Dengan pendekatan ini, batubara tidak hanya dipandang sebagai sumber pendapatan saat ini, tetapi juga sebagai modal transisi menuju struktur ekonomi yang lebih beragam. Strategi semacam ini penting karena Bank Indonesia (2025) menunjukkan bahwa kinerja pertambangan Kalimantan Selatan dapat melemah ketika permintaan batubara dari mitra dagang utama mengalami perlambatan.

IV.2 Agroindustri Inklusif Berbasis Petani, Koperasi, dan UMKM

Sektor pertanian, perkebunan, dan pangan memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat luas. Berbeda dengan sektor ekstraktif yang cenderung padat modal, agroindustri memiliki potensi lebih besar untuk menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan petani, memperkuat koperasi, dan mendorong pemerataan. Dalam perspektif pembangunan daerah, agroindustri dapat menjadi jembatan antara sektor primer dan sektor industri karena menciptakan keterkaitan antara produksi bahan baku, pengolahan, logistik, perdagangan, dan konsumsi akhir (Hirschman, 1958; World Bank, 2009).

Komoditas seperti sawit, karet, lada, padi, hortikultura, perikanan, dan produk pangan lokal dapat dikembangkan melalui pengolahan bernilai tambah. Namun, pengembangan agroindustri tidak cukup dilakukan dengan membangun pabrik. Masalah utama sering berada pada kualitas bahan baku, kontinuitas pasokan, kelembagaan petani, standar mutu, akses pembiayaan, dan kepastian pasar. Dalam kerangka rantai nilai, kemampuan pemasok lokal menjadi faktor penting untuk menentukan apakah pelaku lokal dapat naik kelas atau hanya bertahan sebagai pemasok bahan mentah (Gereffi et al., 2005; Humphrey & Schmitz, 2002).

Petani perlu diperkuat melalui pola kemitraan yang lebih adil. Koperasi dapat berperan sebagai agregator produksi, pengelola gudang, penyedia sarana produksi, dan negosiator kontrak dengan industri atau pembeli besar. UMKM dapat masuk dalam pengolahan awal, pengemasan, logistik lokal, jasa pendukung, dan pemasaran digital. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi legalitas, sertifikasi halal, izin edar, standardisasi mutu, serta akses pembiayaan. Perguruan tinggi dan lembaga vokasi dapat mendukung peningkatan teknologi pengolahan, manajemen mutu, dan inovasi produk.

Agroindustri yang inklusif juga penting untuk memastikan pembangunan IKN tidak hanya menguntungkan perusahaan besar. Permintaan pangan, material pendukung, jasa katering, produk olahan, dan kebutuhan logistik IKN dapat menjadi pasar baru bagi produk Kalimantan Selatan. Namun, agar pelaku lokal dapat masuk ke pasar tersebut, mereka harus memenuhi standar mutu, kuantitas, kontinuitas, dan ketepatan waktu. Di sinilah peran koperasi, BUMD, dan lembaga agregator menjadi penting. Tanpa agregasi, petani dan UMKM sulit memenuhi permintaan besar secara konsisten.

IV.3 Logistik Terpadu sebagai Pengungkit Nilai Tambah

Kalimantan Selatan memiliki potensi menjadi simpul logistik penting karena memiliki akses pelabuhan, jaringan sungai, jalan darat, serta posisi relatif dekat dengan IKN dan wilayah Kalimantan lainnya. Namun, logistik tidak boleh hanya dilihat sebagai infrastruktur fisik. Logistik harus dipahami sebagai sistem ekonomi yang mencakup transportasi, pergudangan, standardisasi, konsolidasi muatan, distribusi, informasi pasar, dan layanan keuangan. Dalam laporan *World Development Report 2009*, World Bank menekankan bahwa pembangunan wilayah sangat dipengaruhi oleh kepadatan aktivitas ekonomi, jarak terhadap pasar, dan integrasi antarwilayah (World Bank, 2009). Hal ini relevan untuk Kalimantan Selatan karena kedekatan geografis dengan IKN perlu diterjemahkan menjadi penurunan biaya logistik dan perluasan akses pasar.

Jika dirancang dengan baik, logistik terpadu dapat menurunkan biaya distribusi, mempercepat aliran barang, meningkatkan daya saing produk lokal, dan memperluas pasar bagi pelaku usaha daerah. Pelabuhan, kawasan industri, sentra produksi pertanian, kawasan pergudangan, pasar induk, dan pusat distribusi perlu dihubungkan dalam satu rencana spasial-ekonomi. Dengan demikian, produk dari daerah tidak hanya keluar sebagai bahan mentah, tetapi dapat melalui proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi bernilai tambah.

Dalam konteks IKN, logistik Kalimantan Selatan perlu diarahkan pada dua fungsi. Pertama, fungsi pasok, yaitu menyediakan kebutuhan pangan, material, energi, dan jasa bagi IKN. Kedua, fungsi hub, yaitu menjadi penghubung arus barang antarwilayah Kalimantan dan antara

Kalimantan dengan wilayah Indonesia lainnya. Untuk menjalankan dua fungsi ini, diperlukan perbaikan konektivitas, digitalisasi logistik, integrasi pelabuhan dengan kawasan produksi, dan kemitraan antara pemerintah daerah, swasta, koperasi, dan BUMD. Dengan demikian, logistik menjadi instrumen penangkapan nilai tambah, bukan sekadar fasilitas perpindahan barang.

V. MODEL INKLUSI EKONOMI: DARI PENONTON MENJADI PELAKU RANTAI NILAI

Salah satu kelemahan umum pembangunan berbasis investasi besar adalah terbentuknya pulau industri yang terpisah dari ekonomi lokal. Industri tumbuh, tetapi bahan baku, tenaga kerja terampil, teknologi, pembiayaan, dan keuntungan lebih banyak berasal dari atau mengalir ke luar daerah. Dalam perspektif rantai nilai, kondisi ini dapat terjadi ketika pelaku lokal hanya ditempatkan pada fungsi produksi bernilai rendah, sementara fungsi bernilai tinggi seperti pengolahan, desain produk, standardisasi, logistik, pembiayaan, dan pemasaran dikuasai aktor lain (Gereffi et al., 2005). Untuk menghindari hal tersebut, Kalimantan Selatan perlu membangun model inklusi ekonomi yang konkret dan terukur.

Model inklusi ekonomi dalam makalah ini terdiri atas lima instrumen. Pertama, kontrak pasok lokal. Industri besar, proyek IKN, BUMD, dan pelaku logistik perlu didorong untuk memiliki porsi tertentu dalam pembelian barang dan jasa dari pelaku lokal. Kebijakan ini tidak boleh hanya bersifat imbauan, tetapi perlu dimasukkan dalam indikator kinerja kemitraan usaha, perizinan, dan evaluasi investasi. Dalam kerangka kebijakan industri, intervensi semacam ini harus tetap disertai akuntabilitas, evaluasi kinerja, dan mekanisme koreksi agar tidak berubah menjadi proteksi yang tidak produktif (Rodrik, 2004).

Kedua, koperasi agregator. Koperasi tidak cukup hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi perlu ditingkatkan menjadi lembaga ekonomi produktif. Koperasi dapat mengumpulkan produksi petani, memastikan standar mutu, mengelola gudang, melakukan kontrak penjualan, dan menjadi penghubung dengan industri. Peran ini sangat penting agar petani kecil tidak berhadapan sendiri dengan pasar besar. Dalam konteks klaster industri dan rantai nilai, lembaga lokal semacam koperasi dapat membantu pelaku kecil melakukan *upgrading* melalui kerja sama, pembelajaran, dan peningkatan kapasitas kolektif (Humphrey & Schmitz, 2002).

Ketiga, sertifikasi dan peningkatan kapasitas UMKM. Banyak UMKM tidak masuk rantai pasok industri bukan karena tidak memiliki produk, tetapi karena belum memenuhi standar legalitas, mutu, keamanan pangan, pembukuan, dan kapasitas produksi. Program pemberdayaan UMKM harus diarahkan pada pemenuhan standar tersebut. Bantuan yang diberikan tidak boleh berhenti pada pelatihan umum, tetapi harus sampai pada hasil konkret berupa NIB, PIRT, sertifikasi halal, sertifikasi mutu, katalog produk, akses pembiayaan, dan kontrak pasar.

Keempat, pelatihan tenaga kerja lokal berbasis kebutuhan industri. Pendidikan vokasi, balai latihan kerja, perguruan tinggi, dan politeknik perlu disambungkan dengan kebutuhan industri hilir, logistik, agroindustri, dan jasa pendukung IKN. Kurikulum perlu disesuaikan dengan keterampilan teknis seperti operator mesin, pengendalian mutu, logistik, pergudangan, pengolahan pangan, administrasi ekspor-impor, keselamatan kerja, dan digital supply chain. Aiginger dan Rodrik

(2020) menegaskan bahwa kebijakan industri kontemporer tidak hanya berorientasi pada sektor manufaktur, tetapi juga pada penciptaan pekerjaan berkualitas dan peningkatan kapasitas produktif.

Kelima, pembiayaan produktif. Inklusi ekonomi membutuhkan akses modal yang sesuai dengan karakter pelaku lokal. KUR, pembiayaan perbankan daerah, dana bergulir, pembiayaan koperasi, dan skema penjaminan perlu diarahkan pada kegiatan produktif yang masuk ke rantai nilai. Pembiayaan tidak cukup diberikan berdasarkan kelayakan administratif, tetapi perlu dikaitkan dengan kontrak pasar, pendampingan usaha, dan kapasitas produksi. Dengan demikian, pembiayaan menjadi instrumen peningkatan produktivitas, bukan sekadar perluasan akses kredit.

VI. SKENARIO DAMPAK EKONOMI

Agar proyeksi manfaat lebih kredibel, makalah ini menggunakan tiga skenario: konservatif, moderat, dan akseleratif. Pendekatan skenario digunakan untuk menghindari klaim deterministik bahwa hilirisasi dan logistik otomatis menghasilkan pertumbuhan tinggi. Dalam kajian kebijakan, proyeksi ekonomi sebaiknya dipahami sebagai hasil bersyarat yang bergantung pada kualitas implementasi, kesiapan kelembagaan, respons pasar, investasi, dan kapasitas pelaku lokal (Rodrik, 2004; World Bank, 2009).

Skenario konservatif menggambarkan kondisi ketika pembangunan infrastruktur dan investasi hilirisasi berjalan lambat, keterlibatan pelaku lokal terbatas, dan integrasi dengan IKN belum optimal. Dalam skenario ini, pertumbuhan ekonomi daerah tetap berada di sekitar pola historis dan manfaat terhadap penurunan kemiskinan relatif terbatas. Risiko utama pada skenario ini adalah Kalimantan Selatan hanya menjadi pemasok bahan mentah dan jalur distribusi, sementara nilai tambah utama tetap tertangkap di luar daerah.

Skenario moderat menggambarkan kondisi ketika beberapa proyek hilirisasi berjalan, agroindustri mulai berkembang, dan sebagian pelaku lokal masuk ke rantai pasok. Dalam skenario ini, nilai tambah daerah meningkat secara bertahap, penyerapan tenaga kerja bertambah, dan sektor industri pengolahan mulai memperkuat kontribusinya terhadap PDRB. Namun, dampaknya masih terbatas apabila kelembagaan koperasi, UMKM, dan tenaga kerja lokal belum diperkuat secara sistematis. Dalam perspektif rantai nilai, skenario moderat menunjukkan adanya partisipasi lokal, tetapi belum tentu menghasilkan *upgrading* yang kuat apabila pelaku lokal masih berada pada fungsi bernilai rendah (Gereffi et al., 2005; Humphrey & Schmitz, 2002).

Skenario akseleratif menggambarkan kondisi ketika Kalimantan Selatan berhasil membangun ekosistem *Regional Value Capture Hub*. Dalam skenario ini, hilirisasi berjalan selektif, agroindustri berkembang berbasis koperasi, logistik terpadu berfungsi sebagai penghubung utama ke IKN, dan kebijakan keterlibatan ekonomi lokal dilaksanakan secara konsisten. Pada skenario ini, pertumbuhan ekonomi daerah dapat bergerak lebih tinggi karena didorong oleh kombinasi investasi, peningkatan nilai tambah, efisiensi logistik, dan perluasan pasar. Namun, pencapaian skenario akseleratif mensyaratkan koordinasi kebijakan yang kuat, kepastian investasi, pembiayaan produktif, kesiapan SDM, dan indikator kinerja yang jelas.

Dengan pendekatan skenario, target pertumbuhan tinggi tidak diperlakukan sebagai klaim tunggal, tetapi sebagai kemungkinan yang bergantung pada prasyarat. Hal ini penting agar makalah tidak terkesan terlalu optimistis, melainkan realistis berbasis kondisi dan kebijakan yang harus dipenuhi. Bank Indonesia (2025) menunjukkan bahwa prospek ekonomi Kalimantan Selatan tetap positif, tetapi masih menghadapi risiko perlambatan dari sektor pertambangan dan ekspor. Karena itu, strategi akselerasi pertumbuhan harus dibangun melalui diversifikasi sumber pertumbuhan, penguatan industri pengolahan, peningkatan produktivitas pertanian, dan integrasi logistik.

VII. MATRIKS KEBIJAKAN TRANSFORMASI KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI REGIONAL VALUE CAPTURE HUB

Agar gagasan Kalimantan Selatan sebagai Regional Value Capture Hub tidak berhenti sebagai narasi strategis, diperlukan matriks kebijakan yang menghubungkan sektor prioritas, bentuk hilirisasi, aktor lokal, prasyarat kebijakan, risiko, dan indikator keberhasilan. Matriks ini penting karena strategi pembangunan daerah tidak cukup hanya menekankan besarnya potensi sumber daya, tetapi harus menunjukkan bagaimana nilai tambah ditangkap, siapa pelaku yang dilibatkan, serta bagaimana keberhasilannya diukur. Pendekatan ini sejalan dengan literatur rantai nilai global yang menekankan pentingnya tata kelola rantai nilai, kapasitas pemasok lokal, standardisasi, dan peningkatan posisi pelaku daerah dalam sistem produksi yang lebih luas (Gereffi et al., 2005; Humphrey & Schmitz, 2002).

Tabel 1. Matriks Kebijakan Transformasi Ekonomi Kalimantan Selatan

Sektor/ Komoditas Prioritas	Arah Hilirisasi/ Transformasi	Aktor Lokal yang Dilibatkan	Prasyarat Kebijakan	Risiko Utama	Indikator Keberhasilan
Batubara	Hilirisasi selektif menuju DME, metanol, bahan baku kimia, pupuk, dan energi transisi yang memiliki kepastian pasar	Perusahaan tambang, BUMD, tenaga kerja lokal, politeknik, perguruan tinggi, penyedia jasa lokal	Studi kelayakan proyek, kepastian offtaker, standar lingkungan, insentif berbasis kinerja, dan kewajiban transfer keterampilan	Risiko transisi energi, pembiayaan proyek karbon tinggi, ketidakpastian harga batubara, dan risiko lingkungan	Persentase batubara yang diolah lokal, nilai tambah per ton, jumlah tenaga kerja lokal tersertifikasi, emisi per unit output, dan kontribusi industri hilir terhadap PDRB
Sawit dan karet	Pengolahan lanjutan menjadi produk setengah jadi dan produk industri berbasis perkebunan	Petani, koperasi, perusahaan pengolahan, UMKM, lembaga pembiayaan	Penguatan koperasi agregator, fasilitas pascapanen, sertifikasi mutu, kontrak pasok, dan pembiayaan produktif	Ketergantungan pada harga global, lemahnya posisi tawar petani, dan keterbatasan standar mutu	Kenaikan harga di tingkat petani, volume produk yang diolah lokal, jumlah koperasi pemasok, dan nilai kontrak pasok dengan industri

Sektor/ Komoditas Prioritas	Arah Hilirisasi/ Transformasi	Aktor Lokal yang Dilibatkan	Prasyarat Kebijakan	Risiko Utama	Indikator Keberhasilan
Padi, hortikultura, dan pangan lokal	Pengolahan pangan, pengemasan, cold chain, logistik pangan, dan pasokan kebutuhan IKN	Kelompok tani, koperasi pangan, UMKM, BUMD pangan, pasar induk, penyedia logistik	Pusat distribusi pangan, standarisasi kualitas, sertifikasi halal dan izin edar, kontrak pembelian, serta integrasi data pasokan	Fluktuasi produksi, kualitas tidak seragam, lemahnya kontinuitas pasokan, dan biaya logistik tinggi	Persentase produk pangan lokal yang masuk rantai pasok IKN, jumlah UMKM tersertifikasi, penurunan food loss, dan peningkatan margin petani
Lada, perikanan, dan komoditas khas daerah	Penguatan produk unggulan daerah berbasis indikasi geografis, pengolahan, branding, dan pemasaran digital	Petani, nelayan, UMKM, koperasi, perguruan tinggi, dinas teknis	Inkubasi bisnis, standarisasi mutu, kemasan, akses e-katalog, promosi produk khas, dan kemitraan dengan marketplace	Skala usaha kecil, kualitas tidak konsisten, lemah branding, dan keterbatasan akses pasar	Jumlah produk masuk pasar modern/e-katalog, peningkatan omzet UMKM, jumlah sertifikasi produk, dan perluasan pasar luar daerah
Jasa logistik dan pelabuhan	Integrasi pelabuhan, pergudangan, transportasi sungai, jalan, pusat distribusi, dan digital supply chain	Pelindo, BUMD, perusahaan logistik lokal, koperasi transportasi, UMKM jasa pendukung	Peta logistik strategis, investasi gudang, digitalisasi tracking, integrasi pelabuhan- produksi, dan penyederhanaan perizinan	Bottleneck infrastruktur, biaya distribusi tinggi, tumpang tindih kewenangan, dan rendahnya digitalisasi	Penurunan biaya logistik, peningkatan volume barang lokal yang dikonsolidasikan di Kalsel, waktu tempuh distribusi, dan pertumbuhan jasa pergudangan
UMKM dan koperasi	Peningkatan peran dari pelaku informal menjadi pemasok resmi rantai nilai industri dan IKN	UMKM, koperasi, perbankan, dinas koperasi, perguruan tinggi, lembaga sertifikasi	NIB, PIRT, halal, pembukuan digital, akses KUR, pendampingan mutu, dan kurasi produk	UMKM tidak memenuhi standar industri, akses modal terbatas, dan lemahnya manajemen usaha	Jumlah UMKM masuk rantai pasok, nilai transaksi UMKM, jumlah koperasi agregator aktif, dan pangsa kredit UMKM produktif
SDM dan tenaga kerja lokal	Pelatihan vokasi berbasis kebutuhan hilirisasi, agroindustri, logistik, dan industri pendukung IKN	BLK, SMK, politeknik, ULM, dunia usaha, pemerintah daerah	Kurikulum berbasis kompetensi industri, sertifikasi profesi, magang industri, dan pusat pelatihan logistik- agroindustri	Mismatch keterampilan, rendahnya produktivitas, dan masuknya tenaga kerja dari luar daerah tanpa transfer keterampilan	Jumlah tenaga kerja lokal tersertifikasi, tingkat penyerapan kerja lokal, produktivitas tenaga kerja, dan jumlah program magang industri

Matriks tersebut menunjukkan bahwa transformasi Kalimantan Selatan tidak dapat hanya bertumpu pada satu sektor. Batubara masih penting sebagai modal transisi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya dasar pertumbuhan jangka panjang. Agroindustri, pangan lokal, komoditas khas daerah, jasa logistik, UMKM, koperasi, dan SDM lokal harus ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem nilai tambah. Dengan demikian, pembangunan IKN tidak hanya menjadi sumber permintaan baru, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat kapasitas produksi dan daya saing daerah.

VIII. MATRIKS PRASYARAT KELEMBAGAAN DAN INDIKATOR IMPLEMENTASI

Strategi Regional Value Capture Hub memerlukan tata kelola yang kuat karena hilirisasi, agroindustri, logistik, dan inklusi ekonomi melibatkan banyak aktor. Pengalaman kebijakan industri menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi struktural tidak hanya ditentukan oleh insentif ekonomi, tetapi juga oleh kualitas koordinasi pemerintah-swasta, akuntabilitas, pembelajaran kebijakan, dan kemampuan negara dalam mengidentifikasi hambatan produktif secara tepat (Rodrik, 2004). Karena itu, kebijakan hilirisasi daerah harus memiliki mekanisme kelembagaan yang jelas, bukan hanya daftar proyek.

Tabel 2. Matriks Prasyarat Kelembagaan dan Indikator Implementasi

Dimensi Kelembagaan	Masalah yang Dihadapi	Intervensi Kebijakan	Lembaga Pengampu	Indikator Antara	Indikator Akhir
Koordinasi lintas sektor	Program hilirisasi, pertanian, logistik, dan UMKM sering berjalan sendiri-sendiri	Membentuk Forum Hilirisasi dan Logistik Inklusif Kalsel	Pemprov, Bappeda, BI, ISEI, KADIN, perguruan tinggi	Forum aktif, peta jalan tersedia, rapat koordinasi berkala	Program lintas sektor berjalan terpadu dan tidak tumpang tindih
Data dan perencanaan	Kebijakan sering berbasis potensi umum, bukan data rantai nilai	Menyusun peta rantai nilai komoditas prioritas	Bappeda, BPS, perguruan tinggi, dinas teknis	Database komoditas, pelaku, kapasitas, dan pasar tersedia	Kebijakan investasi dan bantuan usaha lebih tepat sasaran
Regulasi local content	Pelaku lokal sulit masuk rantai pasok industri besar	Menetapkan indikator keterlibatan ekonomi lokal dalam proyek strategis	Pemprov, DPRD, dinas perizinan, badan pengadaan	Persentase minimum barang/jasa lokal ditetapkan	Kenaikan belanja industri besar kepada pelaku lokal
Pembiayaan produktif	UMKM dan koperasi sulit memperbesar kapasitas usaha	Skema pembiayaan berbasis kontrak pasar dan penjaminan daerah	Bank Kalsel, perbankan, Jamkrida, koperasi	Jumlah debitur produktif meningkat	UMKM dan koperasi mampu memenuhi permintaan industri/IKN

Dimensi Kelembagaan	Masalah yang Dihadapi	Intervensi Kebijakan	Lembaga Pengampu	Indikator Antara	Indikator Akhir
Sertifikasi dan mutu	Produk lokal belum memenuhi standar pasar modern dan industri	Program sertifikasi massal NIB, halal, PIRT, mutu, dan pembukuan digital	Dinas koperasi, dinas perdagangan, BPJPH, perguruan tinggi	Jumlah produk tersertifikasi	Produk lokal masuk e-katalog, pasar modern, dan kontrak pasok
SDM dan vokasi	Keterampilan tenaga kerja belum sesuai kebutuhan industri hilir	Link and match kurikulum SMK, BLK, politeknik, dan perguruan tinggi dengan industri	Dinas tenaga kerja, dinas pendidikan, ULM, politeknik, industri	Program pelatihan dan magang berjalan	Penyerapan tenaga kerja lokal meningkat
Monitoring independen	Risiko kebijakan berhenti pada klaim investasi	Membentuk mekanisme evaluasi berbasis indikator inklusi dan nilai tambah	ISEI, perguruan tinggi, BI, Bappeda	Laporan evaluasi berkala diterbitkan	Kebijakan dapat dikoreksi berdasarkan bukti

Matriks kelembagaan ini menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak dapat hanya dinilai dari nilai investasi. Investasi memang penting, tetapi belum tentu menciptakan transformasi daerah apabila tidak menghasilkan keterkaitan lokal, transfer keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, dan perluasan kesempatan kerja. Karena itu, setiap proyek strategis perlu dievaluasi berdasarkan indikator nilai tambah lokal, keterlibatan UMKM, penyerapan tenaga kerja lokal, penurunan biaya logistik, serta peningkatan pendapatan petani dan pelaku usaha daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiginger, K., & Rodrik, D. (2020). Rebirth of industrial policy and an agenda for the twenty-first century. *Journal of Industry, Competition and Trade*, 20, 189–207. <https://doi.org/10.1007/s10842-019-00322-3>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Selatan menurut lapangan usaha 2020–2024*. BPS Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bank Indonesia. (2025). *Laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan Mei 2025*. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.
- Gereffi, G. (2018). *Global value chains and development: Redefining the contours of 21st century capitalism*. Cambridge University Press.
- Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. *Review of International Political Economy*, 12(1), 78–104. <https://doi.org/10.1080/09692290500049805>

- Hirschman, A. O. (1958). *The strategy of economic development*. Yale University Press.
- Humphrey, J., & Schmitz, H. (2002). How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters? *Regional Studies*, 36(9), 1017–1027. <https://doi.org/10.1080/0034340022000022198>
- International Energy Agency. (2024). *Coal 2024: Analysis and forecast to 2027*. IEA.
- Porter, M. E. (1998). Clusters and the new economics of competition. *Harvard Business Review*, 76(6), 77–90.
- Republik Indonesia. (2022a). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*.
- Republik Indonesia. (2022b). *Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara*.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045*.
- Rodrik, D. (2004). *Industrial policy for the twenty-first century*. Harvard University, John F. Kennedy School of Government.
- World Bank. (2009). *World development report 2009: Reshaping economic geography*. World Bank.



Martha Fani Cahyandito

**Hilirisasi Berkelanjutan, Transisi Energi, dan
Daya Saing Industri Hijau:**

Mengubah Paradoks Menjadi Daya Dorong

**Martha Fani Cahyandito
Akuat Supriyanto
Wardhana
Aditia Febriansyah**

Bandung, 13 Agustus 2026

Hilirisasi Berkelanjutan, Transisi Energi, dan Daya Saing Industri Hijau: Mengubah Paradoks Menjadi Daya Dorong

Martha Fani Cahyandito¹, Akuat Supriyanto², Wardhana³, Aditia Febriansyah⁴

ABSTRAK

Indonesia menghadapi paradoks struktural: ambisi mencapai Net Zero Emission 2060 berjalan berdampingan dengan ketergantungan tinggi pada batubara, besarnya dukungan fiskal terhadap energi fosil, dan terbatasnya mobilisasi pendanaan transisi. Pada saat yang sama, berlakunya rezim definitif *Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)* Uni Eropa sejak 2026 meningkatkan tuntutan pengukuran emisi dan dekarbonisasi bagi industri padat karbon. Artikel ini menawarkan jalan keluar melalui integrasi hilirisasi hijau, ekonomi sirkular, dan strategi perdagangan hijau. Tiga pilar aksi diusulkan: penguatan tata kelola transisi energi, percepatan operasionalisasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia, serta peluncuran *National Green Trade Strategy* untuk memperkuat daya saing industri hijau Indonesia.

Kata Kunci: Hilirisasi Berkelanjutan, Transisi Energi, CBAM, Ekonomi Hijau, Daya Saing Industri Hijau.

I. PENDAHULUAN: PARADOKS FUNDAMENTAL DALAM LANSKAP EKONOMI HIJAU INDONESIA

Indonesia berada pada titik nadir yang menentukan: apakah akan bertransformasi menjadi pemimpin industri hijau global atau tetap terjebak dalam kelompok institusional (*institutional paralysis*). Transformasi ini bukan sekadar pemenuhan komitmen iklim, melainkan pertarungan kedaulatan ekonomi di tengah pergeseran paradigma perdagangan dunia. Keberhasilan transisi ini saat ini dihalangi oleh tiga kontradiksi makro yang mencerminkan ketidakselarasan mendalam antara retorika politik dan eksekusi sektoral.

I.1 Kontradiksi Kebijakan: Inkoherensi Regulatori

Upaya dekarbonisasi industri masih dibatasi oleh sistem energi yang *coal-heavy*. Target lama bauran EBT sekurang-kurangnya 23% pada 2025 berasal dari PP No. 79 Tahun 2014, bukan PP No. 14 Tahun 2020. PP No. 40 Tahun 2025 kemudian mencabut PP tersebut dan menetapkan kisaran sasaran EBT 17%–20% untuk 2025. Realisasi 14,65% pada 2024 dan 15,75% pada 2025 adalah

- 1 Ketua FG Lingkungan Hidup dan Transisi Energi PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Guru Besar FEB Universitas Padjadjaran
- 2 Anggota FG Lingkungan Hidup dan Transisi Energi PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Dosen FEB Universitas Padjadjaran
- 3 Anggota FG Moneter dan Fiskal PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Dosen FEB Universitas Padjadjaran
- 4 Sekretaris III PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)

bauran energi primer, bukan bauran listrik *on-grid* (Republik Indonesia, 2014, 2025; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2026a). Untuk ketenagalistrikan, EBT menyumbang 17,89% produksi listrik hingga April 2026, sedangkan batubara masih 64,87% (ANTARA, 2026a). Perbedaan indikator ini perlu dijaga agar evaluasi kebijakan tidak mencampur bauran energi primer dengan bauran pembangkitan listrik.

I.2 Kontradiksi Fiskal: Misalokasi Sumber Daya

Struktur kebijakan fiskal masih menjaga keekonomian energi fosil melalui antara lain *Domestic Market Obligation (DMO)* dan batas harga jual batubara untuk pembangkit umum sebesar US\$70 per ton. IESR (Institute for Essential Services Reform) memproyeksikan dukungan bagi energi fosil selama 2022–2026 sekitar Rp1.023 triliun (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2019; IESR, 2025). Anggaran subsidi listrik dalam APBN 2026 adalah Rp104,65 triliun (Kementerian Keuangan, 2026). Besarnya dukungan tersebut menegaskan perlunya peralihan fiskal yang bertahap, terukur, dan tetap melindungi rumah tangga rentan.

Pendanaan transisi energi melalui *Just Energy Transition Partnership (JETP)*, yang diumumkan pada KTT G20 Bali 2022, meningkat dari komitmen awal US\$20 miliar menjadi US\$21,4 miliar. Hingga November 2025, sekitar US\$3,1 miliar dilaporkan telah dimobilisasi dan US\$5,5 miliar berada dalam proses negosiasi proyek konkret (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025b). Sementara itu, CIPP memperkirakan kebutuhan investasi sektor ketenagalistrikan US\$97,3 miliar untuk mencapai sasaran JETP 2030 (JETP Indonesia, n.d.). Angka komitmen, mobilisasi, negosiasi, dan pencairan perlu dibedakan secara konsisten dalam pelaporan publik.

I.3 Kontradiksi Ekologis: Pertumbuhan Semu vs Kerusakan Sistemik

Metrik lingkungan agregat dapat bergerak berlawanan dengan tekanan ekologis di lokasi tertentu. IKLH 2025 mencapai 78,58 dan melampaui target 76,49 (Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, 2026). Pada tahun yang sama, pemantauan Auriga Nusantara mencatat deforestasi 433.751 hektar, naik dari 261.575 hektar pada 2024. Berdasarkan klasifikasi Simontini, sekitar 189.970 hektar atau 43% berada dalam konsesi konversi (Auriga Nusantara, 2026a, 2026b). Angka tersebut berasal dari metodologi organisasi masyarakat sipil dan perlu dibaca berdampingan—bukan disamakan—dengan statistik deforestasi pemerintah.

Papua Pegunungan dan Papua Tengah mencatat nilai IKLH tinggi, masing-masing 88,55 dan 86,78, tetapi keduanya juga masuk sepuluh provinsi dengan deforestasi terluas pada 2025: Papua Tengah di peringkat kelima dan Papua Pegunungan di peringkat kesepuluh (Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, 2026; Auriga Nusantara, 2026a). Perbandingan ini tidak membatalkan IKLH, tetapi menunjukkan bahwa indeks agregat perlu dilengkapi indikator kehilangan tutupan hutan dan dampak pada tingkat tapak.

Ketimpangan makro ini menegaskan bahwa tanpa pembongkaran ketergantungan struktural pada sektor energi fosil, seluruh upaya hilirisasi akan kehilangan legitimasi hijaunya.

II. ANALISIS TRANSISI SEKTOR ENERGI: MEMBONGKAR JEBAKAN BATUBARA

Transisi energi di Indonesia bukan sekadar tantangan teknologis, melainkan masalah kemauan politik (*political will*) untuk menghentikan penguncian (*lock-in*) infrastruktur fosil. Fragmentasi infrastruktur dan inersia birokrasi menjadi penghalang utama bagi pemanfaatan potensi energi baru.

II.1 Hambatan Struktural Utama

Beberapa hambatan struktural utama, yaitu:

- **Underutilisasi Potensi Teknis.** Kapasitas PLTS terpasang mencapai sekitar 1.494 MW pada akhir 2025, meningkat dari sekitar 909 MW pada 2024, tetapi masih sangat kecil dibandingkan potensi teknis nasional (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2026a). Hambatan utamanya mencakup kepastian pengadaan, kesiapan jaringan, serta ketidaksesuaian lokasi sumber EBT dengan pusat beban. RUPTL 2025–2034 karena itu juga menempatkan penguatan transmisi sebagai unsur penting integrasi listrik bersih (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2025a).
- **Legacy Koordinasi.** RUPTL PLN 2025–2034 merencanakan penambahan kapasitas sekitar 69,5 GW. Sekitar 76% atau 52,9 GW merupakan gabungan EBT dan penyimpanan energi, bukan EBT saja (PT PLN [Persero], 2025). Hingga Mei 2026, sekitar 22,57 GW atau 43% portofolio tersebut telah berada dalam pengadaan, konstruksi, commissioning, atau operasi; sekitar 0,78 GW telah beroperasi (ANTARA, 2026a). Kemajuan ini tetap memerlukan koordinasi antara perencanaan sistem, pengadaan, kesiapan jaringan, dan pembiayaan.
- **Ironi Pembiayaan.** Investasi energi surya masih menghadapi kuota, ketidakpastian pengadaan dan tarif PPA, serta keterbatasan jaringan. Sumatra menunjukkan peluang perbaikan dengan porsi EBT 41,76% dalam bauran listrik regional, sedangkan sistem Jawa–Bali masih jauh lebih bergantung pada pembangkitan fosil (ANTARA, 2026b). Perbedaan ini menegaskan bahwa kebijakan investasi harus disesuaikan dengan potensi sumber daya, profil beban, dan kesiapan transmisi masing-masing sistem.

II.2 Langkah Taktis Pemecah Kebuntuan

Untuk memecah kebuntuan dari permasalahan diatas, beberapa Langkah taktis dapat dilakukan:

- **Moratorium De Facto PLTU.** Menghentikan perizinan PLTU baru diluar pengecualian yang masih berlaku dan mengeksekusi pensiun dini secara berkeadilan. CIPP JETP menetapkan sasaran emisi sektor ketenagalistrikan tidak lebih dari 250 MtCO₂ pada 2030, porsi energi terbarukan 44% pada 2030, dan emisi nol bersih sektor ketenagalistrikan pada 2050 (JETP Indonesia, 2023).
- **Reformasi Pasar (*Power Wheeling*).** Membuka akses jaringan transmisi bagi pengembang EBT independen untuk menghapuskan monopoli distribusi listrik fosil.
- **Peralihan Subsidi menjadi Insentif EBT.** Merealokasi subsidi fosil menjadi insentif pajak dan pembiayaan lunak bagi teknologi rendah karbon.
- **Akselerasi PLTS Berbagai Skala.** Mendorong PLTS atap pada bangunan komersial, PLTS skala utilitas, dan PLTS terapung melalui kuota yang transparan, pengadaan yang *bankable*, dan kesiapan sistem. Percepatan tersebut harus terhubung dengan area investasi JETP untuk energi terbarukan variabel, transmisi, dan penyimpanan energi (JETP Indonesia, 2023).

Pembenahan hulu energi adalah prasyarat absolut; tanpa listrik hijau, produk industri hilir Indonesia akan kehilangan akses ke pasar global yang makin ketat.

III. TRANSFORMASI INDUSTRI HIJAU DAN INTEGRASI ALIRAN NILAI STRATEGIS

Industri pengolahan nonmigas menyumbang 16,92% PDB pada triwulan II 2025; angka tersebut bukan kontribusi setahun penuh 2025 (Kementerian Perindustrian, 2025a). Indonesia telah memiliki standar label dan deklarasi lingkungan, tetapi belum memiliki satu label karbon produk yang wajib dan terintegrasi lintas sektor (Badan Standardisasi Nasional, n.d.). TKBI Edisi Kedua telah menyediakan *technical screening criteria* untuk beberapa sektor; tantangan utamanya adalah cakupan yang belum lengkap, termasuk sebagian kegiatan manufaktur/IPPU, bukan ketiadaan indikator teknis (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

III.1 TKBI 2.0 sebagai Kerangka Pembiayaan Hijau

Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan TKBI Edisi Kedua pada 11 Februari 2025 sebagai pengembangan dari edisi pertama tahun 2024. TKBI mengklasifikasikan kegiatan ekonomi berdasarkan kontribusinya pada tujuan lingkungan dan transisi, sehingga dapat menjadi acuan alokasi modal dan manajemen risiko pembiayaan berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

TKBI merujuk antara lain pada ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance dan kebijakan nasional. Edisi Kedua memuat kriteria untuk Konstruksi dan Real Estat, Transportasi dan Pergudangan, serta beberapa aktivitas Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan. Perluasan berikutnya diarahkan pada sisa AFOLU, Manufaktur/IPPU, serta Penyediaan Air dan Pengelolaan Limbah (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

III.2 Model Integrasi Aliran Nilai (*Value Stream Integration*)

Untuk menciptakan keunggulan kompetitif, Indonesia harus membangun ekosistem simbiotik melalui sistem *Feedback Loop*:

- **Hilirisasi Nikel Hijau.** Indonesia menguasai lebih dari 40% cadangan nikel dunia, sehingga dekarbonisasi smelter menjadi faktor strategis bagi daya saing (Badan Geologi, 2026). Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel menargetkan penurunan emisi hingga 81% pada 2045 melalui efisiensi energi dan material, penggantian bahan bakar, substitusi material, dan penggunaan listrik rendah karbon (Kementerian PPN/Bappenas, 2025). Untuk smelter feronikel Kolaka, ANTAM dan PLN menyepakati 112.940 unit Renewable Energy Certificate per tahun, setara 112.940 MWh atau 112,94 GWh—bukan 112 MW (PT PLN [Persero], 2024).
- Pada 2024, BASF dan Eramet membatalkan rencana investasi bersama sekitar US\$2,6 miliar dalam kompleks pemurnian nikel–kobalt Sonic Bay. Sumber resmi BASF menyebut perubahan pasokan dan pasar nikel sebagai alasan keputusan, sedangkan BKPM menyebutnya keputusan bisnis. Karena itu, pembatalan tersebut tidak tepat diklaim sebagai akibat masalah lingkungan dan sosial tanpa bukti tambahan (BASF, 2024; Kementerian Investasi/BKPM, 2024). Meski demikian, penguatan standar ESG tetap penting untuk menekan risiko proyek dan meningkatkan penerimaan pasar.

- **Ekonomi Sirkular Terintegrasi.** MIND ID melaporkan pemanfaatan kembali dan daur ulang lebih dari satu juta ton material sisa selama 2025. Praktiknya mencakup pengolahan tailing emas ANTAM menjadi Green Fine Aggregate serta pemanfaatan FABA dan slag nikel sebagai bahan baku beton (ANTARA, 2026c). Klaim mengenai tingkat pemanfaatan limbah tambang nasional tetap membutuhkan inventarisasi lintas perusahaan dan evaluasi keamanan lingkungan sebelum dijadikan ukuran kinerja.
- **Loopback System.** Pertambangan memasok mineral kritis untuk komponen EBT → Industri manufaktur beroperasi dengan energi bersih → Ekspansi EBT menciptakan permintaan mineral lebih lanjut → Seluruh rantai diaudit dengan standar ESG transparan.
- Kementerian Perindustrian mengidentifikasi empat pengungkit transformasi industri hijau: kebijakan dan regulasi, inovasi teknologi, akses pembiayaan hijau, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kerangka ini menempatkan dekarbonisasi industri sebagai agenda daya saing dan pembangunan inklusif, bukan sekadar pemenuhan administratif (ANTARA, 2025).

IV. DAYA SAING GLOBAL: MITIGASI RISIKO CBAM DAN DIPLOMASI PERDAGANGAN

Rezim definitif CBAM Uni Eropa berlaku sejak 1 Januari 2026 dan pada cakupan awal meliputi antara lain semen, besi dan baja, aluminium, pupuk, listrik, dan hidrogen. Tujuan resminya adalah mengurangi risiko carbon leakage serta menyetarakan harga karbon antara produk Uni Eropa dan impor (European Commission, 2026a; European Parliament & Council of the European Union, 2023).

IV.1 Analisis Dampak Finansial CBAM

Beban CBAM bukan tarif tetap per ton komoditas. Kewajiban ditentukan oleh emisi tertanam yang diverifikasi, jumlah sertifikat CBAM yang harus diserahkan, harga sertifikat yang terkait dengan lelang EU ETS, serta pengurangan untuk harga karbon yang telah dibayar di negara asal. Karena itu, setiap perkiraan biaya harus menyatakan asumsi dan menggunakan data instalasi yang transparan (European Commission, 2026a, 2026b).

Komoditas	Status CBAM	Basis Kewajiban dan Implikasi
Besi & baja	Cakupan awal	Emisi tertanam terverifikasi × kebutuhan sertifikat; biaya bukan tarif tetap per ton produk.
Aluminium	Cakupan awal	Pelaporan emisi tingkat instalasi dan koordinasi dengan deklarasi resmi CBAM di Uni Eropa.
Semen	Cakupan awal	Paparan bergantung pada volume ekspor, intensitas emisi, harga sertifikat, dan harga karbon negara asal.

Catatan: CBAM tidak menetapkan tarif komoditas yang seragam. Kewajiban aktual mengikuti emisi tertanam, harga sertifikat, dan harga karbon yang telah dibayar di negara asal.

Sumber: European Parliament & Council of the European Union (2023);
European Commission (2026a, 2026b).

Jika data emisi aktual yang memenuhi persyaratan tidak tersedia, ketentuan CBAM memungkinkan penggunaan nilai default sesuai aturan pelaksanaan. Dampak finansial harus dimodelkan per instalasi dan produk dengan memperhitungkan emisi langsung, emisi tidak langsung bila relevan, volume ekspor, dan harga sertifikat. Pendekatan ini lebih andal daripada menggunakan satu benchmark biaya untuk seluruh eksportir (European Parliament & Council of the European Union, 2023).

Southeast Asia Energy Transition Partnership memperkirakan kebutuhan investasi menuju emisi nol bersih 2050 sekitar US\$46 miliar untuk besi dan baja serta US\$13 miliar untuk aluminium di Indonesia. Angka ini adalah kebutuhan investasi dekarbonisasi jangka panjang, bukan biaya langsung untuk mematuhi CBAM (Southeast Asia Energy Transition Partnership, 2026).

IV.2 Respons Strategis dan Geopolitik

Perundingan IEU-CEPA diselesaikan pada 23 September 2025. Pada 29 Juni 2026, Komisi Eropa mengajukan proposal penandatanganan dan penyelesaian perjanjian kepada Dewan Uni Eropa. Pemerintah Indonesia menargetkan ratifikasi pada semester II 2026 dan implementasi pada awal 2027 (European Commission, 2026c; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2026). Dengan demikian, dokumen ini tidak lagi menggunakan klaim penandatanganan pada kuartal IV 2026 sebagai kepastian.

Dengan posisi sebagai pemasok utama mineral kritis dan mitra investasi hijau, Indonesia memiliki *leverage* untuk menuntut masa transisi CBAM yang lebih panjang serta pengakuan terhadap sistem *Monitoring, Reporting, and Verification* (MRV) domestik. Hal ini krusial agar devisa karbon tidak mengalir ke Uni Eropa, melainkan tetap terserap dalam ekosistem fiskal nasional melalui bursa karbon yang berintegritas.

Bursa Karbon Indonesia dibuka bagi perdagangan karbon internasional pada Januari 2025. Hingga akhir Desember 2025, volume transaksi kumulatif sejak peluncuran mencapai 1.811.933 tCO₂e dengan nilai sekitar Rp87 miliar dan 150 pengguna jasa terdaftar (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Angka kumulatif ini lebih tepat untuk menggambarkan perkembangan pasar daripada mencampur data bulanan dengan total sejak peluncuran.

V. DILEMA LINGKUNGAN DAN REKONSEPTUALISASI EKONOMI KERAKYATAN INKLUSIF

Ketergantungan pada data agregat dapat menutupi risiko majemuk. Pada April 2026, BMKG memperkirakan peluang El Niño lemah hingga moderat pada semester kedua 2026. Pada Juli 2026, WMO menyatakan El Niño telah berkembang dan berpotensi menguat (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2026; World Meteorological Organization, 2026). Terminologi dan tingkat kekuatan fenomena mengikuti klasifikasi resmi. Risiko iklim tersebut perlu dianalisis bersama kehilangan tutupan hutan untuk menilai dampaknya terhadap pangan dan air.

V.1 Kritik Pengaman Ekologis

Perubahan Undang-Undang Kehutanan perlu dinilai berdasarkan kemampuannya memperkuat perlindungan hutan, hak masyarakat, penegakan hukum, dan transparansi perijinan. Forest Watch Indonesia melaporkan sekitar 1,01 juta hektar *deforestation alert* pada 2025 (Forest Watch Indonesia, 2026). Angka alert tersebut berbeda definisi dan metode dari estimasi deforestasi Auriga sebesar 433.751 hektar, sehingga keduanya tidak boleh dipertukarkan sebagai satu statistik yang sama.

Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) penting bagi proyek yang memengaruhi tanah, wilayah, dan sumber daya masyarakat adat. UNDRIP menempatkan konsultasi yang dilakukan dengan itikad baik dan dengan tujuan memperoleh persetujuan sebagai standar utama; FPIC lebih dari sekadar penyampaian informasi (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2013). Laporan masyarakat adat terkait PSN Merauke menunjukkan perlunya penerapan standar tersebut sejak tahap perencanaan (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2024).

V.2 Transformasi Ekonomi Inklusif

Hilirisasi harus membawa manfaat distributif melalui:

- **Pekerjaan Layak.** Hilirisasi perlu dilengkapi mekanisme afirmatif bagi tenaga kerja lokal, alih teknologi, dan pengadaan domestik yang kompetitif. Dasar teknis terbaru yang mengatur ketentuan dan tata cara sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan adalah Peraturan Menteri Perindustrian No. 35 Tahun 2025, bukan No. 41 Tahun 2025 (Kementerian Perindustrian, 2025b).
- *Just transition* menjadi penting seiring pengurangan bertahap PLTU. Climate Policy Initiative mengusulkan Self-Sustaining Workforce Transition Model dan Integrated Knowledge Platform di Maluku untuk memetakan kebutuhan keterampilan, menghubungkan pelatihan dengan permintaan industri, dan membangun pembiayaan pengembangan tenaga kerja dalam jangka panjang (Climate Policy Initiative, 2025). Model tersebut dapat menjadi rujukan yang perlu diuji dan disesuaikan dengan konteks wilayah lain.
- **Inklusi UMKM.** Skema *ESG rating* sederhana untuk memudahkan UMKM masuk rantai pasok hijau.
- **Mekanisme Bagi Hasil.** Formula fiskal yang memastikan daerah penghasil mendapatkan dividen ekologi dan ekonomi yang adil.

VI. REKOMENDASI KEBIJAKAN: AGENDA AKSI TIGA PILAR

Tanpa reformasi struktural yang radikal, paradigma ekonomi ekstraktif lama akan terus mendominasi.

Pilar 1: Tata Kelola Integratif

Memperkuat mandat dan akuntabilitas Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau yang dibentuk melalui Keputusan Menko Perekonomian No. 141 Tahun 2025 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025a). Satgas perlu mengharmonisasikan kebijakan lintas kementerian dan mengawal pelaksanaan porsi 76% penambahan kapasitas RUPTL 2025–2034 yang berasal dari gabungan EBT dan penyimpanan energi (PT PLN [Persero], 2025).

Pilar 2: Reformasi Fiskal & Pembiayaan Hijau

Mempercepat operasionalisasi TKBI Edisi Kedua sekaligus memperluas cakupan kegiatan manufaktur/IPPU. Subsidi fosil perlu dialihkan secara bertahap untuk mendanai *just transition* dan insentif dekarbonisasi. Pendanaan JETP yang telah dimobilisasi sekitar US\$3,1 miliar harus dialokasikan melalui kriteria proyek yang transparan, terutama untuk transmisi, dedieselisasi, penyimpanan energi, dan pembangkit EBT. Green Energy Corridor Sulawesi dan program dedieselisasi telah disebut pemerintah sebagai proyek prioritas; proyek lain tidak dicantumkan sebagai penerima dana tanpa bukti alokasi resmi (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025b; Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Pilar 3: Diplomasi Hijau & Strategi Perdagangan

Meluncurkan National Green Trade Strategy yang mengintegrasikan pelabelan karbon, verifikasi, dan MRV domestik dengan standar internasional. Diplomasi IEU-CEPA perlu diarahkan pada kerja sama teknis, fasilitasi kepatuhan, dan pengakuan data emisi yang dapat diverifikasi. Karena CBAM sudah memasuki rezim definitif pada 2026, fokus yang lebih realistis adalah menurunkan emisi tertanam dan membangun kesiapan pelaporan, bukan mengasumsikan masa transisi tambahan yang belum disepakati (European Commission, 2026a, 2026c).

VII. AGENDA RISET MASA DEPAN

Guna mendukung *evidence-based policy*, prioritas riset harus diarahkan pada:

- **Ekonomi Politik Transisi:** Analisis biaya-manfaat penutupan dini PLTU vs. subsidi EBT, dengan mempertimbangkan dampak terhadap ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi regional.
- **Model Kelayakan Sirkular:** Pemanfaatan *tailings* pertambangan secara komersial, termasuk analisis tekno-ekonomi dan lingkungan dari pengolahan ulang tailing.
- **Audit Kepatuhan ESG:** Efektivitas investasi asing terhadap peningkatan kesejahteraan lokal, dengan fokus pada transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
- **Dampak Lingkungan Kumulatif:** Parameter baku dampak industri besar terhadap jasa ekosistem, termasuk pengembangan metodologi untuk mengukur kerusakan ekosistem di luar metrik agregat seperti IKLH.
- **Indeks Hilirisasi Berkelanjutan:** Pengembangan metrik baru yang melampaui PDB tradisional dengan memasukkan variabel intensitas emisi, kualitas lingkungan hidup, inklusi tenaga kerja lokal, dan kepatuhan terhadap prinsip FPIC.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2024, 21 Agustus). Masyarakat adat di Papua Selatan menderita akibat Proyek Strategis Nasional. <https://www.aman.or.id/news/read/1884>
- ANTARA. (2025, 19 Agustus). Menperin sebut empat faktor akselerasi transformasi industri hijau. <https://www.antaraneews.com/berita/5050873/menperin-sebut-empat-faktor-akselerasi-transformasi-industri-hijau?page=all>

- ANTARA. (2026a, 4 Juni). PLN garap proyek listrik dari energi bersih berkapasitas 22,57 GW. <https://www.antaranews.com/berita/5594656/pln-garap-proyek-listrik-dari-energi-bersih-berkapasitas-2257-gw>
- ANTARA. (2026b, 5 Juni). Indonesia's renewable energy mix gains pace, beats 2026 target. <https://en.antaranews.com/news/419901/indonesias-renewable-energy-mix-gains-pace-beats-2026-target>
- ANTARA. (2026c, 25 Juni). MIND ID daur ulang lebih dari 1 juta ton material sisa. <https://www.antaranews.com/berita/5639012/mind-id-daur-ulang-lebih-dari-1-juta-ton-material-sisa>
- Auriga Nusantara. (2026a, 31 Maret). Status deforestasi Indonesia 2025. https://auriga.or.id/press_release/detail/65/status-deforestasi-indonesia-2025?lang=id
- Auriga Nusantara. (2026b). Status deforestasi di Indonesia 2025. Simontini. <https://simontini.id/id/status-deforestasi-di-indonesia-2025>
- Badan Geologi. (2026, 14 April). Nikel Indonesia bagian 2: Peluang dan tantangan. <https://geologi.esdm.go.id/index.php/media-center/nikel-indonesia-bagian-2-peluang-dan-tantangan>
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2026, 14 April). BMKG hadir rakor Polri untuk antisipasi fenomena El Niño 2026. <https://www.bmkg.go.id/berita/bmkg-hadiri-rakor-polri-untuk-antisipasi-fenomena-el-nino-2026>
- Badan Standardisasi Nasional. (n.d.). Daftar SNI bidang label, deklarasi lingkungan, dan jejak karbon produk. https://pesta.bsn.go.id/produk/by_ics/7?ics_no=13.020&key=
- BASF. (2024, 24 Juni). BASF decides against investment in nickel-cobalt refining complex in Indonesia. https://battery-materials.basf.com/global/en/news/2024/2024-06-18_BASF-decides-against-investment-in-nickel-cobalt-refining-complex-in-Indonesia
- Climate Policy Initiative. (2025, 16 Desember). CPI launches report on operationalizing JETP Standard 9 in Maluku. <https://www.climatepolicyinitiative.org/press-release/cpi-launches-report-on-operationalizing-jetp-standard-9-in-maluku/>
- European Commission. (2026a). Carbon Border Adjustment Mechanism: Definitive regime. https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism/cbam-definitive-regime_en
- European Commission. (2026b). Price of CBAM certificates. https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism/price-cbam-certificates_en
- European Commission. (2026c). EU–Indonesia agreements. https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/indonesia/eu-indonesia-agreements_en
- European Parliament & Council of the European Union. (2023). Regulation (EU) 2023/956 establishing a carbon border adjustment mechanism. Official Journal of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj/eng>
- Forest Watch Indonesia. (2026, Juni). Siaran pers Koalisi Reset Kehutanan: Hari Lingkungan Hidup 2026. <https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2026/06/SiPres-Koalisi-Reset-Kehutanan-Hari-Lingkungan-Hidup-2026.pdf>
- Institute for Essential Services Reform. (2025). Indonesia energy transition outlook 2026. <https://iesr.or.id/wp-content/uploads/2025/11/Indonesia-Energy-Transition-Outlook-IETO-2026-IESR-1.pdf>
- JETP Indonesia. (2023). Comprehensive investment and policy plan 2023. <https://jetp-id.org/storage/jetp-comprehensive-investment-and-policy-plan-2023-draft-for-public-consultation-vshare-1698982627.pdf>
- JETP Indonesia. (n.d.). JETP financing workshop gathers interest and insight of energy transition financiers to help unlock USD 21.6 billion. <https://jetp-id.org/news/key-takeaways-from-the-financiers-workshop>

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2019, 27 Desember). Per 1 Januari 2020, DMO dipatok 25% dan harga jual ke pembangkit US\$70 per ton. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/per-1-januari-2020-dmo-dipatok-25-dan-harga-jual-ke-pembangkit-usd-70-per-ton>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2025a, 27 Mei). Alirkan setrum bersih ke wilayah pelosok, pemerintah bangun transmisi 47 ribu kms. <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/alirkan-setrum-bersih-ke-wilayah-pelosok-pemerintah-bangun-transmisi-47-ribu-kms>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2026a). Laporan kinerja Direktorat Jenderal EBTKE tahun 2025. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-ebtke-tahun-2025.pdf>
- Kementerian Investasi/BKPM. (2024, 26 Juni). Mundurnya BASF di proyek Sonic Bay tidak menurunkan minat investasi hilirisasi di Indonesia. <https://investindonesia.go.id/id/info/siaran-pers/mundurnya-basf-di-proyek-sonic-bay-tidak-menurunkan-minat-investasi-hilirisasi-di-indonesia>
- Kementerian Keuangan. (2026). Nota keuangan beserta APBN tahun anggaran 2026. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/4069fa26-57a7-4234-9307-c27124737af0>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2025a, 24 Maret). Pemerintah bentuk Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/6275/perkuat-komitmen-percepatan-implementasi-just-energy-transition-partnership-jetp-pemerintah-bentuk-satgas-transisi-energi-dan-ekonomi-hijau>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2025b, 17 Desember). Just Energy Transition Partnership siapkan Rp350 triliun untuk pembiayaan renewable energy di Indonesia. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/6718/just-energy-transition-partnership-jetp-siapkan-rp350-triliun-untuk-pembiayaan-renewable-energy-di-indonesia>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2026, 15 Juli). Percepat ratifikasi IEU-CEPA pada semester II 2026, target implementasi awal 2027. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6966/percepat-ratifikasi-ieu-cepa-pada-semester-ii-2026-menko-airlangga-targetkan-implementasi-di-awal-2027>
- Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH. (2026). Laporan kinerja Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH tahun 2025. <https://kemenlh.go.id/report>
- Kementerian Perindustrian. (2025a, 6 Agustus). Sektor manufaktur nasional tumbuh positif, industri alas kaki jadi penopang ekonomi. <https://bpipi.kemenperin.go.id/sektor-manufaktur-nasional-tumbuh-positif-industri-alas-kaki-jadi-penopang-ekonomi>
- Kementerian Perindustrian. (2025b). Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang ketentuan dan tata cara sertifikasi TKDN dan BMP. <https://ikm.kemenperin.go.id/storage/peraturan/revisi-baru-16-april/permenperin-nomor-35-tahun-2025-ketentuan-dan-tata-cara-sertifikasi-tkdn-dan-bmp.pdf>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2025, 12 Juni). Transisi energi berkelanjutan: Bappenas dan WRI Indonesia pastikan integrasi dekarbonisasi industri nikel. <https://bappenas.go.id/index.php/id/berita/transisi-energi-berkelanjutan-bappenas-dan-wri-indonesia-pastikan-integrasi-dekarbonisasi-industri-nikel-wIEk>
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2013). The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: A manual for national human rights institutions. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/UNDRIPManualForNHRIs.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia: Edisi kedua. <https://www.ojk.go.id/en/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Sektor-Jasa-Keuangan/Keuangan-Berkelanjutan/Pages/Taxonomy-for-Indonesian-Sustainable-Finance-2nd-Edition.aspx>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2026, 9 Januari). Stabilitas sektor keuangan terjaga dalam menghadapi prospek perekonomian tahun 2026. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-Des-2025.aspx>
- PT PLN (Persero). (2024, 10 Oktober). PLN siapkan listrik bersih untuk hilirisasi mineral smelter ANTAM di Kolaka. <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2024/10/pln-siapkan-listrik-bersih-untuk-hilirisasi-mineral-smelter-antam-di-kolaka-sultra/>
- PT PLN (Persero). (2025, 26 Mei). Tingkatkan bauran EBT hingga 2034, PLN siap jalankan RUPTL ter hijau sepanjang sejarah. <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2025/05/tingkatkan-bauran-ebt-hingga-2034-pln-siap-jalankan-ruptl-terhijau-sepanjang-sejarah/>
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/33346/PP%20Nomor%2079%20Tahun%202014.pdf>
- Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/328789>
- Southeast Asia Energy Transition Partnership. (2026, 7 Juli). Anticipating carbon tariffs can accelerate Indonesia's industrial transformation. <https://www.energytransitionpartnership.org/2026/07/07/anticipating-carbon-tariffs-can-accelerate-indonesias-industrial-transformation/>
- World Meteorological Organization. (2026, 3 Juli). El Niño forecast to intensify, increasing likelihood of extreme weather. <https://public.wmo.int/news/media-centre/el-nino-forecast-intensify-increasing-likelihood-of-extreme-weather>



Kajian Kebijakan Publik

Hilirisasi - Industrialisasi & Penguatan Ekonomi Rakyat Menuju Indonesia Maju

Interim Result Series of Discussion “Road to Pleno Bogor”

*Bidang IV Perumusan Kebijakan Sektor Riil dan Struktural
Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
Agustus 2026*